

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/397 TAHUN 2025****TENTANG****POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk memajukan kebudayaan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah mendasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 430/160 Tahun 2018 tentang Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota disusun setiap 5 (lima) tahun sekali, sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

KETIGA Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : Rangkuman Umum
- b. BAB II : Profil Provinsi Jawa Tengah
- c. BAB III : Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan
- d. BAB IV : Data Objek Pemajuan Kebudayaan
- e. BAB V : Data Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Lembaga Kebudayaan
- f. BAB VI : Data Sarana dan Prasarana Kebudayaan
- g. BAB VII : Permasalahan dan Rekomendasi Hasil Forum Group Discussion

KEEMPAT : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan landasan kebijakan pembangunan kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 430/160 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;

7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
197007291996031001



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI



PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029



DAFTAR ISI

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
SAMBUTAN GUBERNUR JAWA TENGAH	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I RANGKUMAN UMUM	1
BAB II PROFIL PROVINSI JAWA TENGAH	6
II.1. <i>Tentang Provinsi</i>.....	6
2.1.1. Wilayah dan Karakteristik Alam	6
2.1.2. Topografi	7
2.1.3. Geologi.....	8
2.1.4. Hidrologi.....	8
2.1.5. Klimatologi	10
2.1.6. Penggunaan Lahan	10
2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah Kawasan Budidaya.....	11
2.1.8. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi.....	11
2.1.9. Kawasan Hutan Rakyat.....	11
2.1.10. Kawasan Peruntukan Pertanian.....	11
2.1.11. Kawasan Peruntukan Perkebunan	11
2.1.12. Kawasan Peruntukan Peternakan.....	11
2.1.13. Kawasan Peruntukan Perikanan.....	11
2.1.14. Kawasan Peruntukan Pertambangan	12
2.1.15. Kawasan Peruntukan Industri	12
2.1.16. Kawasan Peruntukan Pariwisata	12
2.1.17. Kawasan Peruntukan Permukiman.....	12
2.1.18. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	13
2.1.19. Kawasan Lindung.....	13
2.1.20. Wilayah Rawan Bencana	16
2.1.21. Demografi.....	19
2.1.22. Kebudayaan.....	28
2.1.23. Latar Belakang Budaya.....	31

2.1.24. Peraturan Tingkat Daerah Terkait Kebudayaan.....	39
2.1.25. Ringkasan Proses Penyusunan PPKD.....	40
BAB III LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	47
<i>III.1. Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan</i>	47
<i>III.2. Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan.....</i>	48
BAB IV DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	49
<i>IV.1. Manuskrip.....</i>	49
<i>IV.2. Tradisi Lisan</i>	52
<i>IV.3. Adat Istiadat</i>	57
<i>IV.4. Ritus.....</i>	60
<i>IV.5. Pengetahuan Tradisional</i>	62
<i>IV.6. Teknologi Tradisional.....</i>	67
<i>IV.7. Seni.....</i>	78
<i>IV.8. Bahasa</i>	91
<i>IV.9. Permainan Rakyat</i>	92
<i>IV.10. Olahraga Tradisional</i>	94
<i>IV.11. Cagar Budaya</i>	96
BAB V DATA SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN	104
<i>V.1. Manuskrip.....</i>	104
<i>V.2. Tradisi Lisan</i>	108
<i>V.3. Adat Istiadat</i>	109
<i>V.4. Ritus.....</i>	110
<i>V.5. Pengetahuan Tradisional</i>	111
<i>V.6. Teknologi Tradisional.....</i>	114
<i>V.7. Seni.....</i>	115
<i>V.8. Bahasa</i>	116
<i>V.10. Olahraga Tradisional.....</i>	119
<i>V.11. Cagar Budaya.....</i>	119
BAB VI DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN	121
<i>VI.1. Manuskrip.....</i>	121
<i>VI.2. Tradisi Lisan</i>	122
<i>VI.3. Adat Istiadat</i>	122
<i>VI.4. Ritus.....</i>	122

VI.5. Pengetahuan Tradisional	123
VI.6. Teknologi Tradisional.....	123
VI.7. Seni.....	124
VI.8. Bahasa	124
VI.9. Permainan Rakyat	126
VI.10. Olahraga Tradisional	127
VI.11. Cagar Budaya	127
 BAB VII PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI HASIL FGD	128
 VII.1. Manuskip.....	128
VII.2. Tradisi Lisan	134
VII.3. Adat-Istiadat.....	139
VII.4. Ritus.....	144
VII.5. Seni.....	149
VII.6. Bahasa	156
VII.7. Olah Raga Tradisional.....	162
VII.8. Permainan Rakyat	166
VII.9. Pengetahuan Tradisional	170
VII.10. Teknologi Tradisional	175
VII.11. Cagar Budaya.....	180
 Lampiran	188
 Daftar PPKD Provinsi Jawa Tengah	188
Notulensi FGD Presentasi Hasil Evaluasi	191
Notulensi FGD Paparan Internalisasi PPKD dalam Dokumen Perencanaan Provinsi Jawa Tengah	199
Notulensi FGD Permasalahan dan Rekomendasi per OPK dan CB Sesi 1	202
Notulensi FGD Permasalahan dan Rekomendasi per OPK dan CB Sesi 2	220
Notulensi FGD Paparan Panel Penguatan PPKD	231
FGD OPK Bahasa, Manuskip, Tradisi Lisan.....	239
FGD OPK Adat Istiadat, Ritus	245
FGD OPK Pengetahuan Tradisional, Permainan Rakyat, Dan Olah Raga Tradisional	251
FGD OPK Teknologi Tradisional dan Cagar Budaya	277
FGD OPK Seni	303

<i>Notulensi Penajaman Hasil Review FGD</i>	316
<i>Notulensi FGD Internal Tim Pemutakhiran dan Evaluasi.....</i>	368
<i>Rekap FGD Permasalahan dan Rekomendasi OPK.....</i>	387

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah OPK Tahun 2023.....	4
Tabel 2. Ketinggian Wilayah di Jawa Tengah.....	7
Tabel 3. Debit Sungai Rata-Rata Harian Luas Daerah Pengaliran Lebih Dari 1.000 km2 di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.....	9
Tabel 4. Kapasitas Waduk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017	10
Tabel 5. Persentase Penduduk menurut Daerah tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Jawa Tengah (2017-2018)	20
Tabel 6. Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2022	21
Tabel 7. Rasio Jenis Kelamin dan Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Jawa Tengah 2017.....	24
Tabel 8. Rasio Ketergantungan, Jumlah Penduduk dan Proporsi Usia Produktif menurut Kelompok Umur dan Kab/Kota Jawa Tengah 2017	26
Tabel 9. Perkembangan Seni dan Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017	29
Tabel 10. Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan	47
Tabel 11. Daftar Cagar Budaya	103
Tabel 12. Status Dokumen PPKD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	188

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Tahun 2018	3
Gambar 2. Jumlah OPK Tahun 2023.....	3
Gambar 3. Jumlah ODCB dengan status valid	4
Gambar 4. Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah.....	6
Gambar 5. Topografi Provinsi Jawa Tengah.....	7
Gambar 6. Kontur Provinsi Jawa Tengah.....	8
Gambar 7. Peta Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah	9
Gambar 8. Peta Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah	18
Gambar 9. Piramida Penduduk Jawa Tengah Tahun 2017	25
Gambar 10. Rasio Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Muda dan Tua Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017	25
Gambar 11. Program Studi Bidang Kebudayaan di Lembaga atau Perguruan Tinggi Jawa Tengah.48	48
Gambar 12. Daftar Jumlah OPK Seni Tari	79
Gambar 13. Daftar Jumlah OPK Seni Tari	79
Gambar 14. Daftar Jumlah OPK Seni Tari	79
Gambar 15. Grafik Agregasi OPK Seni Tari	80
Gambar 16. Daftar Jumlah OPK Seni Tari	81
Gambar 17. Daftar Jumlah OPK Seni Tari	81
Gambar 18. Daftar Jumlah OPK Seni Tari	82
Gambar 19. Daftar Jumlah OPK Seni Tari	82
Gambar 20. Daftar Jumlah OPK Seni Musik.....	82
Gambar 21. Grafik Agregasi OPK Seni Musik.....	83
Gambar 22. Daftar Jumlah OPK Seni Musik.....	83
Gambar 23. Daftar Jumlah OPK Lagu.....	83
Gambar 24. Daftar Jumlah OPK Lagu.....	84
Gambar 25. Daftar Jumlah OPK Seni Pertunjukan.....	84
Gambar 26. Daftar Jumlah OPK Seni Pertunjukan.....	84
Gambar 27. Daftar Jumlah OPK Seni Pertunjukan.....	84
Gambar 28. Daftar Jumlah OPK Seni Pertunjukan.....	85
Gambar 29. Daftar Jumlah OPK Seni Pertunjukan.....	85
Gambar 30. Daftar Jumlah OPK Seni Pertunjukan.....	85
Gambar 31. Grafik Agregasi OPK Seni Pertunjukan.....	85
Gambar 32. Daftar Jumlah Seni Pertunjukan.....	86

Gambar 33. Daftar Jumlah Seni Pertunjukan.....	86
Gambar 34. Daftar Jumlah Seni Pertunjukan.....	86
Gambar 35. Daftar Jumlah Seni Pertunjukan.....	87
Gambar 36. Daftar Jumlah Seni Pertunjukan.....	87
Gambar 37. Daftar Jumlah Seni Pertunjukan.....	87
Gambar 38. Daftar Jumlah OPK Naskah Skenario.	88
Gambar 39. Daftar Jumlah OPK Naskah Skenario.	88
Gambar 40. Daftar Jumlah OPK Seni Sastra.....	88
Gambar 41. Daftar Jumlah OPK Seni Sastra.....	88
Gambar 42. Daftar Jumlah OPK Film.....	89
Gambar 43. Daftar Jumlah OPK Film.....	89
Gambar 44. Daftar Jumlah OPK Seni Media Baru.	89
Gambar 45. Grafik Agregasi OPK Seni Media Baru.	89
Gambar 46. Daftar Jumlah OPK Seni Media Baru.	90
Gambar 47. Daftar Jumlah OPK Seni Rupa.....	90
Gambar 48. Daftar Jumlah OPK Seni Rupa.....	90
Gambar 49. Daftar Jumlah OPK Seni Rupa.....	90
Gambar 50. Daftar Jumlah OPK Bahasa.....	92
Gambar 51. Grafik Agregasi OPK Bahasa.....	92
Gambar 52. Daftar Jumlah OPK Bahasa.....	92
Gambar 53. Daftar Jumlah OPK Permainan Rakyat.....	93
Gambar 54. Grafik Agregasi OPK Permainan Rakyat.....	93
Gambar 55. Daftar Jumlah OPK Permainan Rakyat.....	94
Gambar 56. Daftar Jumlah OPK Olahraga Tradisional.	95
Gambar 57. Grafik Agregasi OPK Olahraga Tradisional.	95
Gambar 58. Daftar Jumlah OPK Olahraga Tradisional.	95
Gambar 59. Daftar Jumlah OPK Benda Cagar Budaya.	97
Gambar 60. Daftar Jumlah OPK Bangunan Cagar Budaya.	97
Gambar 61. Daftar Jumlah OPK Struktur Cagar Budaya.....	97
Gambar 62. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.	98
Gambar 63. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.	98
Gambar 64. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.	98
Gambar 65. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.	99
Gambar 66. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.	99
Gambar 67. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.	99

Gambar 68. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.	100
Gambar 69. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.	100
Gambar 70. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.	100
Gambar 71. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.	101
Gambar 72. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.	101
Gambar 73. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.	101
Gambar 74. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.	101
Gambar 75. Grafik Agregasi OPK Situs Cagar Budaya.	102
Gambar 76. Daftar Jumlah OPK Kawasan Cagar Budaya.	102
Gambar 77. Daftar Jumlah OPK Kawasan Cagar Budaya.	102
Gambar 78. Grafik Agregasi OPK Kawasan Cagar Budaya.	103
Gambar 79. Grafik Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga.....	104
Gambar 80. Grafik Jumlah Sarana dan Prasarana.....	121

BAB I

RANGKUMAN UMUM

Provinsi Jawa Tengah secara administratif terdiri atas 29 Kabupaten dan 6 Kota yang semuanya mempunyai potensi budaya, baik *tangible* maupun *intangible*. Pada tahun 2018 terdapat 13 Kabupaten/Kota yang telah melakukan input data Objek Pemajuan Kebudayaan. Pada tahun 2019, terdapat tambahan 4 daerah yang mengesahkan PPKD, yaitu Banjarnegara, Purworejo, Temanggung, dan Tegal.¹ Jumlah jenis Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya (CB) yang berhasil diinput terbanyak adalah cagar budaya. Jawa Tengah sebagai pusat peradaban kebudayaan dapat dilihat dari banyaknya peninggalan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah mulai masa prasejarah, Hindu Budha, Islam, Kolonial hingga awal Kemerdekaan. Meskipun penginputan data pada tahun 2018 masih belum maksimal tetapi diharapkan pada akhir tahun 2023 semua kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah menyelesaikan input data PPKD.

Lembaga Pendidikan Menengah dan Tinggi di Provinsi Jawa Tengah, baik negeri maupun swasta memberikan kontribusi bagi eksistensi pemajuan kebudayaan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, SMK bidang kebudayaan dikelompokkan menjadi 8 jenis, yaitu Perhotelan, Boga, Kecantikan, Kriya, Seni, Partiseri, Kepariwisataan dan Busana. Komposisi tersebut terdiri dari SMK Jurusan Perhotelan sejumlah 58 sekolah, SMK Jurusan Boga/kuliner terdapat 83 sekolah, SMK Jurusan Kriya/seni terdapat 14 sekolah, SMK Jurusan Kecantikan terdapat 26 sekolah, SMK Jurusan Kepariwisataan terdapat 19 sekolah, dan SMK Jurusan Busana terdapat 220 sekolah.

Data Objek Pemajuan Kebudayaan di Jawa Tengah secara ringkas diuraikan sebagai berikut. Manuskrip yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah dilihat dari bahan cukup beragam, namun yang dominan adalah kertas. Manuskrip yang terdapat di Jawa Tengah sebagian besar menggunakan Bahasa Arab, kemudian Bahasa Jawa dan Arab Jawa. Tradisi lisan yang dimaksudkan dalam objek pemajuan kebudayaan ini adalah tradisi yang Murni disebarluaskan secara lisan, yang terdiri atas: dongeng; ungkapan tradisional; pertanyaan tradisional; bahasa rakyat; dan nyanyian rakyat. Mayoritas tradisi lisan yang ada di Jawa Tengah berjenis dongeng. Ada data-data yang sulit untuk dipastikan masuk dalam kategori-kategori sehingga dimasukkan ke dalam kategori *not available*. Media penyajian tradisi lisan dengan cara bercerita langsung menduduki posisi tertinggi, kemudian penerbitan dalam buku, dan pertunjukan langsung. Adat istiadat yang sering dilakukan yaitu terkait dengan Sang Pencipta. Ritus juga masih sering dilakukan oleh masyarakat Jawa. Pengetahuan tradisional dikelompokkan, yaitu kuliner dan pengolahan makanan, pengobatan, pertanian, kriya dan tata kelola hidup. Teknologi tradisional yang terbanyak adalah pertanian dan kerajinan. OPK seni terdiri atas media, rupa, film, musik sastra, teater tari. OPK bahasa yaitu Jawa, Sunda, Arab, Cina, Betawi, Madura, Minangkabau, Batak, dan Melayu. Cagar Budaya, meliputi Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya. Adapun Bangunan Cagar Budaya menempati urutan jumlah terbanyak diantara jenis cagar budaya lainnya.

¹<https://ppkd.kemdikbud.go.id/dokumen-ppkd> diakses 17 Desember 2023

Dari data sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah ternyata telah mengakses dan memanfaatkan OPK diantaranya adalah manuskrip. Hal ini dikarenakan banyak manuskrip yang terbuka untuk diakses oleh masyarakat umum, namun banyak juga manuskrip yang tidak mudah bahkan tidak pernah diakses oleh masyarakat umum. Hal ini dimungkinkan karena banyaknya manuskrip yang masih menjadi koleksi pribadi. Selanjutnya Adat istiadat dan ritus masih sering dilakukan oleh etnis Jawa. Pengetahuan Tradisional masih sering digunakan oleh etnis Jawa, Sunda, Madura, Cina, Arab, dan India. Pengetahuan tradisional yang terbanyak adalah batik. Teknologi tradisional yang terbanyak digunakan masyarakat adalah dokar, ani-ani, dan anyaman bambu. Permainan Rakyat masih sering dilakukan oleh etnis Jawadan lembaga yang menangani OPK Permainan Rakyat adalah Pemerintah, Dewan Kesenian/Swasta, lembaga masyarakat, dan Lembaga Pendidikan. EtnisJawa juga masih sering melakukan olahraga tradisional. OPK Cagar budaya sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah pusat, Provinsi, Kab./Kota, dan Desa.

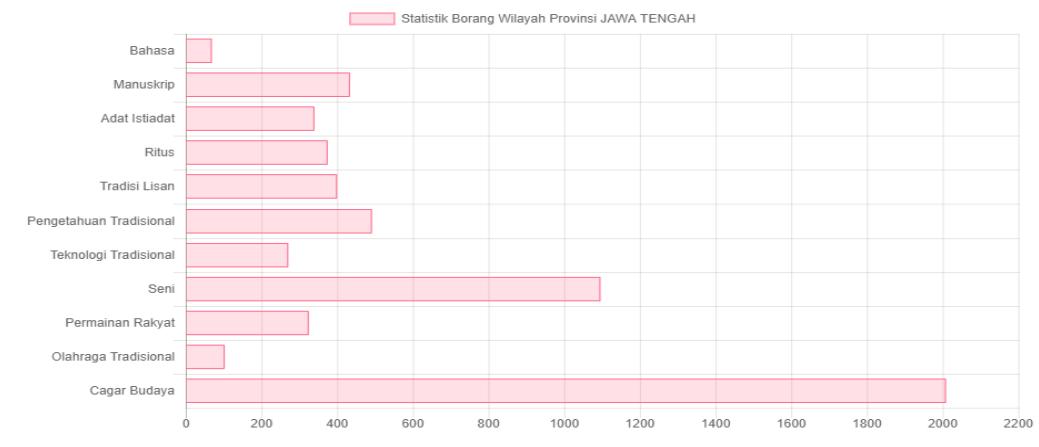
Data sarana dan prasarana OPK di provinsi Jawa Tengah dalam tradisi lisan lebih didominasi penyediaannya oleh pemerintah dibanding dengan masyarakat umum. Sedangkan sarana prasarana Adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, Permainan Rakyat, olahraga tradisional banyak disediakan oleh masyarakat.. Adapun untuk bahasa dan cagar budaya sarana dan prasarananya disediakan dan dikelola oleh pemerintah.

Berdasarkan data yang telah diinput, terdapat beberapa permasalahan dari aspek pelindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan. Permasalahan dari aspek pelindungan berupa masih sedikitnya pendaftaran dan pendataan terhadap potensi OPK di kabupaten/kota serta belum semua kabupaten/kota memiliki regulasi yang mendukung pemajuan kebudayaan. Dari sisi pengembangan, menunjukkan bahwa kajian terhadap OPK yang meliputi manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional dan cagar budaya masih sangat minim. Dari aspek pembinaan menunjukkan bahwa permasalahan utamanya adalah proses regenerasi dari para pelaku budaya yang kurang terstruktur, sistematis dan terprogram sehingga dari aspek regenerasi ini di beberapa daerah mengalami permasalahan. Dari aspek pemanfaatan masih banyak Objek Pemajuan Kebudayaan di Jawa Tengah yang belum dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama Cagar Budaya.

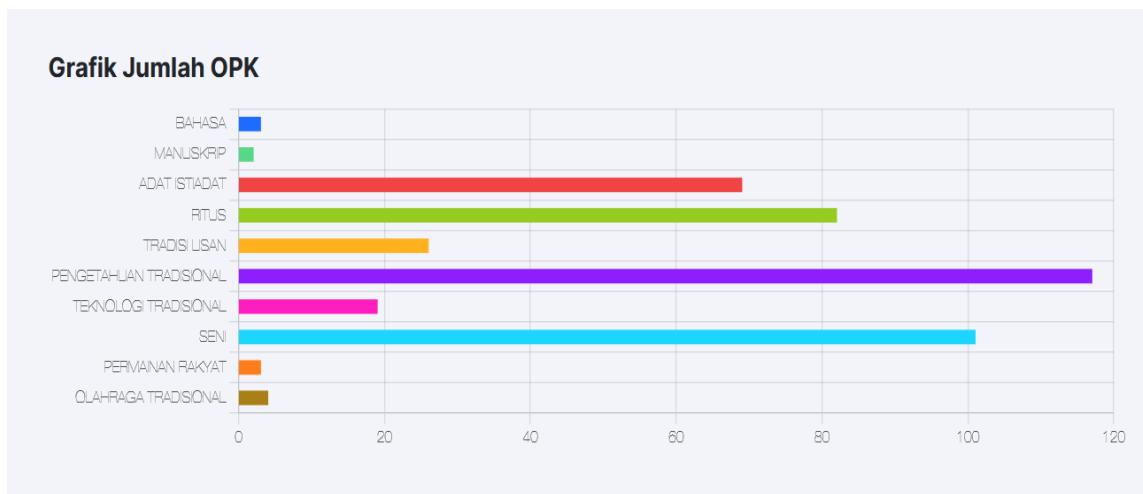
Berdasarkan data Data Pokok Kebudayaan Jawa Tengah dan website PPKD tahun 2023 (per 18 Desember 2023) jumlah OPK dan CB di Provinsi Jawa Tengah adalah 655 buah. Dari jumlah tersebut, Cagar Budaya menempati urutan tertinggi dari OPK di Jawa Tengah sebanyak 229 buah, dan yang paling sedikit adalah OPK manuskrip sejumlah 2 buah.

Berikut ini data statistik Objek Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah

Statistik Data



*Gambar 1. Data Tahun 2018
(Sumber: Aplikasi APIK diakses tanggal x x 2018, PPKD Jateng 2018)*



*Gambar 2. Jumlah OPK Tahun 2023
(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> diakses tanggal 17 Desember 2023)*

Gambar 3. Jumlah ODCB dengan status valid

(Sumber: <https://app.dapobud.kemdikbud.go.id/pendataan/cagarbudaya> diakses tanggal 17 Desember 2023)

Tabel 1. Jumlah OPK Tahun 2023

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> diakses tanggal 17 Desember 2023)

No	OPK	Jumlah	Sumber
1	Bahasa	3	https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/ diakses tanggal 17 Desember 2023
2	Manuskrip	2	https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/ diakses tanggal 17 Desember 2023
3	Adat Istiadat	69	https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/ diakses tanggal 17 Desember 2023
4	Ritus	82	https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/ diakses tanggal 17 Desember 2023
5	Tradisi Lisan	26	https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/ diakses tanggal 17 Desember 2023
6	Pengetahuan Tradisional	117	https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/ diakses tanggal 17 Desember 2023
7	Teknologi Tradisional	19	https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/ diakses tanggal 17 Desember 2023

8	Seni	101	https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/ diakses tanggal 17 Desember 2023
9	Permainan Rakyat	3	https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/ diakses tanggal 17 Desember 2023
10	Olah Raga Tradisional	4	https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/ diakses tanggal 17 Desember 2023 diakses tanggal 17 Desember 2023
11	ODCB* (status: valid)	229	https://app.dapobud.kemdikbud.go.id/pendataan/cagarbudaya
	Jumlah	655	

BAB II

PROFIL PROVINSI JAWA TENGAH

II.1. Tentang Provinsi

2.1.1. Wilayah dan Karakteristik Alam

Provinsi Jawa Tengah terletak di $5^{\circ}40'$ - $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $108^{\circ}30'$ - $111^{\circ}30'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 3,43 juta hektar atau sekitar 25,89 persen dari luas Pulau Jawa (1,81 persen dari luas Indonesia). Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, meliputi 576 Kecamatan, 7.810 Desa, dan 753 Kelurahan.

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Secara geografis, letak wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Batas wilayah administrasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut,



*Gambar 4. Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah
(Sumber: Peta dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI), BAKOSURTANAL Skala 1:25.000 Edisi Tahun 2000)*

2.1.2. Topografi



*Gambar 5. Topografi Provinsi Jawa Tengah
(Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029)*

Kondisi topografi wilayah Jawa Tengah beraneka ragam, meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh Jawa Tengah; dan pantai yaitu pantai Utara dan Selatan. Kemiringan lahan di Jawa Tengah bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2- 15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan.

Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki ketinggian yang beraneka ragam, yaitu pegunungan dan dataran tinggi yang membujur di bagian tengah dan dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah yang umumnya adalah wilayah pantai. Sekitar 53% wilayah Provinsi Jawa Tengah berada pada ketinggian 0-99 m dpl, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2, dan Peta Kontur pada Gambar 6.

*Tabel 2. Ketinggian Wilayah di Jawa Tengah
(Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029)*

No	Ketinggian (m dpl)	% Luas
1	0-99	53,3
2	100-499	27,4
3	500-999	14,7
4	>1000	4,6



*Gambar 6. Kontur Provinsi Jawa Tengah
(Sumber : RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029)*

2.1.3. Geologi

Kondisi fisiografis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi fisiografis, yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, dan podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial, dan gromosol, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburnya cukup tinggi.

Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 6 (enam) gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Boyolali), Gunung Slamet (di Pemalang), Gunung Sindoro (di Temanggung-Wonosobo), Gunung Sumbing (di Temanggung-Wonosobo), Gunung Dieng (di Banjarnegara) dan Gunung Merbabu (di Salatiga-Boyolali). Gunung berapi di sepanjang wilayah Jawa Tengah rata-rata mempunyai tingkat kerentanan terhadap bencana vulkanik tinggi, sehingga memerlukan pengawasan terus menerus.

2.1.4. Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Jawa Tengah cukup banyak. Beberapa DAS yang menjadi DAS Prioritas di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 18 DAS Prioritas di Jawa Tengah, yaitu DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan; Jabar, Jateng), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY), dan DAS Wawar Medono.

Jumlah sungai di wilayah Jawa Tengah cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah. Sungai-sungai tersebut antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain.

Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa, memiliki mata air di Pegunungan Sewu (Kabupaten Wonogiri), sungai ini mengalir ke utara, melintasi Kota Surakarta, dan akhirnya menuju ke Jawa Timur dan bermuara di daerah Gresik (dekat Surabaya). Sungai lainnya yang cukup besar adalah Sungai Serayu, yang melintasi 6 (enam) Kabupaten yaitu Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, dan Cilacap. Sungai ini berhulu di Kabupaten Wonosobo dan bermuara di Kabupaten Cilacap, dengan panjang sekitar 30 km dan lebar sekitar 12-25 m, peta daerah aliran sungai dapat dilihat pada Gambar 7.



*Gambar 7. Peta Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
(Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2013)*

Sungai-sungai di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas daerah pengaliran lebih dari 1.000 km^2 perlu diwaspadai karena daerah pengalirannya cukup luas dengan debit yang cukup besar, sehingga mengakibatkan wilayah di sekitarnya rawan banjir limpahan.

Tabel 3. Debit Sungai Rata-Rata Harian Luas Daerah Pengaliran Lebih Dari 1.000 km^2 di Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2014

(Sumber Dinas PSDA Prov. Jateng 2015)

Induk Sungai	Desa, Kecamatan,Kabupaten	Luas Daerah Pengaliran (km ²)	Debit Air(m ³ /det)	
			Terbesar	Terkecil
S. Pemali	Pos Rengaspendawa, Wanacala, Jatibarang, Brebes	1.111	1.599,09	0,98
Bengawan Solo	Pos Jurug, Desa Jebres, Kota Surakarta	3.206,70	4.056,5	7,9
S. Serayu	Pos Bd. Gerak Serayu Desa Gambarsari, Kab.Banyumas	3.060	1.157,5	16,6

Di wilayah Jawa Tengah terdapat waduk-waduk besar dengan kapasitasnya yang berbeda-beda antara lain sebagaimana dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 4. Kapasitas Waduk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

(Sumber : Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, 2018)

No	Nama Waduk	Lokasi Wilayah	Kapasitas
1	Gajah Mungkur /Wonogiri	Kab. Wonogiri	560
2	Kedung Ombo	Kab. Grobogan	689,09
3	Wadaslintang	Kab. Kebumen	388,72
4	Mrica /Panglima Besar Sudirman	Kab. Banjarnegara	23,24
5	Cacaban	Kab. Tegal	49,02
6	Sempor	Kab. Kebumen	38,04
7	Rowopening	Kab. Semarang	49,9
8	Malahayu	Kab. Brebes	31,14
9	Jatibarang	Kab. Semarang	17,67

2.1.5. Klimatologi

Suhu udara rata-rata di Jawa Tengah tahun 2022 berkisar 22,0°C sampai dengan 35,2°C. Kelembaban udara relatif rata-rata bervariasi berkisar 74,0 persen sampai dengan 86,0 persen. Tahun 2022 mencatatkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 357,0 mm dan curah hujan terendah di bulan Agustus sebesar 82 mm. Hari hujan terbanyak terjadi di bulan Februari sebanyak 22 hari hujan, dan terendah adalah di bulan Juli sebanyak 8 hari hujan.

2.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 meliputi lahan sawah seluas 991.524 Ha (30,47%), dan bukan lahan sawah seluas 2.262.888 Ha (69,53%). Dibandingkan tahun 2009, kondisi ini menunjukkan penurunan luas lahan sawah yang beralih menjadi bukan lahan sawah sebesar 128 Ha (0,013%).

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, peruntukan lahan dengan memperhatikan pola ruang terdiri dari kawasan budidaya dan kawasan lindung. Peruntukan kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, peternakan dan permukiman seluas 2.693.008 Ha, dan lahan peruntukan kawasan lindung meliputi hutan lindung, kawasan sempadan, suaka alam dan pelestarian alam, kawasan lindung karst seluas 561.404 Ha.

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya di Jawa Tengah terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, serta pesisir dan pulau-pulau kecil.

2.1.8. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi di Provinsi Jawa Tengah dengan luas 546.290 Ha terbagi ke dalam 20 KPH (Kesatuan Pemangkuhan Hutan), dengan fungsi hutan sebagai hutan produksi terbatas seluas \pm 362.360 Ha dan hutan produksi tetap seluas \pm 183.930 Ha. Kawasan hutan produksi terbatas berada di 28 kabupaten (seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Sukoharjo) dan satu kota yaitu Kota Semarang, sedangkan kawasan hutan produksi tetap berada di 28 kabupaten (seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Karanganyar).

2.1.9. Kawasan Hutan Rakyat

Pengembangan kawasan hutan rakyat seluas 345.822,96 Ha (10,63% luas Jawa Tengah) berada di 29 kabupaten dan 5 kota, kecuali Kota Tegal.

2.1.10. Kawasan Peruntukan Pertanian

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah seluas \pm 990.652 Ha dan kawasan pertanian lahan kering seluas \pm 995.587 Ha yang diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Lahan pertanian basah dan kering tersebut dikelola untuk mendukung program perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Provinsi Jawa Tengah dengan rencana seluas 1.022.570 Ha.

2.1.11. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pengembangan kawasan perkebunan di Provinsi Jawa Tengah seluas 885.344 Ha, terdiri dari perkebunan rakyat seluas 845.668 Ha (96%), PTPN IX seluas 28.212 Ha (3%), dan Perkebunan Besar Swasta/PBS seluas 11.464 Ha (1%).

2.1.12. Kawasan Peruntukan Peternakan

Pengembangan kawasan peruntukan peternakan meliputi kawasan peternakan besar, kecil dan kawasan peternakan unggas diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

2.1.13. Kawasan Peruntukan Perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan sebesar \pm 24.802 Ha, diarahkan untuk dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan difungsikan menjadi lokasi budidaya ikan. Kawasan perikanan tersebut meliputi:

1. Kawasan perikanan tangkap, diarahkan pada perairan pantai utara dan pantai selatan, danau, waduk, rawa, sungai dan embung;
2. Kawasan perikanan budidaya (air tawar, air payau, air laut), diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

2.1.14. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Potensi kawasan peruntukan pertambangan hampir merata di sebagian besar wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kawasan peruntukan pertambangan, meliputi:

1. Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batu bara, terletak di kawasan Majenang-Bantarkawung, Serayu-Pantai Selatan, kawasan Serayu-Pantai Utara, kawasan Gunung Slamet, kawasan Sindoro- Sumbing-Dieng, kawasan Merapi-Merbabu-Ungaran, kawasan Gunung Muria, kawasan Pegunungan Kendeng Utara, kawasan Kendeng Selatan, dan kawasan Gunung Lawu; Kawasan pertambangan panas bumi, terletak di 9 (sembilan) lokasi kompleks/kawasan panas bumi yang ada di 15 kabupaten, yaitu Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi Dieng, Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, Gunung Lawu, Baturraden, Guci, Banyugaram, Mangunan- Wanayasa, dan Condrodimuka; Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terletak di Wilayah Kerja Migas di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Grobogan, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Salatiga, Pekalongan, Tegal dan pengembangan sumur tua/marjinal yang tersebar di Kabupaten Blora, Grobogan dan Kendal.

2.1.15. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri skala wilayah diarahkan pada produk-produk unggulan berbasis industri manufaktur. Wilayah industri/ kawasan peruntukan industri tersebar di semua kabupaten/kota di Jawa Tengah kecuali Kota Magelang dan Kota Surakarta, sedangkan kawasan berikat berada di Kabupaten Cilacap, Semarang, Kendal dan Kota Semarang.

2.1.16. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi koridor Borobudur-Prambanan-Surakarta; koridor Borobudur-Dieng; koridor Sema- rang- Demak-Kudus-Jepara-Pati-Rembang-Blora; koridor Semarang- Ambarawa- Salatiga; koridor Batang-Pekalongan-Pemalang-Tegal-Brebes; koridor Cilacap- Banyumas-Purbalingga-Banjarnegara dan koridor Cilacap- Kebumen-Purworejo.

Pengembangan kegiatan pariwisata di Jawa Tengah juga akan didukung antara lain dengan penyelenggaraan Kereta Api Wisata, meliputi: Lokomotif Wisata di Kabupaten Blora, Museum Kereta Api dan Lokomotif Wisata di Wilayah Kabupaten Semarang (Ambarawa-Bedono), serta Kereta api wisata Borobudur dan sekitarnya.

2.1.17. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Jawa Tengah tersebar di seluruh kabupaten/kota, meliputi:

1. Kawasan permukiman perdesaan diarahkan pada kawasan-kawasan yang sudah ada dan perluasan areal dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan pertanian yang merupakan peruntukan dominan di perdesaan;

2. Kawasan permukiman perkotaan diarahkan pada intensifikasi kawasan-kawasan yang sudah ada melalui upaya pembangunan ke arah vertikal dan perluasan kawasan perkotaan, diikuti upaya pengendalian sehingga tidak mengganggu kawasan peruntukan lainnya terutama sawah di pinggiran kawasan perkotaan.

2.1.18. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kawasan pesisir yang terletak di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes dan Kota Semarang, Pekalongan, serta Tegal. Di Jawa Tengah terdapat 33 pulau-pulau kecil dimana 27 pulau terletak di kepulauan Karimunjawa, 2 pulau (Pulau Panjang dan Pulau Mandalika di Kabupaten Jepara); 3 Pulau (Pulau Marongan, Gede dan Sualan di Kabupaten Rembang) serta Pulau Nusakambangan di Kabupaten Cilacap.

2.1.19. Kawasan Lindung

Sesuai RTRW Provinsi Jawa Tengah, rencana kawasan lindung Provinsi Jawa Tengah tahun 2009–2029 seluas 561.404 Ha (17,4% dari luas wilayah provinsi). Pemanfaatan ruang hutan lindung fisiografis merupakan sub kawasan lindung yang paling besar, sedangkan pemanfaatan ruang yang paling kecil adalah kawasan pantai dan sempadan.

a. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung yang dikelola oleh negara diarahkan penyebarannya di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Brebes.

Untuk kawasan hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat terus didorong setidaknya mencapai minimal 10% melalui alih fungsi lahan tidak produktif, yang diarahkan pengembangannya di 29 kabupaten dan 3 kota (Magelang, Salatiga, dan Semarang).

b. Kawasan yang Memberikan Pelindungan bagi Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan pelindungan bagi kawasan bawahannya berbentuk kawasan resapan air. Luas kawasan resapan air di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan seluas 114.822 Ha. Kawasan resapan air tersebar di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Salatiga dan Semarang.

c. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar danau/waduk/rawa. Luas kawasan perlindungan setempat ditetapkan minimal seluas 59.918 Ha, meliputi:

1. Kawasan sempadan sungai, direncanakan berada pada semua wilayah kabupaten/kota yang dilewati oleh sungai, seluas 23.583 Ha;

2. Kawasan sempadan pantai, direncanakan seluas 8.786 Ha yang terdiri dari kawasan pesisir pantura dan pansela sejauh 100 meter dari garis pasang tertinggi; dan kawasan pesisir pulau-pulau kecil sejauh 50 meter dari garis pasang tertinggi;
3. Kawasan sekitar danau/waduk/rawa, direncanakan seluas 24.618,2 Ha, yang terdiri dari kawasan sempadan pagar terhadap danau/waduk/rawa sejauh 50 meter dari titik pasang tertinggi danau/waduk/rawa; dan kawasan sempadan bangunan terhadap danau/waduk/rawa sejauh paling sedikit 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan waduk tersebar di 15 kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Pati, Semarang, Pemalang, Tegal dan Brebes.
4. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan pengembangan RTH tersebar di tiap kabupaten/kota, terdiri dari RTH publik dan RTH privat, dengan luas minimal 30% dari kawasan perkotaan. Proporsi RTH publik minimal 20% sedangkan RTH privat 10%.

d. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya meliputi:

1. Daerah perlindungan plasma nutfah, tersebar di 29 kabupaten dan 4 kota, yaitu Kota Magelang, Salatiga, Semarang dan Tegal;
2. Kawasan perlindungan plasma nutfah perairan, tersebar dikabupaten/kota sepanjang pantai utara dan pantai selatan
3. Daerah pengungsian satwa berada di Srondol Kota Semarang.

e. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Kawasan lindung ini terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, suaka alam laut dan perairan, kawasan pantai berhutan bakau, taman wisata alam serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi,

1. Kawasan cagar alam, taman wisata alam dan suaka marga satwa tersebar di 4 konservasi wilayah, meliputi Pati, Surakarta, Cilacap dan Pemalang, dengan luas yang telah ditetapkan sebesar 2.923,3 Ha. Sebaran kawasan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

**Sebaran Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa
di Provinsi Jawa Tengah**

	lal, Taman Wisata Alam & Suaka Margasatwa	Lokasi	Luas (Ha)
A.	KONSERVASI WIL. I PATI		
1	Cagar Alam Keling I a, b, c	Kabupaten Jepara	6,8
2	Cagar Alam Keling II, III	Kabupaten Jepara	61
3	Cagar Alam Kembang	Kabupaten Jepara	1,8
4	Cagar Alam Gunung Celering	Kabupaten Jepara	1328,4
5	Cagar Alam Bekutuk	Kabupaten Blora	25,4
6	Cagar Alam Cabak I/II	Kabupaten Blora	30
7	Cagar Alam Gunung Butak	Kabupaten Rembang	45,1
B.	KONSERVASI WIL. II SURAKARTA		
1	Cagar Alam Gebugan	Kabupaten Semarang	1,8
2	Cagar Alam Sepakung	Kabupaten Semarang	10
3	Cagar Alam Donoloyo	Kabupaten Wonogiri	8,3
4	Suaka Margasatwa Gunung Tunggangan	Kabupaten Sragen	103,9
C.	KONSERVASI WIL. III CILACAP		
1	Cagar Alam Pantodomas	Kabupaten Wonosobo	4,1
2	Cagar Alam Telogo Dringo	Kabupaten Banjarnegara	26,1
3	Cagar Alam Telogo Sumurup	Kabupaten Banjarnegara	20,1
4	Cagar Alam Pringamba I / II	Kabupaten Banjarnegara	58
5	Cagar Alam Nusakambangan Barat	Kabupaten Cilacap	675
6	Cagar Alam Nusakambangan Timur	Kabupaten Cilacap	277
7	Cagar Alam Wijaya Kusuma	Kabupaten Cilacap	1
8	Cagar Alam Karangbolong	Kabupaten Cilacap	0,5
D.	KONSERVASI WIL. IV PEMALANG		
1	Cagar Alam Pagerwunung Darupono	Kabupaten Kendal	33,2
2	Cagar Alam Peson Subah I	Kabupaten Batang	10,4
3	Cagar Alam Peson Subah II	Kabupaten Batang	10
4	Cagar Alam Ulolanang Kecubung	Kabupaten Batang	69,7
5	Cagar Alam Bantarbolang	Kabupaten Pemalang	24,5
6	Cagar Alam Curug Bengkawah	Kabupaten Pemalang	1,5
7	Cagar Alam Moga	Kabupaten Pemalang	3,5
8	Cagar Alam Vak 53 Comal	Kabupaten Pemalang	29,1
9	Cagar Alam Guci	Kabupaten Tegal	2
10	Cagar Alam Sub Vak 18c, 19b Jatinegara	Kabupaten Tegal	6,6
11	Cagar Alam Telaga Renjeng	Kabupaten Brebes	48,5
Jumlah			2.923,3

Sumber: Dinas Kehutanan

2. Kawasan Taman Nasional ditetapkan seluas 12.135 Ha, meliputi: a) Taman Nasional Gunung Merapi seluas 6.410 Ha, berada di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten dan sebagian Sleman - DIY; b) Taman Nasional Gunung Merbabu seluas 5.725 Ha berada di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Semarang; serta c) Taman Nasional Karimunjawa seluas 111.625 Ha berada di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara;
3. Kawasan pelestarian alam berupa taman hutan rakyat dan kebun raya, yaitu kawasan Taman Hutan Raya Jawa Tengah berada di Berjo- Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar seluas 231,3 Ha, dan Kebun Raya Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas seluas 150 Ha;

4. Pengembangan taman wisata alam dan taman wisata alam laut meliputi:

Taman Wisata Alam Gunung Selok di Kabupaten Cilacap; Taman Wisata Alam Tlogo Warno/Pengilon di Kabupaten Wonosobo; Taman Wisata Alam Grojogan Sewu di Kabupaten Karanganyar; Taman Wisata Alam Sumber Semen di Kabupaten Rembang; Taman Wisata Alam Laut Ujung Negoro- Roban di Kabupaten Batang;

5. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan untuk melindungi 597 benda, struktur, bangunan dan situs cagar budaya yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Benda cagar budaya tersebut terdiri dari candi, situs purbakala, benteng kuno, makam kuno, masjid, gereja, krenteng, dan bangunan bersejarah lainnya;

6. Daerah pantai berhutan bakau seluas 10.718,51 Ha tersebar di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Kota Semarang. Kawasan mangrove terluas di pantai selatan berada di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, 2012 Cilacap (77,99%), sedangkan di pantai utara berada di Kabupaten Demak (9,19%).

2.1.20. Wilayah Rawan Bencana

Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Provinsi Jawa Tengah menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, kawasan rawan bencana alam di Jawa Tengah dapat diidentifikasi ke dalam 10 kawasan, yaitu:

1. Kawasan Rawan Banjir, wilayah yang mengalami genangan akibat curah hujan tinggi, luapan air sungai ataupun rusaknya bendung/ tanggul yang mengancam areal persawahan, jalan dan permukiman, yaitu Kabupaten Demak, Grobogan, Kendal, Semarang, Pati, Kudus, Brebes, Tegal, Pekalongan, Kebumen, Magelang, Purworejo, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Sragen, Karanganyar, Cilacap, Banjarnegara, Banyumas, dan Purbalingga;
2. Kawasan Rawan Kekeringan, yaitu kawasan dengan ketersediaan air rendah untuk pertanian dan kebutuhan konsumsi masyarakat, khususnya pada musim kemarau yang diperparah dampak perubahan iklim dan pemanasan global yang mengancam Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Jepara, Kudus, Blora, Rembang, Pati, Demak, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes;
3. Kawasan Rawan Tanah Longsor, yaitu wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah bergerak akibat patahan atau pergeseran, kemiringan lereng, jenis/karakter batuan, hujan, kandungan air dalam tanah dan penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus,

Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes dan Kota Semarang;

4. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi, yaitu wilayah di sekitar puncak gunung berapi yang rawan terhadap bahaya primer berupa lepasan lava, semburan api, luncuran awan panas piroklastik, gas vulkanik beracun dan bahaya sekunder berupa aliran lahar hujan, banjir bandang dan longsoran material vulkanik. Bahaya tersebut khususnya mengancam kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten, Kota Magelang, dan Gunung Slamet di Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, Brebes dan Kota Tegal;
5. Kawasan Rawan Gempa Bumi, meliputi wilayah Selatan Jawa Tengah dimana relatif lebih dekat dengan zona tumbukan lempeng benua dan terdapat sebaran garis-garis sesar aktif yang terdapat di wilayah Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Klaten dan Wonogiri. Peristiwa gempa bumi signifikan terakhir terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 berkekuatan 6,3 Skala Richter, yang mengguncang bagian selatan Pulau Jawa dan berdampak hingga radius 95 km dari pusat gempa meliputi Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri, Purworejo, Magelang, Kebumen, Temanggung dan Karanganyar;
6. Kawasan Rawan Gelombang Pasang, meliputi wilayah pantai berkemiringan landai di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Pekalongan dan Tegal;
7. Kawasan Rawan Tsunami, meliputi kawasan Pesisir Pantai Selatan berhadapan dengan Samudera Hindia yang terdapat di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri. Tsunami terakhir terjadi pada 17 Juli 2006 akibat gempa bawah laut di Samudera Hindia dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan sarana prasarana perikanan dan kerusakan lingkungan pantai di Cilacap, Kebumen, dan Purworejo;
8. Kawasan Rawan Abrasi yang mengikis tanah daratan kawasan pesisir pantai utara berakibat pada rusaknya kawasan pertambakan, pelabuhan dan permukiman di Kabupaten Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Pekalongan dan Tegal;
9. Rawan Angin Topan dimana angin dengan kecepatan dan daya rusak tinggi melintasi daratan yang seringkali terjadi di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Blora, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Kota Semarang dan Pekalongan;
10. Kawasan Rawan Gas Beracun, meliputi wilayah di sekitar kawah Sinila, Timbang, Sikendang, Sibanteng dan Sileri di kawasan Pegunungan Dieng, mengancam areal permukiman dan pertanian desa-desa sekitarnya yang terdapat di wilayah perbatasan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Kawasan rawan bencana di Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 8.



*Gambar 8. Peta Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah
(Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029)*

Sebagai bagian dari Indonesia yang rawan bencana, wilayah Jawa Tengah juga memiliki risiko bencana alam yang cukup tinggi seperti banjir, tsunami, abrasi dan longsor. Kondisi tersebut dapat diketahui berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022, yang menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kelas risiko bencana sedang dengan skor 115 dan menempati urutan/rangking 3 di tingkat nasional. Terdapat 1 kabupaten di wilayah Jawa Tengah yang masuk kategori risiko bencana tinggi, dan 34 kabupaten/kota termasuk kategori risiko bencana sedang, dengan skor risiko tertinggi adalah Kabupaten Pati.

Tingkat kerawanan bencana di Jawa Tengah tersebut dapat diindikasikan dengan frekuensi kejadian bencana alam di Jawa Tengah dari tahun 2020 – 2022. Intensitas kejadian bencana terbesar berada di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Magelang, dan Kota Semarang dengan kejadian bencana meliputi tanah longsor, banjir, kebakaran. Kejadian bencana di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2018 - 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Kejadian Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022

No	Uraian	Satuan	Tahun					Keterangan	Sumber
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Angin topan	Kejadian	629,00	488,00	671,00	0,00	0,00		BPBD Provinsi Jawa Tengah 29 November 2023, 10:28:41
2	Banjir	Kejadian	459,00	250,00	374,00	0,00	0,00		BPBD Provinsi Jawa Tengah 25 Januari 2023, 07:25:16
3	Gas beracun	Kejadian	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		BPBD Provinsi Jawa Tengah 27 Juli 2022, 14:18:23
4	Gempa Bumi	Kejadian	2,00	5,00	4,00	0,00	0,00		BPBD Provinsi Jawa Tengah 25 Januari 2023, 07:25:36
5	Kebakaran	Kejadian	356,00	171,00	312,00	0,00	0,00		BPBD Provinsi Jawa Tengah 25 Januari 2023, 07:25:41
6	Kekeringan	Kejadian	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		BPBD Provinsi Jawa Tengah 27 Juli 2022, 13:42:00

7	Letusan Gunung Api	Kejadian	12,00	6,00	1,00	0,00	0,00		BPBD Provinsi Jawa Tengah 25 Januari 2023, 07:25:47
8	Tanah Longsor	Kejadian	1.387,00	787,00	1.010,00	0,00	0,00		BPBD Provinsi Jawa Tengah 14 Februari 2023, 15:04:45
9	Gelombang Pasang	Kejadian	23,00	6,00	24,00	0,00	0,00		BPBD Provinsi Jawa Tengah 25 Januari 2023, 07:26:02
10	TOTAL KEJADIAN BENCANA	Kejadian	2.990,00	1.895,00	2.440,00	0,00	0,00		BPBD Provinsi Jawa Tengah 25 Januari 2023, 07:26:07

Sumber: <https://edatabase.bappeda.jatengprov.go.id/e-rpjmd>

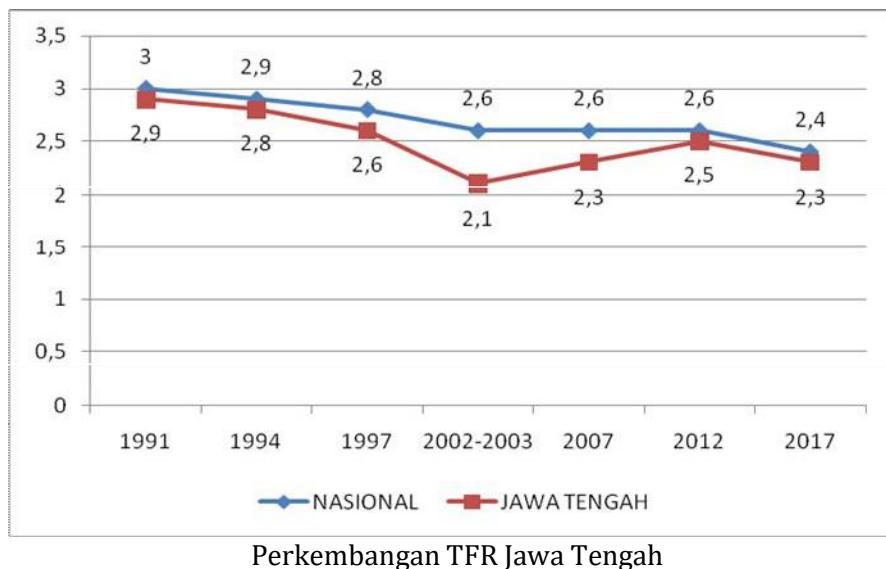
2.1.21. Demografi

Penduduk merupakan potensi tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi penduduk juga membutuhkan barang-barang konsumsi untuk menunjang kehidupannya. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tidak terkendali, dan persebaran penduduk yang tidak seimbang ditambah dengan daya dukung alam dan lingkungan yang terbatas, akan menimbulkan masalah dan beban bagi Negara. Kuantitas dan kualitas sumber daya alam akan mengalami penurunan yang cepat jika angka pertumbuhan penduduk terus meningkat. Oleh karena itu harus dilakukan pengendalian jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu fertilitas (tingkat kelahiran), mortalitas (tingkat kematian) dan migrasi (perpindahan).

Jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2022 (Susenas 2022) adalah sebesar 37,03 juta jiwa. Jumlah penduduk ini mengalami peningkatan sebesar 0,29 juta jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2021 yang mencapai 36,74 juta jiwa. Secara nasional, Jawa Tengah dengan penduduk sebesar 37,03 juta jiwa termasuk provinsi dengan jumlah penduduk relatif tinggi setelah Jawa Barat sebesar 49,40 juta jiwa dan Jawa Timur sebesar 41,15 juta jiwa.

Perkembangan jumlah penduduk Jawa Tengah relatif terkendali, hal ini terlihat dari kondisi tingkat kelahiran. Gambaran tingkat kelahiran di Propinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate/TFR) yang didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1.000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya. Tahun 2022 angka TFR Jawa Tengah sebesar 2,09% cukup rendah jika dibanding dengan nasional

yang sebesar 2,15%. Angka ideal TFR yang diharapkan guna mencapai penduduk tumbuh seimbang adalah 2,1%



Sementara itu, persentase penduduk laki-laki pada 2022 sebesar 50,26 persen sedikit lebih banyak dibanding persentase penduduk laki-perempuan sekitar 49,74 persen. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk di perkotaan dan di perdesaan memiliki pola yang cenderung sama. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa penduduk perempuan di perkotaan sebesar 50,49 persen, sedangkan penduduk laki-laki mencapai 49,51 persen. Penduduk perempuan di pedesaan sekitar 50,32 persen dan penduduk laki-laki sebanyak 49,68 persen.

Tabel 5. Persentase Penduduk menurut Daerah tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Jawa Tengah (2017-2018)
(Sumber: BPS 2017)

URAIAN	Persentase Penduduk	
	laki-laki	Perempuan
Tahun 2017		
Perkotaan	49,50	50,50
Perdesaan	49,68	50,32
Perkotaan + Perdesaan	49,59	50,41
Tahun 2018		
Perkotaan	49,51	50,49
Perdesaan	49,68	50,32
Perkotaan + Perdesaan	49,59	50,41

Dilihat dari persebarannya, Kabupaten Brebes merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak diantara 35 daerah kabupaten/kota di JawaTengah, yakni 2.010.617 jiwa atau 5,43 persen dari total penduduk Jawa Tengah. Sedangkan Kota Magelang merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit sebanyak 121.675 jiwa. Bila dilihatberdasarkan kabupaten/kota, kepadatan penduduk di seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk pada masing-masing kabupaten/kota. Kepadatan penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 1.113 jiwa setiap kilometer persegi di tahun 2022. Kota Surakarta menempati kepadatan penduduk tertinggi sekitar 11.878 jiwa setiap kilometernya. Selanjutnya diikuti oleh Kota Tegal dan Kota Pekalongan dengan masing-masing kepadatan penduduk sekitar 8.069 jiwa setiap kilometernya dan 6.889 jiwa setiap kilometernya. Kabupaten Rembang (642 jiwa setiap kilometernya), Kabupaten Wonogiri (580 jiwa setiap kilometernya), dan Kabupaten Blora (495 jiwa setiap kilometernya) merupakan tiga Kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk terendah. Sementara itu jika dilihat dari jenis kelamin, penduduk laki-laki Jawa Tengah (18,61 juta jiwa) lebih banyak dibanding penduduk laki-laki yang sebesar 18,41 juta jiwa.

Tabel 6. Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Jawa Tengah Tahun 2022

(Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023)

No	Kabupaten/ Kota	Luas	Jumlah Penduduk			
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Kepadatan
1	Kab. Cilacap	2.139	1.002.672	985.950	1.988.622	930
2	Kab. Banyumas	1.328	908.981	897.032	1.806.013	1.360
3	Kab. Purbalingga	778	515.842	503.998	1.019.840	1.311
4	Kab. Banjarnegara	1.070	527.488	511.230	1.038.718	971
5	Kab. Kebumen	1.283	697.439	679.386	1.376.825	1.073
6	Kab. Purworejo	1.035	389.302	388.955	778.257	752
7	Kab. Wonosobo	985	456.748	439.598	896.346	910
8	Kab. Magelang	1.086	661.131	651.442	1.312.573	1.209
9	Kab. Boyolali	1.015	543.113	536.839	1.079.952	1.064
10	Kab. Klaten	656	634.985	640.865	1.275.850	1.946
11	Kab. Sukoharjo	467	458.483	458.144	916.627	1.964
12	Kab. Wonogiri	1.822	527.651	529.436	1.057.087	580
13	Kab. Karanganyar	772	472.414	475.228	947.642	1.227

14	Kab. Sragen	946	494.252	497.991	992.243	1.048
15	Kab. Grobogan	1.976	737.881	732.269	1.470.150	744
16	Kab. Blora	1.794	444.257	443.967	888.224	495
17	Kab. Rembang	1.014	327.196	323.574	650.770	642
18	Kab. Pati	1.491	667.890	671.682	1.339.572	898
19	Kab. Kudus	425	427.243	429.229	856.472	2.014
20	Kab. Jepara	1.004	599.842	592.969	1.192.811	1.188
21	Kab. Demak	897	617.297	605.920	1.223.217	1.363
22	Kab. Semarang	947	532.529	535.963	1.068.492	1.128
23	Kab. Temanggung	870	402.114	397.650	799.764	919
24	Kab. Kendal	1.002	522.098	511.269	1.033.367	1.031
25	Kab. Batang	789	410.738	403.053	813.791	1.031
26	Kab. Pekalongan	836	500.355	486.100	986.455	1.180
27	Kab. Pemalang	1.012	760.798	739.956	1.500.754	1.483
28	Kab. Tegal	880	823.044	800.551	1.623.595	1.846
29	Kab. Brebes	1.658	1.019.123	991.494	2.010.617	1.213
30	Kota Magelang	18	60.284	61.391	121.675	6.715
31	Kota Surakarta	44	257.257	265.751	523.008	11.878
32	Kota Salatiga	53	96.341	98.724	195.065	3.683
33	Kota Semarang	374	821.305	838.670	1.659.975	4.442
34	Kota Pekalongan	45	156.391	153.351	309.742	6.889
			Jumlah Penduduk			
		Luas	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Kepadatan
35	Kota Tegal	34	140.384	137.915	278.299	8.069
Jawa Tengah		32.544	18.614.868	18.417.542	37.032.410	1.138

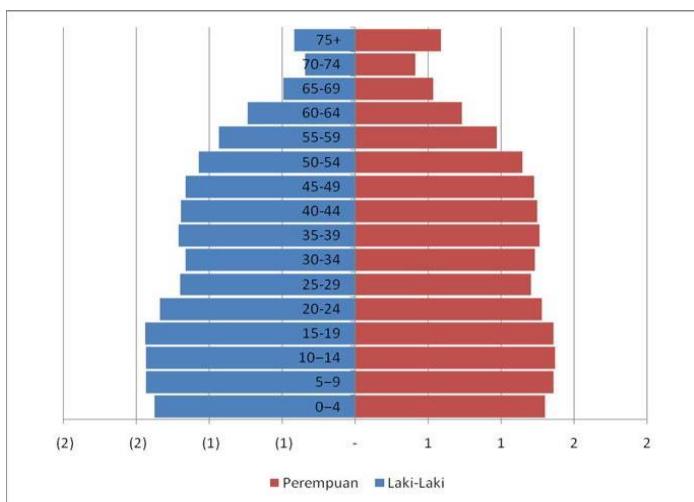
Jika dilihat menurut kelompok umur, maka di kelompok umur 0-19 tahun menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sedangkan pada kelompok umur 20-54 tahun, 55-59 tahun dan 60 tahun ke atas menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan. Hasil Susenas 2017 menunjukkan

jumlah penduduk perempuan di Jawa Tengah diperkirakan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yakni 17,24 juta jiwa berbanding 16,96 juta jiwa, dengan nilai rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 101,1. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pada tahun 2022 di Jawa Tengah terdapat 101 orang laki-laki pada setiap 100 orang perempuan. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin secara berangsur-angsur terus naik pada kelompok umur 0-29 tahun dan selanjutnya pada kelompok umur yang lebih tua (30 tahun ke atas) hingga di bawah 100.

Tabel 7. Rasio Jenis Kelamin dan Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Jawa Tengah 2017
(Sumber: BPS Jawa Tengah, 2018)

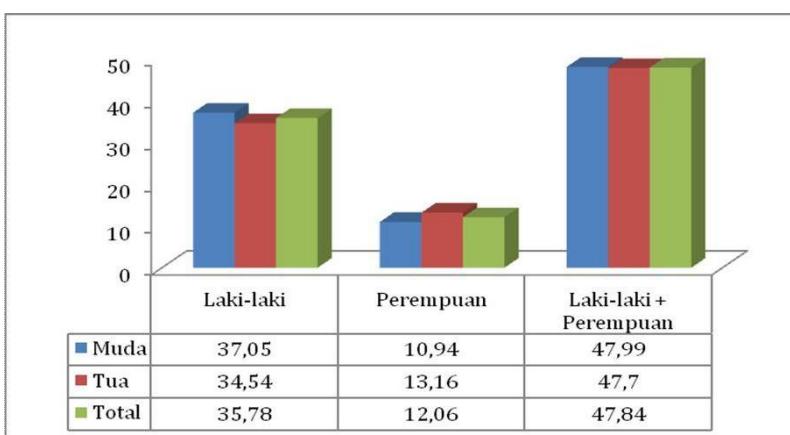
Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis
0-4	1.371.632	1.307.094	2.678.726	104,93
5-9	1.375.709	1.315.876	2.691.585	104,54
10-14	1.414.613	1.338.868	2.753.481	105,65
15-19	1.441.110	1.350.244	2.791.354	106,72
20-24	1.449.093	1.368.657	2.817.750	105,87
25-29	1.466.452	1.397.819	2.864.271	104,91
30-34	1.458.710	1.407.175	2.865.885	103,66
35-39	1.425.985	1.388.929	2.814.914	102,66
40-44	1.376.901	1.371.159	2.748.060	100,41
45-49	1.290.544	1.309.824	2.600.368	98,52
50-54	1.180.963	1.217.441	2.398.404	97,00
55-59	1.034.513	1.080.795	2.115.308	95,71
60-64	856.018	896.109	1.752.127	95,52
65-69	657.642	694.272	1.351.914	94,72
70-74	426.679	468.770	895.449	91,02
75+	388.304	504.510	892.814	76,96
Jawa Tengah	18.614.868	18.417.542	37.032.410	101,07

Perubahan struktur penduduk menurut umur mempengaruhi besarnya angka rasio ketergantungan. Angka rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif (65 tahun ke atas) dan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun). Tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya rasio ketergantungan. Semakin tinggi rasio ketergantungan, beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif akan semakin besar. Gambaran mengenai rasio ketergantungan penduduk Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar piramida penduduk sebagai berikut:



Gambar 9. Piramida Penduduk Jawa Tengah Tahun 2017

Angka rasio ketergantungan Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 43,72 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung hampir 44 orang penduduk usia tidak produktif. Beban tanggungan pada penduduk produktif perempuan (44,02) lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk produktif laki-laki (43,40). Angka rasio ketergantungan penduduk muda (31,52) lebih tinggi dibandingkan rasio ketergantungan penduduk tua (12,18). Angka rasio ketergantungan tersebut mengindikasikan bahwa Jawa Tengah telah terjadi bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif.



Gambar 10. Rasio Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Muda dan Tua Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018)

Pada rasio ketergantungan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki proporsi penduduk usia produktif tertinggi di Jawa Tengah sebesar 73,63 persen. Hal ini mengakibatkan angka rasio ketergantungan di Kota Semarang paling rendah (40,43) dibandingkan angka rasio ketergantungan kabupaten/kota lainnya. Sebaliknya proporsi penduduk usia produktif terendah dimiliki oleh Kabupaten Kebumen (65,48 persen), sedangkan angka rasio ketergantungan paling tinggi dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri (47,03).

**Rasio Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Muda dan Tua
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017**

Tabel 8. Rasio Ketergantungan, Jumlah Penduduk dan Proporsi Usia Produktif menurut Kelompok Umur dan Kab/Kota Jawa Tengah 2017
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018)

No.	Kabupaten/ Kota	Rasio Keter- gantungan	Kelompok Umur				Proporsi Penduduk Usia
			0-14	15-64	65+	Total	
1	Kab. Cilacap	43,69	404.243	1.158.088	171.807	1.733.418	66,80
2	Kab. Banyumas	46,31	385.395	1.156.748	177.614	1.719.757	67,26
3	Kab.	46,95	221.845	632.249	97.528	952.046	66,40
4	Kab.	45,69	199.193	638.831	91.952	929.976	68,69
5	Kab. Kebumen	46,38	271.079	782.609	141.415	1.195.103	65,48
6	Kab. Purworejo	45,85	151.611	470.009	95.273	716.893	65,56
7	Kab. Wonosobo	43,94	182.375	531.508	78.690	792.573	67,06
8	Kab. Magelang	44,06	281.000	895.827	135.469	1.312.296	68,26
9	Kab. Boyolali	46,46	208.317	655.569	126.959	990.845	66,16
10	Kab. Klaten	44,84	233.323	788.456	153.522	1.175.301	67,08
11	Kab. Sukoharjo	43,38	180.393	630.278	93.081	903.752	69,74
12	Kab. Wonogiri	47,03	166.940	631.945	158.482	957.367	66,00
13	Kab.	45,40	188.404	615.090	97.472	900.966	68,27
14	Kab. Sragen	46,11	180.993	600.881	108.219	890.093	67,50
15	Kab. Grobogan	43,87	300.723	948.390	135.055	1.384.168	68,51
16	Kab. Blora	40,81	175.870	596.586	93.688	866.144	68,87
17	Kab. Rembang	41,38	135.002	454.076	57.382	646.460	70,24
18	Kab. Pati	41,67	258.559	870.903	137.308	1.266.770	68,74
19	Kab. Kudus	40,70	194.573	634.446	64.333	893.352	71,01
20	Kab. Jepara	42,78	306.264	884.163	109.182	1.299.609	68,03
21	Kab. Demak	43,04	272.437	831.930	81.334	1.185.701	70,16

22	Kab. Semarang	42,43	223.597	752.794	108.010	1.084.401	69,42
23	Kab.	44,15	165.623	541.862	76.853	784.338	69,08
24	Kab. Kendal	40,66	214.853	687.054	81.090	982.997	69,89
25	Kab. Batang	42,63	168.965	544.677	66.686	780.328	69,80
26	Kab.	43,49	212.528	627.146	66.773	906.447	69,18
27	Kab. Pemalang	43,79	305.367	882.006	112.966	1.300.339	67,82
28	Kab. Tegal	44,06	345.336	964.002	128.204	1.437.542	67,05
29	Kab. Brebes	43,80	423.979	1.230.847	156.495	1.811.321	67,95
30	Kota Magelang	41,60	22.947	87.445	11.528	121.920	71,72
31	Kota Surakarta	42,01	100.442	375.987	43.373	519.802	72,33
32	Kota	42,19	40.596	142.838	16.747	200.181	71,35
33	Kota	40,43	386.559	1.388.344	110.605	1.885.508	73,63
34	Kota	41,42	70.051	222.912	18.977	311.940	71,45
35	Kota Tegal	42,11	58.209	173.339	18.591	250.139	69,29
Jawa Tengah		43,72	7.637.591	24.030.124	3.422.663	35.090.378	68,48
			0-14	15-64	65+	Total	

Bonus Demografi di Jawa Tengah mempunyai waktu peluang relatif lebih pendek dibanding dengan tingkat nasional maupun provinsi lain di Pulau Jawa, khususnya DKI, DIY, Jawa Timur dan Banten. Angka beban ketergantungan di Jawa Tengah telah mencapai di bawah 50, sejak tahun 2015 yaitu sebesar 48,1 dan menurun hingga 47,7 pada tahun 2020 yang merupakan titik terendah, karena pada tahun 2025 telah meningkat menjadi 48,4. Akan tetapi pada tahun 2030 telah meningkat lagi menjadi 49,9 bahkan pada tahun 2035 semakin meningkat ke angka di atas 50 yaitu sebesar 51,7. Artinya pada saat ini Provinsi Jawa Tengah sudah memasuki periode dengan angka rasio ketergantungan yang rendah dan peluang bonus demografi hanya terjadi pada tahun 2015 hingga tahun 2030. Hal ini memerlukan arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang tepat, antara lain menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja; menjaga penurunan fertilitas; menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana.

Sebagai langkah antisipasi menghadapi bonus demografi di Jawa Tengah telah disusun Grand Desain Bonus Demografi Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2018-2038, dimana di dalamnya berisi serangkaian arah kebijakan antara lain menyangkut Pengendalian Kuantitas

Penduduk yang diarahkan untuk mengelola dan mempertahankan pertumbuhan penduduk melalui pengendalian kelahiran dengan cara mengoptimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB). Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas penduduk yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan secara umum dan pendidikan serta kesempatan kerja/berusaha. Dalam rangka peningkatan kualitas penduduk, dari sisi pelayanan kesehatan perlu diupayakan peningkatan derajat kesehatan untuk menurunkan angka kematian terutama ibu dan anak serta meningkatkan usia harapan. Sementara dari sisi pendidikan, perlu diupayakan peningkatan kompetensi dan daya saing penduduk melalui pendidikan formal, non formal dan informal tanpa mengesampingkan masalah kesetaraan gender. Sedangkan dari sisi kesempatan kerja/berusaha perlu diupayakan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak atau kemudahan berwirausaha. Melalui pekerjaan yang layak memberi peluang keluarga untuk meningkatkan penghasilannya sehingga terbebas dari kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Tantangan ke depan adalah upaya meningkatkan jumlah penduduk yang berkualifikasi pendidikan menengah. Dengan kata lain perlu peningkatan Angka Partisipasi SMA/SMK/MA dengan meminimalkan Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA.

2.1.22. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku, dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi, namun demikian harus tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, sehingga terwujud karya-karya seni budaya yang memiliki kepribadian. Disisi lain kesenian merupakan hasil karya yang mengacu pada nilai keindahan (estetika) dan mewujud dari proses pengendapan makna relasi antar manusia dan manusia dengan lingkungan hidupnya. Kurun waktu 2018-2023 pembangunan kebudayaan di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan sebagai berikut: 1) angka partisipasi seni dan budaya mencapai 12 % pada tahun 2023; 2) persentasi jenis seni budaya yang terlayani melebihi target pada tahun 2023, ditargetkan 6,28% dan terealisasi 6,82%.

Meskipun aktivitas seni budaya di Jawa Tengah mengalami peningkatan, namun demikian ke depan upaya untuk lebih memberdayakan nilai adiluhung budaya Jawa; mengembangkan ajaran Ki Hajar Dewantoro yaitu Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani; mendayagunakan Bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan serta melestarikan kesenian Jawa perlu terus ditingkatkan. Kinerja pembangunan bidang kebudayaan pada tahun 2023 yang telah terselenggara diantaranya Parade Seni Budaya Jawa Tengah, Kongres Bahasa Jawa, P5 Berbasis Budaya, Usulan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), Workshop Daluang, Penulisan Karya Ilmiah Sejarah dan Tradisi, Lomba Karya Tulis Ilmiah tentang Cagar Budaya, Penetapan dan Pemeringkatan Cagar Budaya.

Pencapaian indikator kinerja dan prestasi penetapan/pemeringkatan WBTB dan CB bisa dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja OPD

INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI
TUJUAN		
Angka partisipasi seni dan budaya	12%	12%
SASARAN		
Persentase jenis seni budaya yang terlayani	6,28%	6,82%
PROGRAM		
Presentase ragam budaya terlayani	3,10%	3,10%
Presentase jenis seni tradisi terlayani	6,28%	6,82%
Persentase sumber belajar berbasis budaya	1,60%	0,42%
Persentase status cagar budaya	20,27%	23,62%

Sumber : Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2023

JENIS CAGAR BUDAYA	NAMA CAGAR BUDAYA
BANGUNAN CAGAR BUDAYA	1. BANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA BAKORWIL II SURAKARTA
SITUS CAGAR BUDAYA	1. LIYANGAN (PROSES PERINGKAT NASIONAL) 2. RUMAH DINAS KEPALA BAKORWIL I PATI 3. RUMAH DINAS KEPALA BAKORWIL II MAGELANG EKS RESIDEN KEDU (PROSES PERINGKAT NASIONAL) 4. KANTOR BAKORWIL III PEKALONGAN 5. RUMAH DINAS KEPALA BAKORWIL III PEKALONGAN 6. RUMAH DINAS KEPALA BAKORWIL III PURWOKERTO 7. KANTOR KARESIDENAN BANYUMAS 8. KOMPLEKS EKS <i>HOOGERE KWEEKSCHOOL</i> PURWOREJO (PERINGKAT NASIONAL TAHUN 2023)
KAWASAN CAGAR BUDAYA	1. PATIAYAM 2. SEMEDO

Sumber : Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2023

JUMLAH PENETAPAN CAGAR BUDAYA DI JAWA TENGAH HINGGA TAHUN 2021	751
JUMLAH OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA TERDAFTAR HINGGA TAHUN 2021	16.088

Sumber : Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2023

TOTAL WBTB DITETAPKAN HINGGA TAHUN 2023	135
OPK TERCATAT HINGGA TAHUN 2023	747
JUMLAH WBT PERDOMAIN	
TRADISI DAN EKSPRESI LISAN	5
SENI PERTUNJUKAN	50
PENGETAHUAN DAN KEBIASAAN PERILAKU MENGENAL ALAM SEMSTA	4
KETERAMPILAN DAN KEMAHIRAN KERAJINAN TRADISIONAL	36
ADAT ISTIADAT MASYARAKAT, RITUS DAN PERAYAAN – PERAYAAN	40

Sumber : Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pada tahun 2024 pengukuran kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah menggunakan “Angka Melek Budaya”. Konsep angka melek budaya adalah angka kuantitatif yang mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat yang diukur berdasarkan kesadaran untuk melibatkan diri dalam ragam aksi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya. Melek dan sadar pada budaya diberi kriteria berdasarkan ingkatannya dari terendah hingga menjadi maestro. Kriterianya berupa; 1) Tepung, 2) Srawung, dan terakhir 3) adalah Dunung”.

Tepung diartikan sebagai kesadaran ekstrinsik individu dalam mengenal atau mengetahui dan memanfaatkan ragam warisan budaya. Srawung diartikan sebagai kesadaran instrinsik individu melibatkan diri menggali pemahaman dan pemanfaatan ragam warisan budaya. Dunung diartikan sebagai kesadaran individu terhadap fisik dan nilai serta pemanfaatan ragam warisan budaya dalam kehidupan. Variable pengukuran kriteria melek budaya diambil dari 5 (lima) dimensi berupa; 1) Pendidikan Budaya, 2) Ekspresi Budaya Masyarakat, 3) Populasi Organisasi Budaya, 4) Pendayagunaan Warisan Budaya, 5) Literasi Budaya.

Konsep Angka Melek Budaya yang digunakan Provinsi Jawa Tengah merupakan Indikator Kinerja cadangan dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Melek Budaya dihitung oleh Bidang Kebudayaan dengan dengan angka capaian ditahun 2022 sebesar 49,32%, 2023 sebesar 50,82% dan target 2024 sebesar 52,32%. Sedangkan IPK Provinsi Jawa Tengah sifatnya dirilis oleh Kemendikbudristek dan Bappenas, tahun 2018 sebesar 60,05%, 2019 sebesar 60,94%, 2020 sebesar 59,12%, 2021 sebesar 55,24%, dan 2022 sebesar 59,43%. Tahun 2023 belum dirilis.

Organisasi penghayat dan upacara tradisional merupakan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan. Jumlah penghayat dalam kurun waktu 2013-2017 fluktuatif mengalami perubahan. Sedangkan jumlah siswa SMA/SMALB/SMK penghayat, organisasi dan upacara tradisional cenderung tetap.

2.1.23. Latar Belakang Budaya

a. Corak Utama

Jawa Tengah adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan, Jawa Timur di sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Pengertian Jawa Tengah secara geografis dan budaya kadang juga mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawa Tengah dikenal sebagai "jantung" budaya Jawa, meskipun demikian di Provinsi ini ada pula suku bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku Jawa seperti suku Sunda di daerah perbatasan dengan Jawa Barat. Daerah Kebudayaan Jawa meliputi seluruh bagian Tengah dan Timur dari pulau Jawa, secara kolektif di Jawa Tengah ada daerah yang disebut Kejawen yaitu Banyumas, Kedu, Yogyakarta, dan Surakarta, Daerah diluar itu dinamakan Pesisir dan Ujung Timur. Jika dilihat dari karakteristik budaya, ada dua (2) daerah luas bekas kerajaan Mataram sebelum terpecah pada tahun 1775, yaitu Yogyakarta dan Surakarta sebagai pusat dari kebudayaan Jawa (Kejawen).

Mayoritas penduduk Jawa Tengah adalah Suku Jawa. Jawa Tengah dikenal sebagai pusat budaya Jawa, di mana di kota Surakarta dan Yogyakarta terdapat pusat istana Kerajaan Jawa yang masih berdiri hingga kini. Selain itu ada pula warga Tionghoa-Indonesia, Arab-Indonesia dan India-Indonesia yang tersebar di seluruh Provinsi ini.

Suku minoritas yang cukup signifikan adalah Tionghoa, terutama di kawasan Perkotaan meskipun di daerah Pedesaan juga ditemukan. Pada umumnya mereka bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Komunitas Tionghoa sudah berbaur dengan Suku Jawa, dan banyak di antara mereka yang menggunakan Bahasa Jawa dengan logat yang kental. Logat kental mereka dapat dirasakan saat berada di kota Semarang serta kota Lasem yang berada diujung Timur laut Jawa Tengah, bahkan Lasem dijuluki Le Petit Chinois atau Kota Tiongkok Kecil, selain itu di beberapa kota-kota besar di Jawa Tengah ditemukan pula komunitas Arab-Indonesia. Mirip dengan komunitas Tionghoa, mereka biasanya bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Di daerah perbatasan dengan Jawa Barat terdapat pula orang Sunda yang sarat akan budaya Sunda, terutama di wilayah Cilacap, Brebes, dan Banyumas. Di pedalaman Blora (perbatasan dengan provinsi Jawa Timur) terdapat komunitas Samin.

Di Jawa Tengah terdapat kelompok etnis yang terdiri atas bangsa - bangsa berkewarganegaraan Cina, Arab, India, Pakistan, Eropa, dan sebagainya. Di Jawa Tengah selain kelompok etnis tersebut, juga ada kelompok-kelompok suku bangsa pendatang, seperti Madura, Kalimantan, Buton, Bugis, Sunda, dan sebagainya. Pada umumnya mereka bekerja sebagai nelayan di daerah mereka tinggal. Bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat di Jawa Tengah ada empat dialek; 1. Dialek Surakarta yang dijadikan sebagai bahasa Jawa standar; 2. dialek Banyumas; 3. Dialek Tegal; dan 4. Dialek Jepara.

Desa sebagai kesatuan masyarakat terkecil yang ditemui di masyarakat Jawa sebagai suatu Sistem kemasyarakatan. Desa-desa di Jawa umumnya dibagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan Dukuh, dan setiap Dukuh dipimpin oleh kepala Dukuh. Di dalam melakukan tugasnya sehari-hari, para pemimpin desa ini dibantu oleh para pembantu-pembantunya yang disebut dengan nama Pamong Desa.

Tidak ada mata pencaharian yang khas bagi masyarakat suku Jawa. Pada umumnya, orang Jawa Tengah bekerja pada segala bidang, terutama administrasi negara dan kemiliteran yang memang didominasi oleh orang Jawa, selain itu mereka bekerja pada sektor pelayanan umum, pertukangan, perdagangan dan pertanian dan perkebunan. Salah satu yang paling menonjol adalah sektor pertanian dan perkebunan dibandingkan mata pencaharian lain, karena seperti yang kita tahu, baik Jawa Tengah dan Jawa Timur banyak lahan-lahan pertanian yang beberapa cukup dikenal, karena memegang peranan besar dalam memasok kebutuhan nasional, seperti padi, tebu, dan kapas. Orang Jawa juga terkenal tidak memiliki bakat yang menonjol dalam bidang industri dan bisnis seperti halnya keturunan etnis Tionghoa, bahwa pemilik industri berskala besar di Indonesia, kebanyakan dimiliki dan dikelola oleh etnis Tionghoa.

Dari sekian banyak daerah di Jawa Tengah terdapat beberapa variasi dan perbedaan-perbedaan yang bersifat lokal dalam beberapa unsur kebudayaan, antara lain istilah teknis, dialek, bahasa, dan lain-lain. Apabila diteliti lebih lanjut, unsur-unsur kebudayaan tersebut masih menunjukkan satu pola atau sistem kebudayaan Jawa. Budaya Jawa termasuk unik karena membagi tingkat bahasa Jawa menjadi beberapa tingkat yaitu Ngoko, Madya dan Krama. Ada yang berpendapat budaya Jawa identik feodal dan sinkretik. Pendapat itu kurang tepat karena budaya feodal ada di semua negara termasuk Eropa. Budaya Jawa menghargai semua agama dan pluralitas sehingga dinilai sinkretik oleh budaya tertentu yang hanya mengakui satu agama tertentu dan sektarian.

Budaya Jawa juga menghasilkan agama sendiri yaitu Kejawen. Kejawen bagi masyarakat Jawa asli sudah hampir menjadi seperti agama tersendiri. Ajaran Kejawen pada dasarnya merupakan kompilasi dari Seni, Budaya, Adat ritual, Sikap sosial, serta berbagai pandangan filosofi lainnya yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa. Bagi masyarakat Jawa yang masih memegang teguh ajaran asli Kejawen, panutan ajaran ini menjadi nilai spiritualitas tersendiri. Masyarakat Jawa diantaranya juga memiliki kitab Kejawen yang disadur dari kitab-kitab karya para Mpu pada masa kerajaan Jawa. Kejawen juga memiliki arti spiritualis atau spiritualis suku Jawa, tetapi mayoritas orang Jawa sekarang menganut agama Islam dan sebagian kecil orang Jawa menganut agama Kristen atau Katolik. Dahulu orang Jawa menganut agama Hindu, Buddha dan Kejawen, bahkan orang Jawa ikut menyebarkan agama Hindu dan Buddha dengan sejumlah kerajaan Hindu-Buddha Jawa. Agama Hindu-Budha sendiri membawa pengaruh besar terhadap Pulau Jawa seperti adanya Candi Borobudur dan Candi Prambanan.

Bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan penduduk suku bangsa Jawa di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahasa Jawa, sebagai bahasa ibu dan bahasa pergaulan sehari-hari masyarakat suku Jawa, ternyata di dalamnya pun dikenal berbagai macam tingkatan dan undhak-undhuk basa. Sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu asing, mengingat beberapa bahasa lain yang berada dalam rumpun Austronesia pun dikenal undhak-undhuk dalam berbahasa. Seseorang ketika

berbicara selain harus memperhatikan kaidah-kaidah tata bahasa, juga masih harus memperhatikan siapa yang diajak berbicara. Berbicara kepada orang tua maupun kepada anak kecil atau yang seumuran. Kata-kata atau bahasa yang ditujukan pada orang lain inilah yang disebut Unggah-unghing bahasa.

b. Keragaman Budaya

Jawa Tengah merupakan salah satu daerah paling produktif di bidang kebudayaan, termasuk kesenian. Sistem kebudayaan timbul agar supaya manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup dan membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain, serta kemampuan manusia menciptakan benda dan sesuatu yang baru. Sistem peralatan hidup atau teknologi yang berkembang di Jawa Tengah terbagi menjadi 3 bagian yaitu, 1. sistem Bangunan, 2. sistem Transportasi, dan 3. sistem Logam.

Seni Bangunan, ada beberapa jenis rumah yang dikenal oleh masyarakat suku Jawa, di antaranya adalah rumah Limasan, rumah Joglo, dan rumah Serotong. Umumnya rumah di daerah Jawa menggunakan bahan batang bambu, glugu (batang pohon nyiur), dan kayu jati sebagai kerangka atau pondasi rumah, sedangkan untuk dindingnya, umum digunakan gedhek atau anyaman dari bilik bambu. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak juga yang telah menggunakan dinding dari tembok. Atap pada umumnya terbuat dari anyaman kelapa kering (blarak) dan banyak juga yang menggunakan genting.

Rumah Joglo yang merupakan ciri khas dari Jawa Tengah yang memiliki gaya arsitek sangat dinamis dengan lingkungannya, karena rumah Joglo memiliki beberapa tiang-tiang penyangga yang terbuat dari kayu jati. Rumah Joglo juga memiliki keunikan tersendiri seperti memiliki Pendhapa untuk menerima tamu atau hanya untuk kumpul keluarga. Di setiap sudut- sudut dindingnya pun biasa dihiasi dengan ukiran-ukiran yang menarik bila dilihat. Rumah Joglo adalah rumah yang beratap meru. Atap meru sering dibuat bersusun yang disebut "Tumpang" dengan "Saka guru" di dalamnya. Saka guru adalah empat buah tiang pokok di tengah-tengah banguan rumahJawa.

Transportasi, berdasarkan relief kapal di Candi Borobudur membuktikan bahwa sejak dulu nenek moyang orang Jawa telah menguasai teknik pembuatan kapal. Kapal yang diciptakan orang Jawa dikenal dengan nama Kapal Jung. Kapal Jung Jawa adalah teknologi kapal raksasa buatan orang Jawa. Alat transpotasi lainnya adalah Andong, Andong merupakan salah satu alat transportasi tradisional di Solo dan Yogyakarta dan daerah- daerah di sekitarnya, seperti Klaten, Karanganyar, Boyolali, Sragen, dan Sukoharjo. Keberadaan Andong sebagai salah satu warisan budaya Jawa memberikan ciri khas kebudayaan tersendiri yang hingga kini masih terus dilestarikan, khususnya di Solo. Keberadaan Andong di Solo difungsikan sebagai alat transportasi pengangkut barang-barang dagangan ibu-ibu dari pedesaan menuju pasar-pasar tujuan. Andong juga tidak jarang berfungsi sesuai dengan aslinya sebagai alat transportasi umum bagi masyarakat di Solodan sekitarnya, selain berfungsi sebagai media pengangkut barang daganganpasar.

Logam, teknologi logam sudah lama berkembang sejak awal Masehi diNusantara. Senjata Keris adalah salah satu contoh hasil kecanggihan teknologi penempaan logam di Jawa Tengah. Keris

merupakan senjata tradisional suku Jawa. Keris sendiri selain sebagai senjata tradisional suku Jawa juga menjadilambang kedaulatan beberapa raja-raja di kerajaan luar Jawa. Bagi orang Jawa, Keris tidaklah sesederhana hanya merupakan senjata saja. Keris lebih dari itu merupakan senjata pusaka yang diyakini oleh sebagai orang memiliki atau menyimpan kesaktian, oleh sebab itu Keris disebut juga sebagai ‘tosan aji’ (alat yang memiliki kesaktian).

Mahakarya yang sungguh mempesona adalah Batik. di Jawa Tengah, setiap daerah mempunyai corak Batik tulis yang berbeda-beda. Mereka mempunyai ciri khas batik sendiri. Selain Batik ada juga kesenian yang tak kalah luar biasa mempesona yaitu wayang kulit yang sudah diakui dunia sebagai warisan budaya dunia oleh Unesco. Ada juga tembang- tembang (lagu-lagu) Jawa yang diiringi oleh Gamelan (alat musik).

Ada sejumlah kesenian yang dihasilkan di Jawa Tengah yaitu, Seni Pahat, Seni Batik, Seni musik, Seni Tari, dan Seni Wayang dengan uraian sebagai berikut, 1. Seni Pahat di Jawa Tengah sebagian besar dihasilkan di Kabupaten Jepara. Seni pahat banyak digunakan untuk menghias/ mengukir perabot rumah tangga. Pahatan antik dari daerah Jepara dan sekitarnya banyak menggunakan kayu jati sebagai bahan bakunya, dengan gaya seni ukir yang luwes dan cindah; 2. Seni Batik di Jawa Tengah dihasilkan dengan corak Pesisiran dan Pedalaman. Corak Kain Pesisiran antara lain dihasilkan dari Pekalongan, dan Lasem, sedangkan kain bercorak Pedalaman dihasilkan antara lain dari Banyumas yang dikenal dengan corak Banyumas, dari Wonogiri dikenal dengan nama batik Wonogiren, batik dari Solo yang bercorak Mataram/Vorstenlanden; 3. Seni musik di Jawa Tengah dikenal dengan nama Gamelan. Orang Jawa menyebut tangga nada Gamelan disebut Raras artinya adalah hati atau rasa. Orang Jawa sering mengucapkan kata “raras” dengan “laras”. Ada dua macam “raras” Gamelan, yaitu raras “sledro” dan raras “pelog”; 4. Seni Tari, Tari dalam bahasa Jawa disebut dengan kata beksa; 5. Seni Wayang, Wayang dalam bentuk yang asli merupakan kreasi budaya orang Jawa yang berisi berbagai aspek kebudayaan Jawa.

c. Sejarah

- Sejarah Singkat Budaya

Provinsi Jawa Tengah telah melewati sejarah yang panjang, dari jaman Prasejarah hingga sekarang. Masa prasejarah di Jawa Tengah untuk dibuktikan sejak kapan timbulnya sangatlah sulit diterangkan, hal ini disebabkan masih terbatasnya data berupa artefak sebagai hasil budaya pada masa itu. Temuan artefak di Jawa Tengah untuk sementara tidak dapat diurutkan secara kronologis, karena artefak sebagai hasil budaya masa prasejarah diketemukan secara parsial pada tempat yang berbeda dan tidak kronologis karena masih banyak kekosongan temuan dari hasil budaya tersebut.

Asal-usul penghuni Jawa Tengah secara garis besar terdiri dari dua tahap kehidupan, yaitu tahap kehidupan pertama pada masa Plistosen dengan penghuninya manusia-manusia purba antara lain Pithecanthropus erectus dan Homo Soloensis (± 600.000 tahun yang lalu). Masa kehidupan yang kedua, ini diperkirakan pada masa Holosen ± 1500 tahun sebelum Masehi dengan kedatangan bangsa Deutro Melayu di Jawa Tengah, mereka menetap secara menyebar,

sehingga hasil kebudayaan yang dihasilkan dari manusia jenis ini pun ditemukan secara sporadis.

Pola kehidupan pada masa Prasejarah di Jawa Tengah, dilihat dari hasil artefak-artefak yang telah ditemukan membuktikan bahwa, pada masa itu kehidupan mereka tersebar tidak mengelompok di satu daerah saja. Hal ini bisa dibuktikan dari keberadaan Situs penemuan antara lain, di Kabupaten Kudus, Pati, Rembang, Tegal, Pemalang, Purbalingga, Karanganyar, Sragen, Banyumas dan daerah Jawa Tengah lainnya, sehingga boleh dikatakan pola kehidupan mereka menyebar mengikuti struktur daerah yang mereka huni. Penyelenggaraan hidup masyarakat Prasejarah Jawa Tengah dapat dilihat dari temuan peralatan hidup mereka yang disebut artefak, dari artefak itulah dapat diketahui bahwa masyarakat Prasejarah sudah mengenal bercocok tanam dan berburu binatang. Adapun temuan gua dibeberapa Situs di Jawa Tengah membuktikan bahwa masyarakat Jawa Tengah pada masa Prasejarah telah mengenal pola berlindung dan bertempat tinggal.

Kehidupan Sosial masyarakat Prasejarah Jawa Tengah dapat diketahui dari pola kehidupan sosial masyarakat sederhana di Indonesia yang masih ada, karena pola itu kemudian diwarisi turun temurun dari nenek moyang mereka. Adanya organisasi "Pedesaan" yang dahulu merupakan bentuk dari "Wanua", yaitu suatu pola pemerintahan yang terkecil kemudian pola itu berkembang menjadi pola Kerajaan, termasuk pengaruh setelah kedatangan bangsa India yang membawa agama baru, yaitu agama Hindu-Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha ke dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut seiring dengan waktu menggeser beberapa anasir kehidupan Prasejarah.

Pola religius dan alam pikiran masyarakat Jawa Tengah, yang diistilahkan dengan kepercayaan Animisme dan Dinamisme beranggapan bahwa semua benda yang ada di sekelilingnya itu bernyawa, dan yang bergerak dianggap hidup serta mempunyai kekuatan gaib. Di antaranya adalah roh nenek moyang yang masih berpengaruh dalam kehidupan, dan di antaranya berwatak baik dan berwatak jahat. Pola religius yang seperti ini sampai saat ini masih dapat dijumpai pada masyarakat terpencil, walaupun sudah mendapat pengaruh dari ajaran agama yang baru (Hindu, Buddha, Islam dan Kristen) serta ajaran-ajaran budi pekerti dari aliran penghayat kepercayaan yang lebih maju. Masyarakat Jawa Tengah pada masa Hindu-Buddha mengakui adanya kemanungan antara kehidupan para dewa (makro kosmos) dan alam manusia (mikro kosmos) dalam kehidupan religi.

Hasil budaya masyarakat Jawa Tengah dalam perjalanan sejarah sejak zaman Pra Sejarah dapat dibagi menjadi dua kelompok menurut jenisnya, yaitu kelompok pertama adalah monumen ritual yang berbentuk Punden Berundak, Situs Prasejarah, Menhir, Dolmen, Tempayan Kubur dan Kubur Prasejarah yang lain, sedangkan untuk kelompok yang kedua merupakan kelompok benda peralatan, terdiri dari Kapak Persegi, Perhiasan (manik-manik dan gelang batu), Gerabah, Kapak Perunggu, Nekara, dan alat-alat lainnya.

Kebudayaan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah mayoritas merupakan kebudayaan Jawa, namun terdapat pula kantong-kantong kebudayaan Sunda di wilayah sebelah Barat yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat terutama di Kabupaten Brebes dan

Kabupaten Cilacap. Jawa Tengah adalah Provinsi dimana budaya Jawa banyak berkembang karena di Jawa Tengah dahulu banyak Kerajaan yang berkuasa dan monument tinggalan dari kerajaan-kerajaan tersebut terlihat sampai sekarang diantaranya peninggalan berupa Candi-candi yang tersebar di Jawa Tengah.

Kebudayaan Jawa merupakan salah satu sosok kebudayaan yang tua. Kebudayaan Jawa mengakar di Jawa Tengah bermula dari kebudayaan nenek moyang yang bermukim di tepian Sungai Bengawan Solo pada ribuan tahun sebelum Masehi. Fosil manusia Jawa purba yang kini menghuni Museum Sangiran di Kabupaten Sragen, merupakan saksi sejarah, betapa tuanya bumi Jawa Tengah sebagai kawasan pemukiman yang dengan sendirinya merupakan suatu kawasan budaya. Dari kebudayaan Purba/ Prasejarah itulah kemudian tumbuh dan berkembang sosok kebudayaan Jawa klasik (masa Hindu Buddha) yang hingga kini terus bergerak maju menuju kebudayaan Indonesia.

Kata klasik ini berasal dari kata Clacius, yaitu nama orang yang telah berhasil menciptakan karya sastra yang mempunyai “nilai tinggi”, maka karya sastra yang tinggi nilainya hasil karya Clacius itu dinamakan “Clacici”. Sebenarnya Clacici adalah golongan Bangsawan, sedangkan Clacius termasuk golongan Ningrat, oleh karena itu hasil karya seni yang mempunyai nilai tinggi disebut “seni klasik”. Bengawan Solo bukan hanya terkenal dengan lagu ciptaan Gesang akan tetapi lebih daripada itu lembahnya terkenal sebagai tempat dimana banyak sekali ditemukan Fosil dan peninggalan awal sejarah kehidupan di atas bumi ini.

Manusia dan Kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang erat sekali, kedua-duanya tidak mungkin dipisahkan. Ada manusia ada Kebudayaan, tidak akan ada Kebudayaan jika tidak ada pendukungnya, yaitu Manusia. Akan tetapi Manusia itu hidupnya tidak berapa lama, ia lalu mati, maka untuk melangsungkan Kebudayaan, pendukungnya harus lebih dari satu orang, bahkan harus lebih dari satu turunan. Jadi harus diteruskan kepada anak cucu keturunan selanjutnya yang disebut dengan enkulturasikan atau pembelajaran dari satu generasi kegenerasi selanjutnya.

Di Jawa Tengah masih ada Kerajaan yang sampai sekarang berdiri tepatnya di kota Surakarta yang dikenal dengan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Budaya Jawa Tengah sungguh banyak mulai dari Wayang, Wayang orang, Ketoprak, Tari dan masih banyak lagi. Budaya Jawa yang berada di daerah Jawa Tengah merupakan budaya yang memiliki berbagai kebudayaan, mulai dari adat istiadat sehari-hari, kesenian, acara ritual, dan lain-lain. Kebudayaan Jawa klasik yang keagungannya diakui oleh dunia Internasional dapat dilihat pada sejumlah warisan sejarah yang berupa Candi, Stupa, bahasa, sastra, kesenian dan adat istiadat. Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Prambanan, Candi Dieng, Candi Gedongsongo dan Candi Sukuh serta candi lainnya merupakan warisan kebudayaan masa silam yang tak ternilai harganya. Teks-teks Sastra yang terpahat di batu-batu Prasasti, tergores di daun lontar dan tertulis di Kitab-kitab merupakan khasanah sastra Jawa klasik yang hingga kini tidak habis-habisnya dikaji para ilmuwan. Ada pulwarisan kebudayaan yang bermutu

tinggi dalam wujud seni tari, seni musik, seni rupa, seni pedalangan, seni bangunan (arsitektur), seni busana, adat istiadat, dan sebagainya.

Provinsi Jawa Tengah juga terkenal dengan sebutan "The Island of Temples", karena memang di Jawa Tengah bertebaran Candi-candi. Miniatur dari Stupa Borobudur, Candi Prambanan dan Candi Mendut ditampilkan pula di Padepokan Jawa Tengah. Padepokan Jawa Tengah juga merupakan tempat untuk mengenal seni bangunan Jawa yang tidak hanya berupa bangunan rumah tempat tinggal tetapi juga seni bangunan peninggalan dari jaman Sanjayawangça dan Syailendrawangça. Masyarakat Jawa Tengah sebagai ahli waris kebudayaan Jawa klasik bukanlah masyarakat yang homogen atau sewarna, melainkan sebuah masyarakat besar yang mekar dalam keanekaragaman budaya, hal itu tercermin pada tumbuhnya Wilayah-wilayah budaya yang pada pokoknya terdiri atas wilayah budaya Negarigung, wilayah budaya Banyumasan dan wilayah budaya Pesisiran.

Wilayah budaya Negarigung yang mencakup daerah Surakarta - Yogyakarta dan sekitarnya merupakan wilayah budaya yang bergayutan dengan tradisi Keraton (Surakarta dan Yogyakarta). Wilayah budaya Banyumasan menjangkau daerah Banyumas, Kedu dan Bagelen, sedangkan wilayah budaya Pesisiran meliputi daerah Pantai Utara Jawa Tengah yang memanjang dari Timur ke Barat.

Keragaman budaya tersebut merupakan kondisi dasar yang menguntungkan bagi mekarnya kreatifitas cipta, rasa dan karsa yang terwujud pada sikap budaya.

Di daerah Jawa Tengah segala macam bidang seni tumbuh dan berkembang dengan baik, dan hal ini dapat kita saksikan pada peninggalan-peninggalan yang ada sekarang. Provinsi Jawa Tengah yang merupakan satu dari sepuluh DTW (Daerah Tujuan Wisata) di Indonesia dapat dengan mudah dijangkau dari segala penjuru, baik darat, laut maupun udara. Dalam usaha memperkenalkan daerah Jawa Tengah yang kaya budaya dan potensi alamnya, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana provinsi-provinsi lain di Indonesia, mempunyai anjungan daerah di Taman Mini "Indonesia Indah" yang juga disebut "Anjungan Jawa Tengah". Anjungan Jawa Tengah Taman Mini "Indonesia Indah" merupakan "show window" dari daerah Jawa Tengah.

Anjungan Jawa Tengah di Taman Mini "Indonesia Indah" dibangun untuk membawakan wajah budaya dan pembangunan Jawa Tengah pada umunya. Bangunan induk beserta bangunan lain di seputarnya secara keseluruhan merupakan kompleks perumahan yang dinamakan "Padepokan Jawa Tengah", yang berarsitektur Jawa asli. Bangunan induknya berupa "Pendhapa Agung", tiruan dari Pendhapa Agung Istana Mangkunegaran di Surakarta, yang diakui sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa.

Sesuai dengan fungsinya Anjungan Jawa Tengah selalu memperlakukan kesenian-kesenian daerah yang secara tetap didatangkan dari Kabupaten-kabupaten/ Kotamadya di Provinsi Jawa Tengah di samping pergelaran kesenian dari sanggar-sanggar yang ada di Ibukota, dengan tidak meninggalkan keadiluhungan nilai-nilai budaya Jawa yang hingga kini masih tampak mewarnai berbagai aspek seni budaya itu sendiri, adat-istiadat dan tata cara kehidupan masyarakat Jawa Tengah.

Bangunan Joglo Pangrawit Apitan di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah terletak bersebelahan dengan sebuah panggung terbuka yang berlatar belakang sebuah bukit dengan bangunan Makara terbuat dari batu cadas hitam bertuliskan kata-kata “Ojo Dumeh” dalam huruf Jawa berukuran besar. Perkataan Ojo Dumeh mempunyai makna yang dalam, sebab artinya, “Jangan Sombong”, sebuah anjuran untuk senantiasa mampu mengendalikan diri, justru di saat seseorang merasa mempunyai keberhasilan. Di panggung inilah pengunjung dapat menyaksikan pergelaran acara khusus Anjungan yang biasanya merupakan acara-acara pilihan.

Budaya daerah merupakan faktor utama berdirinya kebudayaan nasional, maka segala sesuatu yang terjadi pada budaya daerah akan sangat mempengaruhi budaya nasional. Atas dasar itulah, kita semua mempunyai kewajiban untuk menjaga, memelihara dan melestarikan budaya baik budaya lokal atau budaya daerah maupun budaya nasional, karena budaya merupakan bagian dari kepribadian bangsa.

- Sejarah Singkat Wilayah Administratif

Jawa Tengah sebagai Provinsi dibentuk sejak zaman Hindia Belanda. Jawa Tengah hingga tahun 1905 terdiri atas lima (5) wilayah (Gewesten) yang dikenal dengan istilah Karesidenan yakni Semarang, Rembang, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan. Surakarta masih merupakan daerah swapraja kerajaan (Vorstenland) yang berdiri sendiri dan terdiri dari dua wilayah, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran, sebagaimana Yogyakarta. Masing-masing Gewest terdiri atas Kabupaten-kabupaten, dimana pada waktu itu Kudus Gewest juga meliputi Regentschap Tuban dan Bojonegoro (sekarang berada di Provinsi Jawa Timur). Gewesten diberi otonomi dan dibentuk Dewan Daerah setelah diberlakukannya Decentralisatie Besluit tahun 1905, selain itu juga dibentuk Gemeente (Kotapraja) yang otonom, yaitu Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga, dan Magelang.

Sejarah singkat wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah diawali sejak tahun 1930. Provinsi ditetapkan sebagai daerah otonom yang juga memiliki Dewan Provinsi (Provinciale Raad). Provinsi terdiri atas beberapa Karesidenan (Residentie), yang meliputi beberapa Kabupaten (Regentschap), dan dibagi lagi dalam beberapa Kawedanan (District). Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 5 Karesidenan, yaitu, Pekalongan, Kudus-Rembang, Semarang, Banyumas, dan Kedu.

Menyusul kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945 Pemerintah membentuk daerah swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran, dan dijadikan Karesidenan. Pada tahun 1950 melalui Undang-undang ditetapkan pembentukan Kabupaten dan Kotamadya di Jawa Tengah yang meliputi dua puluh sembilan (29) Kabupaten dan enam (6) Kotamadya. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 Desa/Kelurahan. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jawa Tengah juga terdiri atas tiga (3) kota administratif, yaitu Kota Purwokerto, Kota Cilacap, dan Kota Klaten, namun sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tahun 2001 kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah Kabupaten. Menyusul

otonomi daerah tiga (3) Kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang (dari Kota Magelang ke Mungkid), Kabupaten Tegal (dari Kota Tegal ke Slawi), serta Kabupaten Pekalongan (dari Kota Pekalongan ke Kajen). Penetapan Undang-undang tersebut hingga kini diperangati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, yakni tanggal 15 Agustus 1950.

Setelah diberlakukannya Decentralisatie Besluit tahun 1905, Gewesten diberi otonomi dan dibentuk Dewan Daerah, selain itu juga dibentuk Gemeente (kotapraja) yang otonom, yaitu Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga, dan Magelang. Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sejak tahun 1930 sebagai daerah otonom yang juga memiliki Dewan Provinsi (Provinciale Raad). Provinsi terdiri atas beberapa Karesidenan (Residentie), yang meliputi beberapa Kabupaten (Regentschap), dan dibagi lagi dalam beberapa Kawedanan (District). Provinsi Jawa Tengah terdiri atas lima (5) Karesidenan yaitu, Pekalongan, Jepara-Rembang, Semarang, Banyumas, dan Kedu.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan UUD 1945 untuk pertama kalinya oleh PPKI sebagai landasan konstitusional ketatanegaraan. Pada saat itu struktur dan sistem ketatanegaraan RI masih sangat sederhana bahkan banyak yang belum terbentuk kecuali Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 19 Agustus 1945 selanjutnya PPKI untuk sementara menetapkan berbagai hal tentang pemerintah daerah. Untuk sementara waktu, daerah negara Indonesia dibagi dalam delapan (8) Provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur.

Provinsi-Provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Daerah Provinsi dibagi dalam Keresidenan yang dikepalai oleh Residen, Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah (KND). Untuk sementara waktu kedudukan kota diteruskan sampai sekarang. Dari konfigurasi tersebut terlihat bahwa struktur dan sistem pemerintah daerah di Indonesia pada awal kemerdekaan masih sangat sederhana yaitu terdiri dari Provinsi, Keresidenan, Kooti, dan Kota ditambah KND.

2.1.24. Peraturan Tingkat Daerah Terkait Kebudayaan

a. Peraturan yang Berlaku

Provinsi Jawa Tengah belum begitu banyak memiliki peraturan terkait dengan kebudayaan, namun demikian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Daerah terkait dengan cagar budaya cagar budaya, Perda Nomor 10 tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Selain itu ada juga aturan lain tentang Bahasa Jawa berupa Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 430/9525 tertanggal 7 Oktober 2014, tentang penggunaan bahasa Jawa sebagai alat komunikasi lisan di lingkungan OPD provinsi Jawa Tengah dan di seluruh Kab/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Melalui edaran ini diharapkan Bahasa Jawa akan lebih membudaya dan biasa

digunakan oleh masyarakat terutama di lingkungan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di wilayah provinsi Jawa Tengah.

Disamping itu dalam rangka penguatan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa telah dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, yang dalam pelaksanaanya diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bahasa sastra dan Aksara Jawa Dalam rangka mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai perkembangan jaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia , maka melalui Peraturan Gubernur.

Sebagai upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dan untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia maka dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 tahun 2016 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya.

Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah sedang berproses menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah dilakukan beberapa kegiatan terkait dengan Pelindungan, pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan kebudayaan melalui beberapa kegiatan di Bidang Pembinaan Kebudayaan , baik itu terkait dengan Pengembangan Kesenian, Pelestarian Cagar Budaya maupun pembinaan Sejarah dan Nilai Tradisi.

2.1.25. Ringkasan Proses Penyusunan PPKD

a. Tim Penyusun

Dalam rangka pemajuan kebudayaan dan penyusunan kebijakan Srtategis bidang kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu adanya pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Jawa Tengah yang telah disusun tahun 2018. Sesuai Amanat Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, dimana Pokok Pikiran Kebudayaan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 harus disusun kembali karena telah berusia 5 (lima) tahun di tahun 2023 ini. PPKD disusun kembali oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi di bidang objek pemajuan kebudayaan, maka dari itu pula tim penyusun PPKD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 ikut dirubah sesuai ketentuan normative yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah serta unsur ahli yang mewakili masyarakat. Unsur pemerintah daerah dipilih dari organisasi perangkat daerah yang membidangi bidang kebudayaan (Dinas yang membidangi kebudayaam), perencanaan dan Keuangan, sedangkan unsur para ahli dipilih dari para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan di Provinsi. Sedangkan unsur para

ahli dipilih dari para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan di provinsi yang terdiri dari unsur pendidik atau akademisi di bidang kebudayaan, budayawan atau seniman, dan ahli serta praktisi Cagar Budaya. Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah diperbarui dan disahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah dengan Susunan Tim sebagai berikut:

b. Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Pokok Pikiran Daerah Jawa Tengah

NO.	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab Tim Penyusun
2.	Sekretaris Daerah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Ketua Tim Penyusun
3.	Kepala Bappeda	Bappeda Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Tim Penyusun
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tim Penyusun
5.	Kepala BPKAD	BPKAD Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tim Penyusun
6.	Kepala Biro Adm. Bangda	Biro Adm. Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tim Penyusun
7.	Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tim Penyusun
8.	Sub Koordinator Seksi Sejarah dan Tradisi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tim Penyusun
9.	Sub Koordinator Seksi Kesenian dan Pengembangan Bahasa Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tim Penyusun
10.	Sub Koordinator Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tim Penyusun
11.	Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si.	Budayawan	Anggota Tim Penyusun
12.	Prof. Dr. Alamsyah, M.Hum.	Universitas Diponegoro/ Akademisi	Anggota Tim Penyusun
13.	Drs. Tri Hartono, M.Hum.	Praktisi Cagar Budaya	Anggota

			Tim Penyusun
14.	Basuki Teguh Yuwono, S.Sn., M.Sn.	Universitas Negeri Surakarta/ Akademisi/ Budayawan	Anggota Tim Penyusun
15.	Wardiyah, S.S., M.A.	Balai Pelestarian Wilayah X/Pendamping Karesidenan Surakarta	Anggota Tim Penyusun
16.	Kukuh Septo Wiyamto	-	Koordinator Tim Input
17.	Yulvian Prastyanto, S. Ark.	-	Anggota Tim Input
18.	Diar Bagus Yurianto, S. Ark.	-	Anggota Tim Input
19.	Nabila Maharani Anis, S.Ark.	-	Anggota Tim Input
20.	Rizal Yoga Prayoga, S.S.	-	Anggota Tim Input
21.	Muhammad Azzam Al-Haq	-	Anggota Tim Input
22.	Siti Nur Aqidatul Izza, S.Ark.	-	Anggota Tim Input
23.	Jalu Naufal Falah, S.Ark.	-	Anggota Tim Input
24.	Lazuardi Ramadhan, S.Ark.	-	Anggota Tim Input
25.	Unggul Satrio Wicaksono, S.Ark.	-	Anggota Tim Input
26.	Ahmad Ihksan Mubarok, S.Ant.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Kesekertariatan
27.	Indah Purnastuti, S.S.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekertariatan
28.	Danang Jatikumoro	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekertariatan
29.	Andhika Setya Mahardhika	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekertariatan

30.	Abdul Hakim Pranata Putra	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekertariatan
31.	Siswani	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekertariatan
32.	Damar Sosa Wibisono	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekertariatan
33.	Ida Suryani	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekertariatan
34.	Anisa Desihapsari	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekertariatan
35.	Filia Handy Pratana	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekertariatan
36.	Regina Singes Tecia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekertariatan
37.	Oky Silvia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekertariatan
38.	Sri Mawarsih	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekertariatan
39.	Meta Astuti Handayani	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekertariatan
40.	Trimo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekertariatan
41.	Kristanto	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekertariatan

c. Proses Pendataan

Dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, proses pendataan yang dilakukan Tim PPKD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan metode pengumpulan data yang diperoleh dari laman web : <https://ppkd.kemdikbud.go.id/>, <https://dapobud.kemdikbud.go.id/>, rekap data OPK dan CB dari Kabupaten/Kota yang dikumpulkan ke Provinsi serta data - data manual yang dimiliki oleh Provinsi. Selain ditambah dengan diskusi melalui FGD (Focus Discussion Group) Evaluasi PPKD Kabupaten/Kota dan FGD Pemutakhiran Data PPKD Provinsi Jawa Tengah. Ada juga data yang diperoleh dari hasil tanya jawab dengan narasumber (Setditjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Ditjen Bina Bangda Kemendagri, BPK Wilayah X Kemendikbudristek, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Surakarta). Peserta FGD Pemutakhiran Data PPKD Provinsi Jawa Tengah berjumlah 100 orang. Focus Group Discussion melibatkan 35 Kabupaten/Kota yang yang membida Bidang Kebudayaan dan yang membida perencanaan pembangunan dengan melibatkan pula para tokoh budaya, pelaku seni dan budaya, serta praktisi, ahli cagar budaya, bidang persekolahan, pelestari dan akademisi yang dianggap memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan 10 objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

Proses pendataan OPK dan CB dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui laman web <https://dapobud.kemdikbud.go.id/> dan di unduh, disajikan dan dianalisis oleh Tim Penyusun PPKD yang dibantu oleh Tim Input dan Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pendataan di masing-masing kabupaten atau kota dan terkumpul 35 kabupaten/kota.

Selain data 10 OPK dan CB dilakukan tambahan kajian terhadap naskah PPKD dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang dilakukan oleh Tim Evaluasi. Hasil kajian ini kemudian dipaparkan untuk memantik diskusi dari Kabupaten/Kota dan membuat komitmen untuk Pemutakhiran PPKD. Selanjutnya hasil kesepakatan atas kajian evaluasi yang sudah disarikan di berikan ke Tim Penyusun PPKD Provinsi Jawa Tengah sebagai masukan untuk mewarnai PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.

Setelah data dari 35 kabupaten/kota terkumpul, kemudian dilakukan inventarisasi terhadap 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya di Jawa Tengah yang meliputi OPK Manuskrip, Tradisi lisan, Adat istiadat, Ritus, Pengetahuan tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, serta Cagar Budaya yang meliputi benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan. Setelah proses pendataan dilakukan, proses selanjutnya adalah mencari permasalahan terhadap OPK dan CB tersebut. Tahapan selanjutnya adalah memberikan rekomendasi terhadap pengembangan OPK yang terdapat di Jawa Tengah. Dari proses pendataan, inputan yang terbanyak adalah cagar budaya.

d. Proses Penyusunan Masalah dan Rekomendasi

Dalam proses perumusan masalah dan rekomendasi, tim penyusun, tim evaluasi dan tim pelaksana teknis serta tim secretariat melakukan rapat koordinasi yang diarahkan oleh Kabid Pembinaan Kebudayaan. Rangkuman permasalahan yang ada dari Kabupaten/Kota hasil rapat diangkat menjadi topik diskusi dengan narasumber dari Setditjen Kebudayaan, Ditjen Bina

Bangda, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Surakarta. Selanjutnya setelah mendapat masukan dari diskusi, permasalahan umum ini dirincikan untuk mendapatkan akar permasalahannya berupa pendataan.

Pada proses perincian inilah muncul mengapa OPK dan CB banyak yang belum didata, sulit dicari di lapangan, atau akan punah. Kemudian dari pendataan berkembang permasalahannya, yang berfokus pada 4 (empat) hal: Pelindungan, Pengembangan, Pembinaan, dan pemanfaatan untuk setiap OPK dan CB. Proses Penyusunan masalah terkait 4 (empat) hal tersebut dilakukan dengan FGD kelompok kecil yang melibatkan seluruh peserta FGD pemutakhiran data. Setelah proses penyusunan masalah dilakukan maka tahap selanjutnya adalah menyusun rekomendasi terhadap setiap objek pemajuan kebudayaan yang meliputi Manuskrip, Tradisi lisan, Adat istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, dan Cagar Budaya. Rekomendasi tersebut dibuat berdasarkan masalah yang muncul dilapangan. Setelah rekomendasi disusun, tahapan selanjutnya adalah menetapkan Tujuan, Sasaran, Tahapan Kerja, dan Indikator Capaian.

Hasil FGD tersebut diisikan kedalam matriks. Setelah teriisi semua, matriks tersebut kemudian diplenokan untuk mendapatkan validasi dari kabupaten/kota. Agar apa yang menjadi masalah dengan rekomendasi yang diberikan tepat sasaran dan bisa terselesaikan. Satu hal yang sangat diperhatikan agar terselesaikannya masalah tersebut adalah terakomodirnya PPKD dalam RPJMD sehingga ada realisasi sebagai bentuk rencana aksi.

e. Catatan Evaluasi atas Proses Penyusunan

Berdasarkan catatan evaluasi atas Proses Penyusunan dilakukan berdasarkan 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya di Jawa Tengah yang meliputi manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional dan cagar budaya. Manuskrip yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah cukup beragam, sebagian besar menggunakan Bahasa Jawa dan Arab. Berkaitan dengan tradisi lisan menunjukkan mayoritas tradisi lisan tersebut berjenis legenda dan cerita rakyat. Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat berkaitan dengan tradisi lisan adalah belum ada mekanisme terpadu dalam inventarisasi, dokumentasi, pengembangan dan pemanfaatan tradisi lisan secara sistematis dan berkelanjutan serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Adapun adat istiadat oleh generasi muda dianggap sebagai sesuatu yang tidak moderen, irrasional, dan ribet sehingga perlu mensosialisasikan nilai-nilai tradisi adat istiadat, terutama kepada generasi muda yang dikemas dalam bentuk kurikulum muatan lokal sekolah.

Objek bahasa menunjukkan bahwa belum optimalnya inventarisasi, pemeliharaan dan publikasi secara terpadu di bidang bahasa. Berkaitan dengan seni belum adanya regulasi tentang seni kurangnya data seni yang akurat. Untuk Objek ritus, sebagian masyarakat menganggap sesuatu yang musyrik dan ribet. Oleh karena itu, perlu disosialisasikan nilai-nilai ritus, terutama kepada generasi muda yang dikemas dalam bentuk kurikulum muatan lokal sekolah. Untuk OPK Olahraga tradisional sebagian besar olahraga ini sudah tidak dikenal oleh masyarakat terutama generasi muda. Generasi muda lebih tertarik dengan olahraga yang lebih popular yang sering dilihat di media massa/sosial. Berkaitan dengan OPK permainan rakyat adalah semakin tidak

dikenal oleh masyarakat karena tidak ada pengenalan dari generasi terdahulu/pegawai, ketertarikan terhadap permainan modern dan bersifat individual, terkendala oleh sarana dan prasarana. Adapun OPK pengetahuan tradisional masih belum terinventarisasi dengan baik terutama yang berkaitan dengan warisan leluhur. Untuk teknologi tradisional, dilihat dari aspek pelindungan terlihat bahwa inventarisasi dan identifikasi data yang berkaitan dengan teknologi tradisional masih belum maksimal. Berkaitan dengan cagar budaya, yang terinventarisasi saat ini sejumlah 15.882 dan 821 CB Nasional, yang terdiri atas benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya.

BAB III

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

III.1. Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Jumlah SMK bidang kebudayaan dikelompokkan menjadi 8 jenis, yaitu Perhotelan, Boga, Kecantikan, Kriya, Seni, Partiseri, Kepariwisataan dan Busana. SMK Jurusan Perhotelan terdapat 40 Sekolah. SMK Jurusan Boga terdapat 50 sekolah, SMK Jurusan Kriya terdapat 21 Sekolah, SMK Jurusan Kecantikan terdapat 31 Sekolah, SMK Jurusan Kepariwisataan terdapat 14, SMK Jurusan Busana terdapat 197 Sekolah.

Dari data kuantitatif lembaga pendidikan menengah bidang kebudayaan tersebut, baik lembaga pendidikan menengah negeri maupun swasta dapat diketahui bahwa lembaga pendidikan ini memberikan kontribusi bagi eksistensi pemajuan kebudayaan di Jawa Tengah.

Tabel 10. Beberapa Contoh Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan

(Sumber: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah No. 420/03574 Tentang Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan TA 2023/2024 Diakses 18 Desember 2023)

NO	KOTA/KAB	NAMA SEKOLAH	Kurikulum 2013		Kurikulum Merdeka		
			Perdijen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/KK/2018		Keputusan Kepala BSKAP No.024/H/KR/2022		Bidang Keahlian
			Bidang Keahlian	Kompetensi Keahlian Awal	Konsentrasi Keahlian	Program Keahlian	
8	Kota Surakarta	SMK Negeri 8 Surakarta	9. Seni dan Industri Kreatif	9.4.1 Seni Tari	10.4.2 Seni Tari	10.4 Seni Pertunjukan	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.3.2 Seni Musik Populer	10.4.1 Seni Musik	10.4 Seni Pertunjukan	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.5.1 Seni Karawitan	10.4.3 Seni Karawitan	10.4 Seni Pertunjukan	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.6.1 Seni Pedalangan	10.4.4 Seni Pedalangan	10.4 Seni Pertunjukan	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.3. Multimedia	10.2.1. Desain Komunikasi Visual	10.2. Desain Komunikasi Visual	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.8.2 Produksi dan Siaran Program Televisi	10.5.2 Produksi dan Siaran Program Televisi	10.5 Broadcasting dan Perfilman	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.4.2 Penataan Tari	10.4.2 Seni Tari	10.4 Seni Pertunjukan	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.5.2 Penataan Karawitan	10.4.3 Seni Karawitan	10.4 Seni Pertunjukan	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
9	Kota Surakarta	SMK Negeri 9 Surakarta	3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.2 Teknik Komputer dan Jaringan	4.2.1 Teknik Komputer dan Jaringan	4.2 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	4. Teknologi Informasi
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.1.1 Seni Lukis	10.1.1 Seni Lukis	10.1 Seni Rupa	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.1.3 Desain Komunikasi Visual	10.2.1 Desain Komunikasi Visual	10.2 Desain Komunikasi Visual	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.2.1 Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	10.3.1 Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	10.3 Desain dan Produksi Kriya	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.2.4 Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan	10.3.4 Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan	10.3 Desain dan Produksi Kriya	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.2.5 Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	10.3.5 Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	10.3 Desain dan Produksi Kriya	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.1.5 Animasi	10.6.1 Animasi	10.6 Animasi	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			8. Pariwisata	8.4.1 Tata Busana	10.7.1 Desain dan Produksi Busana	10.7 Busana	10. Seni dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/03574 Tentang Konsentrasi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2023/2024 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Jumlah SMK bidang kebudayaan dikelompokkan menjadi 8 jenis, yaitu Perhotelan, Boga, Kecantikan, Kriya, Seni, Partiseri, Kepariwisataan dan Busana. SMK Jurusan Perhotelan terdapat 58 Sekolah. SMK Jurusan Boga / kuliner terdapat 83 sekolah, SMK Jurusan Kriya / seni terdapat 14 Sekolah, SMK Jurusan Kecantikan terdapat 26 Sekolah, SMK Jurusan Kepariwisataan terdapat 19, SMK Jurusan Busana terdapat 220 Sekolah.

III.2. Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan

Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri Bidang Kebudayaan di Jawa Tengah terdapat 11 Perguruan Tinggi, yaitu UNDIP, UNNES, UNS, UNSOED, ISI Surakarta, UIN Walisongo Semarang, UIN Raden Mas Said Surakarta, UIN Salatiga, IAIN Kudus, UNTIDAR, UIN Purwokerto. Selain itu, terdapat Lembaga Pendidikan Swasta Bidang kebudayaan di antaranya, UPGRIS, UNISULA, STIPAR, STIKUBANK, USM, UNSAHID, UKSW, UNIVET, dan lain-lain. Dari gambaranini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah banyak lembaga pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta yang memberikan kontribusi terhadap pemajuan kebudayaan

Perguruan Tinggi	Fakultas	Program Studi
Universitas Diponegoro	Fakultas Ilmu Budaya	1. Sejarah 2. Antropologi Sosial
Universitas Negeri Semarang	Fakultas Bahasa dan Seni	1. Pendidikan Seni Rupa 2. Seni Rupa 3. Pendidikan Seni Musik 4. Pendidikan Seni Tari 5. Pendidikan Bahasa Jawa 6. Sastra Jawa
Institut Seni Indonesia Surakarta	Fakultas Seni Pertunjukan	1. Seni Karawitan 2. Seni Pedalangan 3. Tari 4. Etnomusikologi 5. Teater
	Fakultas Seni Rupa dan Desain	1. Kriya 2. Seni Murni 3. Desain Mode Batik 4. Senjata Tradisional Keris

Gambar 11. Contoh Program Studi Bidang Kebudayaan di Lembaga atau Perguruan Tinggi Jawa Tengah

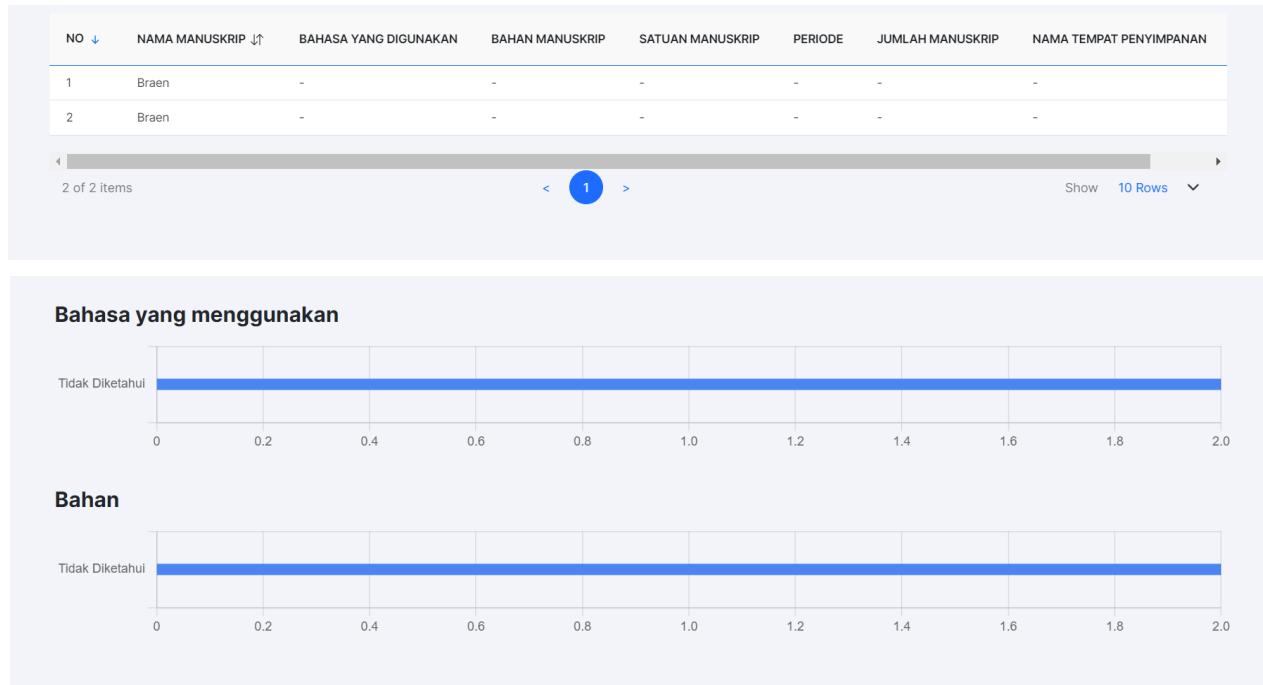
Berdasarkan data dari website LDDIKTI VI, beberapa perguruan tinggi khususnya lembaga swasta yang memiliki program studi di bidang kebudayaan antara lain UNISSULA, UPS Tegal, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Universitas Widya Dharma, UNISBANK, dan Universitas Muria Kudus. Website LDDIKTI VI hanya mencantumkan Perguruan Tinggi Swasta sehingga untuk mencari data Perguruan Tinggi Negeri tidak ditemukan.

BAB IV

DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

IV.1. Manuskrip

Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan Manuskrip 2023

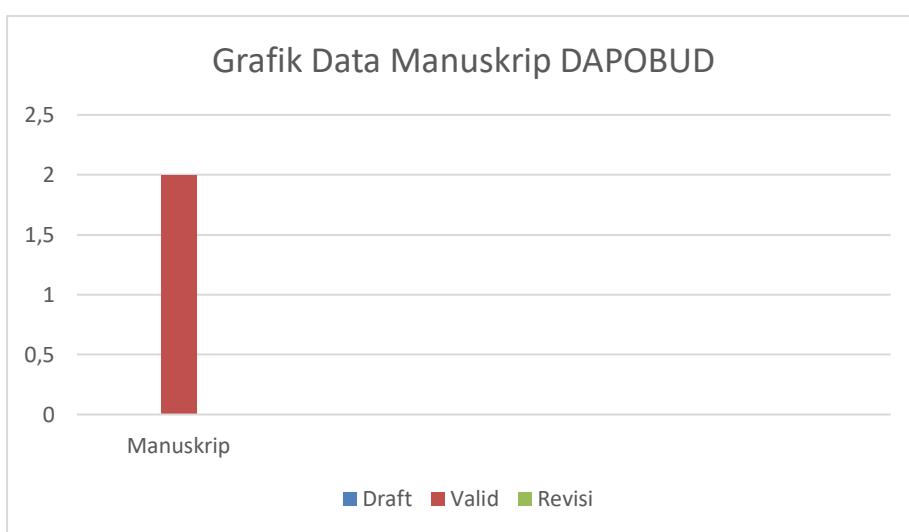


Gambar 1 Daftar Manuskrip; Grafik Bahasa dan Bahan yang digunakan

(sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/manuskrip/> Diakses 28 Desember 2023)

Tabel 4.1 Daftar Manuskrip DAPOBUD

No.	Kategori	Status			Jumlah
		Draft	Valid	Revisi	
1	Manuskrip		2		2
				Total	2

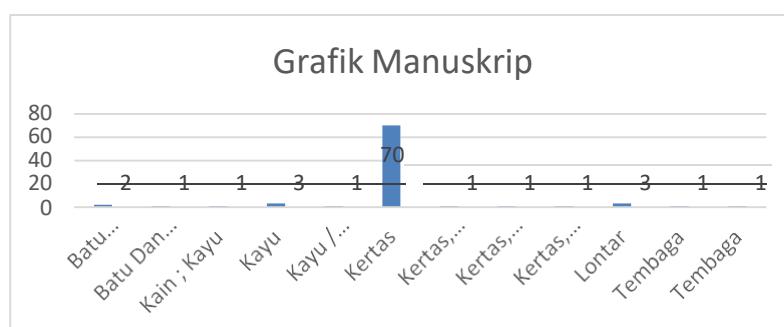


(Sumber: <https://app.dapobud.kemdikbud.go.id/pendataan/opk/> Diakses 28 Desember 2023)
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Manuskrip yang ada di Jawa Tengah dilihat dari bahan terdiri atas :

BAHAN	JUMLAH
Batu Andesit	2
Batu Dan Tembaga	1
Kain ; Kayu	1
Kayu	3
Kayu / Kulit / Kertas	1
Kertas	70
Kertas, Kulit (Tidak Di Publikasikan)	1
Kertas, Kulit, Lontar	1
Kertas, Lontar	1
Lontar	3
Tembaga	1

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa manuskrip yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah dilihat dari bahan cukup beragam, namun yang dominan adalah kertas sejumlah 70 buah.

Manuskrip yang ada di Jawa Tengah dilihat dari bahasa terdiri atas:

Bahasa	Jumlah
Mandarin	2
Arab	76
Arab dan Jawa	30
Jawa	44
Jawa Dan Belanda	4
Jawa Kuno	8

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasar data di atas menunjukkan bahwa manuskrip yang terdapat di Jawa Tengah sebagian besar menggunakan Bahasa Arab, kemudian Bahasa Jawa dan Arab Jawa. Berdasarkan data yang ada, terdapat data yang tidak dapat dikategorikan manuskrip karena sudah tercetak dan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Belanda. Mayoritas manuskrip yang berbahasa Arab menunjukkan bahwa manuskrip- manuskrip itu berasal dari periode pengaruh Kebudayaan Islam. Hal ini bisa dipahami karena data-data yang masuk sebagian besar berasal dari Kota dan Kabupaten di pantai Utara Jawa Tengah.

IV.2. Tradisi Lisan

Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan Tradisi Lisan 2023

NO ↓	NAMA CERITA RAKYAT ↓↑	ETNIS PENUTUR	KATEGORI CERITA RAKYAT	MEDIA PENYAJIAN
1	Geguritan Surakarta	-	-	-
2	Geguritan Surakarta	-	-	-
3	Braen	-	-	-
4	Braen	-	-	-
5	Jembul Tulakan	-	-	-
6	Labuhan Ageng Pantai Sembukan	-	-	-
7	Labuhan Ageng Pantai Sembukan	-	-	-
8	Jembul Tulakan	-	-	-
9	Suran Tutup Ngisor Kabupaten Magelang	-	-	-
10	Manten Kaji	-	-	-

10 of 21 items

< 1 2 3 >

Show 10 Rows ▾

Etnis yang menggunakan



Jenis



Gambar 2 Daftar Tradisi Lisan Cerita Rakyat; Jenis dan Etnis yang menggunakan

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/tradisi-lisan/> Diakses 27 Desember 2023)

NO ↓	NAMA ↓↑	ETNIS PENUTUR	JENIS
1	Braen	-	-
2	Braen	-	-
3	Langgam Jawa	-	-
4	Geguritan	-	-
5	Santiswara Larasmadya	-	-

5 of 5 items

< 1 >

Show 10 Rows ▾

Etnis penutur



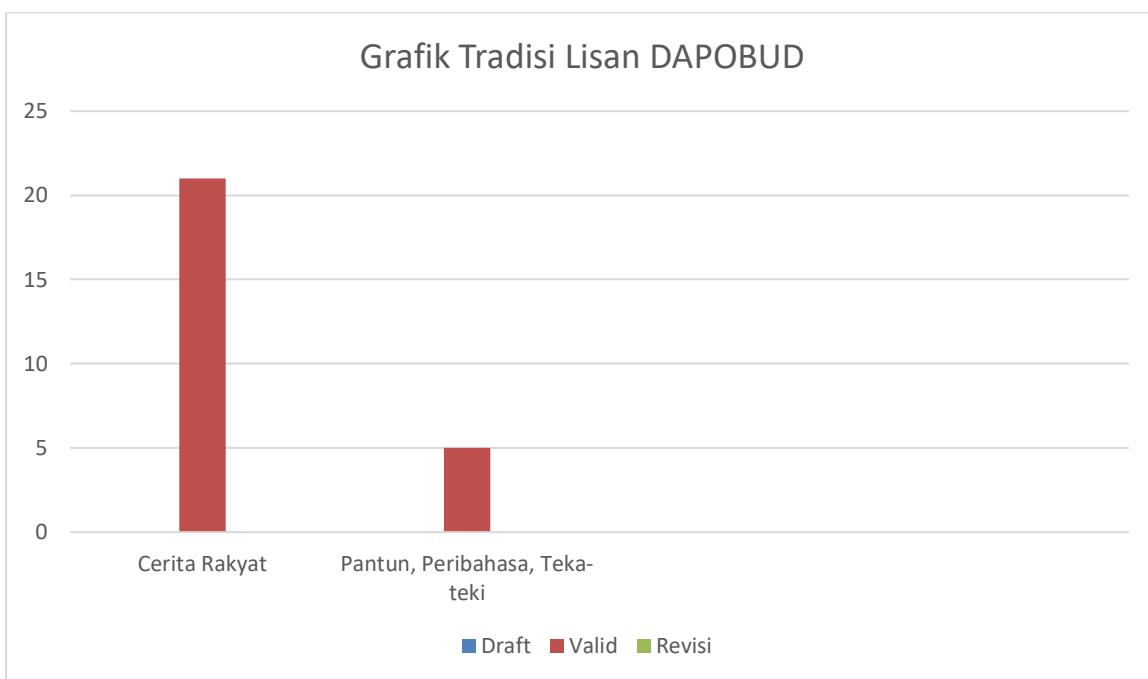
Jenis



Gambar 3 Daftar Tradisi Lisan Pantun, Peribahasa, dan Teka-teki; Etnis Penutur dan Jenisnya
 (Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/tradisi-lisan/> Diakses 27 Desember 2023)

Tabel 4.2 Daftar Tradisi Lisan DAPOBUD

No.	Kategori	Status			Jumlah
		Draft	Valid	Revisi	
1	Cerita Rakyat		21		
2	Pantun, Peribahasa, Teka-teki		5		
				Total	26



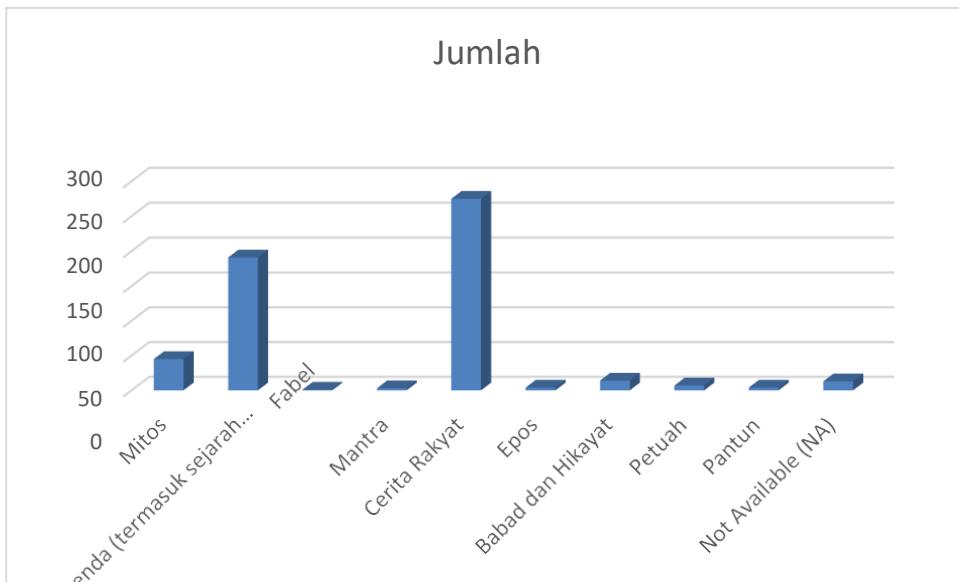
(Sumber: <https://app.dapobud.kemdikbud.go.id/pendataan/opk/> Diakses 28 Desember 2023)

Tradisi Lisan yang ada di Jawa Tengah terdiri dari;

Kategori kecil	Jumlah
Mitos	45
Legenda (termasuk sejarah lisan)	191
Fabel	1
Mantra	3
Cerita Rakyat	275
Epos	4
Babad dan Hikayat	14

Petuah	7
Pantun	4
Not Available (NA)	13

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut James Danandjaja, folklor Indonesia dapat dikelompokkan menjadi: Folklor Murni Lisan, Folklor Setengah Lisan, dan Folklor Bukan Lisan. Di dalam borang ini, yang dimaksud dengan Tradisi Lisan merujuk pada pendapat James Danandjaja adalah Folklor yang Murni Lisan, yang terdiri atas:

1. Dongeng
2. Ungkapan tradisional
3. Pertanyaan tradisional
4. Bahasa rakyat
5. Nyanyian rakyat

Berdasarkan pendapat Danandjaja maka kompilasi data yang masuk dari kabupaten kota sebagai berikut:

Jenis	Jumlah
Dongeng	530
Ungkapan Tradisional	4
Pertanyaan Tradisional	0
Bahasa Rakyat	0
Nyanyian Rakyat	0
Not Available (NA)	23

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas tradisi lisan yang ada di Jawa Tengah berjenis dongeng. Ada data-data yang sulit untuk dipastikan masuk dalam kategori-kategori di atas sehingga dimasukkan ke dalam kategori *not available*.

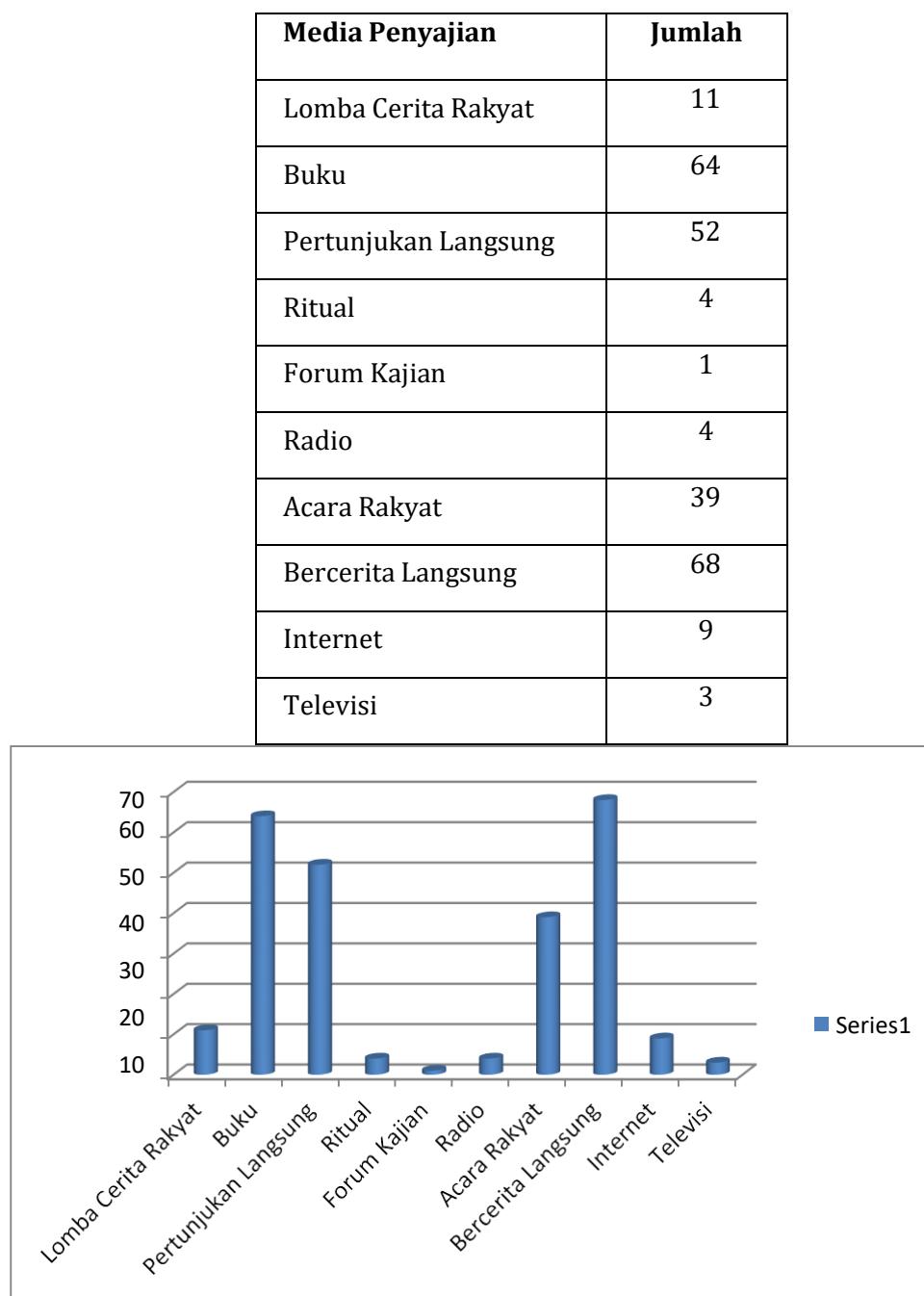
Tradisi Lisan yang ada di Jawa Tengah dilihat dari etnis terdiri dari :

Etnis	Jumlah
Jawa	361
Sunda	2
Jawa, Thionghoa	2
Jawa; Sunda	2
Jawa; Cina	2
Sunda	1
Not Available	29
	399

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan data di atas, etnis yang mendominasi adalah etnis Jawa dan data yang tidak mencantumkan kolom etnis dikategorikan dalam not available.

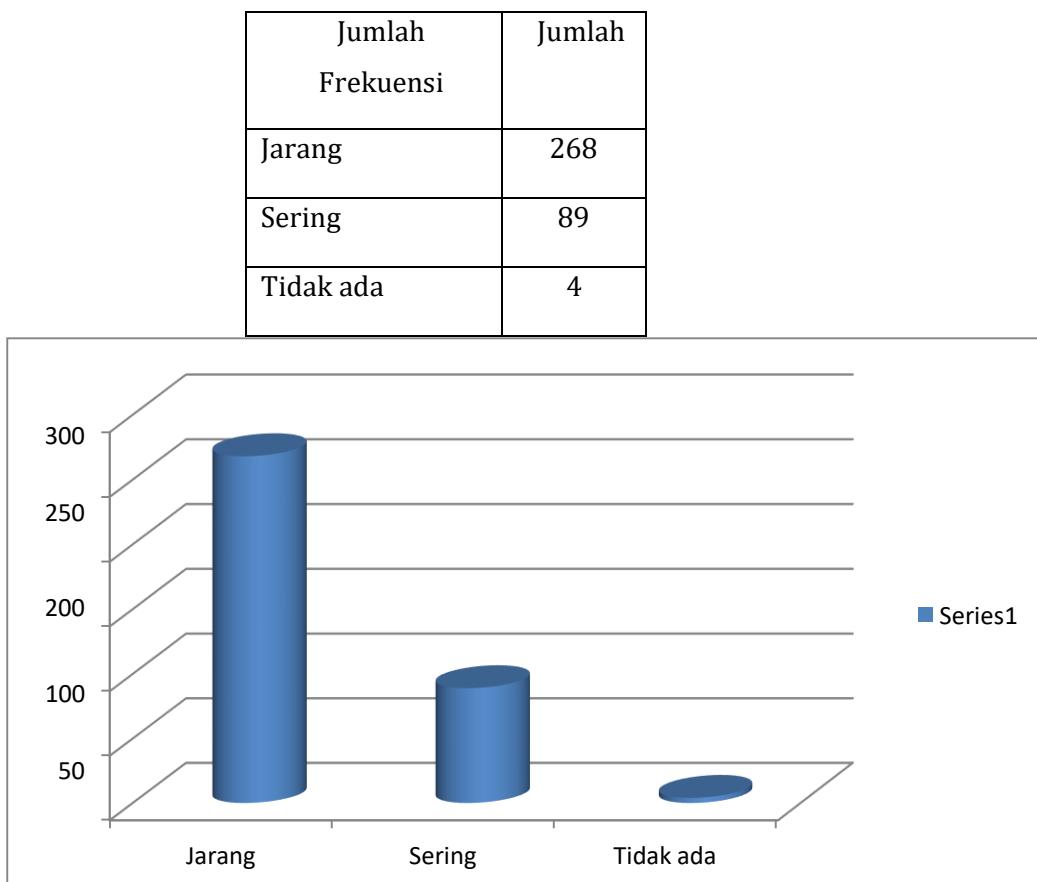
Tradisi Lisan yang ada di Jawa Tengah dilihat dari MediaPenyajian terdiri atas:



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Dilihat dari media penyajian, data yang ada menunjukkan bahwa penyajian dengan cara bercerita langsung menduduki posisi tertinggi, kemudian penerbitan dalam buku dan pertunjukan langsung. Dari data yang diperoleh, terdapat beberapa tradisi lisan yang disajikan melalui lebih dari satu media. Perbedaan jumlah antara jumlah media penyajian dan jumlah data tradisi lisan disebabkan banyaknya dinas kabupaten/kota yang tidak mengisi data.

Tradisi Lisan yang ada di Jawa Tengah dilihat dari Frekuensi Pelaksanaan terdiri atas:



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Sulit untuk membedakan frekuensi pelaksanaan pada masing-masing jenis tradisi lisan karena antara yang sering dituturkan dengan yang jarang dituturkan berasal dari jenis yang sama. Namun ada juga jenis tradisi lisan yang memang tidak pernah dituturkan atau dipentaskan.

IV.3. Adat Istiadat

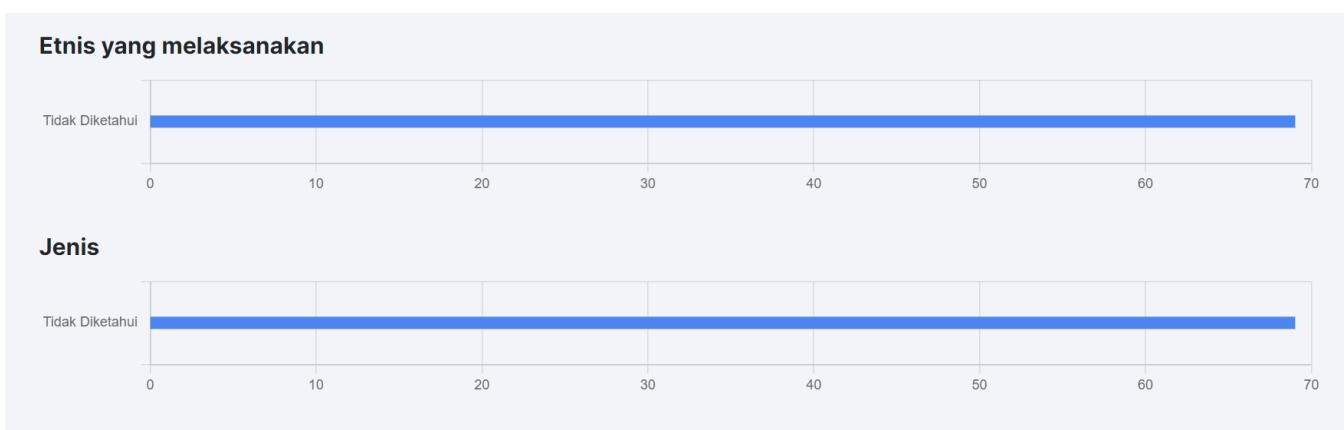
Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan Adat Istiadat 2023

NO ↓	NAMA ADAT ISTIADAT ↓↑	APAKAH MASIH DIGUNAKAN	ETNIS YANG MELAKSANAKAN	JENIS ADAT ISTIADAT
1	Jamasan Meriam Nyai Setomi	-	-	-
2	Larung Langse Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	-	-	-
3	Tingalan Jumenengan Dalem Sahandap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Susuhunan Paku Buwono Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	-	-	-
4	Tingalan Jumenengan Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Jumeneng Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Mangkunagoro Puro Mangkunegaran	-	-	-
5	Grebeg Syawal Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	-	-	-
6	Jamasan Meriam Nyai Setomi	-	-	-
7	Upacara Adat Dandangan Kudus	-	-	-
8	Larung Langse Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	-	-	-
9	Tingalan Jumenengan Dalem Sahandap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Susuhunan Paku Buwono Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	-	-	-
10	Jamasan Pusaka Keris Cintoko	-	-	-

10 of 69 items

< 1 2 3 4 5 ... 7 >

Show 10 Rows ▾

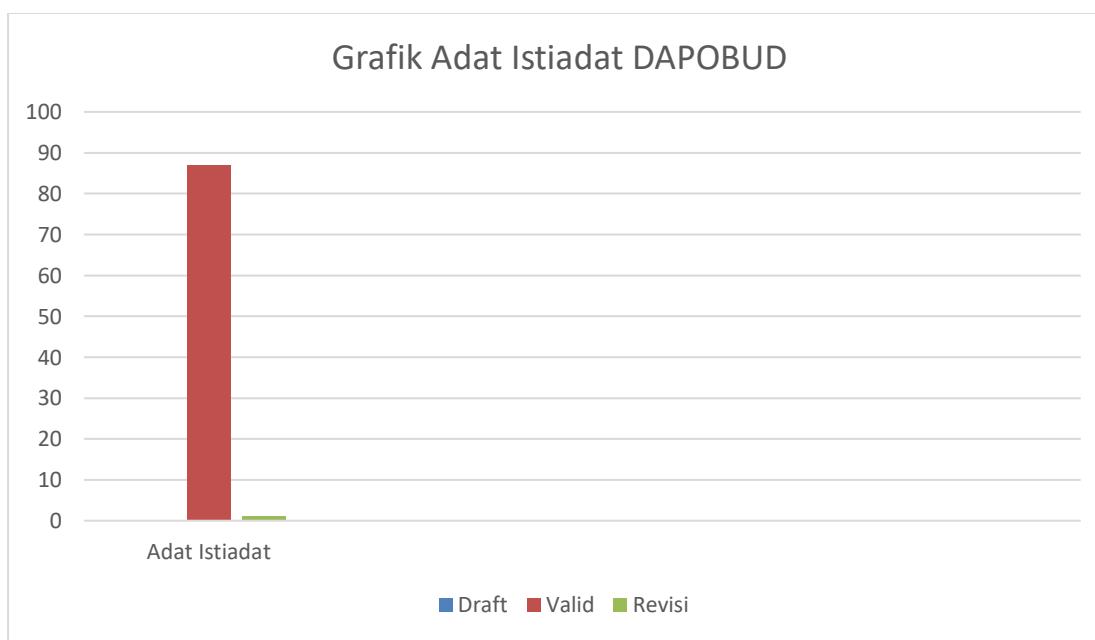


Gambar 4 Daftar Adat Istiadat; Grafik Etnis yang melaksanakan dan Jenisnya

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/adat-istiadat/> Diakses 28 Desember 2023)

Tabel 4.3 Daftar Adat Istiadat DAPOBUD

No.	Kategori	Status			Jumlah
		Draft	Valid	Revisi	
1	Adat Istiadat		87	1	88
					Total 88

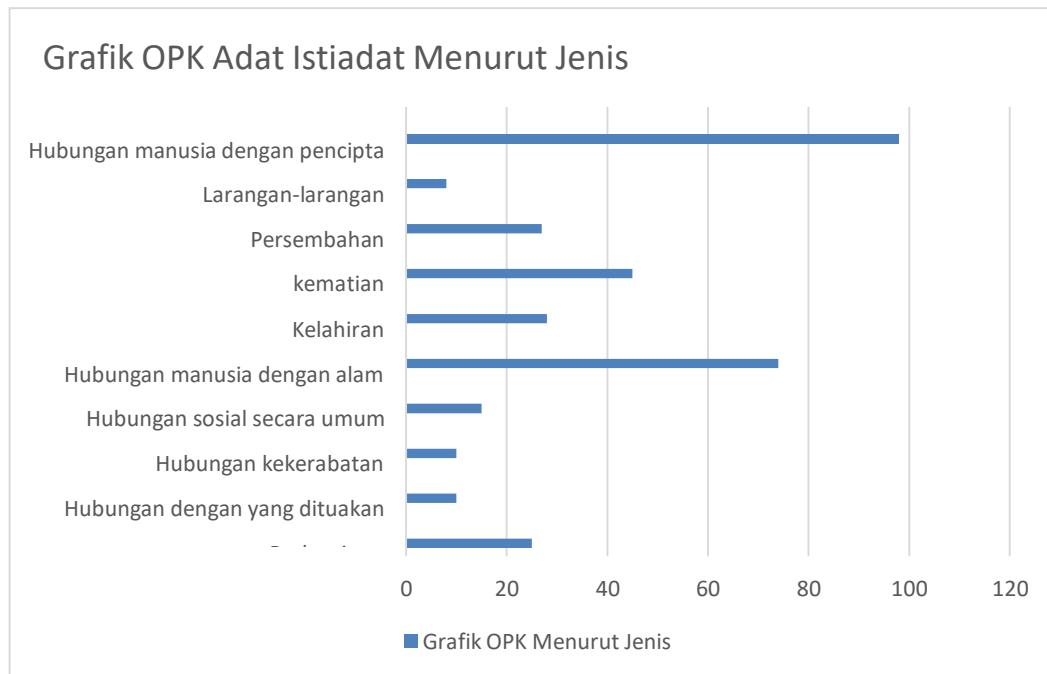


(Sumber: <https://app.dapobud.kemdikbud.go.id/verval/opk/> Diakses 28 Desember 2023)

Statistik OPK Adat istiadat

Jumlah Objek Adat istiadat	340	
Jumlah Lembaga	217	
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	208
	Sarana Pemerintah	73
Jumlah Produk Hukum	4	
Jumlah Permasalahan	116	

Menurut data statistik OPK adat istiadat terdapat 340.



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data sesuai diagram di atas, terdapat 10 kategori jenis adat istiadat dan yang terbanyak dilakukan oleh masyarakat adalah yang berhubungan dengan Sang Pencipta.



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data sesuai diagram di atas, frekuensi penggunaan/pelaksanaan adat istiadat masih sering dilaksanakan di Jawa Tengah sebanyak 234 adat istiadat.

IV.4. Ritus

Daftar OPK

NO ↓	NAMA RITUS ↴	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS RITUS	KOMPONEN PELAKU RITUS	PERLENGKAPAN RITUS	APAKAH MASIH DILAKUKAN	NAMA RAPALAN
1	Jamasan Meriam Nyai Setomi	-	-	-	-	-	-
2	Larung Langse Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	-	-	-	-	-	-
3	Tingalan Jumenengan Dalem Sahandap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Susuhunan Paku Buwono Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	-	-	-	-	-	-
4	Tingalan Jumenengan Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Jumeneng Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arjo Mangkunegoro Puro Mangkunegaran	-	-	-	-	-	-
5	Grebeg Syawal Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	-	-	-	-	-	-
6	Grebeg Besar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	-	-	-	-	-	-
7	Jamasan Meriam Nyai Setomi	-	-	-	-	-	-
8	Upacara Adat Dandangan Kudus	-	-	-	-	-	-
9	Larung Langse Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	-	-	-	-	-	-
10	Tingalan Jumenengan Dalem Sahandap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Susuhunan Paku Buwono Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	-	-	-	-	-	-

10 of 82 items

< 1 2 3 4 5 ... 9 >

Show 10 Rows ▾

Etnis yang menggunakan



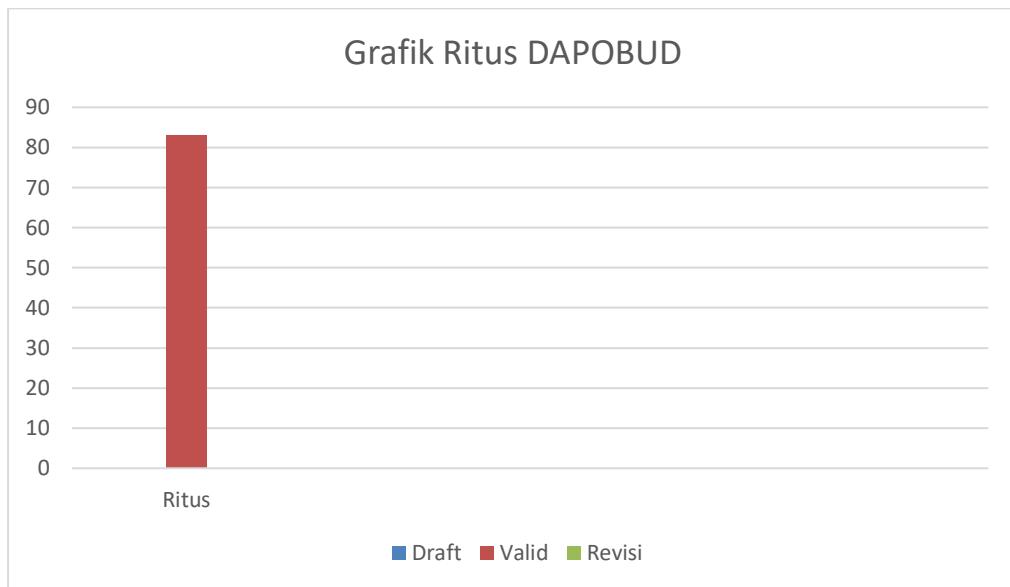
Jenis



(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/ritus> / Diakses 28 Desember 2023)

Tabel 4.4 Daftar Ritus DAPOBUD

No.	Kategori	Status			Jumlah
		Draft	Valid	Revisi	
1	Ritus		83		83
				Total	83



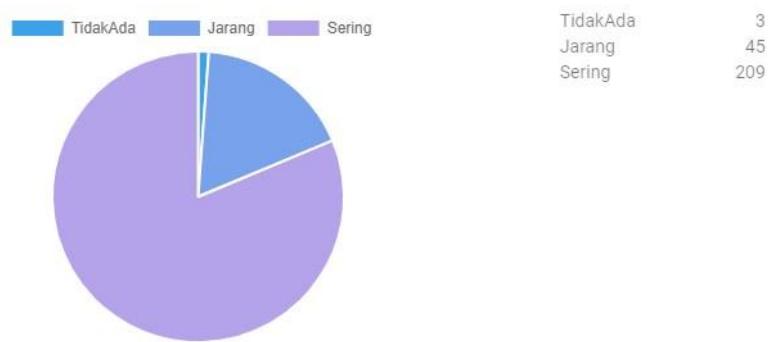
(Sumber: <https://app.dapobud.kemdikbud.go.id/pendataan/opk/> Diakses 28 Desember 2023)

Statistik OPK Ritus

Jumlah Objek Ritus	375
Jumlah Lembaga	260
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat
	Sarana Pemerintah
Jumlah Produk Hukum	2
Jumlah Permasalahan	167

Menurut statistik OPK Ritus di atas, terdapat 375 objek ritus.

Diagram OPK Ritus Menurut Frekuensi Pelaksanaan



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut grafik di atas, frekuensi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ritus masih terbilang sering.

IV.5. Pengetahuan Tradisional

Daftar OPK

SDM Kebudayaan **Rempah dan Bumbu** Pengetahuan Tradisional Makanan dan Minuman Pakaian Tradisional Metode Penyehatan Kerajinan Jamu dan Ramuan Tradisional

Cari

NO ↓	NAMA REMPAH & BUMBU ↓↑	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	MANFAAT	CARA PENGUNAAN	APAKAH MASIH DIGUNAKAN
0 of 0 items < > Show 10 Rows					

Etnis yang menggunakan
Data tidak tersedia

Gambar 4.5.1 Daftar Rempah dan Bumbu; Grafik Etnis yang menggunakan

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/pengetahuan-tradisional/> Diakses 27 Desember 2023)

NO ↓	NAMA PENGETAHUAN ↓↑	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	SATUAN USIA PENGGUNAAN	PERKIRAAN USIA PENGGUNAAN	JENIS PENGETAHUAN TRADISIONAL	KEGUNAAN PENGETAHUAN TRADISIONAL
1	Pranata Mangsa Surakarta	-	-	-	-	-
2	Pranata Mangsa Surakarta	-	-	-	-	-
3	Jembul Tulakan	-	-	-	-	-
4	Cowongan Cilacap	-	-	-	-	-
5	Jembul Tulakan	-	-	-	-	-
6	Cowongan Cilacap	-	-	-	-	-
7	Tari Gambyong	-	-	-	-	-
8	Obor-Obor Tegal Sambl	-	-	-	-	-
9	Tata Rias Pengantin Khas Boyolali	-	-	-	-	-
10	Pranata Mangsa	-	-	-	-	-

10 of 10 items < 1 > Show 10 Rows



Gambar 4.5.2. Daftar Pengetahuan Tradisional; Grafik Etnis yang Menggunakan

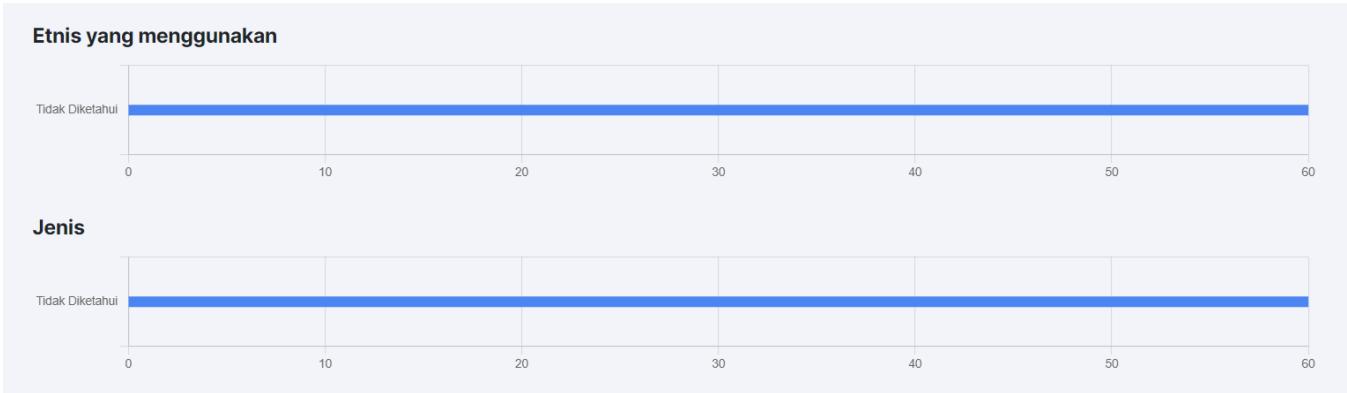
(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/pengetahuan-tradisional/> Diakses 27 Desember 2023)

NO ↓	NAMA MAKANAN & MINUMAN ↗	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS	CARA DAN WAKTU PENYIMPANAN	BAHAN BAKU	CARA PEMBUATAN	CARA DAN WAKTU PENYAJIAN
1	Sate Kere	-	-	-	-	-	-
2	Warung Hik Solo	-	-	-	-	-	-
3	Mendoan Banyumas	-	-	-	-	-	-
4	Roti Kecik	-	-	-	-	-	-
5	Serabi Notosuman	-	-	-	-	-	-
6	Sate Kere	-	-	-	-	-	-
7	Warung Hik Solo	-	-	-	-	-	-
8	Mendoan Banyumas	-	-	-	-	-	-
9	Sega Grombyang	-	-	-	-	-	-
10	Sate Buntel	-	-	-	-	-	-

10 of 60 items

< 1 2 3 4 5 6 >

Show 10 Rows ▾



*Gambar 4.5.3 Daftar Pengetahuan Tradisional Makanan dan Minuman; Grafik Etnis yang Menggunakan
(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/pengetahuan-tradisional/> Diakses 27 Desember 2023)*

NO ↓	NAMA PAKAIAN TRADISIONAL ↗	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	BAHAN BAKU	ORANG YANG MENGGUNAKAN	TEMPAT PENGUNAAN	WAKTU PENGUNAAN	TEKNIK PEMBUATAN
1	Tata Rias Pengantin Wahyu Merapi Pacul Goweng	-	-	-	-	-	-
2	Tata Rias Pengantin Wahyu Merapi Pacul Goweng	-	-	-	-	-	-
3	Blangkon (Tehnologi tradisional)	-	-	-	-	-	-

3 of 3 items

< 1 >

Show 10 Rows ▾



*Gambar 4.5.4 Daftar Pengetahuan Tradisional Pakaian Adat; Grafik Etnis yang menggunakan dan Bahan Bakunya
(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/pengetahuan-tradisional/> Diakses 27 Desember 2023)*

NO ↓	NAMA METODE PENYEHATAN ↓↑	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	TATA CARA PEMBUATAN	PERALATAN YANG DIGUNAKAN
1	Pranata Mangsa Surakarta	-	-	-
2	Pranata Mangsa Surakarta	-	-	-

2 of 2 items 1 Show 10 Rows

Etnis yang menggunakan

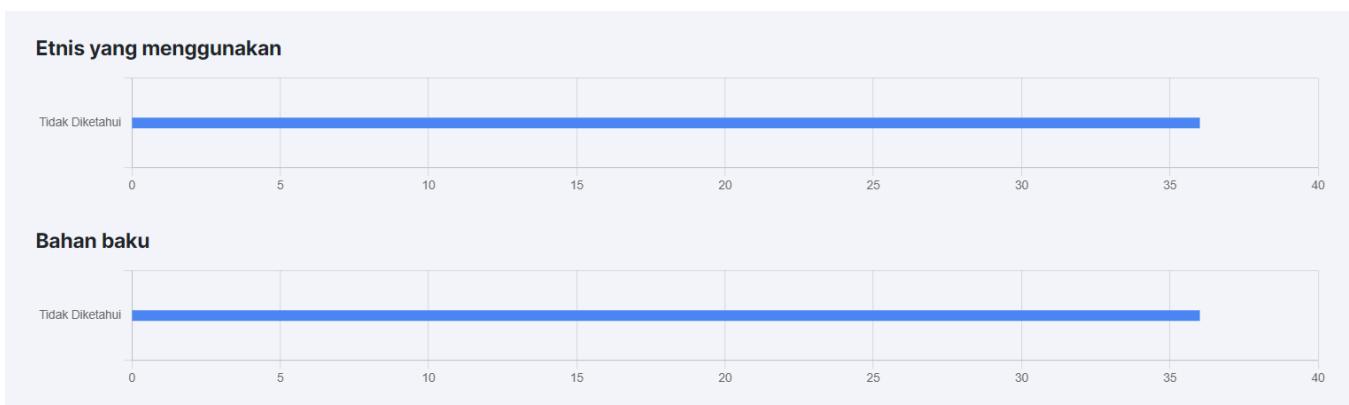


Etnis	Persentase
Tidak Diketahui	2.0

*Gambar 4.5.5 Daftar Pengetahuan Tradisional Metode Penyehatan; Grafik Etnis yang menggunakan
(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/pengetahuan-tradisional/> Diakses 27 Desember 2023)*

NO ↓	NAMA KERAJINAN ↓↑	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	BAHAN BAKU	KEGUNAAN	TEKNIK PEMBUATAN
1	Kriya Logam Tumang Boyolali	-	-	-	-
2	Kriya Logam Tumang Boyolali	-	-	-	-
3	Lurik Klaten	-	-	-	-
4	Batik Bakaran Juwana	-	-	-	-
5	Lurik Klaten	-	-	-	-
6	Batik Bakaran Juwana	-	-	-	-
7	Tari Topeng Lengger	-	-	-	-
8	Kebo Kinul	-	-	-	-
9	Wayang Suket Purbalingga	-	-	-	-
10	Kebo Kinul	-	-	-	-

10 of 36 items 1 2 3 4 > Show 10 Rows



*Gambar 4.5.6 Daftar Pengetahuan Tradisional Kerajinan; Grafik Etnis yang menggunakan dan Bahan Bakunya
(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/pengetahuan-tradisional/> Diakses 27 Desember 2023)*

NO ↓	NAMA JAMU & RAMUAN ↓↑	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS	KHASIAT	BAHAN BAKU	CARA PEMBUATAN
1	Jamu Cabe Puyang	-	-	-	-	-
2	Jamu uyup-uyup /Gepyokan	-	-	-	-	-
3	Jamu Beras Kencur	-	-	-	-	-
4	Jamu Kunyit Asam/Kunir Asem	-	-	-	-	-
5	Jamu Pahitan	-	-	-	-	-
6	Serbat Jahe Solo (Kuliner)	-	-	-	-	-

6 of 6 items

< 1 >

Show 10 Rows ▾

Etnis yang menggunakan



Jenis

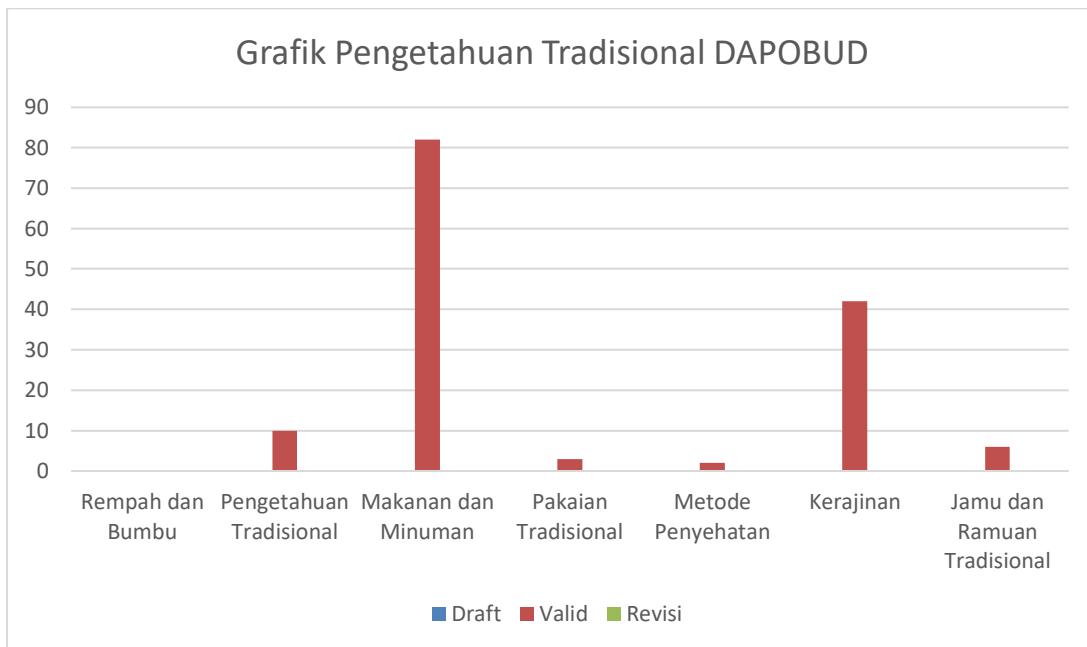


Gambar 4.5.7 Daftar Pengetahuan Tradisional Jamu dan Ramuan; Grafik Etnis yang menggunakan dan Bahan Bakunya

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/pengetahuan-tradisional/> Diakses 27 Desember 2023)

Tabel 4.5 Daftar Pengetahuan Tradisional DAPOBUD

No.	Kategori	Status			Jumlah
		Draft	Valid	Revisi	
1	Rempah dan Bumbu				0
2	Pengetahuan Tradisional		10		10
3	Makanan dan Minuman		82		82
4	Pakaian Tradisional		3		3
5	Metode Penyehatan		2		2
6	Kerajinan		42		42
7	Jamu dan Ramuan Tradisional		6		6
			Total		145



(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/pengetahuan-tradisional/> Diakses 28 Desember 2023)

Statistik OPK Pengetahuan Tradisional

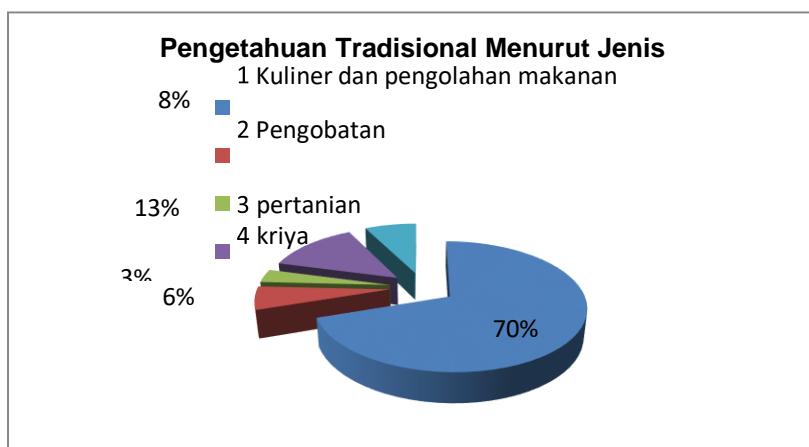
Jumlah Objek Pengetahuan Tradisional	493
Jumlah Lembaga	181
Jumlah Sarana dan Prasarana	94
	63
Jumlah Produk Hukum	1
Jumlah Permasalahan	92

Dari data OPK di atas terdapat 493 Jenis Pengetahuan Tradisional di Jawa Tengah yang berhasil didata oleh tim survey, dengan beberapa pengelola.

Grafik OPK Pengetahuan trasional menurut Jenisnya

No	Klasifikasi	Pengetahuan Tradisional Menurut Jenis
1	Kuliner dan pengolahan makanan	329
2	Pengobatan	28
3	pertanian	16
4	kriya	63
5	tata 67elola hidup	35

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



Menurut agregasi data yang didapat dalam grafik di atas, terdapat 5 kelompok besar jenis pengetahuan terdisional, yaitu kuliner dan pengolahanmakanan, pengobatan, pertanian, kriya dan tata 67elola hidup.

IV.6. Teknologi Tradisional

Daftar OPK

NO ↓	NAMA ARSITEKTUR TRADISIONAL ↗	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	BAHAN BAKU	FUNGSI UTAMA ARSITEKTUR
1	Begalan Banyumas	-	-	-
2	Grebeg Besar Demak	-	-	-

2 of 2 items 1 Show 10 Rows

Etnis yang menggunakan

Etnis	Persentase
Tidak Diketahui	2.0

Gambar 4.6.1 Daftar Arsitektur Tradisional; Etnis yang menggunakan

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/teknologi-tradisional> / Diakses 27 Desember 2023)

NO ↓	NAMA ↓↑	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	BAHAN BAKU	CARA PENGUNAAN	CARA PEMBUATAN
1	Bundengan	-	-	-	-
2	Bundengan	-	-	-	-
3	Jamjaneng Cilacap	-	-	-	-

3 of 3 items 1 < > Show 10 Rows ▾

Etnis yang menggunakan

Tidak Diketahui	3.0
-----------------	-----

Bahan baku

Tidak Diketahui	3.0
-----------------	-----

Gambar 4.6.2 Daftar Instrumen Musik; Etnis yang menggunakan dan bahan bukunya

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/teknologi-tradisional> / Diakses 27 Desember 2023)

NO ↓	NAMA SISTEM PENGELOLAHAN LAHAN ↓↑	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	BAHAN BAKU	FUNGSI	WAKTU MULAI DIGUNAKAN	SATUAN WAKTU
1	Pranata Mangsa Surakarta	-	-	-	-	-
2	Pranata Mangsa Surakarta	-	-	-	-	-

2 of 2 items 1 < > Show 10 Rows ▾

Etnis yang menggunakan

Tidak Diketahui	2.0
-----------------	-----

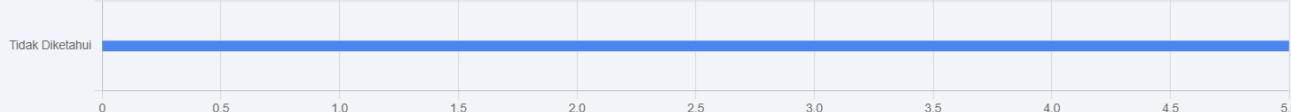
Gambar 4.6.3 Daftar Sistem Pengolahan Lahan; Etnis yang menggunakan

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/teknologi-tradisional> / Diakses 27 Desember 2023)

NO ↓	NAMA ALAT PRODUKSI ↓↑	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	BAHAN BAKU	FUNGSI	WAKTU PENGUNAAN	OBJEK YANG DIHASILKAN
1	Pranata Mangsa Surakarta	-	-	-	-	-
2	Pranata Mangsa Surakarta	-	-	-	-	-
3	Gubrak Lesung	-	-	-	-	-
4	Gubrak Lesung	-	-	-	-	-
5	Canting Batik	-	-	-	-	-

5 of 5 items 1 > Show 10 Rows ▾

Etnis yang menggunakan



Gambar 4.6.4 Daftar Alat Produksi; Etnis yang menggunakan

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/teknologi-tradisional> / Diakses 27 Desember 2023)

NO ↓	NAMA SENJATA TRADISIONAL ↓↑	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	BAHAN BAKU PEMBUATAN	FUNGSI SENJATA
1	Dakon Jawa Tengah	-	-	-

1 of 1 items 1 > Show 10 Rows ▾

Etnis yang menggunakan



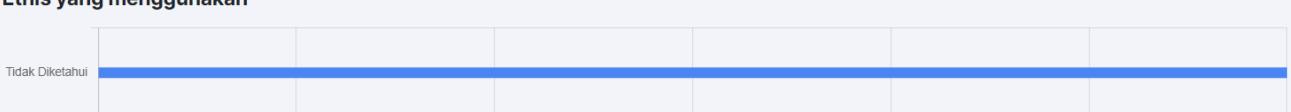
Gambar 4.6.5 Daftar Senjata Tradisional; Etnis yang menggunakan

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/teknologi-tradisional> / Diakses 27 Desember 2023)

NO ↓	NAMA TEKNOLOGI PENUNJANG ↓↑	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	BAHAN BAKU	FUNGSI	WAKTU MULAI DIGUNAKAN	SATUAN WAKTU
1	Pranata Mangsa Surakarta	-	-	-	-	-
2	Pranata Mangsa Surakarta	-	-	-	-	-
3	Ruwatan Rambut Gimbal	-	-	-	-	-
4	Lumpia Semarang	-	-	-	-	-
5	KENTHONGAN	-	-	-	-	-
6	Pengasapan Ikan Tegal	-	-	-	-	-

6 of 6 items 1 > Show 10 Rows ▾

Etnis yang menggunakan

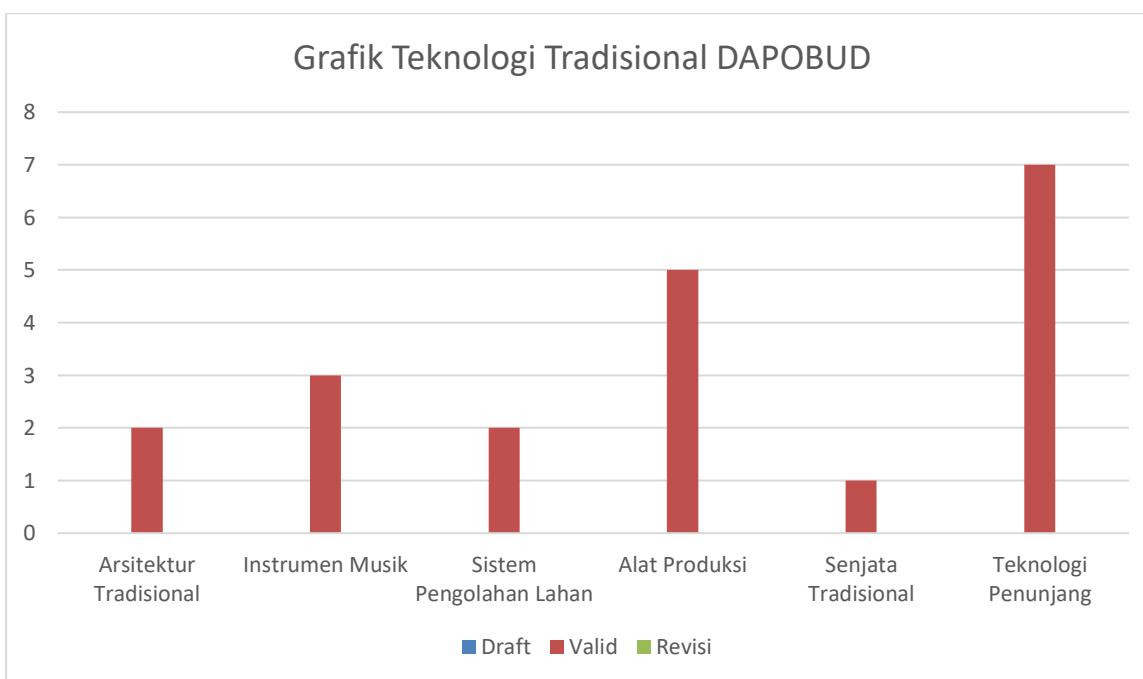


Gambar 4.5.6 Daftar Teknologi Penunjang; Etnis yang menggunakan

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/teknologi-tradisional> / Diakses 27 Desember 2023)

Tabel 4.6 Teknologi Tradisional DAPOBUD

No.	Kategori	Status			Jumlah
		Draft	Valid	Revisi	
1	Arsitektur Tradisional		2		2
2	Instrumen Musik		3		3
3	Sistem Pengolahan Lahan		2		2
4	Alat Produksi		5		5
5	Senjata Tradisional		1		1
6	Teknologi Penunjang		7		7
			Total		20

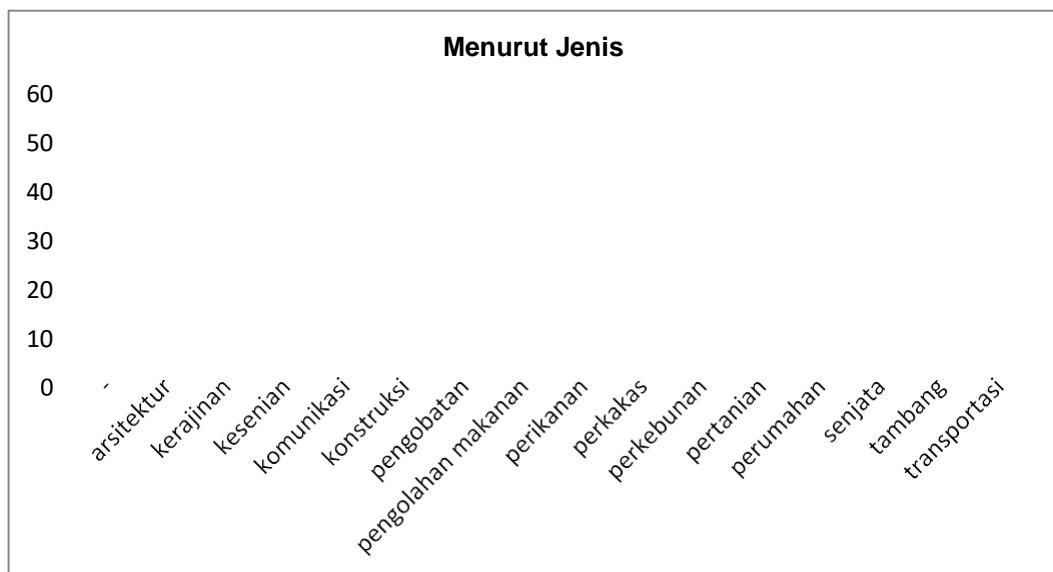


(Sumber: <https://app.dapobud.kemdikbud.go.id/pendataan/opk/> Diakses 28 Desember 2023)

Jumlah Objek Teknologi Tradisi	271
Jumlah Lembaga	
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana masyarakat
	Sarana Pemerintah
Jumlah Produk Hukum	2
Jumlah permasalahan	64

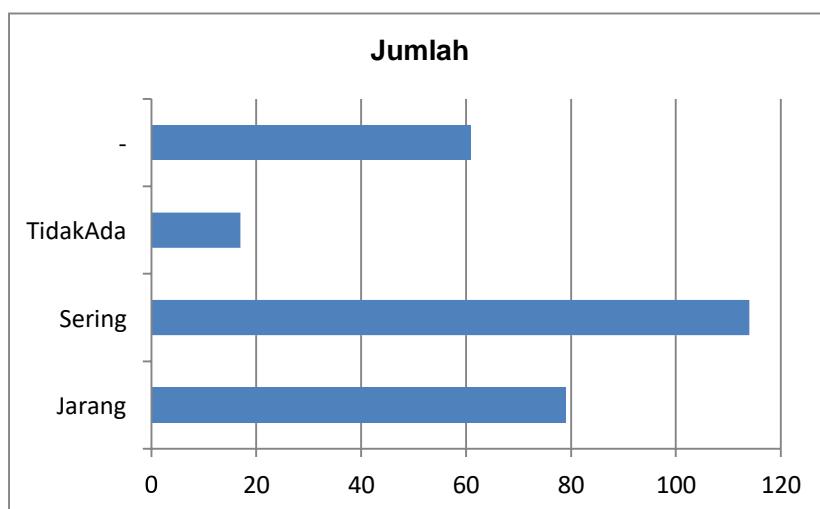
Terdapat 275 teknologi tradisional yang berhasil didata oleh tim survey dengan beberapa lembaga pendukung, sarana prasarana pendukung dan permasalahan yang dihadapi dalam pemajuan kebudayaan.

Jenis	Jumlah
-	
arsitektur	2
kerajinan	48
kesenian	7
komunikasi	4
konstruksi	9
pengobatan	4
pengolahan makanan	6
perikanan	3
perkakas	49
perkebunan	
pertanian	20
perumahan	1
senjata	8
tambang	
transportasi	13



Menurut agregasi data yang didapat dalam grafik di atas, terdapat 15 kelompok besar jenis teknologi tradisional. Dari data di atas jenis teknologi tradisional yang paling banyak adalah perkakas dengan jumlah 49.

Diagram OPK Teknologi Tradisional Menurut Frekuensi Pelaksanaan

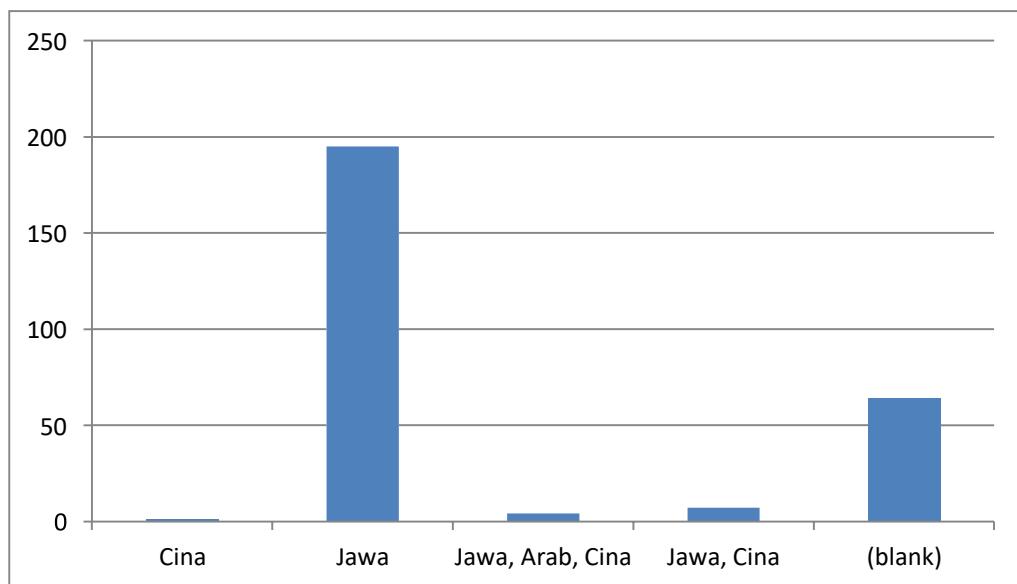


Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data sesuai diagram di atas, frekuensi pelaksanaan teknologi tradisional sering dilaksanakan sebanyak 114 (41%)

Frekuensi Pelaksanaan	Jumlah
Jarang	79
Sering	114
Tidak Ada	17
-	61

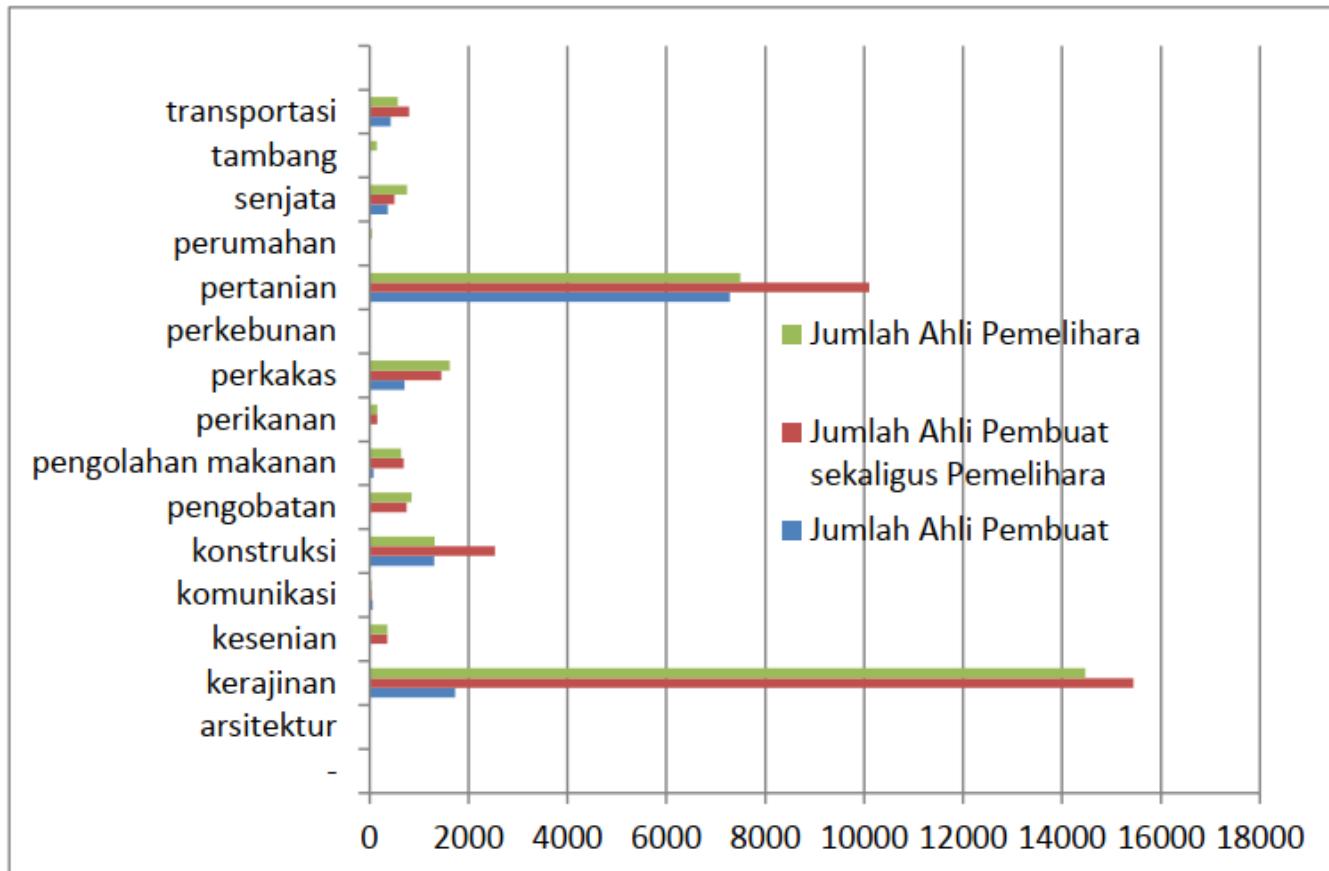
Grafik OPK menurut Etnis



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

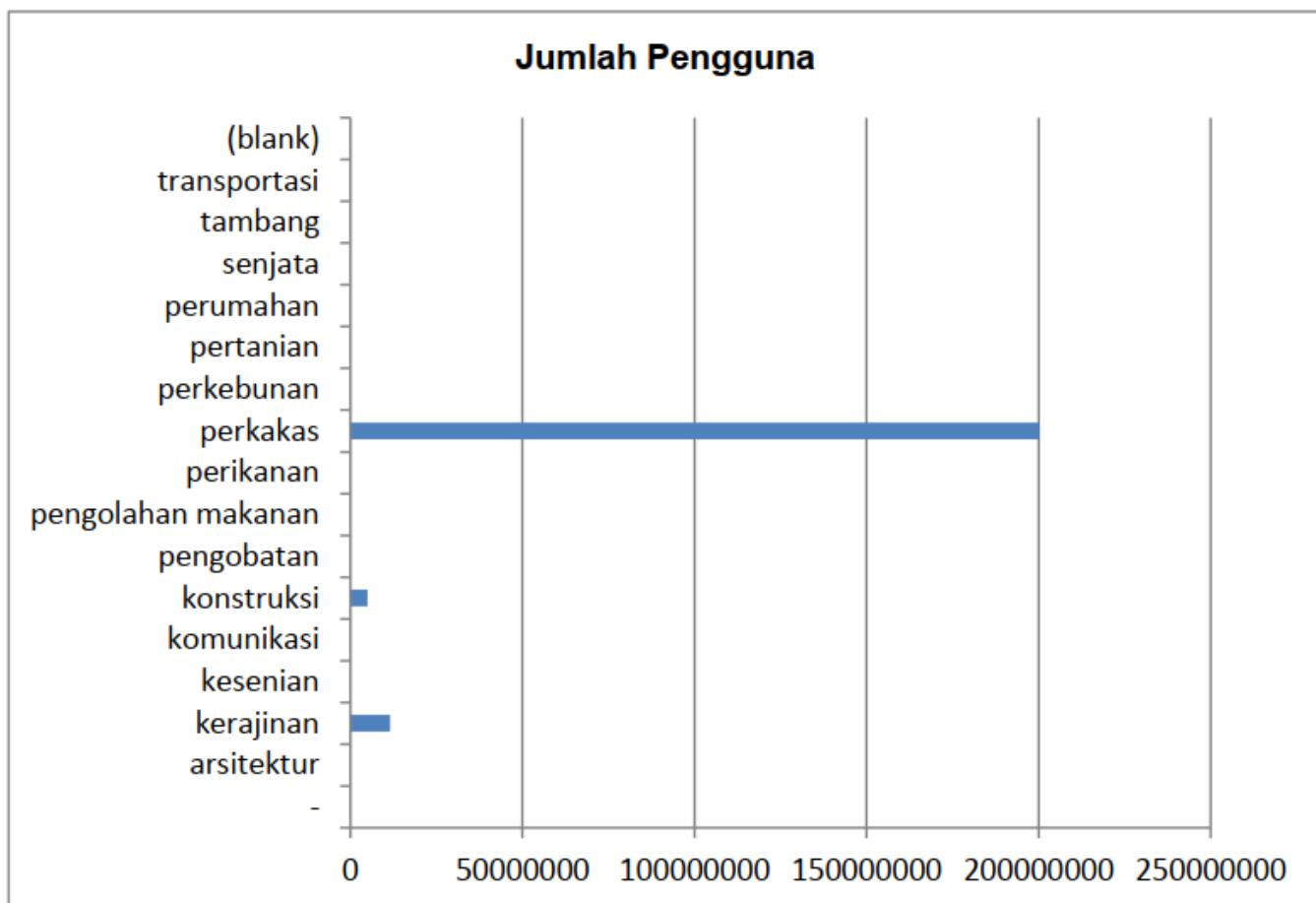
Menurut agregasi data yang terdapat dalam grafik di atas, OPK teknologi tradisional kebanyakan dilaksanakan oleh etnis Jawa 195.

Grafik Jumlah Pelaku Pemanfaatan Teknologi Tradisional



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data yang terdapat dalam grafik di atas, ahli pembuat teknologi tradisional yang terbanyak adalah pertanian, ahli pemelihara terbanyak adalah kerajinan dan ahli pembuat sekaligus pemelihara terbanyak adalah kerajinan.



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan agregasi data yang terdapat dalam grafik di atas, teknologi tradisional yang paling banyak digunakan hingga saat ini adalah perkakas dan kerajinan.

Jenis Teknologi	Jumlah Ahli Pembuat	Jumlah Ahli Pembuat sekaligus Pemelihara	Jumlah Ahli Pemelihara	Jumlah Pengguna
-	0	0	0	0
arsitektur		5	5	20
kerajinan	1733	15446	14469	11588105
kesenian	1	358	359	2053
komunikasi	65	35	35	10250
konstruksi	1305	2535	1320	5006240
pengobatan	0	750	847	1390
pengolahan makanan	84	687	636	7960
perikanan	2	152	154	2760

perkakas	705	1451	1619	200238820
perkebunan	0	0	0	
pertanian	7286	10102	7493	7550
perumahan		15	50	200
senjata	367	507	758	8100
tambang		0	150	150
transportasi	428	803	573	17315

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

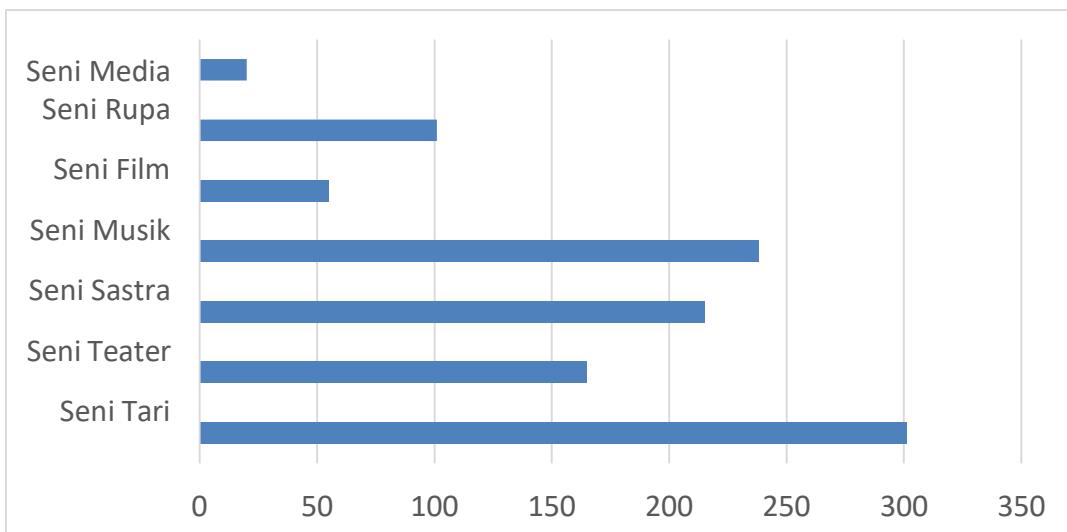
IV.7. Seni

Statistik OPK Seni

Jumlah Objek Seni	1095
Jumlah Lembaga	1829
Jumlah Sarana dan Prasarana	880
	Sarana Masyarakat
	Sarana Pemerintah
Jumlah Produk Hukum	429
Jumlah Permasalahan	18
	312

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Grafik OPK Seni Menurut Cabang Seni



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi OPK Seni, terdapat 1095 objek seni dari 13 kabupaten/kota yang telah mengisi borang. Objek ini dibagi menjadi seni media sebanyak 20 objek, seni rupa sebanyak 101 objek, seni film sebanyak 55 objek, seni musik sebanyak 238 objek, seni sastra sebanyak 215 objek, seni teater sebanyak 165 objek, dan seni tari sebanyak 301 objek.

Daftar OPK Seni Seni Tari

NO	NAMA SENI TARI	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS SENI TARI	PROPERTI	FUNGSI SENI TARI
1	Tari Topeng Lengger	+	+	+	+
2	Tari Topeng Lengger	+	+	+	+
3	TARI TOFENG LENGGER	+	+	+	+
4	Wireng Gemukaca Dadungawuk	+	+	+	+
5	Tari Jalungmas Cilacap	+	+	+	+
6	Sintren Cilacap	+	+	+	+
7	Gambeying Langen Kusumo	+	+	+	+
8	Eteeg Cilacap	+	+	+	+
9	Srimpi Pandhelori	+	+	+	+
10	Bechaya Kertawang	+	+	+	+

10 of 27 items

< 1 2 3 >

Show 10 Rows

Gambar 12. Daftar Jumlah OPK Seni Tari

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

NO	NAMA SENI TARI	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS SENI TARI	PROPERTI	FUNGSI SENI TARI
1	Srimpi Sangupati	+	+	+	+
2	Srimpi Ludiramadu (Tari)	+	+	+	+
3	Tari Karondih	+	+	+	+
4	Tari Menak Koncar	+	+	+	+
5	Bedhaya Ela-Ela (Tari)	+	+	+	+
6	Srimpi Gondokusumo (Tari)	+	+	+	+
7	Tari Bondan	+	+	+	+
8	Tari Bambangan Cakil	+	+	+	+
9	Gatotkaca Gandrung (Tari)	+	+	+	+
10	Gambir Anom (Tari)	+	+	+	+

Gambar 13. Daftar Jumlah OPK Seni Tari

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

NO	NAMA SENI TARI	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS SENI TARI	PROPERTI	FUNGSI SENI TARI
1	Golek Montra	+	+	+	+
2	Bedhaya Pangkur (Tari)	+	+	+	+
3	Prawira Wulang (Tari)	+	+	+	+
4	Srikandi Mustakaweni (Tari)	+	+	+	+
5	Tari Ambabar Batik	+	+	+	+
6	Bedhaya Ladhang Mangungkung	+	+	+	+
7	Bedhaya Duradasih (Tari)	+	+	+	+

Gambar 14. Daftar Jumlah OPK Seni Tari

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)



Gambar 15. Grafik Agregasi OPK Seni Tari

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
Bedhaya Pangkur (Tari)	Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Bedhaya Ketawang	Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gambir Anom (Tari)	Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Wireng Gatutkaca Dadungawuk	Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gatotkaca Gandrung (Tari)	Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Bedhaya Surya Sumirat	Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Srikandi Mustakaweni (Tari)	Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Ebeg Cilacap	Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Golek Montrro	Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Bedhaya Duradasih (Tari)	Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Showing 1 to 10 of 34 entries

Gambar 16. Daftar Jumlah OPK Seni Tari

(Sumber: [DAPOBUD | OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://DAPOBUD | OPK (kemdikbud.go.id)) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
Tari Ambabar Batik	Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Srimpi Sangupati	Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tari Jalungmas Cilacap	Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tari Karonsih	Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Wireng Bugis Kembar	Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	draft	 
Tari Topeng Lengger	Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Srimpi Ludiramadu (Tari)	Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Bedhaya Ladrang Mangungkung	Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Srimpi Anglit Mendung	Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Srimpi Gondokusumo (Tari)	Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Showing 11 to 20 of 34 entries

Gambar 17. Daftar Jumlah OPK Seni Tari

(Sumber: [DAPOBUD | OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://DAPOBUD | OPK (kemdikbud.go.id)) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

Gambyong Langen Kusumo	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tari Topeng Lengger	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Prawira Watang (Tari)	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tari Bondan	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Bedhaya Ela-Ela (Tari)	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Barongsai	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Sintren Cilacap	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tari Menak Koncar	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
TARI TOPENG LENGGER	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tari Bambangan Cakil	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-		https://app.dapobud.kemdikbud.go.id/

Gambar 18. Daftar Jumlah OPK Seni Tari

(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://dapobud.go.id/) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
Bedhaya Pangkur	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Srimpi Pandhelori	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Srimpi Muncar	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Bdhaya Bedhah Madiun	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Showing 31 to 34 of 34 entries

Gambar 19. Daftar Jumlah OPK Seni Tari

(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://dapobud.go.id/) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

Seni Musik

NO	NAMA SENI MUSIK	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS SENI MUSIK	KOMPONEN ALAT MUSIK
1	Bundengan	-	-	-
2	Gubrak Lesung	-	-	-
3	Bundengan	-	-	-
4	Gubrak Lesung	-	-	-
5	Bisan	-	-	-
6	Krumping Desa Langgar	-	-	-

6 of 6 items Show 10 Rows

Gambar 20. Daftar Jumlah OPK Seni Musik

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)



Gambar 21. Grafik Agregasi OPK Seni Musik.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
Bundengan	• Seni Musik	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Braen	• Seni Musik	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Bundengan	• Seni Musik	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gubrak Lesung	• Seni Musik	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Yang Qiem	• Seni Musik	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Krumpyung Desa Langgar	• Seni Musik	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Drumblek	• Seni Musik	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gubrak Lesung	• Seni Musik	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Gambar 22. Daftar Jumlah OPK Seni Musik.

(Sumber: [DAPOBUD | OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://DAPOBUD | OPK (kemdikbud.go.id)) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

Lagu

Seni Tari	Seni Musik	Lagu	Seni Pertunjukan	Naskah Skenario	Seni Sastra	Film	Seni Media Baru	Seni Rupa
<input type="text"/> Cari								
NO	NAMA LAGU	PENCIPTA	TAHUN PENCIPTAAN	LABEL/PUBLISHER	GENRE			
0 of 0 items		< >		Show 10 Rows				
Pencipta								
Data tidak tersedia								

Gambar 23. Daftar Jumlah OPK Lagu.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
Macapat Semarangan	• Lagu	provinsi	JAWA TENGAH	-	draft	 
Macapat Semarangan	• Lagu	provinsi	JAWA TENGAH	-	draft	 

Showing 1 to 2 of 2 entries

Gambar 24. Daftar Jumlah OPK Lagu.

(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://DAPOBUD/OPK(kemdikbud.go.id)) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

Seni Pertunjukan

NO	NAMA SENI PERTUNJUKAN	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS SENI PERTUNJUKAN	PENOKOHN DALAN SENI PERTUNJUKAN
1	Ebeg Banyumas	-	-	-
2	Bambangan Cakil Surakarta	-	-	-
3	Gatotkaca Gandrung	+	+	+
4	Langendriyan	+	+	+
5	Golek Montri	+	+	+
6	Gatotkaca Gandrung	+	+	+
7	Langendriyan	-	-	-
8	Srimpi Mondorlini	-	-	-
9	Gambryong Pareanom	+	+	+
10	Krumpung Desa Langgar	+	+	+

10 of 55 items

< 1 2 3 4 5 6 >

Show 10 Rows

Gambar 25. Daftar Jumlah OPK Seni Pertunjukan.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

NO	NAMA SENI PERTUNJUKAN	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS SENI PERTUNJUKAN	PENOKOHN DALAN SENI PERTUNJUKAN
1	Wayang Topeng Kadung Panjang	-	-	-
2	Gambryong Retno Kusumo	-	-	-
3	Wayang Othok Obror	+	+	+
4	Santilawara Larasmadaya	+	+	+
5	Cingpoling	+	+	+
6	Tari Soeng	+	+	+
7	Srimpi Ludiramadu	-	-	-
8	Srimpi Sangupati	-	-	-
9	Wayang Othok Obror	+	+	+
10	Krumpung Desa Langgar	+	+	+

Gambar 26. Daftar Jumlah OPK Seni Pertunjukan.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

NO	NAMA SENI PERTUNJUKAN	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS SENI PERTUNJUKAN	PENOKOHN DALAN SENI PERTUNJUKAN
1	Wayang Topeng Kadung Panjang	-	-	-
2	Bambangan Cakil Surakarta	-	-	-
3	Gambryong Retno Kusumo	+	+	+
4	Golek Montri	+	+	+
5	Jemjaneng	+	+	+
6	Tari Cepestan Alas	+	+	+
7	Santilawara Larasmadaya	-	-	-
8	Cingpoling	-	-	-
9	Tari Soeng	+	+	+
10	Srimpi Mondorlini	+	+	+

Gambar 27. Daftar Jumlah OPK Seni Pertunjukan.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

NO	NAMA SENI PERTUNJUKAN	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS SENI PERTUNJUKAN	PENOKOHAN DALAN SENI PERTUNJUKAN
1	Gambyong Panenom	-	-	-
2	Srimpi Ludramadu	-	-	-
3	Srimpi Sangupati	x	x	x
4	Ebeg Banyumas	x	x	x
5	Jamjeng	x	x	x
6	Tari Cepetan Alas	x	x	x
7	Gubrak Lesung	x	-	x
8	Tari Topeng Lengger	-	-	-
9	Gubrak Lesung	x	x	x
10	Tari Topeng Lengger	x	x	x

Gambar 28. Daftar Jumlah OPK Seni Pertunjukan.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

NO	NAMA SENI PERTUNJUKAN	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS SENI PERTUNJUKAN	PENOKOHAN DALAN SENI PERTUNJUKAN
1	Jaranan Margowati	-	-	-
2	Suran Tutup Ngisor Kabupaten Magelang	-	-	-
3	Jamu Jawa Tengah	x	x	x
4	Sedular Sikep Blora	x	x	x
5	Kethek Ogleg Wonogiri	x	x	x
6	Hak-Hakan	x	x	x
7	Barongan Blora	x	-	-
8	Gethuk Goreng Sokaraja	-	-	-
9	Tempo Jawa Tengah	x	x	x
10	Joglo Pencu (Rumah Adat Kudus)	x	x	x

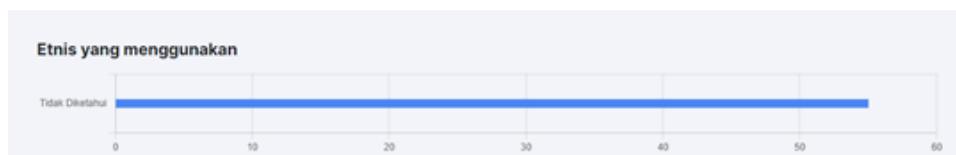
Gambar 29. Daftar Jumlah OPK Seni Pertunjukan.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

NO	NAMA SENI PERTUNJUKAN	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS SENI PERTUNJUKAN	PENOKOHAN DALAN SENI PERTUNJUKAN
1	Turonggo Seto Boyolali	-	-	-
2	Meron Pati	x	x	x
3	Upacara Adat Apeman Yaqowiyu	x	x	x
4	Sekaten	x	x	x
5	Kertas Daulang	x	x	x

Gambar 30. Daftar Jumlah OPK Seni Pertunjukan.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)



Gambar 31. Grafik Agregasi OPK Seni Pertunjukan.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
Jaranan Margowati	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gambyong Pareanom	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Santiswara Larasmadya	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Ebeg Banyumas	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tari Bondan	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	draft	
Wayang Topeng Kedung Panjang	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Jamjaneng	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Srimpi Ludiramadu	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tempe Jawa Tengah	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Barongan Blora	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Gambar 32. Daftar Jumlah Seni Pertunjukan.

(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://dapoebud.go.id) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

Srimpi Sangupati	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Kethek Ogleng Wonogiri	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Bambangan Cakil Surakarta	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gubrak Lesung	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Sedulur Sikep Blora	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Golek Montro	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Krumpyung Desa Langgar	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Kethoprak Truthuk	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Srimpi Sangupati	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Barongan Blora	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Gambar 33. Daftar Jumlah Seni Pertunjukan.

(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://dapoebud.go.id) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

Wayang Warta	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Golek Montro	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Santiswara Larasmadya	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
nyadran	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	draft	
Srimpi Mondronini	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gatotkaca Gandrung	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gambyong Retno Kusumo	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tari Cepetan Alas	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Bambangan Cakil Surakarta	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Barongan Blora	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Gambar 34. Daftar Jumlah Seni Pertunjukan.

(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://dapoebud.go.id) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

Joglo Pencu (Rumah Adat Kudus)	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Meron Pati	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gambyong Pareanom	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Langendriyan	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Upacara Adat Apeman Yaqowiyu	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Cingpoling	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Ebeg Banyumas	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Wayang Othok Obrol	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Wayang Othok Obrol	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gatotkaca Gandrung	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Gambar 35. Daftar Jumlah Seni Pertunjukan.

(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://daopbud.opk.kemdikbud.go.id) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

Hak-Hakan	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Sekaten	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Jamjaneng	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Srimpi Ludiramadu	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tari Cepetan Alas	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gethuk Goreng Sokaraja	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gambyong Retno Kusumo	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Wayang Kedu Temanggungan	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Wayang Topeng Kedung Panjang	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gubrak Lesung	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Gambar 36. Daftar Jumlah Seni Pertunjukan.

(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://daopbud.opk.kemdikbud.go.id) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

Suran Tutup Ngisor Kabupaten Magelang	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tari Soreng	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Jamu Jawa Tengah	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Kertas Datuwing	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tari Soreng	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Wayang Topeng Dalang Klaten	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Cingpoling	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Turonggo Seto Boyolali	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Srimpi Mondrorini	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Langendriyan	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tari Topeng Lengger	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Showing 61 to 61 of 61 entries

Gambar 37. Daftar Jumlah Seni Pertunjukan.

(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://dapolud.opk.kemdikbud.go.id) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

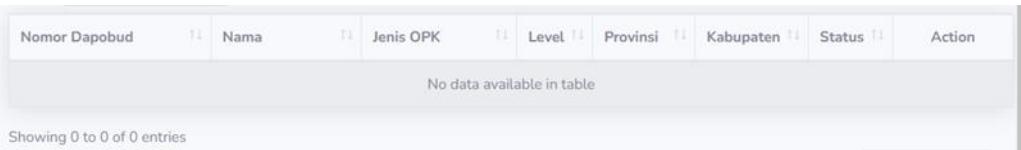
Naskah Skenario



NO	NAMA NASKAH SKENARIO	NAMA PENULIS SKENARIO	TAHUN PENCINTAAN
0 of 0 items			

Gambar 38. Daftar Jumlah OPK Naskah Skenario.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

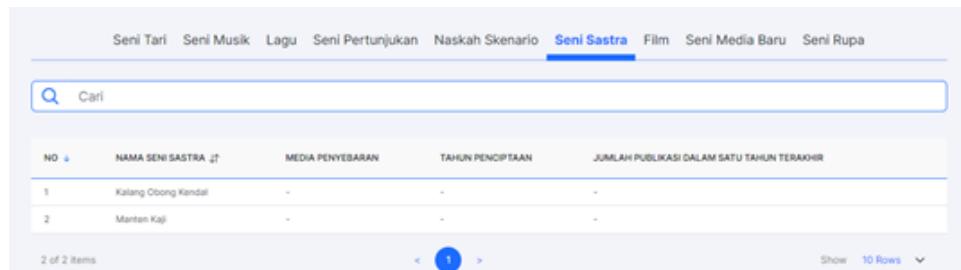


Nomor Dapobud	Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
No data available in table							

Gambar 39. Daftar Jumlah OPK Naskah Skenario.

(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://dapolud.opk.kemdikbud.go.id) Diakses tanggal 17 Desember 2023)

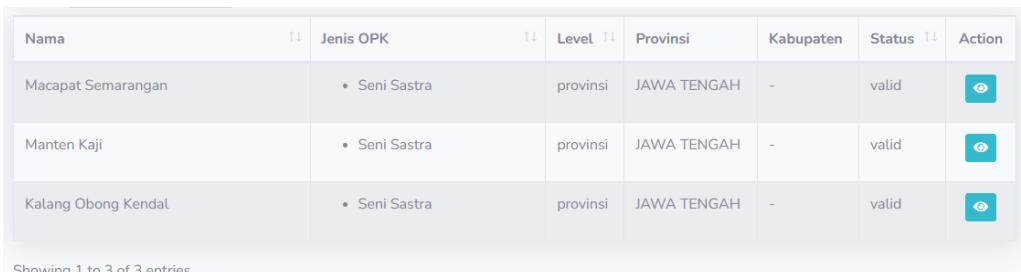
Seni Sastra



NO	NAMA SENI SASTRA	MEDIA PENYESARAN	TAHUN PENCINTAAN	JUMLAH PUBLIKASI DALAM SATU TAHUN TERAKHIR
1	Kalang Obong Kendal	-	-	-
2	Manten Kaji	-	-	-

Gambar 40. Daftar Jumlah OPK Seni Sastra.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)



Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
Macapat Semarangan	• Seni Sastra	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Manten Kaji	• Seni Sastra	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Kalang Obong Kendal	• Seni Sastra	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Gambar 41. Daftar Jumlah OPK Seni Sastra.

(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://dapolud.opk.kemdikbud.go.id) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

Film

Seni Tari	Seni Musik	Lagu	Seni Pertunjukan	Naskah Skenario	Seni Sastra	Film	Seni Media Baru	Seni Rupa	
<input type="text"/> Cari									
NO ↗ NAMA FILM ↗ JENIS SENI FILM PRODUSER SUTRADARA PENULIS TAHUN PENCITAAN GENRE DURASI SATUAN DURASI									
0 of 0 items < > Show 10 Rows									
NO ↗	NAMA FILM ↗	JENIS SENI FILM	PRODUSER	SUTRADARA	PENULIS	TAHUN PENCITAAN	GENRE	DURASI	SATUAN DURASI

Gambar 42. Daftar Jumlah OPK Film.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

Nomor Dapobud	Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
No data available in table							
Showing 0 to 0 of 0 entries							

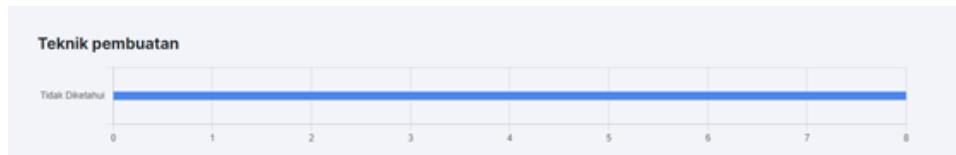
Gambar 43. Daftar Jumlah OPK Film.

(Sumber: [## Seni Media Baru](https://DAPOBUD/OPK(kemdikbud.go.id) https://DAPOBUD/OPK(kemdikbud.go.id) Diakses tanggal 17 Desember 2023)</p>
</div>
<div data-bbox=)

NO ↗	NAMA SENI MEDIA BARU ↗	TEKNIK PEMBUATAN	TAHUN PENCITAAN	JUMLAH PUBLIKASI DALAM SATU TAHUN TERAKHIR
1	Wayang Bawor	+	+	+
2	Wayang Suket Mbah Gepuk Purbalingga	+	+	+
3	WAYANG TOPENG KEDUNG PANJANG	+	+	+
4	KESENIAN KENTRUNG DEMAKAN	+	+	+
5	Langendriyan	+	+	+
6	Wireng Bandabaya	+	+	+
7	Srimulat	+	+	+
8	TALANG TAWING	+	+	+

Gambar 44. Daftar Jumlah OPK Seni Media Baru.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)



Gambar 45. Grafik Agregasi OPK Seni Media Baru.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
Wireng Bandabaya	• Seni Media Baru	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Langendriyan	• Seni Media Baru	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Srimulat	• Seni Media Baru	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
KESENIAN KENTRUNG DEMAKAN	• Seni Media Baru	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Wayang Suket Mbah Gepuk Purbalingga	• Seni Media Baru	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Wayang Bawor	• Seni Media Baru	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
TALANG TAWING	• Seni Media Baru	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
WAYANG TOPENG KEDUNG PANJANG	• Seni Media Baru	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Showing 1 to 8 of 8 entries

Gambar 46. Daftar Jumlah OPK Seni Media Baru.

(Sumber: [DAPOBUD | OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://dapobud.kemendikbud.go.id/) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

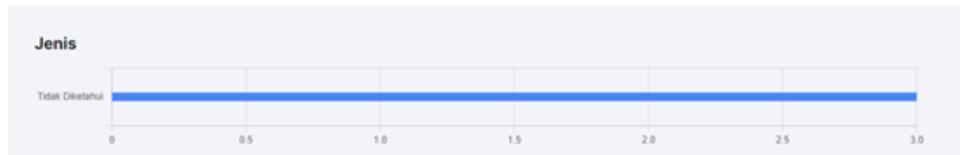
Seni Rupa

NO	NAMA SENI RUPA	JENIS SENI RUPA	MEDIA PEMBUATAN	TEKNIK PEMBUATAN	TAHUN PENCITAAN	JUMLAH PUBLIKASI
1	Dolalak	•	•	•	•	•
2	Ngasa Kabupaten Brebes	•	•	•	•	•
3	Jolenan Somongari	•	•	-	-	-

3 of 3 items Show 10 Rows

Gambar 47. Daftar Jumlah OPK Seni Rupa.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemendikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)



Gambar 48. Daftar Jumlah OPK Seni Rupa.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemendikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

Normor Dapobud	Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
OP.5050.20160101.00097	Jolenan Somongari	• Seni Rupa	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
OP.5050.20190101.00381	Ngasa Kabupaten Brebes	• Seni Rupa	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
OP.5050.20190101.00371	Dolalak	• Seni Rupa	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Showing 1 to 3 of 3 entries

Gambar 49. Daftar Jumlah OPK Seni Rupa.

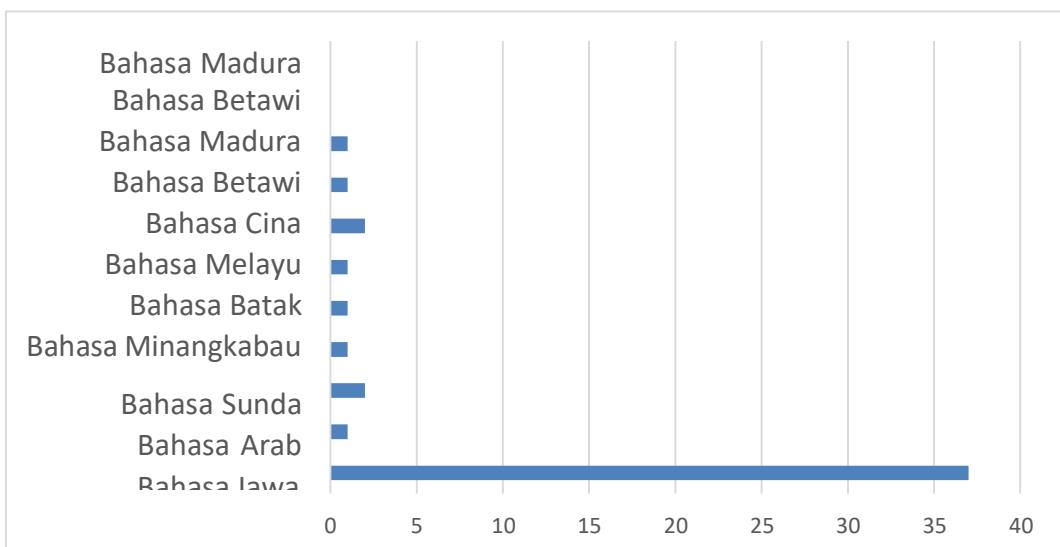
(Sumber: [DAPOBUD | OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://dapobud.kemendikbud.go.id/) Diakses tanggal 17 Desember 2023)

IV.8. Bahasa

Statistik OPK Bahasa

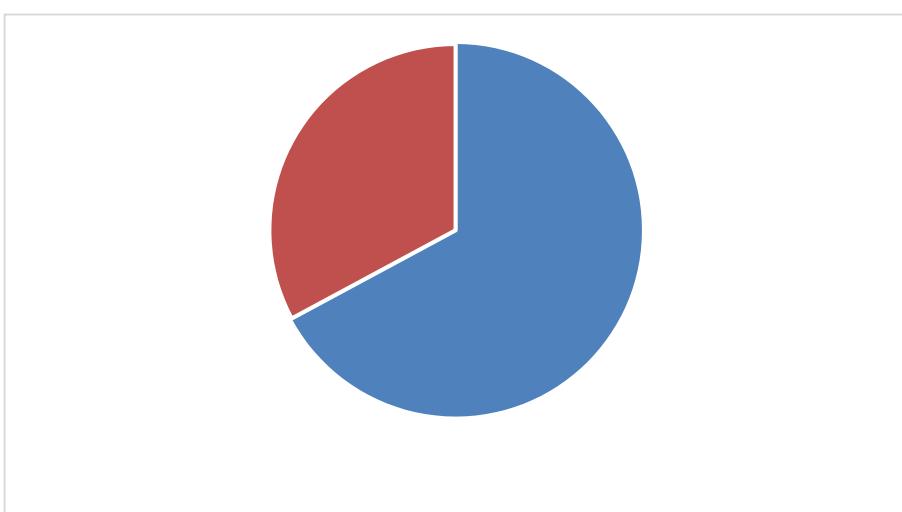
Jumlah Objek Bahasa	70	
Jumlah Lembaga	85	
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	32
	Sarana Pemerintah	38
Jumlah Produk Hukum		3
Jumlah Permasalahan	51	

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Diagram OPK Bahasa Menurut Status Penggunaan



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data yang terdapat di dalam OPK Bahasa, terdapat 70 objek bahasa dari 13 kabupaten/kota yang telah mengisi borang. Data tersebut kemudian dikelompokkan menjadi bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Betawi, bahasa Madura, bahasa Minangkabau, bahasa Batak, dan bahasa Melayu. Objek bahasa tersebut sebanyak 47 objek masih digunakan dan sebanyak 23 objek sudah tidak digunakan.

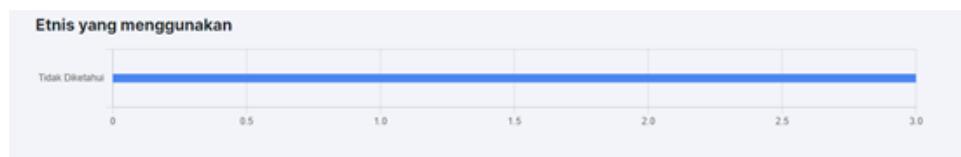
Daftar OPK Bahasa

NO	NAMA DIEALEK	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS AKSARA	STATUS PENGUNAAN
1	Braen	-	-	-
2	Braen	-	-	-
3	Gamelan Jawa Gaya Surakarta dan Yogyakarta	-	-	-

3 of 3 items Show 10 Rows

Gambar 50. Daftar Jumlah OPK Bahasa.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)



Gambar 51. Grafik Agregasi OPK Bahasa.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
Braen	• Bahasa	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gamelan Jawa Gaya Surakarta dan Yogyakarta	• Bahasa	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Braen	• Bahasa	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Bahasa Mandarin	• Bahasa	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Showing 1 to 4 of 4 entries

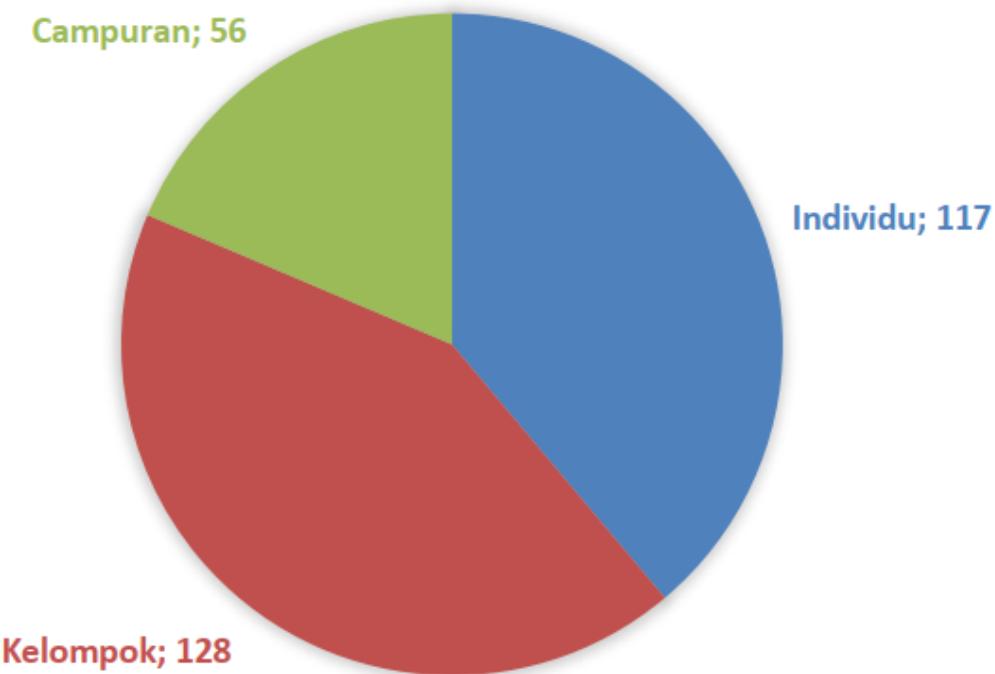
Gambar 52. Daftar Jumlah OPK Bahasa.

(Sumber: [https://DAPOBUD/OPK\(kemdikbud.go.id](https://DAPOBUD/OPK(kemdikbud.go.id)) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

IV.9. Permainan Rakyat

Dari data yang sudah diisikan oleh kabupaten/kota pada aplikasi terdapat 325 objek Permainan Rakyat yang ada di Jawa Tengah. Kemudian melalui FGD dikerucutkan menjadi 301 objek Permainan Rakyat karena terdapat jenis objek permainan rakyat yang tidak ada sumber data yang jelas dan salah kategori.

DIAGRAM OPK PERMAINAN RAKYAT MENURUT KATEGORI



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Dari data diagram di atas terdapat 301 OPK permainan rakyat yang ada di JawaTengah, kemudian dibagi menurut kategori permainannya terdapat 128 permainan rakyat kategori permainan kelompok, 117 permainan kategori individu, dan 56 permainan kategori campuran.

Daftar OPK Permainan Rakyat

NO	NAMA PERMAINAN RAKYAT	ETNIS YANG MENGUNAKAN	JUMLAH PEMAIN	JUMLAH PEMAIN MINIMAL	PERLENGKAPAN	NILAI MORAL
1	Braen	-	-	-	-	-
2	Braen	-	-	-	-	-
3	Keris	-	-	-	-	-

3 of 3 items Show 10 Rows

Gambar 53. Daftar Jumlah OPK Permainan Rakyat.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).



Gambar 54. Grafik Agregasi OPK Permainan Rakyat.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
Braen	• Permainan Rakyat	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Braen	• Permainan Rakyat	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Barongsai	• Permainan Rakyat	provinsi	JAWA TENGAH	-	draft	
Keris	• Permainan Rakyat	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Showing 1 to 4 of 4 entries

Gambar 55. Daftar Jumlah OPK Permainan Rakyat.

(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://dapoebud.go.id) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

IV.10. Olahraga Tradisional

Statistik OPK Olahraga Tradisional

Jumlah Objek Olahraga Tradisional	103
Jumlah Lembaga	60
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat
	Sarana Pemerintah
Jumlah Produk Hukum	0
Jumlah Permasalahan	39

Dari data yang sudah diisikan oleh kab/kota pada aplikasi terdapat 103 objek Olahraga tradisional yang ada di Jawa Tengah. Kemudian melalui FGD di kerucutkan menjadi 90 OPK olahraga tradisional karena terdapat jenis OPK olahraga tradisional yang tidak ada sumber data yang jelas dan salah kategori.



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Dari data diagram di atas terdapat 90 OPK olahraga tradisional yang ada di Jawa Tengah, kemudian dibagi menurut kategori olahraganya, terdapat 46 olahraga kategori kelompok, 30 olahraga kategori individu, dan 14 olahraga kategori campuran.

Data OPK Olahraga Tradisional

NO	NAMA OLAHRAGA TRADISIONAL	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JUMLAH PEMAIN	JUMLAH PEMAIN MINIMAL	PERLENGKAPAN	NILAI MORAL
1	Braen	-	-	-	-	-
2	Braen	-	-	-	-	-
3	Tari Prajuritan Kabupaten Semarang	-	-	-	-	-
4	Jemparingan (Olahraga tradisional)	-	-	-	-	-

4 of 4 items Show 10 Rows

Gambar 56. Daftar Jumlah OPK Olahraga Tradisional.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).



Gambar 57. Grafik Agregasi OPK Olahraga Tradisional.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

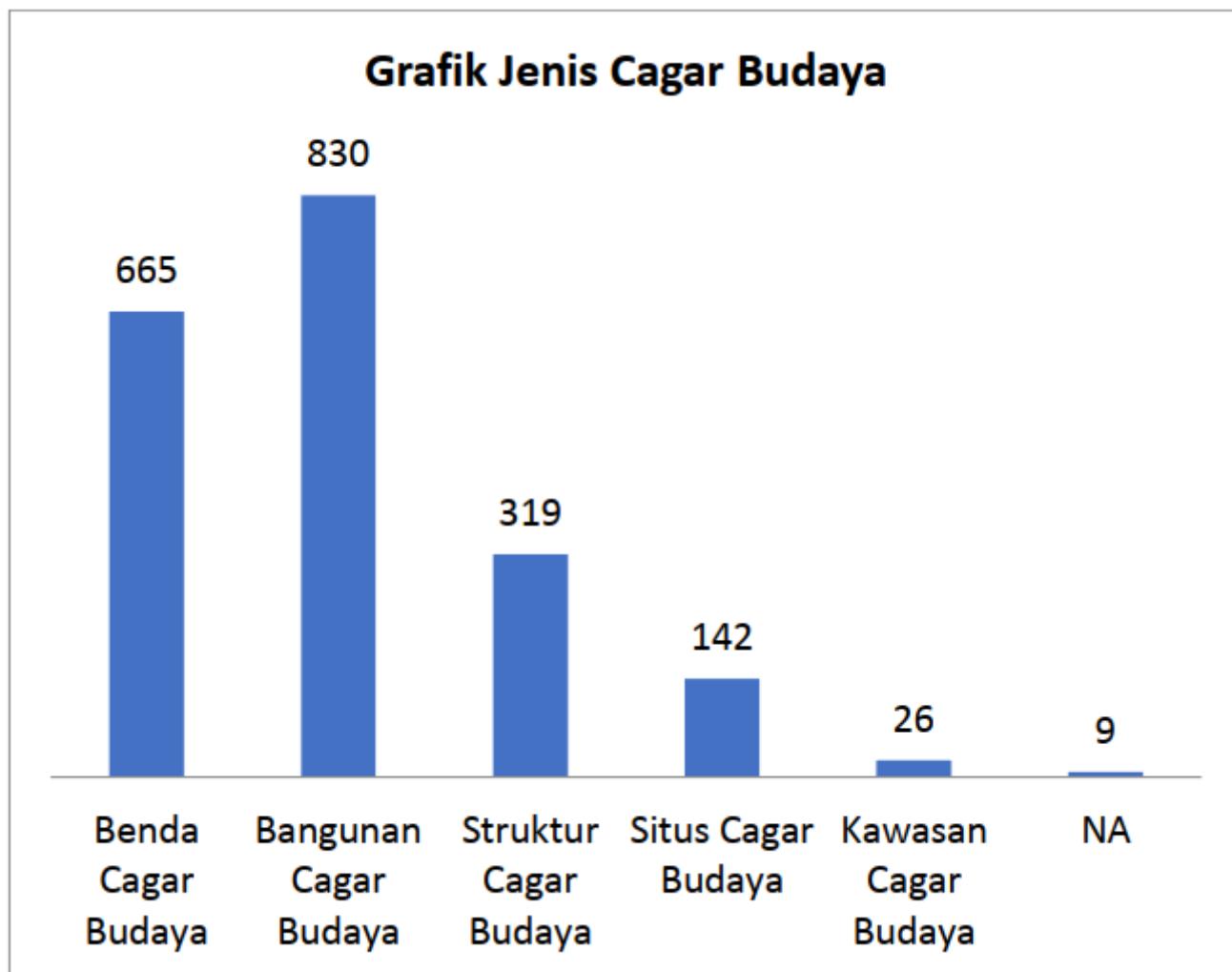
Nomor Dapobud	Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
OP.5050.20210101.00393	Braen	• Olahraga Tradisional	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
OP.5050.20210101.00823	Braen	• Olahraga Tradisional	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
OP.5050.20200101.00363	Jemparingan (Olahraga tradisional)	• Olahraga Tradisional	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
OP.5050.20190101.00380	Tari Prajuritan Kabupaten Semarang	• Olahraga Tradisional	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Showing 1 to 4 of 4 entries

Gambar 58. Daftar Jumlah OPK Olahraga Tradisional.

(Sumber: [DAPOBUD | OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://dapobud.ppkd.kemdikbud.go.id/) Diakses tanggal 17 Desember 2023)

IV.11. Cagar Budaya



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Dari diagram batang cagar budaya di Jawa Tengah di atas dapat terbaca sebagai berikut:

Sejumlah 1991 yang terdiri atas Benda Cagar budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya, maka bangunan cagar budaya menempati urutan jumlah terbanyak diantara jenis cagarbudaya lainnya dengan perincian sebagai berikut; Benda Cagar budaya sejumlah 665, berasal dari masa klasik dari masa Hindu Budha abad 7- 9 Masehi dan prasejarah dari 2,4 juta tahun yang lalu; Bangunan Cagar Budaya sejumlah 830 berasal dari masa kolonial dan juga masa Islam; Struktur Cagar budaya sejumlah 319, sebagian besar merupakan peninggalan masa klasik dan kolonial; Situs Cagar Budaya sejumlah 142, terdiri atas situs masa klasik dan masa Islam; Kawasan Cagar Budaya sejumlah 26 berupa kompleks bangunan candi dari masa Klasik abad 7- 9 Masehi dan kawasan masa kolonial seperti pabrik gula. Sejumlah 1991 cagar budaya yang terinventarisasi ada 9 cagar budaya yang *Not Available* (NA).

Daftar OPK Cagar Budaya Benda Cagar Budaya

Cagar Budaya Benda						
<input type="text"/> Cari						
NO	NAMA OOCB	KELOMPOK BENDA	SIFAT BENDA	PERIODE BENDA	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
0 of 0 items						
Kondisi terkini Data tidak tersedia						
Status penetapan Data tidak tersedia						

Gambar 59. Daftar Jumlah OPK Benda Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

Bangunan Cagar Budaya

Cagar Budaya Bangunan						
<input type="text"/> Cari						
NO	NAMA OOCB	SIFAT BANGUNAN	PERIODE BANGUNAN	GAYA ARSITEKTUR	FUNGSI	BENTUK ATAP
0 of 0 items						
Kondisi terkini Data tidak tersedia						
Status penetapan Data tidak tersedia						

Gambar 60. Daftar Jumlah OPK Bangunan Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

Struktur Cagar Budaya

Cagar Budaya Struktur						
<input type="text"/> Cari						
NO	NAMA OOCB	SIFAT STRUKTUR	FUNGSI STRUKTUR	PERIODE STRUKTUR	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
0 of 0 items						
Kondisi terkini Data tidak tersedia						
Status penetapan Data tidak tersedia						

Gambar 61. Daftar Jumlah OPK Struktur Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

Situs Cagar Budaya

NO	NAMA OOCB	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	Alun-Alun Purwokerto Kabupaten Banyumas	Campuran	-	-	Utuh	-
2	Kerkop Purbalingga	Campuran	-	-	Utuh	-
3	Watu Lesung	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
4	Kompleks Makam Bayat	Campuran	-	-	Utuh	-
5	Situs Goa Gong	Campuran	-	-	-	-
6	Situs Ci Jambu	Campuran	-	-	Utuh	-
7	SUMUR GEMULING	Campuran	-	-	Utuh	-
8	Makam Sumolangga (Mahfud Abdul Rahman)	Campuran	-	-	Utuh	-
9	Makam Adipati Mangkupraja	Campuran	-	-	Utuh	-
10	Situs Batur Agung	Campuran	-	-	Utuh	-

10 of 125 items

< 1 2 3 4 5 ... 13 >

Show 10 Rows

Gambar 62. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA OOCB	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	Situs Goa Silumbu	Campuran	-	-	Utuh	-
2	Situs Goa Lawang	Campuran	-	-	Utuh	-
3	Candi Ngawen	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
4	Candi Gunung Wukir	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
5	SITUS KOMPLEKS VAN LITH MUNTILAN	Campuran	-	-	Utuh	-
6	Situs Brongsongan	Campuran	-	-	Utuh	-
7	Situs Bowonjan	Campuran	-	-	Utuh	-
8	Situs Sumberan	Campuran	-	-	Utuh	-
9	Situs Plandi	Campuran	-	-	Utuh	-
10	Candi Losari	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-

Gambar 63. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA OOCB	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	Perahu Kuno Rembang	Campuran	-	-	Utuh	-
2	Situs Plangatan	Campuran	-	-	Utuh	-
3	Candi Cetho	Campuran	-	-	Utuh	-
4	Candi Sukuh	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
5	Situs Menggung	Campuran	-	-	Utuh	-
6	Situs Riyanti	Campuran	-	-	Utuh	-
7	Situs Planggatan	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
8	Situs Purbakala Menggung	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
9	Situs Tanah Kritis	Campuran	-	-	Utuh	-
10	Situs Medang Kamulan	Campuran	-	-	Utuh	-

Gambar 64. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA OOCB	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	situs ngloram	Campuran	+	+	Tinggal Sebagian	+
2	situs blungun	Campuran	+	+	Utuh	+
3	situs sunggul	Campuran	+	+	Utuh	+
4	tapakan pengging	Campuran	+	+	Tinggal Sebagian	+
5	situs sembungan	Campuran	+	+	Utuh	+
6	situs medalem	Campuran	+	+	Utuh	+
7	situs kedinding	Campuran	+	+	Tinggal Sebagian	+
8	situs gua kidang	Campuran	+	+	Utuh	+
9	petilasan pertapaan ratu kalinyamat di pengkal	Campuran	+	+	Utuh	+
10	makam pangeran syarif	Campuran	+	+	Utuh	+

Gambar 65. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA OOCB	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	situs makam tumenggung cendol	Campuran	+	+	Utuh	+
2	Masjid Agung Demak	Campuran	+	+	Utuh	+
3	Kompleks Makam Astana Gedhong Kenep, Glagahwangi	Campuran	+	+	Utuh	+
4	Museum Kereta Api Ambarawa	Campuran	+	+	Utuh	+
5	SITUS KRAJAN CANDI	Campuran	+	+	Utuh	+
6	CANDI ASU	Campuran	+	+	Utuh	+
7	SITUS CANDI GARON	Campuran	+	+	Utuh	+
8	SITUS KRAJAN JAMBU	Campuran	+	+	Utuh	+
9	SITUS SIDOMUKTI ATAS	Campuran	+	+	Utuh	+
10	SITUS SIDOMUKTI	Campuran	+	+	Utuh	+

Gambar 66. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA OOCB	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	SITUS TEGALRECO	Campuran	+	+	Utuh	+
2	SITUS DOPLANG	Campuran	+	+	Utuh	+
3	SITUS KALITAMAN	Campuran	+	+	Utuh	+
4	SITUS NGASEM LOR	Campuran	+	+	Utuh	+
5	Situs Liyangan	Campuran	+	+	Utuh	+
6	Situs Liangan	Campuran	+	+	Utuh	+
7	Galangan Kapel, Dasun	Campuran	+	+	Utuh	+
8	Situs Plewangan	Campuran	+	+	Tinggal Sebagian	+
9	Petilasan Sunan Prawoto	Campuran	+	+	Tinggal Sebagian	+
10	Kompleks Peninggalan Sunan Kudus	Campuran	+	+	Utuh	+

Gambar 67. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA OOCB ↗?	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	Kompleks Makam dan Masjid Sunan Muria	Campuran	+	+	Utuh	+
2	Patlayam	Campuran	+	+	Tinggal Sebagian	+
3	Kompleks Mantingan	Campuran	+	+	Utuh	+
4	Situs Candi	Campuran	+	+	Utuh	+
5	situs makam Citrosoeman	Campuran	+	+	Utuh	+
6	situs makam	Campuran	+	+	Utuh	+
7	situs makam ki gedé Bangsri	Campuran	+	+	Tinggal Sebagian	+
8	situs punden Kawak	Campuran	+	+	Utuh	+
9	petilasan pertapaan Ratu Kalinyamat Sonder	Campuran	+	+	Utuh	+
10	makam sunan nyamplungan	Campuran	+	+	Utuh	+

Gambar 68. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA OOCB ↗?	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	Kompleks Makam Pangeran Maoneng	Campuran	+	+	Tinggal Sebagian	+
2	Yoni II	Campuran	+	+	Utuh	+
3	Makam Syekh Hasan Syidiq	Campuran	+	+	Utuh	+
4	Bendungan Sungapan	Campuran	+	+	Utuh	+
5	Stasiun Kereta Api Pemalang	Campuran	+	+	Utuh	+
6	Gua Jepang	Campuran	+	+	Utuh	+
7	Gunung Jimat	Campuran	+	+	Tinggal Sebagian	+
8	Situs Platawangan	Campuran	+	+	Tinggal Sebagian	+
9	Situs Candi Arca	Campuran	+	+	Tinggal Sebagian	+
10	Stasiun Kereta Api Petarukan	Campuran	+	+	Utuh	+

Gambar 69. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA OOCB ↗?	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	Stasiun Kereta Api Comal	Campuran	+	+	Utuh	+
2	Batu Lumpang-Pariji	Campuran	+	+	Tinggal Sebagian	+
3	Batu Santi Mujung	Campuran	+	+	Tinggal Sebagian	+
4	Watu Gentong	Campuran	+	+	Utuh	+
5	Watu Mesjid	Campuran	+	+	Utuh	+
6	Makam Belanda	Campuran	+	+	Utuh	+
7	Kompleks Makam Yudhanegara	Campuran	+	+	Tinggal Sebagian	+
8	Situs Jatisari	Campuran	+	+	Utuh	+
9	Kompleks Makam Tegal Arum	Campuran	+	+	Utuh	+
10	Lokasi Fosil-fosil Prasejarah Semojo	Campuran	+	+	Utuh	+

Gambar 70. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA OOCB ↗‡	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	Pendopo Kab.Brebes	Campuran	-	-	Utuh	-
2	Makam dan Paku Tanah Jawa	Campuran	-	-	Utuh	-
3	Situs Lumpang Maniyasih	Campuran	-	-	Utuh	-
4	Keraton Kasunanan Surakarta	Campuran	-	-	Utuh	-
5	Kompleks Stasiun Jebres	Campuran	-	-	Utuh	-
6	Stadion Sriwedari	Campuran	-	-	Utuh	-
7	Benteng Vastenburg	Campuran	-	-	Utuh	-
8	Taman Balekambang	Campuran	-	-	Utuh	-
9	Taman Jurug	Campuran	-	-	Utuh	-
10	TMP Kusuma Bhakti	Campuran	-	-	Utuh	-

Gambar 71. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA OOCB ↗‡	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	Makam Putri Cempo	Campuran	-	-	Utuh	-
2	Taman Banjarsari	Campuran	-	-	Utuh	-
3	Lokasi Eks Pabrik Es Sanipetjo	Campuran	-	-	Utuh	-
4	Monumen 45 Banjarsari	Campuran	-	-	Utuh	-
5	Monumen Pasar Nongko	Campuran	-	-	Utuh	-
6	Taman Sriwedari	Campuran	-	-	Utuh	-
7	Petilasan Pangeran Mangkubumi	Campuran	-	-	Utuh	-
8	Makam Ki Ageng Henis	Campuran	-	-	Utuh	-
9	Makam Ki Padmosusastro	Campuran	-	-	Utuh	-
10	Pura Mangkunegaran	Campuran	-	-	Utuh	-

Gambar 72. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA OOCB ↗‡	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	Gereja Blenduk (Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Immanuel)	Campuran	-	-	Utuh	-
2	Benteng Willem II 11-22/5ma/TB/12	Campuran	-	-	Utuh	-
3	Candi Lawang	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
4	Kompleks Petirtaan Cabeian Kunti	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
5	Kompleks Masjid Ciptomulyo	Campuran	-	-	Utuh	-
6	Umbul Pengging	Campuran	-	-	Utuh	-
7	Candi Sewu	Campuran	-	-	Utuh	-
8	candi plaosan	Campuran	-	-	Utuh	-
9	Candi Sojiwan	Campuran	-	-	Utuh	-
10	Kompleks Makam dan Masjid Gala	Campuran	-	-	Utuh	-

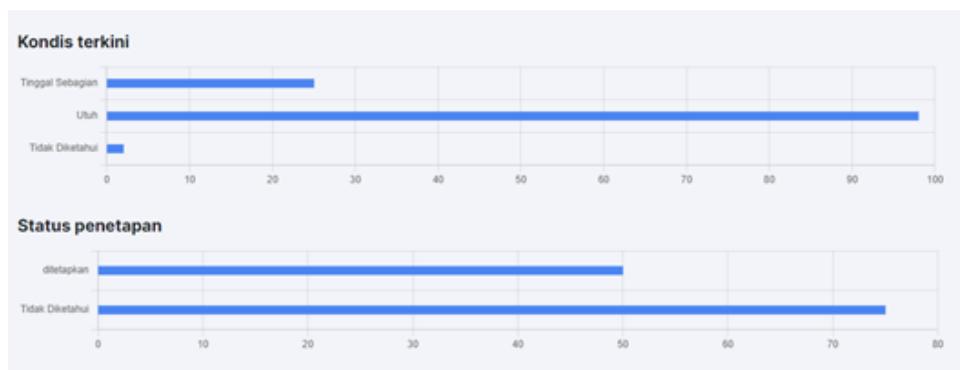
Gambar 73. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA OOCB ↗‡	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	Kompleks Fransiscan Xavirius	Campuran	-	-	Utuh	-
2	Makam Ki Ageng Pandanaran (Makam Tembayat)	Campuran	-	-	-	-
3	Situs Kalongan	Campuran	-	-	Utuh	-
4	Bekas Kraton Kartasura	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
5	PETIRTAAN BALEKAMBANG	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	Diketola Pemerintah

Gambar 74. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).



Gambar 75. Grafik Agregasi OPK Situs Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.pppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

Kawasan Cagar Budaya

NO	NAMA OOCB	SIFAT KAWASAN	FUNGSI KAWASAN	PERIODE KAWASAN	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	Demogra Pelabuhan 1	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
2	MAKAM DAUN LUMBUNG	Campuran	-	-	Utuh	-
3	Stasiun Besar Cilacap	Campuran	-	-	Utuh	-
4	MAKAM ADIPATI CILACAP KARANGSUCI	Campuran	-	-	Utuh	-
5	Percandian Dieng	Campuran	-	-	Utuh	-
6	Borobudur	Campuran	-	-	Utuh	-
7	Prambanan	Campuran	-	-	Utuh	-
8	Sapta Tirta Pablongan	Campuran	-	-	Utuh	-
9	Situs Wahy Kandang	Campuran	-	-	Utuh	-
10	Kasarian Diponegoro	Campuran	-	-	Utuh	-

Gambar 76. Daftar Jumlah OPK Kawasan Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.pppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA OOCB	SIFAT KAWASAN	FUNGSI KAWASAN	PERIODE KAWASAN	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	Sangiran	Campuran	-	-	Utuh	-
2	Kawasan Museum Kartini	Campuran	-	-	Utuh	-
3	Kawasan Gunung Kendeng	Campuran	-	-	Utuh	-
4	Situs Batu Bata Merah di Sawah / Sawah Boto	Campuran	-	-	Utuh	-
5	Kompleks Percandian Gedongsongo	Campuran	-	-	Utuh	-
6	Kawasan Laweyan	Campuran	-	-	Utuh	-
7	Kawasan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	Campuran	-	-	Utuh	-
8	Keraton Puro Mangkunegaran	Campuran	-	-	Utuh	-
9	Lingkungan Pemukiman Baluwarti	Campuran	-	-	Utuh	-
10	Lingkungan Pemukiman Laweyan	Campuran	-	-	Utuh	-

Gambar 77. Daftar Jumlah OPK Kawasan Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.pppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).



Gambar 78. Grafik Agregasi OPK Kawasan Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

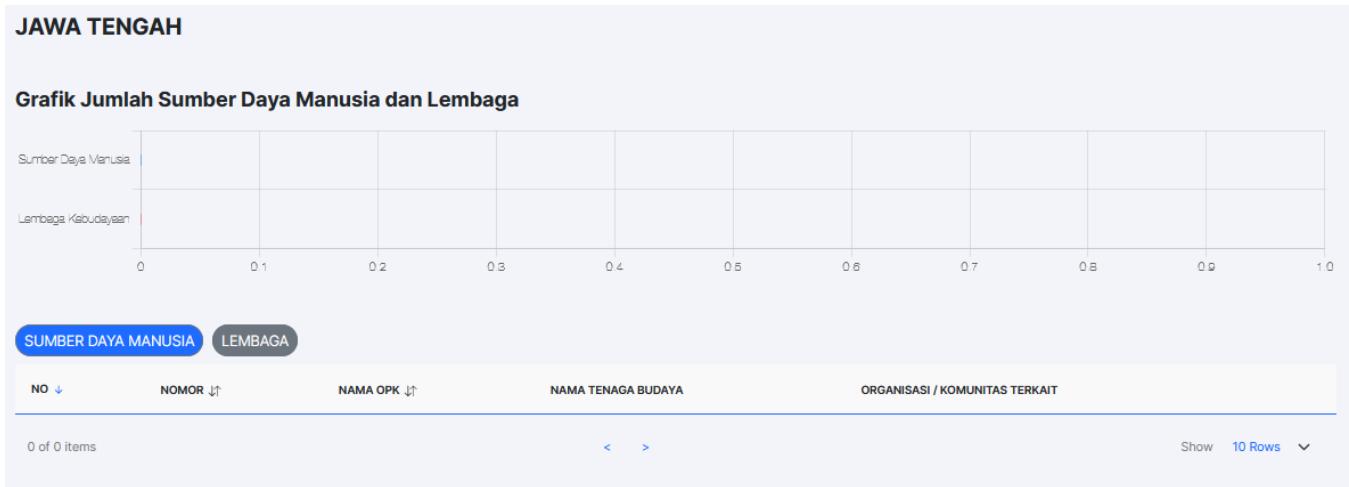
No	Kategori Cagar Budaya	Status			Jumlah
		Valid	Draft	Revisi	
1.	Benda	0	0	0	0
2.	Bangunan	0	0	0	0
3.	Struktur	0	0	0	0
4.	Situs	208	862	1	1071
5.	Kawasan	22	204	0	226
	Total	230	1066	1	1297

Tabel 11. Daftar Cagar Budaya

(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://daopobud.kemdikbud.go.id/) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

BAB V

DATA SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN



Gambar 79. Grafik Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

Data Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Lembaga Kebudayaan di laman Dapobud masih kosong. Sehingga untuk data pada Bab ini masih menggunakan data PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

V.1. Manuskrip

Manuskrip yang ada di Jawa Tengah dilihat dari Jumlah Pengakses terdiri atas:

Nama Manuskrip	Jumlah Pengakses
Klenteng Po An Thian	8000
Suluk Saridin (Syekh Jangkung)	75
Masjid Aulia Sapuro	6000
Muskhaf Al Quran Raksasa	6000
Tafsir Jalalain	5
Kitab Abiyanul Khawa'Ij, Jilid.1,2,5	5
Alfiyah Ibnu Malik	5
Kitab Berjanji	40
Kitab Muslihat, Karya Kh. Ahmad Rifai, Tentang Mewaris	4
Kitab Mufid, Karya Syaikh Abu Abdullah Muhammad Bin Sulaiman Al Jazuli	4
Babuk Haikal	35

Naskah Maulid Qashor	3
Kitab Abiyanun Hawa`Ij Jilid 6	3
Babad Pati	250
Ahmad Widodo	25
Door Duisternis Tot Licht	20000
Tafsir Al-Qur'an Bahasa Jawa	20000
Kongso Adu Jago	20000
Al-Mursyid Al-Wajîz Fî 'Ilm Al-Qur'âن Al-Azîz.	2000
Hadis Al-Ghaithir Lan Syarah Al-Barzanji	2000
Serat Rara Mendut Dan Pranacitra	20
Kitab Pawukon	20
Kitab Pengobatan	20
Serat Sirwenda Danurwenda	20
Prasasti Plandi	20
Kitab Ngelmu Kalam	2
Kitab Ri`Ayatul Himmah Jilid.9	2
Al'quran Tua (Ukuran 1 M X 75 Cm)	2
Kitab Wadlihah	2
Naskah Teks Kajen	15
Serat Baron Sekeber	15
Prasasti Tuk Mas	15
Naskah Pakem Kajen	15
Kitab Nadoman	1000
Pratelan Wontênipun Candhi, Rêca, Patilasan, Padusan Sasaminipun, Ing Bawah Kabupatèn Kitha Surakarta	100
Masjid Jami' Kauman Kota Pekalongan	10.000
Ngakoid'so	10
Hadis Mabawi	10
Fiqih Taqrih	10
Sarahmajnuq Tholab	10

Fathul Hotip Al Mujib	10
Serat Cebolek	10
Kitab Manaqib Mbah Nur Anam	10
Kitab Manhaj Diwan Nadhor Karya Kyai Amir Bin Idris	10
Kitab Tafsir Quran Karya Kyai Amir Bin Idris	10
Turunan Mushaf Al-Quran Karya Kyai Nur Iman	10
Kitab As'aful Matoli' Karya Kyai Amir Bin Idris	10
Kitab Gunyatut Tholab Karya Kyai Amir Bin Idris	10
Naskah Kuno Tulisan Tangan (Ahli Waris Sunsn Kalijaga)	10
Babad Banyumas	1
Babad Arungbinang	1
Babad Ambal	1
Babad Mangir	1
Kitab Jalalain	0
Kitab Ushul	0
Sejarah Pejajaran	0
Sejarah Janjang	0
Babad Sruni	0
Punika Serat Sedjarah Babad Onje	0
Tapel Adam	0

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

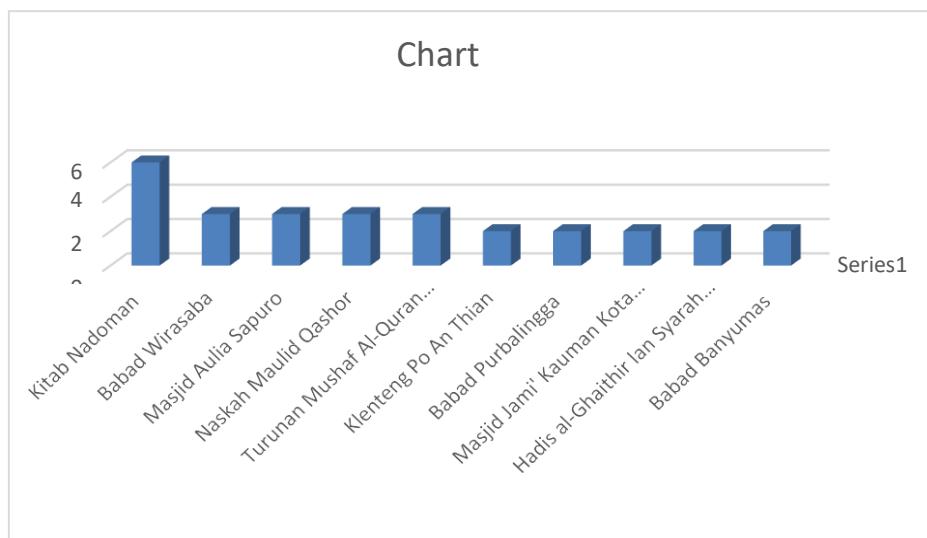
Data di atas menunjukkan bahwa banyak manuskrip yang terbuka untuk diakses oleh masyarakat umum, namun banyak juga manuskrip yang tidak mudah bahkan tidak pernah diakses oleh masyarakat umum. Hal ini dimungkinkan karena banyaknya manuskrip yang masih menjadi koleksi pribadi.

Manuskrip yang ada di Jawa Tengah dilihat dari Jumlah Lembagaterdiri dari :

Nama Manuskrip	Jumlah Pengelola
Kitab Nadoman	6
Babad Wirasaba	3
Masjid Aulia Sapuro	3
Naskah Maulid Qashor	3
Turunan Mushaf Al-Quran karya Kyai Nur Iman	3

Klenteng Po An Thian	2
Babad Purbalingga	2
Masjid Jami' Kauman Kota Pekalongan	2
Hadis al-Ghaithir lan Syarah al-arzanji	2
Babad Banyumas	2

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



Dari data di atas menunjukkan bahwa masih banyak manuskrip-manuskrip yang menjadi koleksi pribadi sehingga perlu dukungan pemerintah dan memunculkan yayasan-yayasan yang peduli terhadap manuskrip.

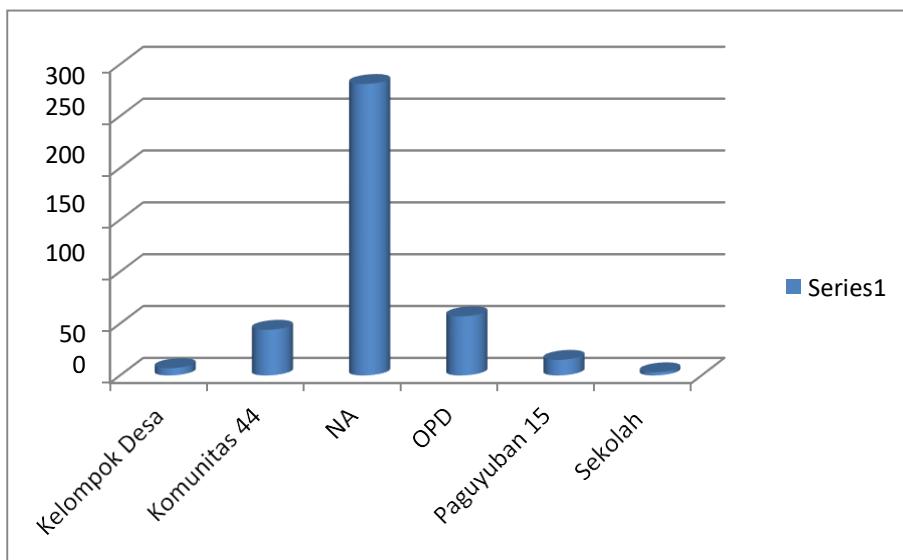
V.2. Tradisi Lisan

Dari data yang ada, jumlah penutur tradisi lisan adalah 1.086.208 orang. Data tersebut masih perlu diverifikasi, karena kemungkinan pengisian databorang tidak berdasarkan survei.

Manuskrip yang ada di Jawa Tengah dilihat dari Jumlah Lembaga terdiri atas:

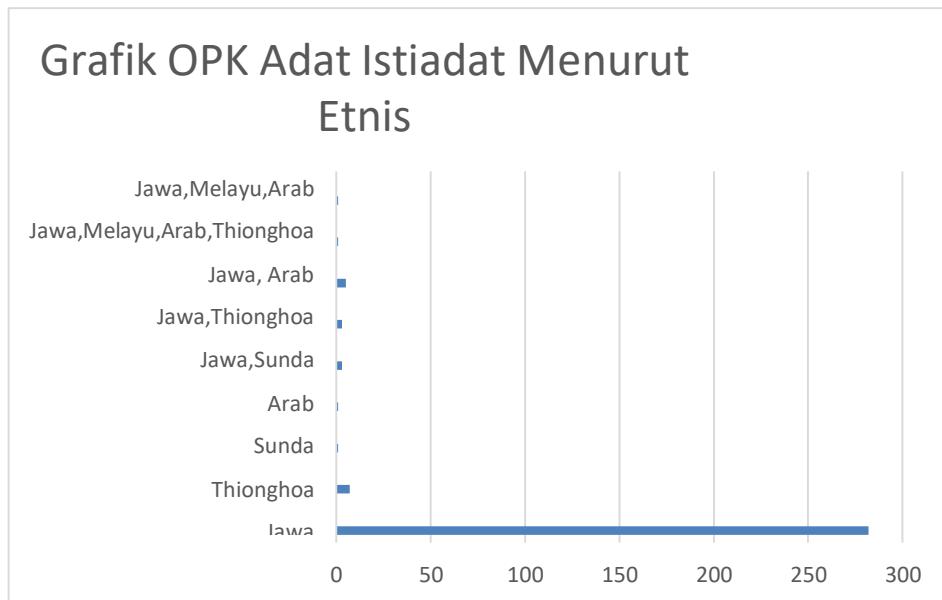
Lembaga	Jumlah
Kelompok Desa	7
Komunitas 44	44
NA	281
OPD	57
Paguyuban 15	15
Sekolah	3
	407

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



Berdasarkan data di atas, ternyata banyak kabupaten/kota tidak mengisiborang berkaitan dengan lembaga pengelola tradisi lisan dan bisa dikategorikan dalam kelompok *Not Available*.

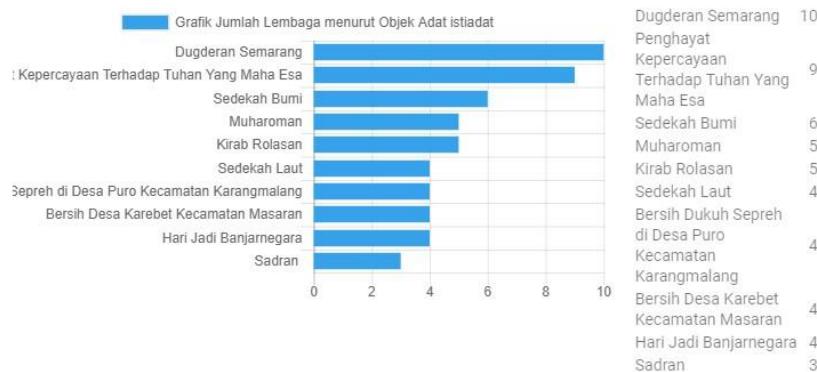
V.3. Adat Istiadat



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data sesuai diagram di atas, etnis yang sering melakukan/melaksanakan kegiatan adat istiadat adalah Jawa.

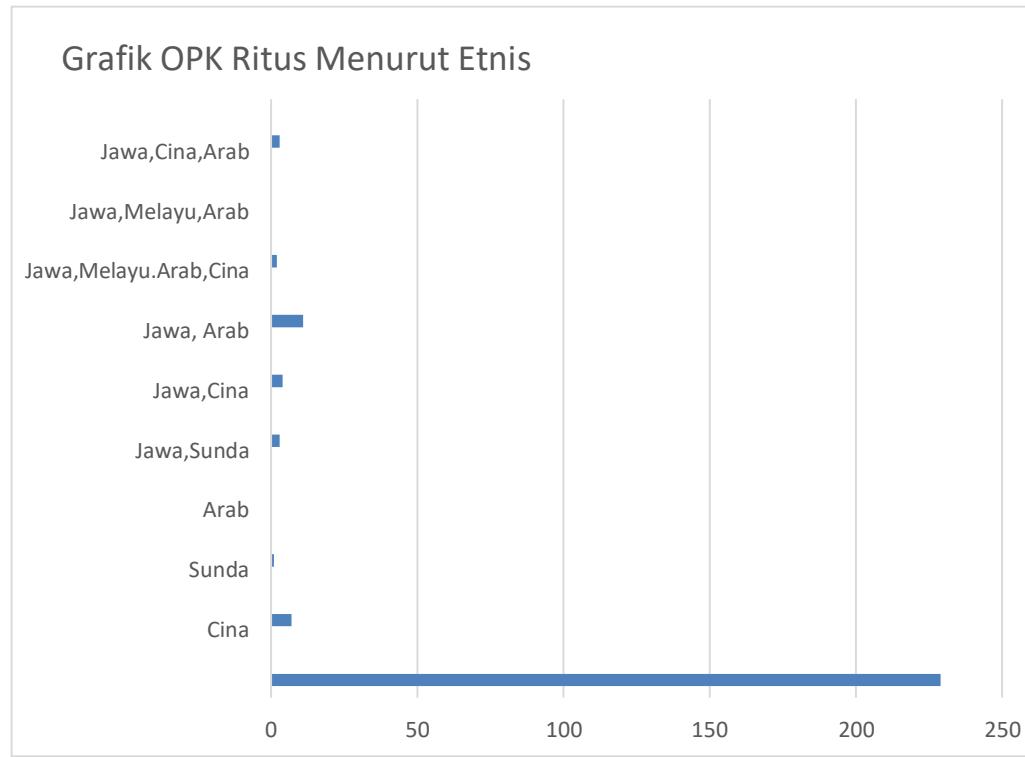
Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Adat istiadat



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data sesuai diagram di atas, terdapat beberapa lembaga yang menangani adat istiadat di Provinsi Jawa Tengah.

V.4. Ritus



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut grafik di atas, terdapat 10 OPK ritus menurut etnis dan yang paling dominan adalah etnis Jawa.

Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Ritus



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

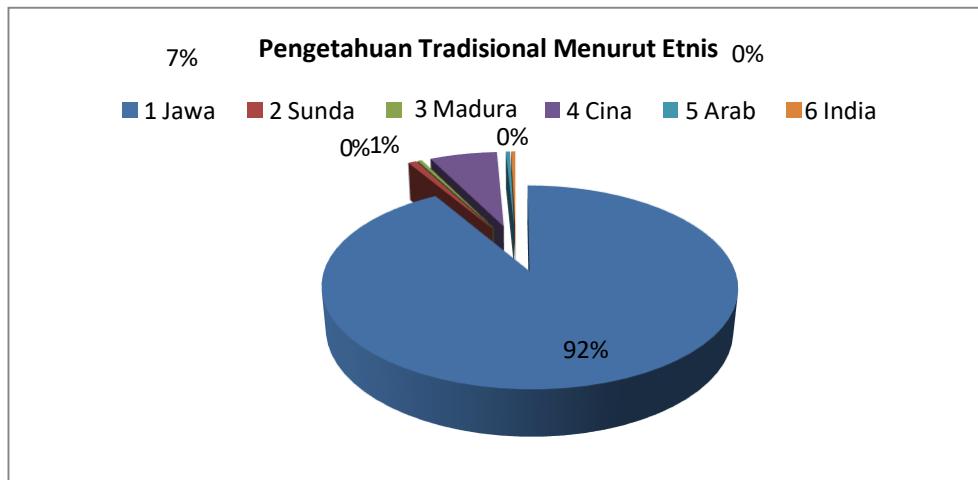
Menurut grafik di atas, terdapat 10 lembaga objek ritus dan didominasi oleh masyarakat nelayan/pesisir pantai di Provinsi Jawa Tengah.

V.5. Pengetahuan Tradisional

No	Klasifikasi	Pengetahuan Tradisional Menurut Etnis
1	Jawa	225
2	Sunda	2
3	Madura	1
4	Cina	16
5	Arab	1
6	India	1

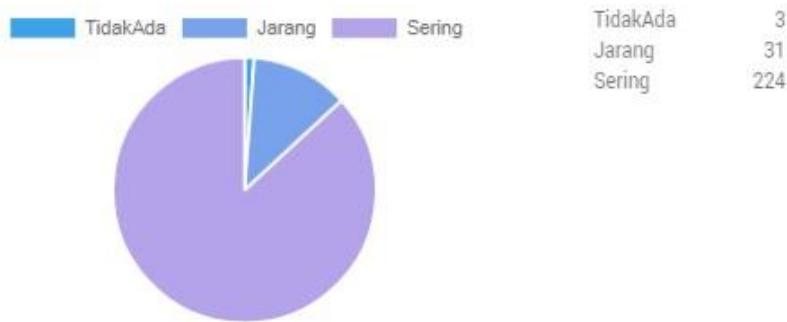
Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Grafik Pengetahuan Tradisional Menurut Etnis



Menurut agregasi data yang terdapat dalam grafik di atas, OPK Pengetahuan Tradisional yang ada di provinsi Jawa Tengah etnis yang melaksanakan adalah Jawa, Sunda, Madura, Cina, Arab, dan India.

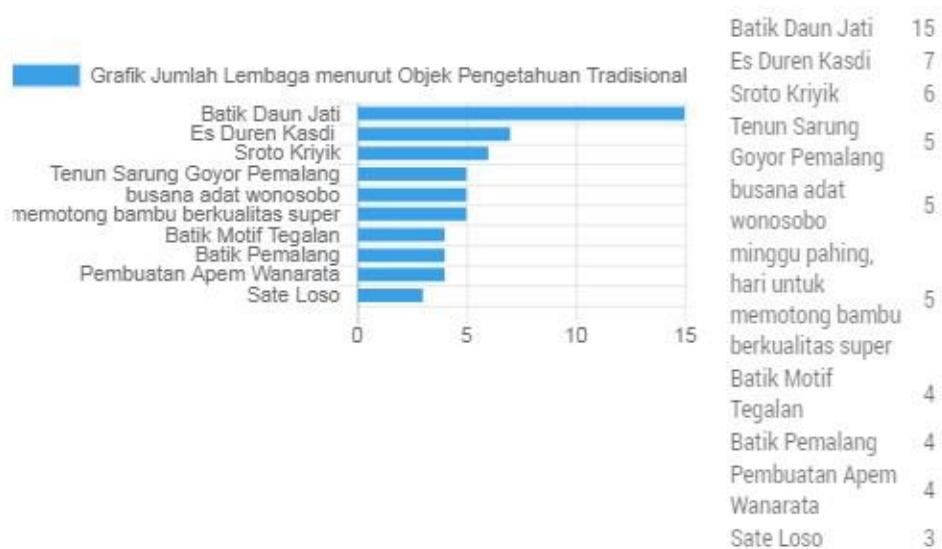
Diagram OPK Pengetahuan Tradisional Menurut Frekuensi Pelaksanaan



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi dalam diagram OPK di atas maka pengetahuan tadisional menurut frekuensi pelaksanaannya adalah Sering 87%, Jarang 12 %, dan Tidak ada 1%.

Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Pengetahuan Tradisional

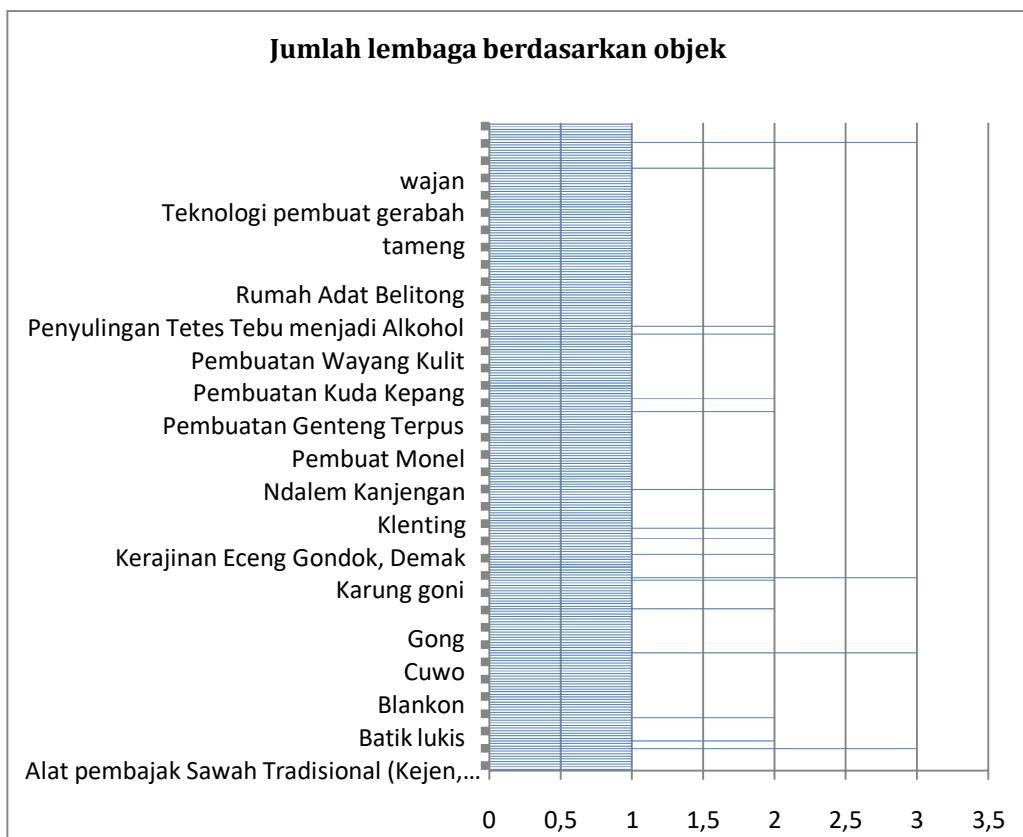


Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data yang terdapat dalam grafik di atas, jumlah lembaga pengetahuan tradisional paling banyak adalah Batik daun jati

V.6. Teknologi Tradisional

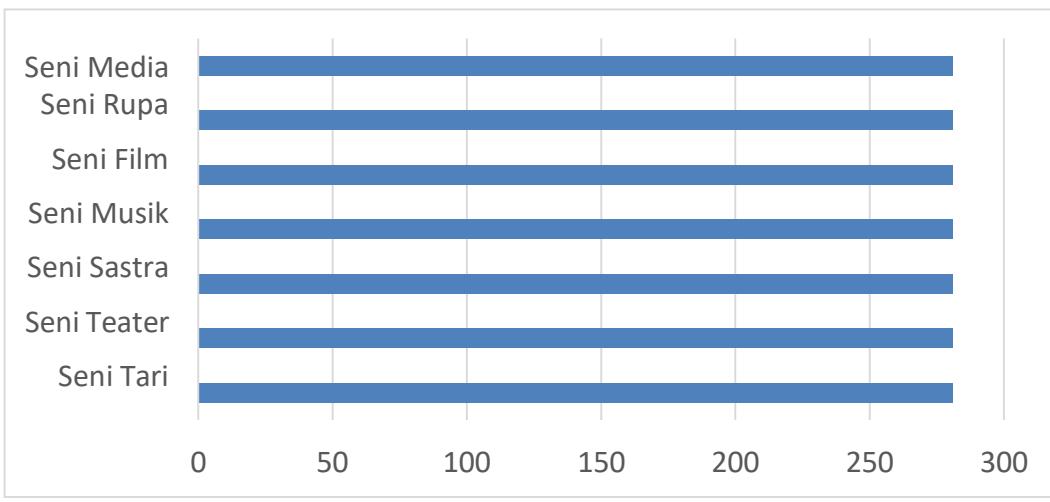
Grafik jumlah lembaga menurut Objek teknologi tradisional



Berdasarkan agregasi data yang terdapat dalam grafik di atas, jumlah lembaga menurut objek teknologi tradisional yang terbanyak adalah dokar, ani-ani, dan anyaman bambu.

V.7. Seni

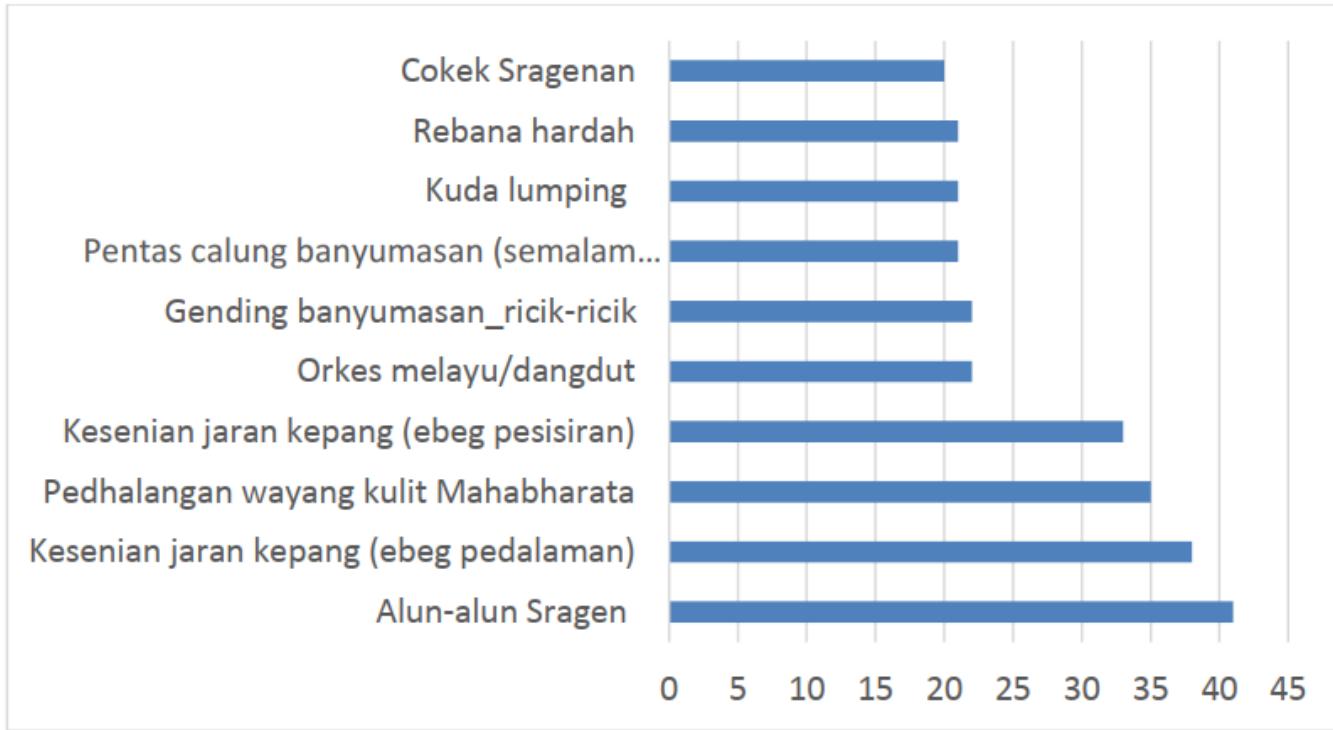
Grafik Jumlah Pelaku/ Pendukung Seni Menurut Cabang Seni



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Munurut agregasi data yang ada di OPK Seni, terdapat 1.967 pelaku/pendukung seni yang dibagi menjadi 7 kelompok seni. Masing-masing kelompok berjumlah 281 pelaku/pendukung seni. Jumlah ini diperoleh dari 13 kabupaten/kota yang telah mengisi borang.

Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Seni



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan agregasi data yang terdapat dalam grafik di atas, jumlah lembaga terbanyak dalam objek seni adalah Alun-alun Sragen sebanyak 41 macam.

V.8. Bahasa

Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa dari sekitar 80 juta orang penutur bahasa Jawa, 73 persennya adalah penutur bahasa Jawa asli (bahasa jati) yang menggunakan bahasa tersebut dalam lingkup keluarga. Adapun 27 persen sisanya adalah orang Jawa yang tidak lagi menggunakan bahasa Jawa di dalam keluarga.

Bahasa Jawa adalah bahasa yang berasal dari Pulau Jawa. Secara administrasi, Provinsi Jateng terdiri atas 29 kabupaten dan enam kota. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jateng terdiri atas lima dialek, yaitu 1) dialek Solo-Yogya, 2) dialek Pekalongan, 3) dialek Wonosobo, 4) dialek Banyumas, dan 5) dialek Tegal. Model revitalisasi mengarah pada peningkatan penguasaan bahasa dan sastra daerah melalui ranah pendidikan, baik sebagai muatan lokal (mulok) maupun ekstrakurikuler. Peserta kegiatan revitalisasi model ini adalah siswa sekolah.

Berikut wujud komitmen pemda Provinsi Jateng dalam merevitalisasi Bahasa Jawa. Dalam pendidikan formal, Pemprov Jateng melibatkan satuan pendidikan formal di Jawa Tengah. Upaya tersebut dibingkai dalam regulasi pelindungan bahasa daerah di Jawa Tengah (bahasa Jawa). Pertama, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57/2013 yang kemudian diubah menjadi Nomor 55 Tahun 2014 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.

Kedua, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 895.5/01/2005 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Jawa Tahun 2004 untuk Jenjang Pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/ MTs, dan SMA/SMALB/SMK/MA Negeri dan Swasta Propinsi Jawa Tengah.

Ketiga, Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 424/13242 tanggal 23 Juli 2013 tentang Implementasi Muatan Lokal (Mulok) Bahasa Jawa di Jawa Tengah yang memuat Bahasa Jawa sebagai mulok wajib di Jateng; mulok dilaksanakan secara terpisah atau berdiri sendiri pada struktur kurikulum 2013; dan jam pelajaran mulok tetap dialokasikan pada struktur kurikulum 2013, alokasi waktu pelajaran dua jam per minggu.

Keempat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa. Perda yang dikeluarkan oleh Gubernur ini menjadi payung hukum peraturan daerah di kabupaten/kota tentang Pelindungan Bahasa Daerah. Sebab, tanpa peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, dukungan dari kabupaten/kota juga tidak akan berjalan.

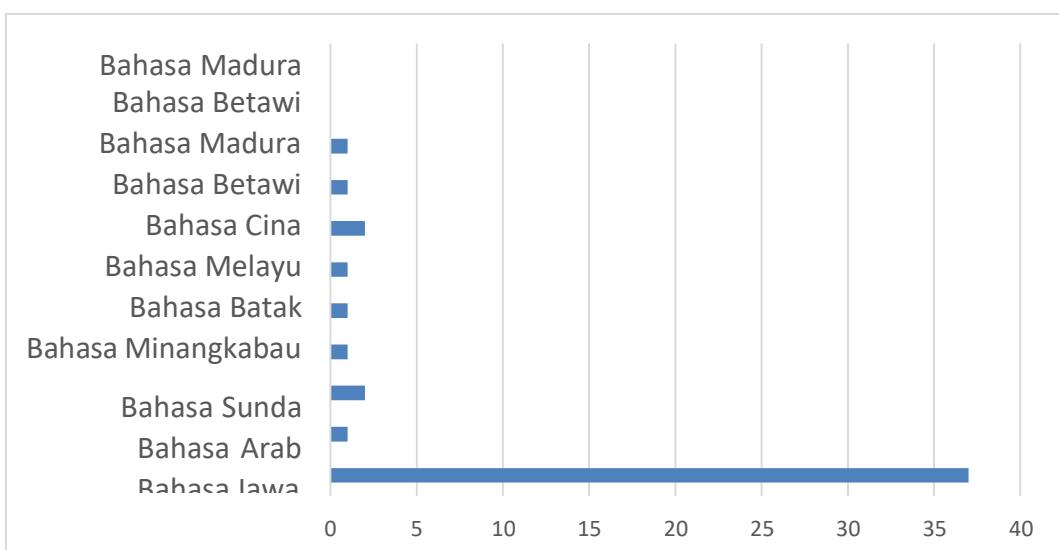
Kelima, Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 430/9525 tertanggal 7 Oktober 2014 tentang Penggunaan Bahasa Jawa untuk Komunikasi Lisan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jateng.

Langkah strategis Pemprov Jateng terhadap pelindungan Bahasa Jawa juga dikemas dengan “Membumikan Spirit Rumah Budaya”, yaitu predikat yang disematkan kepada lokasi/tempat yang potensial terjadi interaksi budaya, yaitu keluarga, sekolah, ragam tempat lokus interaksi maupun ruang maya.

Statistik OPK Bahasa

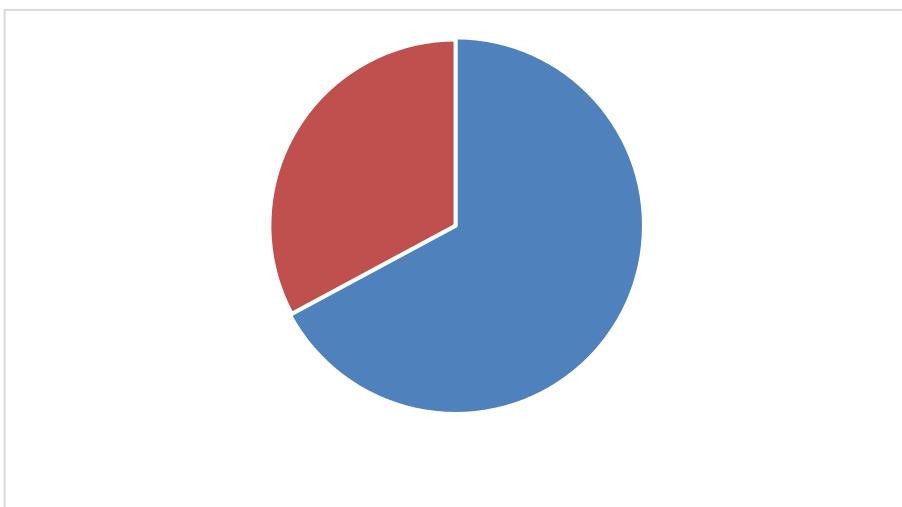
Jumlah Objek Bahasa	70	
Jumlah Lembaga	85	
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	32
	Sarana Pemerintah	38
Jumlah Produk Hukum		3
Jumlah Permasalahan	51	

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



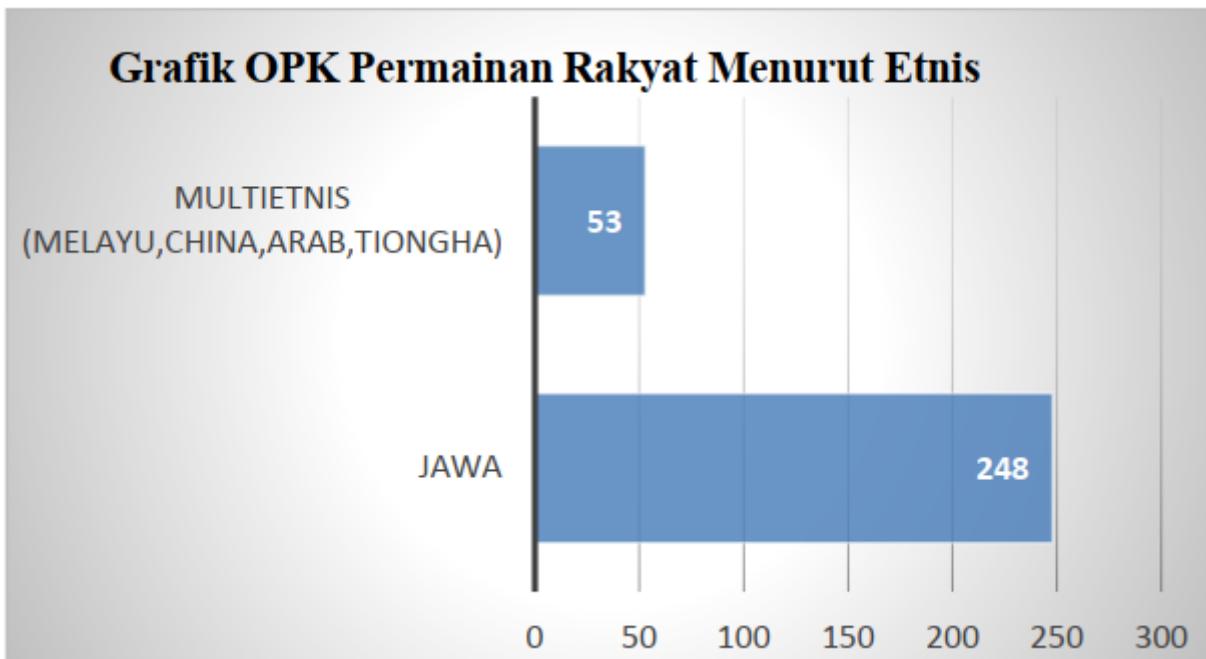
Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Diagram OPK Bahasa Menurut Status Penggunaan



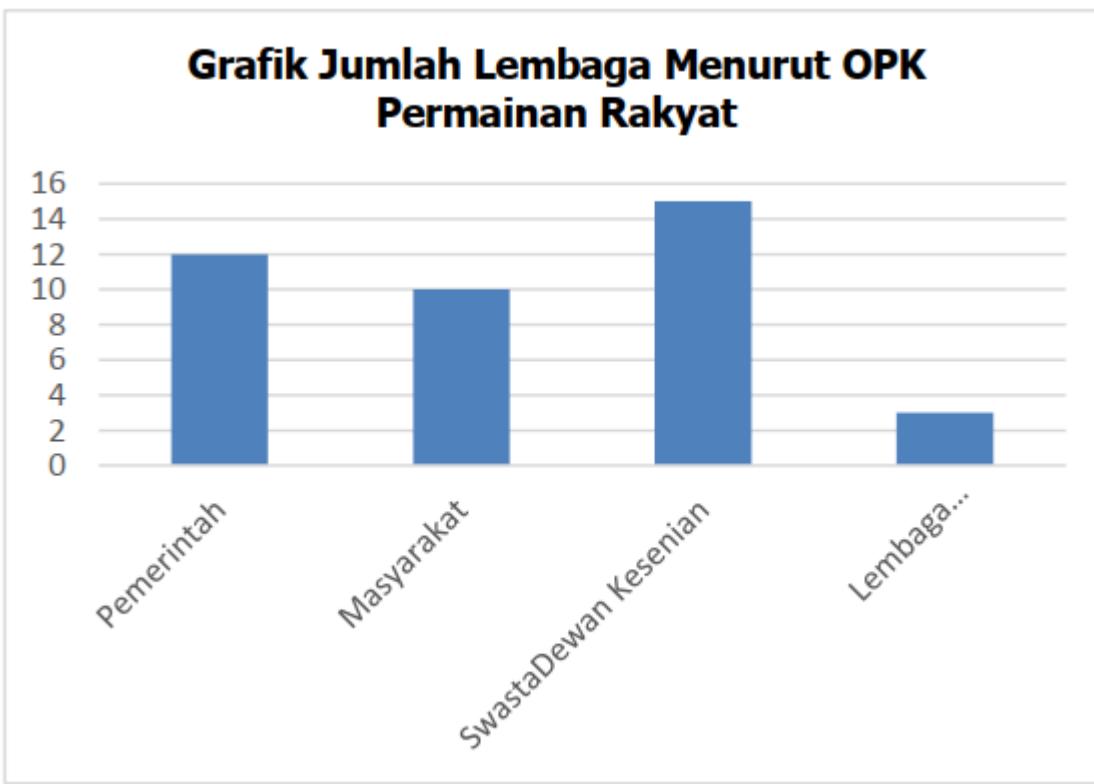
Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

V.9. Permainan Rakyat



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

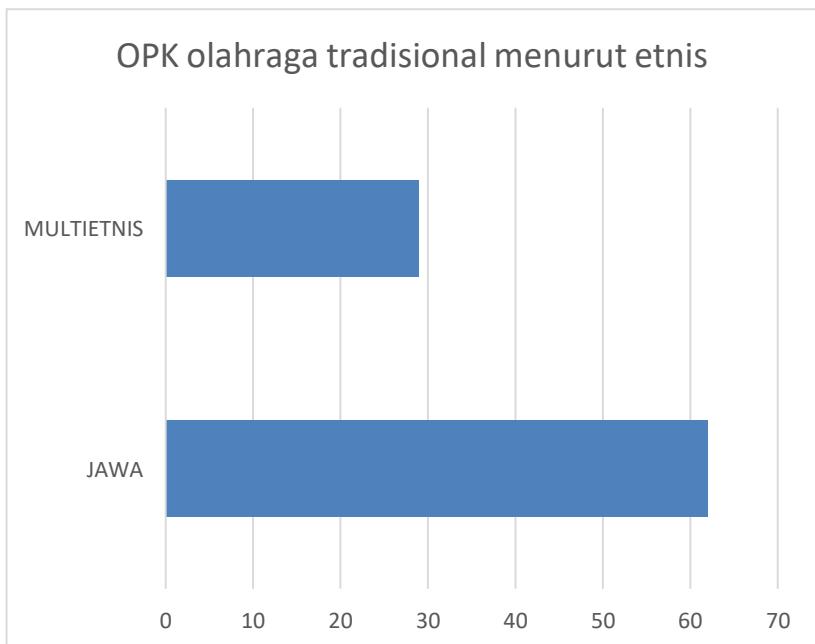
Menurut agregasi data yang didapat dalam grafik di atas, OPK permainan rakyat yang ada di Jawa Tengah lebih dominan dimainkan oleh etnis Jawa sebesar 248 dan multietnis yang mempermainkan permainan rakyat di Jawa Tengah sebanyak 53.



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data yang didapat dalam grafik di atas, jumlah lembaga yang menangani OPK Permainan Rakyat adalah 12 Lembaga Pemerintah, 15 Dewan Kesenian/Swasta, 10 lembaga masyarakat, 3 Lembaga Pendidikan.

V.10. Olahraga Tradisional

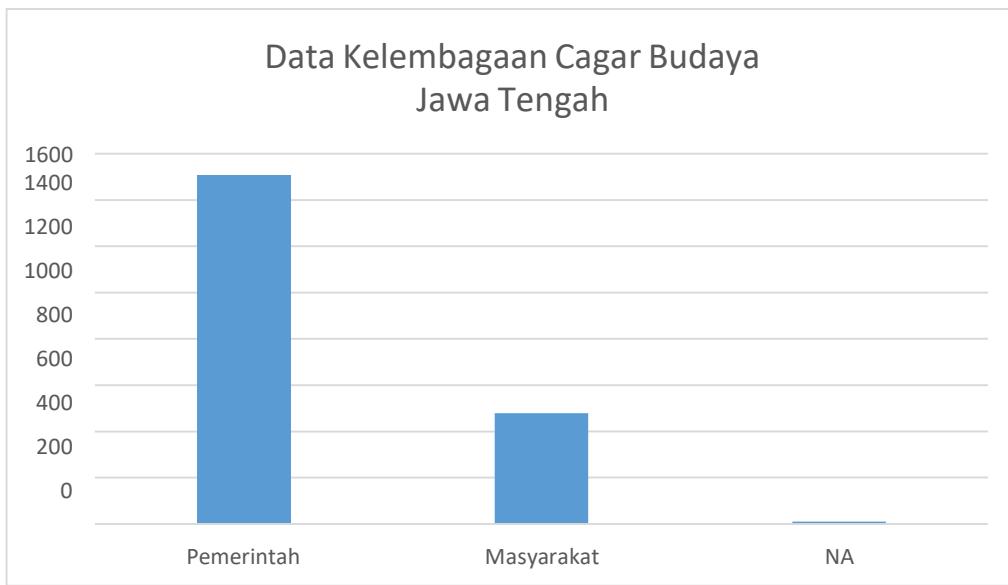


Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data yang didapat dalam grafik di atas, OPK olahraga tradisional yang ada di Jawa Tengah lebih dominan dilakukan oleh etnis Jawa sebesar 62 dan multietnis yang mempermudah permainan rakyat di Jawa Tengah sebanyak 29.

V.11. Cagar Budaya

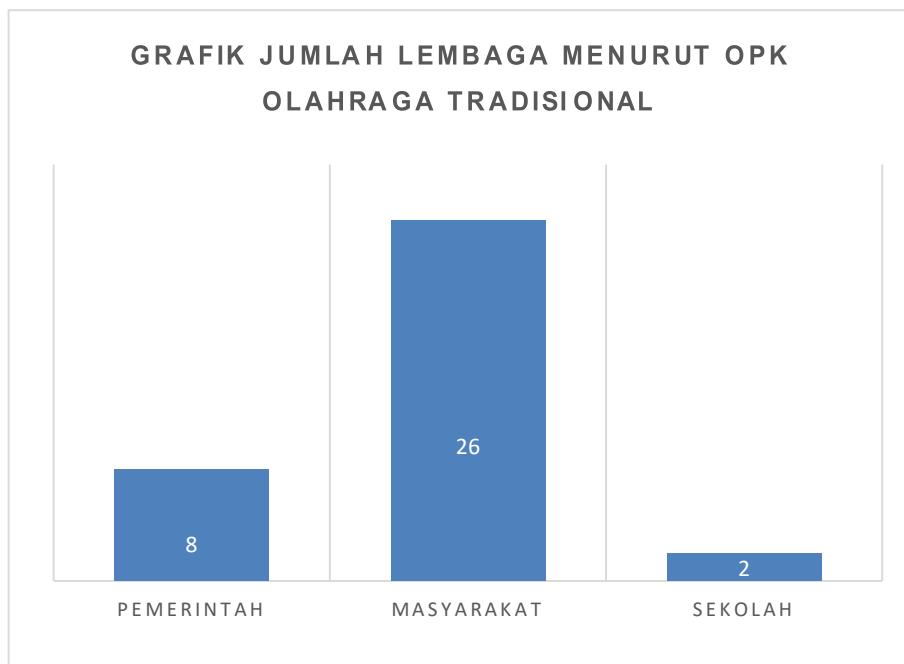
Data kelembagaan bidang Cagar Budaya



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Dari Diagram Batang cagar budaya di Jawa Tengah tersebut dapat terbaca sebagai berikut ; Data kepemilikan Cagar budaya yang ada di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah sejumlah 1504, baik Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab./Kota dan

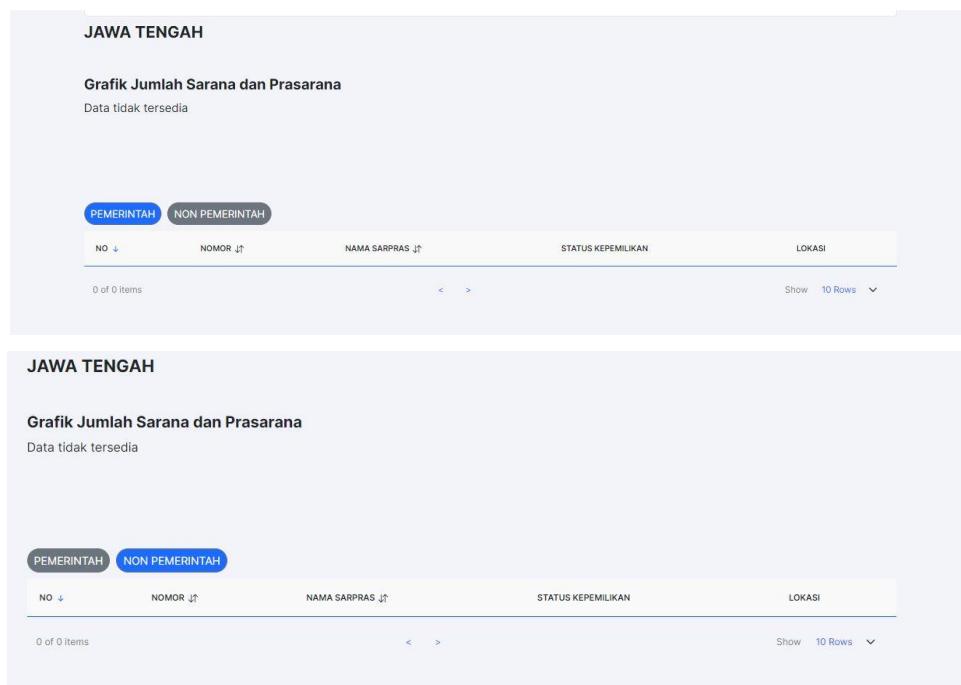
Pemerintah Desa. Sedangkan cagar budaya yang dimiliki oleh masyarakat sejumlah 478 dan 9 cagar budaya yang Not Available (NA).



Menurut agregasi data yang didapat dalam grafik di atas, jumlah lembaga yang menangani OPK olahraga tradisional adalah 8 Lembaga Pemerintah, 26 Lembaga masyarakat dan 2 Lembaga Pendidikan.

BAB VI

DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN

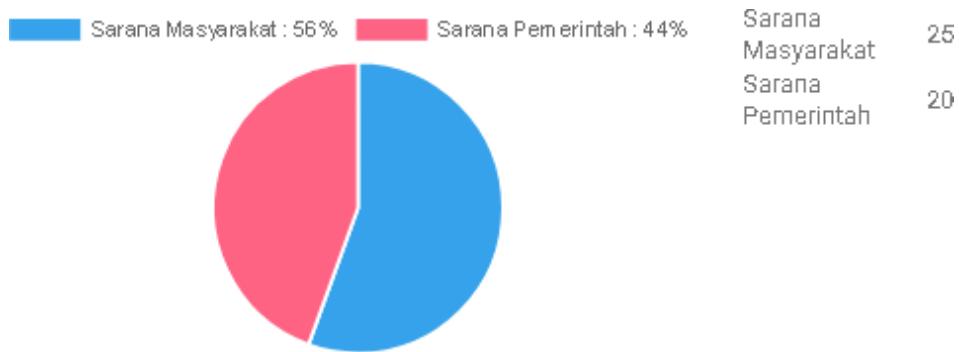


Gambar 80 . Grafik Jumlah Sarana dan Prasarana

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

Data sarana dan prasarana kebudayaan pada tahun 2023 di laman web dapobud belum tersedia, sehingga untuk PPKD ini masih menggunakan data PPKD tahun 2018

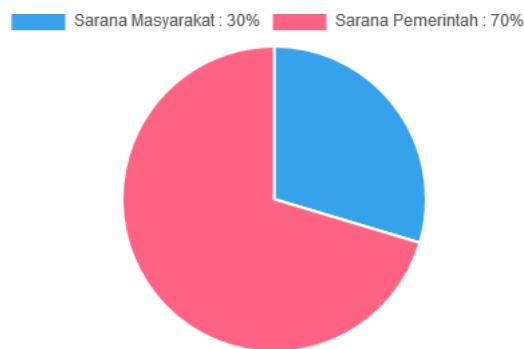
VI.1. Manuskrip



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Apabila dibandingkan dengan data pengakses maka akan ditemukan ketimpangan dengan data sarana prasarana ini. Artinya pendataan belum sesuai dengan kenyataan di lapangan. Masih sebatas asumsi.

VI.2. Tradisi Lisan

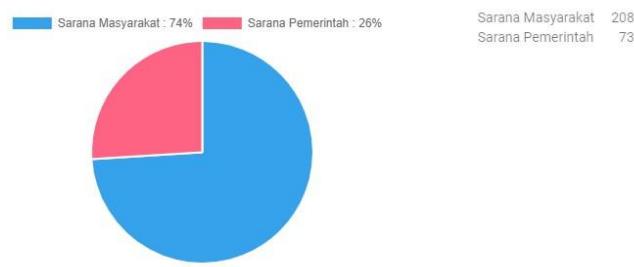


Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Pemerintah memiliki keterlibatan yang lebih tinggi dibanding dengan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana.

VI.3. Adat Istiadat

Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Adat istiadat



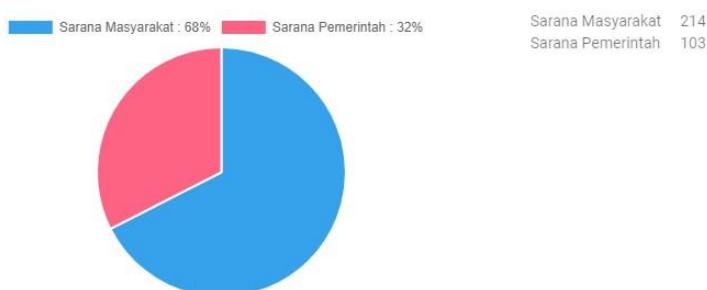
Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data sesuai diagram di atas, sarana prasarana yang dikelola dan diusahakan oleh masyarakat lebih banyak dengan jumlah 208 sarana prasarana.

VI.4. Ritus

Menurut agregasi data sesuai diagram di atas, jumlah sarana prasarana yang dikelola dan diusahakan oleh masyarakat sebanyak 214.

Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Ritus

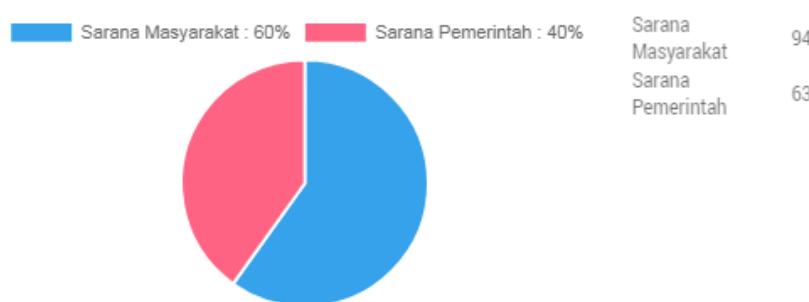


Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

VI.5. Pengetahuan Tradisional

Menurut agregasi data yang didapat dalam diagram di atas, sarpras pendukung OPK pengetahuan tradisional jumlah paling banyak dari masyarakat mencapai 60%

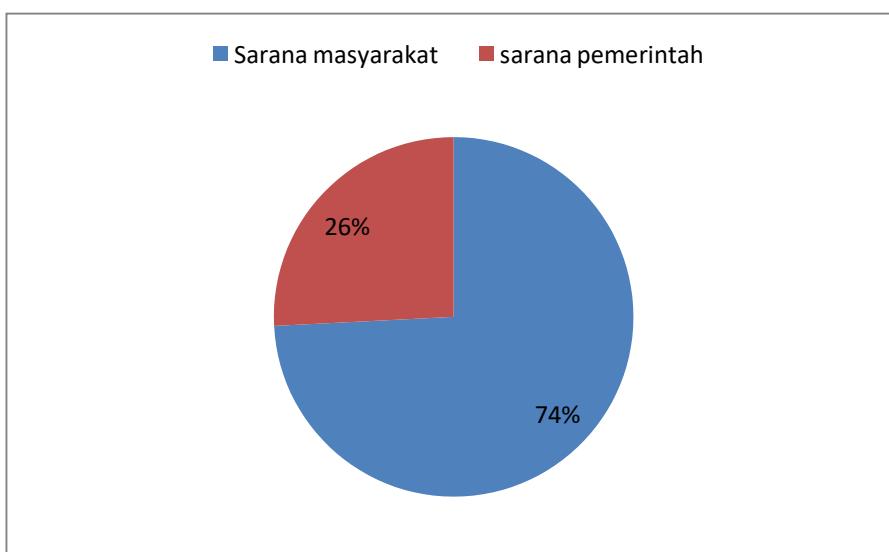
Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Pengetahuan Tradisional



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

VI.6. Teknologi Tradisional

Diagram presentase sarana prasarana yang mendukung OPK Teknologi tradisional

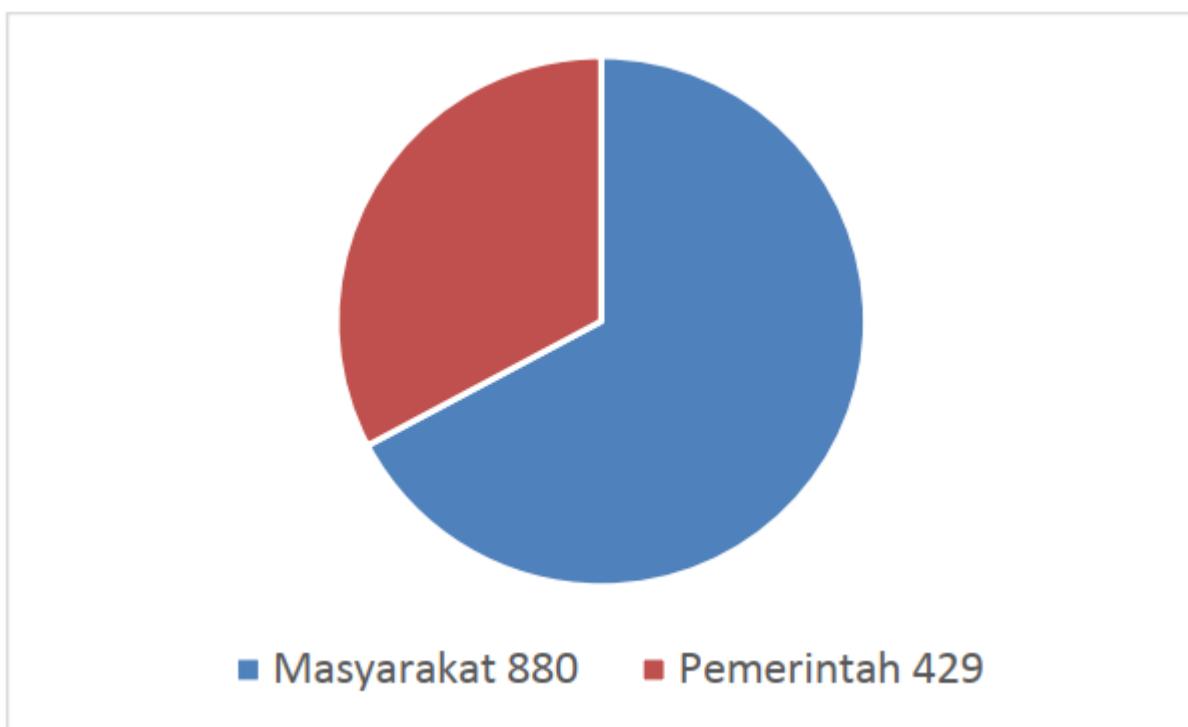


Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan agregasi data yang terdapat dalam grafik di atas, sarpras pendukung OPK teknologi tradisional yang paling banyak jumlahnya berasal dari sarana masyarakat mencapai 74%.

VI.7. Seni

Daftar Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Seni

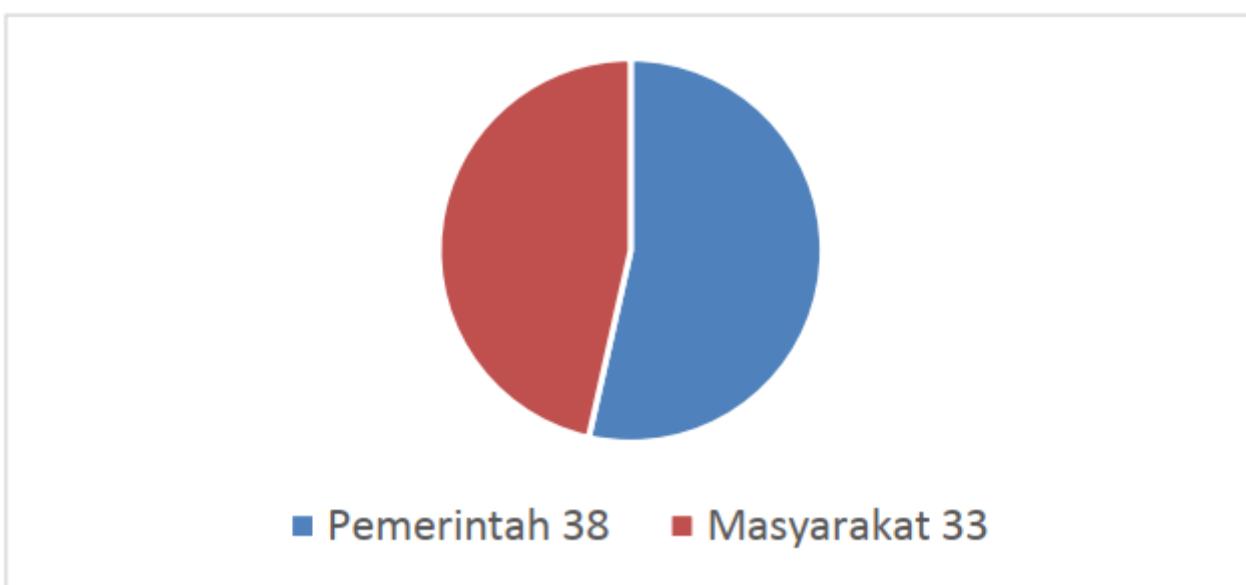


Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data yang di dapat dalam diagram di atas, sarana prasarana pendukung OPK Seni sebanyak 1.309 macam. Jumlah ini dari 11 kabupaten/kotayang telah mengisi borang. Dari jumlah yang ada, dibagi menjadi saranaprasarana masyarakat sebanyak 880 macam dan sarana prasarana pemerintah 429 macam.

VI.8. Bahasa

Diagram Presentase Sarana Prasarana yang mendukung OPK Bahasa



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

OPK Bahasa

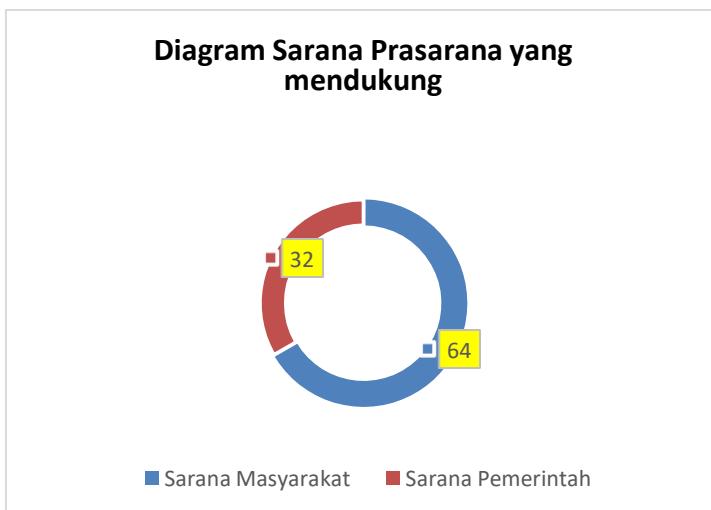
NO	MASYARAKAT	PEMERINTAH
1	Kamus bahasa Semarangan	Gedung pembelajaran
2	Pasar	Tidak diketahui
3	Lapangan	Kantor desa/ kelurahan
4	Laptop/Internet	Kantor kecamatan
5	Pasar	Kantor OPD (terminal, rumah sakit, gedung sebaguna, taman rekreasi)
6	Lapangan	Gedung sekolah
7	Laptop/Internet	Alun-alun
8	Rumah Tokoh Masyarakat	Laptop/ internet
9	Buku Kamus	Kantor desa/ kelurahan
10	Koran Radar Tegal	Kantor kecamatan
11	Kamus Bahasa Jawa	Kantor OPD (terminal, rumah sakit, gedung serbaguna, taman rekreasi)
12	Kamus Bahasa Banyumasan	Gedung sekolah
13	Gedung Sekolah	Alun-alun
14	Komputer	Laptop/ internet
15	Gedung Pesemuan	Pendopo Ki Gede Sebayu Kota Tegal
16	Kamera Video	Pendopo Kecamatan se-Kota Tegal
17	Kamus Bahasa Sunda	Pendopo Kelurahan se-Kota Tegal
18	Gedung Sekolah	Gedung kearsipan dan perpustakaan Kota Tegal
19	Ruang Kelas Lembaga Les Bahasa Mandarin	Gedung Taman Budaya Kota Tegal
20	sanggar masyarakat	Gedung adipura Kota Tegal
21	Aula / gedung pertemuan	Gedung serba guna Kota Tegal
22	Gedung pesantren	Kamus Bahasa Jawa
23	Bangunan Pesantren	Kamus Bahasa Banyumasan
24	Kamus Arab-Indonesia	Mobil film
25	Bangunan sekolah	Kamera video

26	Kampus Perguruan Tinggi	Kamus Bahasa Sunda
27	Perlengkapan laboratorium Bahasa Arab	Gedung sekolah
28	tempat dan masyarakat	Studio radio

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data yang didapat dari OPK Bahasa 13 kabupaten/kota yang telah mengisi borang, ada 71 sarana prasarana yang mendukung OPK Bahasa. Jumlah tersebut kemudian dikelompokkan menjadi sarana prasarana masyarakat sebanyak 32 macam dan sarana prasarana pemerintah sebanyak 38 macam. Terdapat tambahan data pada kelompok masyarakat, sehingga sarana prasarana menjadi 33 macam.

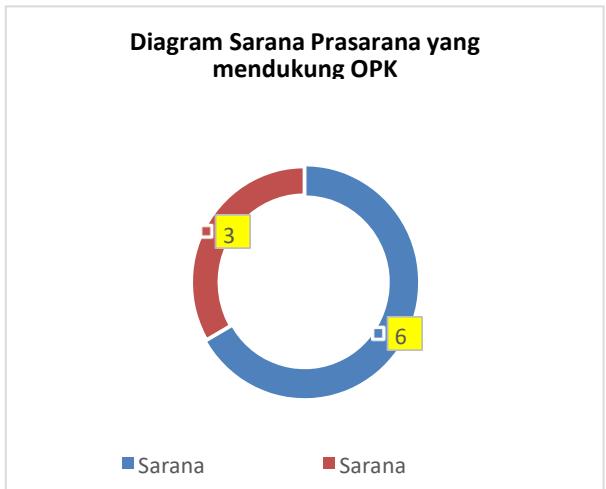
VI.9. Permainan Rakyat



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data yang didapat dalam grafik di atas, jumlah sarana prasarana fisik yang mendukung OPK Permainan Rakyat adalah 64 sarana prasarana dari masyarakat dan 32 sarana prasarana dari pemerintah.

VI.10. Olahraga Tradisional

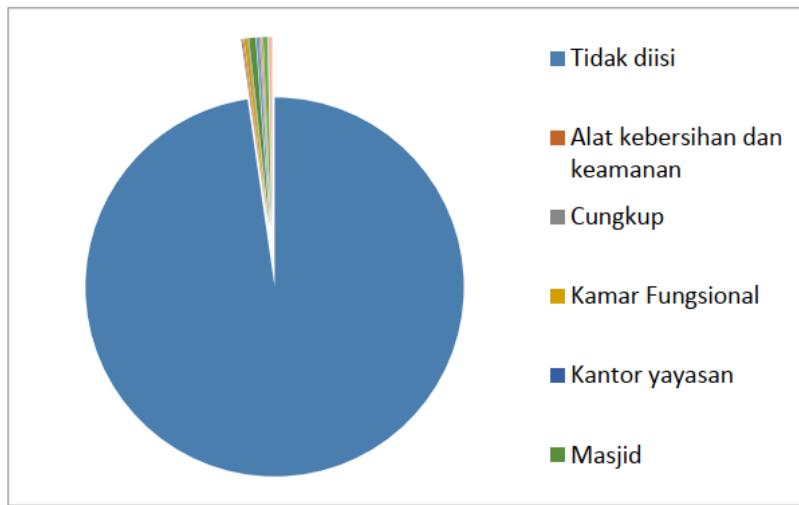


Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data yang didapat dalam grafik di atas, jumlah sarana prasarana fisik yang mendukung OPK Olahraga Tradisional adalah 64 sarana prasarana dari masyarakat dan 32 sarana prasarana dari pemerintah.

VI.11. Cagar Budaya

Grafik Sarana Prasarana Cagar Budaya di Jawa Tengah



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Dari Grafik di atas dapat terbaca sejumlah 1963 tidak diisi untuk kolom sarana dan prasarana ada beberapa kemungkinan, yang pertama sarana dan prasarana memang tidak tersedia untuk jenis cagar budaya, kedua sarana dan prasarana tersedia namun tidak tertulis di dalam isian data aplikasi sehingga sejumlah 1963 bukan merupakan hasil kuantitatif secara real di lapangan. Dari grafik di atas, irisan data yang menerangkan ketersedian sarana dan prasarana pada cagar budaya di Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

Ketersedian sarana dan prasarana berupa alat kebersihan sejumlah 2, Cungkup sejumlah 2, kantor yayasan sejumlah 1, kamar fungsional sejumlah 6, Masjid sejumlah 11, Masjid Makam sejumlah 5, Pendapa sejumlah 1, Pagar sejumlah 1, Pos Penjaga sejumlah 1, Taman sejumlah 1, Tembok keliling sejumlah 7, Tempat Ibadah sejumlah 6, Tempat Wudhu sejumlah 6.

BAB VII
PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI HASIL FGD

VII.1. Manuskip

	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian				
						2025	2026	2027	2028	2029
Pelindungan										
Inventarisasi	Terbatasnya jumlah manuskrip yang diinventarisasi	Melakukan upaya inventarisasi keberadaan manuskrip	Terinventaris manuskip	Dinas kebudayaan, dinas arsip dan perpusatkan, pemerintah desa	- Pencarian dan penemuan manuskrip - Penyusunan template/form pendataan - Inventarisasi Manuskrip	Terinventaris asinya 35 manuskrip pertahun				
Pengamanan	Belum optimalnya upaya	Mewujudkan pemutakhiran data	Terwujudnya pemutakhiran data	Dinas kebudayaan, dinas	- Pengumpulan data dalam	Bertambahnya 5 data dalam	Bertambahnya 5 data dalam	Bertambahnya 5 data dalam	Bertambahnya 5 data dalam	Bertambahnya 5 data dalam

	pemutakhiran data manuskrip dalam sistem pendataan terpadu	iran data manuskrip dalam sistem pendataan terpadu	manuskrip dalam sistem pendataan terpadu	arsip dan perpusatkan	- Memasukan data dalam sistem - Pemutakhiran data	dapoud setiap tahun	dalam dapoud setiap tahun	dapoud setiap tahun	dapoud setiap tahun	dapoud setiap tahun
Pemeliharaan	Belum optimalnya upaya pemeliharaan manuskrip agar tidak rusak, hilang dan musnah	Mewujudkan pemeliharaan manuskrip agar tidak rusak, hilang dan musnah	Terselamatkan manuskrip dari kerusakan, kehilangan, dan kemusnahan	Dinas kebudayaan, dinas arsip dan perpusatkan, dan perpustakaan, pemerintah desa	- Mengidentifikasi jenis dan ragam manuskrip - Melakukan upaya preventif - Melakukan upaya kuratif - Terpeliharaanya manuskrip	Digitalisasi 3 manuskrip pertahun	Digitalisasi 3 manuskrip pertahun	Digitalisasi 3 manuskrip pertahun	Digitalisasi 1 manuskrip pertahun	Digitalisasi 1 manuskrip pertahun

	Belum optimalnya upaya digitalisasi manuskrip	Digitalisasi data base	Terdigitalisasinya database manuskrip	Admin database, IT	- Digitalisasi data base - Tersusunnya data base secara terintegrasi					
Penyelamatan										
Restorasi	Masih banyak manuskrip yang mengalami kerusakan	Mewujudkan restorasi manuskrip	Terwujudnya restorasi manuskrip yang rusak	Dinas kebudayaan, dinas aris dan perpusatkan, perpusatkaan, perpusatkaan	- Mengidentifikasi kerusakan manuskrip - Dilakukan upaya restorasi - Manuskrip terselamatkan	2 manuskrip nilai penting yang rusak teridentifikasi	1 manuskrip nilai penting yang rusak terestorasi	1 manuskrip nilai penting yang rusak terestorasi	1 manuskrip terselamatkan	1 manuskrip terselamatkan
Pengembangan										
Kajian	Belum optimalnya kajian tentang	Transliterasi, transkripsi, alih	Tersedia kajian manuskrip	Pemilik manuskrip baik dari dinas	- Transkripsi, transliterasi, alih bahasa	Terwujudnya sistem pengkajian manuskrip	Terwujudnya mekanisme transliterasi, penerjemahan	penerbitan manuskrip secara berkelanjutan	Terbentuknya tata kelola pengembangan	Terwujudnya ekosistem pengembangan manuskrip yang sistematis

	manuskrip	bahasa, pengkajian, sosialisasi		terkait maupun individu	- Analisis isi dan fisik manuskrip	yang berkelanjutan dan tersambung dengan keperluan pemanfaatan		minimal 1 manuskrip	n manuskrip yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan	dan berkelanjutan
Pemanfaatan										
Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan manuskrip yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat	Menjadikan substansi manuskrip sebagai sumber pendapat masyarakat	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Pemilik manuskrip dan masyarakat	- Pengemasan manuskrip sebagai daya tarik wisata - Penyajian/display manuskrip	Terwujudnya mekanisme pemanfaatan manuskrip untuk penguatan pendidikan karakter	Terwujudnya mekanisme pemanfaatan ekonomi atas manuskrip yang menjaga kaidah pelestarian	Terwujudnya mekanisme pemanfaatan manuskrip untuk tujuan diplomasi budaya	Terlaksananya aktualisasi nilai-nilai manuskrip di sekolah sekolah dan masyarakat umum	Minimal 1 manuskrip yang menjadi sumber belajar

Membangun Karakter Bangsa	Belum optimalnya manuskrip sebagai media membangun karakter bangsa	Menjadikan substansi manuskrip sebagai salah satu muatan lokal dalam pendidikan baik formal maupun non formal	Menjadikan substansi mansukrip sebagai media membangun karakter bangsa	Peserta didik, guru, masyarakat	- Sosialisasi Pembuatan Kurikulum - Pembuatan bahan ajar - Pengajaran di kelas	1 kali kegiatan sosialisasi pertahun				
Pembinaan										
SDM	Terbatasnya SDM yang mampu melakukannya	Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan	Tersedianya SDM yang kompeten	Pengelola manuskrip	- Pelatihan Standarisasi dan sertifikasi SDM	1 kali kegiatan pelatihan pertahun				

	transliterasi, alih aksara, dan alih bahasa untuk manuskrip	n dan pelatihan								
--	---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

VII.2. Tradisi Lisan

	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian				
						2025	2026	2027	2028	2029
Pelindungan										
Inventari sasi	Belum optimalnya inventarisasi tradisi lisan	Melakukan upaya inventarisasi tradisi lisan	Melakukan pendataan tradisi lisan	Dinas kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pencarian dan penemuan tradisi lisan - Penyusunan template/ form pendataan - Inventarisasi Tradisi Lisan 	<ul style="list-style-type: none"> Terinventarisasinya 35 Tradisi Lisan pertahun 	<ul style="list-style-type: none"> Terinventarisasinya 35 Tradisi Lisan pertahun 	<ul style="list-style-type: none"> Terinventarisasinya 35 Tradisi Lisan pertahun 	<ul style="list-style-type: none"> Terinventarisasinya 35 Tradisi Lisan pertahun 	<ul style="list-style-type: none"> Terinventarisasinya 35 Tradisi Lisan pertahun
Pengamanan	Belum optimalnya upaya pemutakhiran data tradisi lisan dalam sistem pendataan terpadu	Mewujudkan pemutakhiran data tradisi lisan dalam sistem terpadu	Terwujudnya pemutakhiran data tradisi lisan dalam sistem terpadu	Dinas kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data - Memasukan data dalam sistem - Pemutakhiran data 	<ul style="list-style-type: none"> Bertambahnya 5 data dalam setiap tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Bertambahnya 5 data dalam setiap tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Bertambahnya 5 data dalam setiap tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Bertambahnya 5 data dalam setiap tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Bertambahnya 5 data dalam setiap tahun

Pemelihraan	Belum optimalnya upaya pemeliharaan tradisi lisan	Mewujudkan pemeliharaan tradisi agar tidak hilang dan musnah	Terselamatkan nya dari kehilangan, kemusnahaan	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi tradisi lisan - Terpeliharanya dialek lokal dalam bahasa daerah 	<ul style="list-style-type: none"> 1 dialek local pertahun 1 dialek local menjadi muatan local pelajaran sekolah kab/kot 1 dialek local menjadi muatan local pelajaran sekolah kab/kot 1 dialek local menjadi muatan local pelajaran sekolah kab/kot 1 dialek local pertahun 1 dialek local menjadi muatan local pelajaran sekolah kab/kot 	<ul style="list-style-type: none"> 1 dialek local pertahun 1 dialek local menjadi muatan local pelajaran sekolah kab/kot 1 dialek local pertahun 1 dialek local menjadi muatan local pelajaran sekolah kab/kot 1 dialek local pertahun 1 dialek local menjadi muatan local pelajaran sekolah kab/kot
	Belum optimalnya upaya digitalisasi tradisi lisan	Melakukan Digitalisasi data base	Terdigitalisasi ya database tradisi lisan	Admin database, IT	<ul style="list-style-type: none"> - Digitalisasi data base - Tersusunya data base secara terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Digitalisasi 3 pertahun Tradisi Lisan 	<ul style="list-style-type: none"> Digitalisasi 3 pertahun Tradisi Lisan
Penyelamatan	Belum optimalnya upaya menghidupkan dan menjaga ekosistem tradisi lisan	Pewarisan pada generasi berikutnya	Terwariskannya tradisi lisan ke generasi berikut	Masyarakat umum dan generasi muda	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi - Proses Pembelajaran - Penyebaran desiminasi 	<ul style="list-style-type: none"> 1 kali kegiatan sosialisasi pertahun 	<ul style="list-style-type: none"> 1 kali kegiatan sosialisasi pertahun 1 kali kegiatan sosialisasi pertahun 1 kali kegiatan sosialisasi pertahun

	Masih belum optimal upaya penyelamatan tradisi lisan	Dilakukan uapaya revitalisasi tradisi lsian	Terselamatkan nya tradisi lisan	Penutur tradisi lisan	- Menghidupkan kembali tradisi lisan	1 objek revitalisasi pertahun				
Pengembangan										
Kajian	Belum optimalnya kajian terhadap tradisi lisan	Tersedianya kajian tradisi lisan	Tersedia kajian tradisi lisan	Pelaku tradisi lisan	- Melakukan wawancara/ penggalian informasi tradisi lisan - Proses Penulisan Kajian - Hasil Kajian	1 objek terkaji pertahun				
Inovasi	Belum optimalnya pengayaan keberagamaan/ keberagamaan/ inovasi tradisi lisan	Terciptanya pengayaan keberagaman/ inovasi tradisi lisan	Terciptanya pengayaan keberagaman/ inovasi tradisi lisan	Pelaku tradisi lisan	- Rekonstruksi aslinya - Pengayaan keberagaman - Kajian, pengayaan teknik kajian, pengayaan performen, pengayaan teknologi yang digunakan	1 objek terkaji pertahun				

Pemanfaatan											
Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan tradisi lisan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat	Menjadikan substansi tradisi lisan sebagai sumber pendapatan masyarakat	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Pelaku tradisi lisan dan masyarakat	- Pengemasan tradisi lisan - Penyajian/perform tradisi lisan	1 Kali kegiatan pelatihan	Tradisi Lisan menjadi sumber muatan local di sekolah	Tradisi Lisan menjadi content dalam media sosial	Terdigitalisasinya Tradisi Lisan	Content creator menggunakan tradisi lisan sebagai muatan dan sumber pembuatan konten	
Membangun Karakter Bangsa	Belum optimalnya tradisi lisan sebagai media untuk membangun karakter bangsa	Menjadikan tradisi lisan sebagai salah satu muatan lokal dalam pendidikan baik formal maupun non formal	Menjadikan tradisi lisan sebagai media untuk membangun karakter bangsa	Peserta didik, guru, masyarakat	- Sosialisasi - Pembuatan Kurikulum - Pengajaran di kelas						
Sumber Daya Manusia	Belum tersedianya	Peningkatan kapasitas	Tersedianya SDM yang kompeten	Pelaku tradisi lisan	- Pelatihan - Standarisasi dan sertifikasi						

	SDM yang kompeten	SDM tradisi lisan							
Sarana dan Prasarana	Belum tersedianya pranata tradisi lisan yang memanfaatkan teknologi	Teknologi digunakan dalam pranata tradisi lisan	Terwujudnya pemanfaatan teknologi dalam pranata tradisi lisan	Pelaku tradisi lisan	- Pengenalan teknologi - Implementasi Teknologi				

VII.3. Adat-Istiadat

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
Perlindungan: Belum tersusunnya peta jalan inventarisasi dan belum optimalnya inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi di bidang adat istiadat.	Menyusun peta jalan dan SOP inventarisasi terintegrasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi di bidang adat istiadat.	Menyusun peta jalan dan standar operasional produk sebagai pedoman dalam melakukan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi di bidang adat istiadat.	1.OPD atau pemangku kepentingan atau dinas terkait	<p>1. Menyusun peta jalan inventarisasi di bidang adat istiadat yang meliputi upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi secara terintegrasi.</p> <p>2. Melakukan inventarisasi secara rinci dan detail berbasis peta jalan yang telah disusun</p> <p>3. Pelaksanaan dan optimalisasi inventarisasi, pelaksanaan pemeliharaan</p> <p>4. Pegiat budaya</p>	<p>Tersusunnya rencana peta jalan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi secara terintegrasi di bidang adat istiadat</p>	<p>Telah dilaksanakan inventarisasi jalan yang melibatkan kelompok sasaran</p> <p>upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi secara terintegrasi di bidang adat istiadat</p>	<p>Peta jalan berjalan dengan baik yang melibatkan kelompok sasaran sebagai ekosistem pelindungan adat istiadat yang berkelanjutan</p>	<p>Terwujudnya mekanisme SOP yang telah mapan sebagai ekosistem pelindungan adat istiadat yang berkelanjutan</p>	<p>mekanisme evaluasi pelaksanaan peta jalan dan perbaikan serta penyesuaianya</p>

				termasuk publikasi khasanah adat istiadat 4. Evaluasi secara keseluruhan mengenai pelaksanaan inventarisasi, pelaksanaan pemeliharaan termasuk publikasi khasanah adat istiadat					
Pengembangan & Pemanfaatan: Belum tersusunnya peta jalan bagi penelitian yang komprehensif mengenai adat istiadat dan dapat dijadikan dasar dalam pewarisan	Menyusun peta jalan penelitian yang komprehensif mengenai adat istiadat dan dapat dijadikan dasar dalam pewarisan	Menyusun peta jalan penelitian di bidang adat istiadat secara komprehensif mengenai adat istiadat dan dapat dijadikan dasar dalam pewarisan	Para peneliti, lembaga riset pemerintah dan pemerintahan, dan pengiat kebudayaan	1. Menyusun peta jalan tentang penelitian dan pengkajian mencakup adat istiadat yang	Menyusun rancangan peta jalan tentang penelitian dan pengkajian mencakup adat istiadat yang	Telah dilaksanakan peta jalan tentang penelitian dan pengkajian mencakup adat istiadat yang	Penelitian adat istiadat telah dapat dijalankan secara baik	Terwujudnya ekosistem penelitian adat istiadat pengkajian di bidang adat istiadat	mekanisme evaluasi pelaksanaan peta jalan dan perbaikannya serta

istiadat dan dapat dijadikan dasar dalam mewariskan nilai-nilai luhur budaya untuk memperkuat karakter bangsa	nilai-nilai luhur budaya untuk memperkuat karakter bangsa	diimplementasikan.		<p>mencakup kekayaan budaya.</p> <p>2. Melaksanakan riset tersebut termasuk mendiseminasi hasil kajian tersebut agar bermanfaat bagi</p> <p>3. Melakukan evaluasi dan pelaksanaan riset yang melibatkan para peneliti, lembaga riset pemerintah, dan pegiat kebudayaan.</p>	kekayaan budaya.	diseminasi yang dapat memperkuat karakter bangsa dan ketahanan budaya.	dan efektif dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai luhur budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan ketahanan budaya	secara berkelanjutan.	penyesuaianya
---	---	--------------------	--	---	------------------	--	--	-----------------------	---------------

Pembinaan: Masih kurangnya upaya yang mendorong masyarakat dalam menghidupi, memelihara, dan melestarikan adat istiadat	Memperbanyak upaya dan meningkatkan kualitas upaya yang mendorong masyarakat dalam menghidupi, memelihara, dan melestarikan adat istiadat	Menciptakan berbagai upaya kreatif, inovatif, dan variatif yang mendorong masyarakat dalam menghidupi, memelihara, dan melestarikan adat istiadat	Dinas dan OPD terkait, perguruan tinggi, akademisi, pegiat LSM, komunitas, dan pemangku adat	<p>1. Menciptakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendorong n kesadaran dan meningkatka n kesadaran dan partisipasi dalam partisipasi masyarakat adat istiadat. dalam menghidupi, merawat, dan melestarikan adat istiadat.</p> <p>2. Melaksanakan kerja gotong royong seluruh</p>	<p>Terciptanya berbagai program yang dalam rangka meningkatka n kesadaran dan partisipasi dalam partisipasi masyarakat adat istiadat.</p>	<p>Terlaksana nya berbagai program yang dalam rangka meningkatka n kesadaran dan partisipasi dalam partisipasi masyarakat adat istiadat.</p>	<p>Terciptanya berbagai program yang dalam rangka meningkatka n kesadaran dan partisipasi dalam partisipasi masyarakat adat istiadat yang meliputi evaluasi dan pembarua</p>	<p>Terciptanya keberlanju tan berbagai program yang dalam rangka meningkatka n kesadaran dan partisipasi dalam partisipasi masyarakat adat istiadat yang</p>	<p>Terciptanya keberlanju tan program pembinaan sumber daya manusia dalam memelihara, menghidupi, dan melestarikan adat istiadat.</p>	mekanis evaluasi pelaksanaan peta jalan dan perbaikan serta penyesua iannya
---	---	---	--	--	---	--	--	--	---	---

				<p>pemangku kepentingan dalam menghidupi, merawat, dan melestarikan adat istiadat</p> <p>3. Menciptakan berbagai program yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan partisipasi Gen-Z dalam menghidupi, merawat, dan melestarikan adat istiadat.</p>			<p>n program pembinaan .</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--

VII.4. Ritus

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
Pelindungan: Belum tersusunnya peta jalan inventarisasi dan belum optimalnya inventarisasi secara termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi di bidang Ritus	Menyusun peta jalan dan SOP sebagai pedoman dalam melakukannya inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi di bidang Ritus	Menyusun peta jalan dan SOP sebagai pedoman dalam melakukannya inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi di bidang Ritus	1.OPD atau pemangku kepentingan atau dinas terkait	1. Menyusun peta jalan inventarisasi di bidang Ritus yang meliputi upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi secara terintegrasi. 2. Melakukan inventarisasi secara rinci dan detail berbasis peta jalan yang telah disusun 3. Pelaksanaan dan optimalisasi inventarisasi, pelaksanaan pemeliharaan	Tersusunnya rencana peta jalan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi di bidang Ritus	Telah dilaksanakan jalan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi di bidang Ritus	Peta jalan berjalan dengan baik yang melibatkan kelompok sasaran	Terwujudnya SOP yang telah mapan sebagai sanaa perlindungan Ritus yang jalan berkelanjutan	mekanisme evaluasi pelakuan perlindungan peta jalan Ritus yang jalan berkelanjutan dan perbaikan serta penyeuaianannya

terintegrasi di bidang Ritus			dan arsitek) 4. Pegiat budaya	termasuk publikasi khasanah Ritus 4. Evaluasi secara keseluruhan mengenai pelaksanaan inventarisasi, pelaksanaan pemeliharaan termasuk publikasi khasanah Ritus					
Pengembangan & Pemanfaatan: Belum tersusunnya peta jalan penelitian yang komprehensif mengenai Ritus yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur budaya	Menyusun peta jalan penelitian yang komprehensif yang mengenai Ritus yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur budaya	Menyusun peta jalan penelitian di bidang Ritus secara komprehensif serta melakukan upaya agar hasil penelitian dapat	Para peneliti, lembaga riset pemerintah dan pegiat swasta, dan pegiat	1. menyusun peta jalan penelitian di bidang Ritus secara komprehensif yang mencakup	Tersusunnya rancangan peta jalan penelitian di bidang Ritus secara termasuk rencana pengembangan dan	Telah dilaksanakan peta jalan penelitian di bidang Ritus yang termasuk rencana pengembangan dan	Penelitian dilaksanakan di bidang Ritus yang telah dilaksanakan di bidang Ritus yang termasuk rencana pengembangan dan	Terwujudnya ekosistem penelitian dan pengkajian di bidang Ritus secara berkelanjutan.	mekanisme evaluasi pelaksanaan dan pengkajian di bidang Ritus secara berkelanjutan.

Ritus yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur budaya sebagai penopang karakter bangsa.	sebagai penopang karakter bangsa.	diimplementasi kebudayaan	kekayaan budaya.	pemanfaatannya.	hasil penelitian.	efektif termasuk pengembangan dan pemanfaatannya.	ikan serta penye suaianya
--	-----------------------------------	---------------------------	------------------	-----------------	-------------------	---	---------------------------

					dan pegiat kebudayaan.					
Pembinaan: Masih kurangnya upaya yang mendorong masyarakat dalam memelihara dan melestarikan Ritus.	Memperbaikan upaya dan meningkatkan kualitas upaya yang mendorong masyarakat dalam memelihara dan melestarikan Ritus.	Menciptakan berbagai upaya kreatif, inovatif, dan variatif untuk mendorong masyarakat dalam memelihara dan melestarikan Ritus.	OPD terkait, perguruan tinggi, akademis, pegiat budaya, LSM, komunitas, dan tokoh adat	4. Menciptakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan meningkatka partisipasi masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam merawat dan melestarikan Ritus. 5. Melaksanakan kerja gotong royong	Terciptanya berbagai program yang dalam rangka meningkatka mendorong n kesadaran dan meningkatka partisipasi masyarakat dalam khususya melestarikan Ritus.	Terlaksana ya berbagai program yang meningkatka n kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam khususya melestarikan Ritus.	Terciptan ya keberlanjutan berbagai program yang manusia dalam memelihara dan melestarika n Ritus.	Terciptanya keberlanjutan program pembinaan sumber daya manusia dalam memelihara dan melestarika n Ritus.	meka nisme evaluasi pelaksanaan dan perbaikan serta penyeuaiannya	

				<p>seluruh pemangku kepentingan dalam merawat dan melestarikan Ritus</p> <p>6. Menciptakan berbagai program yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan partisipasi Gen-Z dalam merawat dan melestarikan Ritus</p>			<p>dan pembuatan program pembinaan.</p>	
--	--	--	--	---	--	--	---	--

VII.5. Seni

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
PELINDUNGAN									
Objek seni rupa belum terdata dengan baik	Perlu kajian, inventarisasi, dokumentasi dan pemetaan seni rupa	Mengetahui jumlah dan kondisi objek seni rupa	Objek seni rupa tradisi terutama jenis, produk dan spesifikasinya	Inventarisasi, dokumentasi, pemetaan dan kajian	Terinventarisasinya objek	Pendokumentasiannya objek	Pengkajian objek	Pemetaan objek	Objek siap dan lengkap untuk ditetapkan
Objek seni rupa banyak yang belum diangkat dan terancam punah	Publikasi terhadap kesenian yang belum populer dan hampir punah	Mengangkat kembali melalui informasi meluas dan menumbuhkan minat pemajuan kesenian	Objek seni yang terancam punah dan yang kurang populer	Inventarisasi, pemetaan, perumusan publikasi dan menyusun bentuk publikasi baik foto, video, radio, dll	Terinventarisasinya objek	Terpetakannya objek	Terpilihnya bentuk publikasi	1 objek terpublikasi lewat video	1 objek terpublikasi lewat video
PEMANFAATAN									
Terbatasnya ruang ekspresi	Pengadaan ruang ekspresi	Menumbuhkan berbagai ruang	Membuka ruang	Pemetaan kebutuhan	Terfasilitasi minimal 1	Terfasilitasi minimal 1	Terfasilitasi minimal 1	Terfasilitasi minimal 1	Terfasilitasi minimal 1

	atau festival yang lebih bisa mewadahi seluruh kesenian	event terutama festival	ekspresi dan ruang apresiasi secara meluas	ekspresi, penentuan tempat, waktu, anggaran dan keterlibatan berbagai pihak	kali ekspresi budaya pertahun				
Seni rupa masih dibuat oleh pelaku seni luar daerah	Mengedepankan kemandirian seniman-seniman setempat untuk membangun identitas daerah melalui kesenian daerah, bangunan monumental, dan ornamentik	Kemandirian pemenuhan produk seni rupa di daerah	Pelaku seni rupa dan masyarakat penggunanya, serta pemerintah daerah setempat	Sosialisasi produk, seniman dan membangun kesadaran penggunaan produk lokal melalui promosi dan percontohan	1 kali kegiatan sosialisasi dan promosi				
PENGEMBANGAN									
Terdapat kesamaan dan	Perlu adanya kajian identitas kesenian	Menggali dan menumbuhkan identitas	Pelaku seni, peneliti dan	Identifikasi dan kajian rupa, motif,	1 kali kajian pertahun				

kemiripan antar daerah		dan kekhasan produk dan objek seninya	pemerintah daerah	teknologi, dan pengetahuan. Publikasi dan ekspresi secara meluas					
Terdapat kesamaan dan kemiripan kesenian di wilayah yang beririsan	Promosi kesenian Pembakuan kesenian	Menumbuhkan identitas dan kekhasan	Pelaku seni, peneliti, akademisi, masyarakat dan pemerintah daerah	Pemetaan persebaran, identifikasi kemiripan, identifikasi pelaku, penggalian identitas, pembakuan, promosi secara meluas	1 kali kajian pertahun				
PEMBINAAN									
Pihak Kabupaten dan Provinsi belum melakukan pembakuan maestro dalam ranah kabupaten,	Mendorong pembakuan maestro dalam ranah kabupaten,	Mengapresiasi maestro dan penjaminan pewarisan,	Pelaku seni, pemerintah daerah	Penentuan kriteria maestro sesuai tingkatan, pembentukan	Munculnya 1 orang maestro pertahun				

	provinsi dan pusat.	serta menumbuhkan motivasi		tim, penilaian dan pembakuan maestro secara berkala tiap tahun					
Terjadinya ketimpangan antar opk yang satu dengan yang lain dan ada kelompok opk tapi belum memiliki legal formal	Pembuatan legal formal organisasi dan pembuatan ruang berekspresi	Menumbuhkan kesadaran berorganisasi yang legal formal dan payung hukum	Pelaku seni dan sanggar-sanggar seni	Publikasi standarisasi organisasi, langkah pendampingan, akta notaris dan kemenkumham	10 kelompok seni berlembaga hukum pertahun				
Kurangnya pemantauan organisasi seni	Pembenahan tata kelola	Organisasi seni yang sehat dengan tata kelola yang baik	Organisasi seni	Penataan pengurus organisasi, manajemen tata kelola	10 Kelompok seni termonev pertahun				

Masalah terkait perlindungan hukum pelaku seni	Pendampingan hukum	Kenyamanan dan kebebasan dalam beraktivitas seni	Pelaku seni dan pemerintah daerah	Pembentukan LSP Kesenian	10 Kelompok seni terdampangi pertahun				
Perundungan kegiatan kesenian	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kode etik • Membuat perda untuk batasan penyelenggaraan pertunjukan kesenian 	Kenyamanan dan kebebasan dalam beraktivitas seni	Pelaku seni dan pemerintah daerah	Konsorsium pelaku seni, pembentukan tim perumus, perumusan, uji publik dan pembakuan kode etik	25% proses penyusunan regulasi	50% proses penyusunan regulasi	75% proses penyusunan regulasi	100% proses penyusunan regulasi	Penetapan dan terpublikasi regulasi
<ul style="list-style-type: none"> • Belum terukurnya kompetensi pelaku seni • Kesulitan sertifikasi bidang kesenian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan sertifikasi profesi • Sosialisasi sertifikasi seni 	Standarisasi profesi	Pelaku seni dan organisasi seni	Pembentukan KKNI, RSKKNI, pendirian LSP, pembentukan asesor, pelatihan dan penyelenggara	5 Pelaku seni tercertifikasi				

	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya sosialisasi LSP 			an UJI Kompetensi					
Pembinaan pelaku seni atau sanggar belum merata	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan ruang ekspresi, fasilitas, dan pendanaan • Pemberahan sistem internal terkait distribusi fasilitas serta melakukan pendataan dan promosi 	Kemandirian pelaku dan organisasi seni secara merata	Pelaku dan organisasi seni, pemerintah daerah dan stakeholder	Pemetaan kondisi pelaku dan sanggar seni, program kegiatan dan pembinaan yang dibutuhkan	5 kabupaten /kota				
Kehidupan sanggar seni masih tahap	Pendampingan tata kelola organisasi	Kemandirian organisasi seni, pelaku seni dan kesenian	Organisasi seni, pelaku seni dan	Pemetaan kondisi sanggar seni,	5 kabupaten /kota				

ketergantungan dan belum mandiri			pemerintah daerah	pendampingan tata kelola	Pelaku seni mandiri	Pelaku seni mandiri	Pelaku seni mandiri	Pelaku seni mandiri	Pelaku seni mandiri
Regenerasi	Upaya mendorong pewarisan	Pewarisan yang berlangsung dengan baik. diminati generasi muda	Generasi pewaris, pelaku seni dan maestro	Pemetaan sistem pewarisan, dukungan pembuatan bahan ajar, publikasi, penyelenggaraan edukasi	Terpetaka nnya jenis seni yang tidak memiliki maestro	Terwujudkanya calon generasi penerus jenis seni yang hampir punah	Terwujudnya bahan ajar	Terwujudnya penyelenggaraan edukasi kesenian	Terwujudnya system pewarisan kesenian yang berkelanjutan
Perlindungan anak dan eksploitasi anak	Mengedepankan HAM dan apresiasi, menghindari eksploitasi, serta kekerasan	Kenyamanan, keamanan dan kebebasan ekspresi anak dalam dunia seni, hak penghargaan dalam ekspresi seni	Pelaku seni, masyarakat, dan generasi pewaris	Pembakuan wilayah keterlibatan anak dalam ekspresi seni, kode etik, pelindungan hukum, pendampingan	Terwujudnya pengenalan seni pada anak	Terwujudnya ekosistem kebebasan ekspresi untuk anak	Terwujudnya anak-anak berkesenian	Terwujudnya seniman anak	Bertambahnya seniman anak

VII.6. Bahasa

	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian				
						2025	2026	2027	2028	2029
Pelindungan										
Inventarisasi	Belum optimalnya inventarisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Melakukan upaya inventarisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Terinventarisasi sasinya dialek lokal dalam bahasa daerah	Masyarakat, BAPED A, dinas kebudayaan	- Pencarian dan penemuan dialek lokal dalam bahasa daerah - Penyusunan template/ form pendataan - Inventarisasi Dialek lokal dalam bahasa daerah	Terinventarisasi 5 dialek pertahun				
Pengamanan	Belum optimalnya upaya pemutakhiran data dialek lokal dalam	Mewujudkan pemutakhiran data dialek lokal dalam bahasa daerah dalam sistem terpadu	Terwujudnya pemutakhiran data dialek lokal dalam bahasa daerah dalam sistem terpadu	Dinas kebudayaan	- Pengumpulan data - Memasukan data dalam sistem - Pemutakhiran data	Bertambahnya 1 data dialek di dapobud				

	bahasa daerah dalam sistem pendataa n terpadu	dalam bahasa daerah dalam sistem pendatan terpadu									
Pemeliha raan	Belum optimalny a upaya pemeliha raan aan dialek lokal lokal dalm bahasa daerah agar tidak hilang dan musnah	Mewujud kan pemeliha raan dialek lokal dalm bahasa daerah agar tidak hilang dan musnah	Terselamatka nnya dialek lokal dalam bahasa dialek daerah dari daerah kehilangan dan kemusnahaan	Masyar akat penutur dialek dalam bahasa daerah	- Mengidentifikasi dialek lokal dalam bahasan daerah -Terpeliharanya dialek lokal dalam bahasa daerah	Terpeliharan ya 1 dialek local pertahun melalui digitalisasi					

	Belum dilakukan upaya digitalisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Melakukan digitalisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Terdigitalisasi inya dialek lokal dalam bahasa daerah	-Dinas pendidikan -Dinas Kebudayaan -Kominfo	- Perekaman dialek lokal dalam berbahasa daerah - Memasukan ke sistem - Digitalisasi dialek lokal dalam bahasa daerah					
Pengembangan										
Kajian	Belum optimalnya kajian tentang dialek lokal dalam bahasa daerah	Melakukan kajian dialek lokal dalam bahasa daerah	Tersedia kajian dialek lokal dalam bahasa daerah	BAPED A, dinas kebudayaan	- Penggalian informasi - Proses penulisan kajian - Hasil kajian	Terkajinya 1 dialek local pertahun				
Pemanfaatan										

Kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat	Menjadikan dialek lokal dalam bahasa daerah sebagai salah satu sumber pendapat an masyarakat	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfataan dialek lokal dalam bahasa daerah	Masyarakat	- Inventarisasi dialek lokal - Mengimplementasikan dialek lokal dalam konten Mengimplementasikan dalam media seni - Masyarakat mendapatkan penghasilan	1 dialek local termanfaatkan pertahun				
Meningkatkan ketahanan budaya	Belum optimalnya dialek lokal dalam bahasa daerah meningkatkan ketahanan budaya	Menjadikan dialek lokal dalam bahasa daerah sebagai salah satu	Menjadikan dialek lokal dalam bahasa daerah sebagai media ketahanan budaya	Peserta didik, guru, masyarakat	- Sosialisasi Pembuatan Kurikulum - Pembuatan bahan ajar - Pengajaran di kelas	Dialok local menjadi muatan local pembelajaran di sekolah	Dialok local menjadi muatan local pembelajaran di sekolah	Dialok local menjadi muatan local pembelajaran di sekolah	Dialok local menjadi muatan local pembelajaran di sekolah	Dialok local menjadi muatan local pembelajaran di sekolah

		muatan lokal							
Pembinaan									
SDM	Semakin berkuran gnya penutur dialek lokal dalam bahasa daerah pada generasi penerus terkait dengan dialek lokal dalam	Mewujud kan transfer <i>knowledg</i> e dialek lokal	Meningkatny a penutur dialek lokal dalam bahasa daerah	Ibu-ibu PKK, masyar akat	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi dialek lokal dalam bahasa daerah - Membangun komunitas dilaek lokal dalam bahasa daerah - Melakukan transfer dialek lokal dalam bahasa daerah pada generasi penerus - Dialek lokal menjadi bahasa keseharian masyarakat 	Meningkatny a	Terciptanya mekanisme pelibatan kesadaran masyarakat atas pentingnya kelestarian bahasa	Terwujudnya mekanisme pelibatan seluruh elemen masyarakat sebagai pelestari bahasa	Terciptanya ekosistem pembinaan SDM yang berkelanjutan di bidang bahasa

	bahasa daerah							
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--

VII.7. Olah Raga Tradisional

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
Pelindungan: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang olah raga tradisional	Melakukan sosialisasi tentang olah raga tradisional	Menyebarluaskan informasi mengenai olah raga tradisional kepada masyarakat, khususnya generasi muda	1. OPD terkait 2. Akademisi 3. Masyarakat 4. Generasi muda	1. Pemutakhiran data tentang olah raga tradisional 2. Penyelenggaraan FGD/DKT 3. Sosialisasi	Tersosialisasikan 10 Objek	Terdatanya 10 Objek pertahun			
Pelindungan: Belum adanya penetapan olah raga tradisional	Melakukan pengusulan penetapan olah raga tradisional	Olah raga yang dilindungi dan siap untuk	1. OPD terkait 2. Kemendikbudristek 3. BPK Wilayah X 4. Akademisi	1. Pendataan dan pendokumen tasian tentang olah	1 objek ditetapkan pertahun	1 objek ditetapkan pertahun	1 objek ditetapkan pertahun	1 objek ditetapkan pertahun	1 objek ditetapkan pertahun

tradisional sebagai WBTB	sebagai WBTB	dikembangkan dan dimanfaatkan	5. Masyarakat	raga tradisional 2. Kajian tentang olah raga tradisional 3. Penyelenggaraan FGD/DKT 4. Usulan penetapan					
Pengembangan: Belum terbentuknya olah raga tradisional kebudayaan dan kolaborasi antar pemangku	Penyelenggaraan event atau festival	Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan olah raga tradisional yang berkelanjutan kepada	1. OPD terkait 2. Masyarakat 3. Generasi muda	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah	Terselenggaranya 1 event/festival pertahun				

kepentingan terkait pelestarian olah raga tradisional		masyarakat, khususnya generasi muda.		maupun swasta 2. Publikasi dan dokumentasi 3. Penyelenggaraan event					
Pemanfaatan: Kurangnya sarana prasana penunjang olah raga tradisional	Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang olah raga tradisional	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang olah raga tradisional yang sesuai standar.	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektor 2. Pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap	Terfasilitasinya 1 kegiatan olah raga tradisional pertahun				
Pemanfaatan: Kurang optimalnya pemanfaatan sebagai	Mengoptimalkan olah raga tradisional yang dapat dimanfaatkan sebagai	Olah raga tradisional yang dapat dimanfaatkan sebagai	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Publikasi dan dokumentasi	1 jenis olahraga tradisional yang termanfaatkan				

menyelenggarakan olah raga tradisional sebagai atraksi wisata daerah	atraksi wisata daerah	atraksi wisata daerah		2. Penyelenggaraan event wisata	menjadi atraksi event/festival pertahun	an menjadi atraksi event/festival pertahun	an menjadi atraksi event/festival pertahun	an menjadi atraksi event/festival pertahun	an menjadi atraksi event/festival pertahun
Pembinaan : Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional	Melakukan pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional	Terselenggaranya pembinaan Budaya kepada para pelaku olah raga tradisional	1. OPD terkait 2. Komunitas Budaya 3. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektor 2. Pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional	30 pelaku olahraga tradisional terbina pertahun				

VII.8. Permainan Rakyat

Permasala han	Rekomend asi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
Pelindunga n: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang permainan rakyat	Melakukan sosialisasi tentang permainan rakyat	Menyebarluaskan informasi mengenai permainan rakyat kepada masyarakat, khususnya generasi muda	1. OPD terkait 2. Akademisi 3. Masyarakat 4. Generasi muda	1. Pemutakhiran data tentang permainan rakyat, 2. Penyelenggaraan FGD/DKT Sosialisasi	Tersosialisasikan 10 Objek	Terdatanya 10 Objek pertahun	Terdatanya 10 Objek pertahun	Terdatanya 10 Objek pertahun	Terdatanya 10 Objek pertahun
Pelindunga n: Belum adanya penetapan permainan rakyat	Melakukan pengusulan penetapan permainan rakyat	Permainan rakyat yang dilindungi dan siap untuk dikembangkan	1. OPD terkait, 2. Kemendikbudristek 3. BPK Wilayah X 4. Akademisi	1. Pendataan dan pendokumen tasian tentang	1 objek ditetapkan pertahun	1 objek ditetapkan pertahun	1 objek ditetapkan pertahun	1 objek ditetapkan pertahun	1 objek ditetapkan pertahun

rakyat sebagai WBTB	sebagai WBTB	an dan dimanfaatkan	5. Masyarakat	permainan rakyat, 2. Kajian tentang permainan rakyat, 3. Penyelenggaraan FGD/DKT, 4. Usulan penetapan.					
Pengembangan: Belum terbentuknya a ekosistem kebudayaan dan kolaborasi antar pemangku	Penyelenggaraan event atau festival	Terbentuknya a ekosistem kebudayaan dan mengenalkan permainan rakyat yang berkelanjutan kepada masyarakat,	1. OPD terkait 2. Masyarakat 3. Generasi muda	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah	Terselenggaranya 1 event/festival pertahun				

kepentingan terkait pelestarian permainan rakyat		khususnya generasi muda		maupun swasta, 2. Publikasi dan dokumentasi, 3. Penyelenggaraan event.					
Pembinaan : Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Melakukan pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Terselenggaranya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	1. OPD terkait 2. Komunitas Budaya 3. Masyarakat 4. Generasi muda	1. Melakukan koordinasi lintas sektor 2. Pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	30 pelaku Permainan Rakyat pertahun	30 pelaku Permainan Rakyat pertahun	30 pelaku Permainan Rakyat pertahun	30 pelaku Permainan Rakyat pertahun	30 pelaku Permainan Rakyat pertahun
Pemanfaatan: Kurang optimalnya pemanfaatan rakyat sebagai	Mengoptimalkan permainan rakyat yang dapat dimanfaatkan sebagai	permainan rakyat yang dapat dimanfaatkan sebagai	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Publikasi dan dokumentasi	1 jenis Permainan rakyat yang termanfaatkan	1 jenis Permainan rakyat yang termanfaatkan menjadi			

men permainan rakyat sebagai atraksi wisata daerah	atraksi wisata daerah	atraksi wisata daerah		2. Penyelenggaraan event wisata	menjadi atraksi pertahun	atraksi pertahun	atraksi pertahun	atraksi pertahun	atraksi pertahun
Pembinaan : Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Melakukan pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Terselenggaranya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	1. OPD terkait 2. Komunitas Budaya 3. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektor 2. Pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	30 pelaku Permainan Rakyat terbina pertahun				

VII.9. Pengetahuan Tradisional

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
Pelindungan: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengetahuan tradisional.	Melakukan sosialisasi kan informasi mengenai pengetahuan tradisional kepada masyarakat, khususnya generasi muda.	Menyebarluaskan informasi mengenai pengetahuan tradisional kepada masyarakat, khususnya generasi muda.	1. OPD terkait 2. Akademisi 3. Masyarakat 4. Generasi muda	1. Pemutakhiran data tentang pengetahuan tradisional 2. Penyelenggaraan FGD/DKT 3. Sosialisasi	1 kali kegiatan sosialisasi pertahun dan pendaftaran objek				
Pelindungan: Keterbatasan bahan baku untuk pembuatan jamu tradisional	Menyediakan bahan baku untuk pembuatan jamu tradisional	Jamu sebagai pengetahuan tradisional yang lestari dan dapat dimanfaatkan.	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektoral 2. OPD terkait menyediakan bibit tanaman untuk pembuatan	1 kali koordinasi pertahun	1 kali koordinasi pertahun	1 kali koordinasi pertahun	Tersedianya bahan baku jamu yang berkelanjutan	Terjaminnya bahan baku di Jawa Tengah

				<p>jamu tradisional,</p> <p>3. Sosialisasi kepada petani untuk menanam tanaman yang dibutuhkan dalam pembuatan jamu tradisional,</p> <p>4. Penanaman tanaman yang dibutuhkan dalam pembuatan jamu tradisional.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pelindungan: Penetapan pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya takbenda (WBTB) masih terbatas.	Melakukan pengusulan penetapan pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya takbenda (WBTB).	Pengetahuan tradisional yang dilindungi dan siap untuk dikembangkan dan dimanfaatkan.	1. OPD terkait 2. Kemendikbudri stek 3. BPK Wilayah X 4. Akademisi 5. Masyarakat	1. Pendataan dan pendokumentasiannya tentang pengetahuan tradisional, wbt pertahun 2. Kajian tentang pengetahuan tradisional, wbt pertahun 3. Penyelenggaraan FGD/DKT, wbt pertahun 4. Usulan penetapan.	1 objek ditetapkan menjadi wbt pertahun				
Pengembangan: Belum terbentuknya ekosistem kebudayaan pengetahuan tradisional.	Penyelenggaraan event atau festival pengetahuan tradisional.	Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan pengetahuan tradisional yang berkelanjutan	1. OPD terkait 2. Masyarakat 3. Generasi muda	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta,	1 kali event dan festival pertahun				

kepentingan terkait pelestarian pengetahuan tradisional		kepada masyarakat, khususnya generasi muda.		2. Publikasi dan dokumentasi, 3. Penyelenggaraan event.					
Pemanfaatan : Belum optimalnya pemasaran produk pengetahuan tradisional.	Mengoptimalkan pasar-pasar untuk menjual produk pengetahuan tradisional.	Tersedianya pasar-pasar untuk menjual produk pengetahuan tradisional.	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta, 2. Publikasi dan dokumentasi, 3. Penjualan produk.	Tersedianya produk pengetahuan tradisional di wilayah Jawa tengah	Tersedianya produk pengetahuan tradisional di wilayah Jawa tengah	Tersedianya produk pengetahuan tradisional di wilayah Jawa tengah	Tersedianya produk pengetahuan tradisional di wilayah Jawa tengah	Tersedianya produk pengetahuan tradisional di wilayah Jawa tengah
Pemanfaatan : Belum optimalnya	Mengoptimalkan sertifikasi produk terhadap produk	Tersedianya produk pengetahuan tradisional	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para	1 jenis produk pengetahuan				

sertifikasi terhadap produk pengetahuan tradisional.	pengetahuan tradisional.	yang telah tersertifikasi.	pemangku kepentingan,	tradisional terdaftar secara hukum pertahunnya	tradisional terdaftar secara hukum pertahunnya	tradisional terdaftar secara hukum pertahunnya	tradisional terdaftar secara hukum pertahunnya	tradisional terdaftar secara hukum pertahunnya
Pembinaan: Belum optimalnya pembinaan dan sertifikasi kepada para pelaku pengetahuan tradisional.	Melakukan pembinaan dan sertifikasi kepada para pelaku pengetahuan tradisional.	Terselenggara nya pembinaan dan sertifikasi kepada para pelaku pengetahuan tradisional yang sesuai dengan standar dan prosedur.	1. OPD terkait 2. Lembaga sertifikasi 3. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait pembinaan dan sertifikasi, 2. Pembinaan kepada para pelaku pengetahuan tradisional, 3. Sertifikasi kepada para pelaku pengetahuan tradisional.	1. Terealisasi 2. Terealisasi 3. Terwujud	1. Pengembangan Pengayaan pelatihan 2. Pengayaan pendidikan 3. Terwujud	1. Penguatan pengayaan pendidikan 2. Penguatan pengayaan pendidikan 3. Terwujud	Pengembangan pelatihan dan pendidikan yang diintegrasikan dengan teknologi informasi

VII.10. Teknologi Tradisional

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
Pelindungan 1. Minimnya data menge nail teknologi tradisional	Inventarisasi berkala data teknologi tradisional	Terhimpunnya data yang valid	a. Lembaga, masyarakat, Akademisi, Pelaku teknologi tradisional dan Pemerintah / OPD terkait	1. Membentuk tim pendataan 2. Identifikasi dan dicatatkan, diverifikasi dan divalidasi 3. Ditetapkan oleh Kepala Daerah 4. Diusulkan untuk mendapatkan penatapan 5. Pelaporan secara berkala 6. Evaluasi	Terbentuknya tim pendataan di Kabupaten/ Kota dan pengusulan objek menjadi wbtb minimal 2 pertahun	pengusulan objek menjadi wbtb minimal 2 pertahun			
Lemahnya pelindungan hukum (terkait)	Memberikan pendampingan hukum	Menjamin terwujudnya payung hukum	a. Lembaga masyarakat, Akademisi	1. Pengusulan/pen gajuan sebagai kekayaan intelektual	1 produk terdaftar haki pertahun	1 produk terdaftar haki pertahun	1 produk terdaftar haki pertahun	1 produk terdaftar haki pertahun	1 produk terdaftar haki pertahun

dengan pengamanan)	teknologi tradisional	pengakuan dari pihak lain/asing	b. Pelaku teknologi tradisional dan pemerintah / OPD terkait	2. Mendapatkan pengakuan kekayaan intelektual 3. Pemutakhiran data 4. Sosialisasi 5. Evaluasi					
Minimnya publikasi ikan melalui media massa kepada masyarakat	Mempublikasikan hasil melalui media massa	Mempublikasikan hasil melalui media massa	a. Lembaga masyarakat b. Akademisi c. Pelaku teknologi tradisional dan Pemerintah/OPD terkait	1. Membentuk tim publikasi 2. Menyiapkan bahan publikasi 3. Mempublikasikan 4. Evaluasi	1 objek terpublikasi setiap tahun				
Pengembangan Penyebarluasan teknologi tradisional	Melakukan penyebarluasan informasi teknologi tradisional	a. Menyebarluaskan nilai budaya teknologi tradisional	a. Lembaga masyarakat b. Akademisi c. Pelaku teknologi	1. Penyiapan bahan informasi 2. Seleksi data/informasi, dikurasi	1 objek terpublikasi setiap tahun				

yang belum merata	<p>b. Penyebaran dilakukan secara desiminasi: melalui nilai - nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, maupun festival dan diaspora: melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya</p> <p>c. Penyebarluasan melalui media</p>	tradisional dan Pemerintah/operd terkait	(penyeleksi secara detail)	3. Ditindaklanjuti melalui pameran				
-------------------	---	--	----------------------------	------------------------------------	--	--	--	--

		massa, informasi budaya, transfer ilmu budayanya							
Rendahnya kajian tentang teknologi tradisional	Melakukan kajian tentang teknologi tradisional	Tergalinya nilai- nilai budaya pada teknologi tradisional secara faktual.	a. Lembaga masyarakat b. Akademisi c. pelaku teknologi tradisional dan pemerintah/op d terkait	1. Penyusunan tim kajian 2. Penulusuran sumber 3. Verifikasi lapangan 4. Pendokumentas ian 5. Penyusunan kajian 6. Penyampaian hasil kajian 7. Sosialisasi hasil kajian 8. Evaluasi	2 objek terkaji pertahun				

Pemanfaatan Rendahnya pemanfaatan teknologi tradisional untuk kesejahteraan masyarakat	Melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi tradisional	Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan	a. Lembaga masyarakat b. Akademisi c. pelaku teknologi tradisional dan d. pemerintah /opd terkait Dinas Pariwisata	1. Identifikasi manfaat teknologi tradisional 2. Mensosialisasikan hasil identifikasi 3. Evaluasi	1 objek termanfaatkan pertahun				
Pembinaan Belum optimalnya pembinaan SDM tentang teknologi tradisional	Penyusunan <i>grand design</i> pelatihan	Meningkatnya kompetensi SDM	a. Lembaga masyarakat b. Akademisi c. pelaku teknologi tradisional dan d. pemerintah /opd terkait e. Dinas Pariwisata	1. Perencanaan <i>grand design</i> 2. Pelaksanaan latihan 3. Evaluasi	30 pelaku terlatih pertahun				

VII.11. Cagar Budaya

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
Pelindungan Belum semua kabupaten kota memiliki Tim Ahli Cagar Budaya	Membentuk TACB Kab Kota	Melakukan rekomendasi penetapan, pemeringkatan	<ol style="list-style-type: none"> Ahli yang memiliki kompetensi Cagar Budaya, Pemerintah, Akademisi, Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Merekut ahli menjadi TACB mengikuti asesmen untuk memperoleh sertifikat meminjam TACB kab terdekat atau provinsi dengan masa kerja 1 tahun dan boleh diperpanjang Evaluasi 	26 Kab/K ot	27 Kab/K ot	28 Kab/ Kot	29 Kab/ Kot	30 Kab/ Kot
Belum semua ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya) ditetapkan sebagai Cagar Budaya	Ditetapkan ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya) menjadi Cagar Budaya	a. Terlindunginya Cagar Budaya dari segi hukum atau sesuai dengan	Objek Diduga Cagar Budaya / Cagar Budaya	<ol style="list-style-type: none"> Inventarisasi Kajian Rekomendasi Penetapan (Data Dapobud) 	751 CB	761 CB	771 CB	781 CB	791 CB

		<p>ketetapan yang berlaku agar lestari</p> <p>b. Perlindungan hukum</p>		<p>5. Sosialisasi</p> <p>6. Pemutakhiran</p> <p>7. Evaluasi</p>						
PERDA Jateng Nomor 10 th 2013 sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang perda no 10 th 2013	Melakukan revisi/perubahan	Untuk pemajuan kebudayaan dan pelestarian CB	<p>a. Ahli yang memiliki kompetensi Cagar Budaya,</p> <p>b. Pemerintah,</p> <p>c. Akademisi,</p> <p>d. Masyarakat Cagar Budaya</p>	<p>1. Penyusunan</p> <p>2. Pembahasan</p> <p>3. Penetapan</p> <p>4. Pengesahan</p> <p>5. Pengundangan</p> <p>6. Penyebarluasan/sosialisasi</p> <p>7. Menyusun rencana induk</p> <p>Evaluasi</p>	<p>Terwuj udnya Perda/ Pergub Pemaj uan Kebud ayaan Pelesta rian Pengel olaan CB besert</p> <p>Terwuj udnya Perda/ Pergub Pemaj uan Kebud ayaan Pelesta rian Pengel olaan CB besert</p> <p>Terw ujudn ya Perd a/Per gub gub Kebu ayaan Pelesta rian dan Pengel olaan CB n dan Peng</p> <p>Terw ujudn ya Perd a/Per gub gub Kebu ayaan Pelesta rian dan Pengel olaan CB n dan Peng</p> <p>Terw ujudn ya Perd a/Per gub gub Kebu ayaan Pelesta rian dan Pengel olaan CB n dan Peng</p> <p>Terw ujudn ya Perd a/Per gub gub Kebu ayaan Pelesta rian dan Pengel olaan CB n dan Peng</p>	<p>Terwuj udnya Perda/ Pergub Pemaj uan Kebud ayaan Pelesta rian Pengel olaan CB besert</p> <p>Terw ujudn ya Perd a/Per gub gub Kebu ayaan Pelesta rian dan Pengel olaan CB n dan Peng</p> <p>Terw ujudn ya Perd a/Per gub gub Kebu ayaan Pelesta rian dan Pengel olaan CB n dan Peng</p> <p>Terw ujudn ya Perd a/Per gub gub Kebu ayaan Pelesta rian dan Pengel olaan CB n dan Peng</p>	<p>Terw ujudn ya Perd a/Per gub gub Kebu ayaan Pelesta rian dan Pengel olaan CB n dan Peng</p> <p>Terw ujudn ya Perd a/Per gub gub Kebu ayaan Pelesta rian dan Pengel olaan CB n dan Peng</p> <p>Terw ujudn ya Perd a/Per gub gub Kebu ayaan Pelesta rian dan Pengel olaan CB n dan Peng</p> <p>Terw ujudn ya Perd a/Per gub gub Kebu ayaan Pelesta rian dan Pengel olaan CB n dan Peng</p>	<p>Terw ujudn ya Perd a/Per gub gub Kebu ayaan Pelesta rian dan Pengel olaan CB n dan Peng</p> <p>Terw ujudn ya Perd a/Per gub gub Kebu ayaan Pelesta rian dan Pengel olaan CB n dan Peng</p> <p>Terw ujudn ya Perd a/Per gub gub Kebu ayaan Pelesta rian dan Pengel olaan CB n dan Peng</p> <p>Terw ujudn ya Perd a/Per gub gub Kebu ayaan Pelesta rian dan Pengel olaan CB n dan Peng</p>	<p>Terw ujudn ya Perd a/Per gub gub Kebu ayaan Pelesta rian dan Pengel olaan CB n dan Peng</p> <p>Terw ujudn ya Perd a/Per gub gub Kebu ayaan Pelesta rian dan Pengel olaan CB n dan Peng</p> <p>Terw ujudn ya Perd a/Per gub gub Kebu ayaan Pelesta rian dan Pengel olaan CB n dan Peng</p> <p>Terw ujudn ya Perd a/Per gub gub Kebu ayaan Pelesta rian dan Pengel olaan CB n dan Peng</p>	

					a 1 regula si turuna nnya	a 1 regula si turuna nnya	elola an CB beser ta 1 regul asi turun anny a	elola an CB beser ta 1 regul asi turun anny a	CB besert a 1 regula si turun annya
Pengembangan Belum optimalnya pengembangan nilai Cagar Budaya melalui Penelitian, Adapatisasi, Revitalisasi	Melakukan optimalisasi Pengembangan nilai Cagar Budaya melalui Adapatisasi, Penelitian, Adapatisasi, Revitalisasi	Meningkatkan nilai Cagar Budaya melalui Penelitian, Cagar Budaya melalui Adapatisasi, Penelitian, Adapatisasi, Revitalisasi	Objek Diduga Cagar Budaya / Cagar Budaya	1. Penelitian (LKTI) 2. Adpatasi, 3. Revitalisasi 4. Evaluasi	70 ODCB/ CB Penelit ian (LKTI)	105 ODCB/ CB Penelit ian (LKTI)	140 ODC B/CB Penel itian (LKT I)	175 B/CB Penel itian (LKT I)	210 /CB Peneli tian (LKT I)
Pemanfaatan Belum optimalnya pemanfaatan ODCB/ Cagar Budaya sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian	Melakukan optimalisasi pemanfaatan ODCB/ Cagar Budaya sesuai dengan prinsip- prinsip pelestarian	Tercapainya pemanfaatan ODCB/ Cagar Budaya sesuai dengan prinsip- prinsip pelestarian	Semua ODCB/ Cagar Budaya yang ada di Jawa Tengah	Regulasi dan fasilitasi Cagar Budaya melalui perizinan, pemanfaatan koleksi, Evaluasi	19 ODCB/ CB	21 ODCB/ CB	23 ODC B/ CB	25 B/ CB	27 / CB

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat							
Belum semua kabupaten kota terdapat museum yang tedaftar	Mendirikan/merintis museum	Kabupaten/ Kota memiliki tempat untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi/ ODCB/ CB dan mengomunikasikan nya pada masyarakat	Semua Cagar Budaya yang ada di Jawa Tengah	1. Merencanakan/melakukan kajian pendirian museum, 2. Menyiapkan sarana prasarana dan/SDM, 3. Menyiapkan Koleksi 4. Mengisi/menata museum, 5. Menyusun SOP pengelolaan Museum Evaluasi	21 Kab/K ot	22 Kab/K ot	23 Kab/ Kot	24 Kab/ Kot	25 Kab/ Kot
Pembinaan Belum optimalnya pembinaan SDM yang bersinggungan/ terkait ODCB/ Cagar Budaya	Melakukan optimalisasi pembinaan SDM untuk pelestarian Cagar Budaya	Meningkatkan kesadaran/ pemahaman SDM untuk pelestarian ODCB/ Cagar	Seluruh komponen Masyarakat	1. Sosialisasi 2. Workshop 3. Lokakarya 4. Seminar dan 5. Bimtek	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang

		Budaya melalui kegiatan peningkatkan kapasitas SDM yang bersinggungan dengan ODCB/CB		6. Evaluasi					
--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

VII.2. UPAYA

Ada sejumlah upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memastikan berjalannya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Sejumlah upaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Membumikan spirit "Rumah Budaya"
2. Penyelenggaraan Parade Budaya tahunan yang melibatkan 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah
3. Penyelenggaran pentas budaya di provinsi secara regular setiap bulan
4. Penyelenggaraan Pentas Kesenian Rakyat Jawa Tengah setiap hari jadi provinsi
5. Penyelenggaraan Festival Tradisi Kebudayaan
6. Penerbitan instruksi Gubernur tentang penggunaan baju adat di lingkungan SKPD Jawa Tengah setiap kamis minggu ke-4 dan 5 setiap bulan
7. Penerbitan instruksi Gubernur tentang pemakaian Bahasa Jawa di lingkungan SKPD Jawa Tengah setiap hari kamis
8. Program kunjungan wajib untuk pelajar ke Museum setiap hari Jumat
9. Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi
10. Rekomendasi Pemeringkatan Cagar Budaya Provinsi oleh TACB Provinsi
11. Fasilitasi Kajian kepada Kabupaten/Kota yang belum memiliki TACB
12. Kongres Bahasa Jawa
13. P5 Berbasis Budaya
14. Pengusulan dan penetapan WBTB oleh Menteri
15. Lomba Karya Tulis Ilmiah tentang Cagar Budaya
16. Workshop Daluang
17. Kegiatan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Sejarah Tradisi
18. Fasilitasi grup kesenian kabupaten/ kota se-Jawa Tengah untuk tampil di Taman Mini Indonesia Indah
19. Melakukan kajian bersama pihak terkait mengenai upaya pendataan/ inventarisasi kebudayaan dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna menciptakan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan

VII.3. Permasalahan Umum dan Rekomendasi Umum

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi budayanya. Budaya tidak hanya seni, melainkan secara menyeluruh diartikan sebagai entitas nilai, laku maupun karya yang diyakini dan ditransmisikan sebagai pedoman dalam berkehidupan bersama. Sehingga budaya menjadi bingkai totalitas pola hidup sekaligus pemuliaan harkat dan martabat manusia. Hal ini yang belum dipahami secara utuh oleh masyarakat di Jawa Tengah sehingga urusan pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan belum berjalan optimal.

Jika pemahaman tersebut teraplikasi maka kebudayaan di Jawa Tengah akan bermakna sebagai aktualisasi budaya yang diyakini dan disepakati bersama oleh masyarakat dalam menetapkan

pola hidup dan tata kehidupan bersama. Tujuan aktualisasi tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidup yang di dalamnya ada 10 OPK yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Selain itu OPK tersebut bisa menjamin keselamatan hidup serta meraih kebahagian hidup bersama.

Dalam pemajuan dan pelestarian kebudayaan pasti memiliki tantangan utama berupa mengelola kemerdekaan individu, kelompok masyarakat, golongan yang multi dimensi menuju satu muara pelestarian budaya nusantara. Maka dari itu butuh ekosistem pemajuan kebudayaan yang adaptif terhadap keberagaman pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat di tengah globalisasi beserta seluruh dampak ikutan yang melekat. Adaptif ini juga untuk menarik regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dari Gen-Z yang menjadi surplus populasi. Gen – Z merupakan generasi yang telah menikmati kemudahan akses pemenuhan seluruh kebutuhan hidup, generasi yang mewarnai perubahan sendi kehidupan, budaya dan perdaban umat manusia. Untuk itu dalam hal pembinaan untuk pemajuan kebudayaan di Jawa Tengah maka perlu porsi yang lebih untuk mengelola Gen-Z sebagai penerus Sumber Daya Manusia Kebudayaan di Jawa Tengah.

Masalah utama dalam pemajuan kebudayaan secara umum yang terangkum menjadi belum tersedianya ekosistem yang kokoh dan tangguh sebagai wahana penopang ketahanan budaya sekaligus pemajuan kebudayaan. Hal ini didukung dengan realitas di daerah bahwa; institusi pemerintah beraneka ragam; kapasitas fiscal belum menjadi prioritas; penguatan pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan; Sinergitas para pemangku belum operasional; dan pemahaman masyarakat terhadap kebudayaan masih identik pada seni.

Rekomendasi yang bisa dilaksanakan atas permasalahan tersebut di atas adalah gotong royong masyarakat dan pemerintah untuk menjalankan mandat undang-undang Pemajuan Kebudayaan dan undang – undang Cagar Budaya. Optimalisasi pelestarian dan tata kelola kebudayaan yang meliputi OPK dan CB dalam hal pendaftaran, pencatatan OPK/ODCB/CB, kemudian diusulkan untuk dikaji oleh tim ahli dan ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya. Kemudian setelah mendapatkan dukungan hukum maka upaya pemajuan dan pelestarian Budayanya menganyakut Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan jadi lebih optimal.

Rekomendasi selanjutnya yang bisa dilakukan adalah penguatan pelibatan daerah kabupaten/kota dalam hal perencanaan, pembiayaandan penguatan agar OPK dan CB bisa lestari. Perencanaan untuk standarisasi berbagai macam aksi pelindungan OPK dan CB. Pembiayaan yang meliputi perawatan, insentif dan DAK dalam pelindungan OPK dan CB. Terakhir adalah Penguatan fasilitasi pembinaan SDM OPK dan CB yang meliputi Ahli – Ahli OPK dan CB yang bersertifikat, dengan kata lain khusus untuk CB adalah 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah harus memiliki TPCB dan TACB yang aktif untuk kajian rekomendasi.

1. Masih terdapat bahan-bahan kebudayaan dalam bentuk dokumen penelitian yang tidak dapat diakses oleh masyarakat dan/atau dinas yang membidangi kebudayaan (memperbanyak kegiatan-kegiatan penelitian atau kajian-kajian terkait OPK dan CB serta pemajuan kebudayaan

secara umum: kajian penetapan, kajian pemeringkatan, kajian biasa, digitalisasi cb, perekaman tradisi, dll_Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya,);

2. SDM kebudayaan pada dinas yang membidangi kebudayaan ataupun di masyarakat sangat terbatas baik jumlah maupun kualifikasinya (melakukan pembinaan melalui workshop, bintek, lokakarya, seminar, CB, sejarah, kesenian: festival lomba dalang anak/regenerasi);

1. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan OPK dan CB masih belum optimal. Hal ini salah satunya terlihat dari data OPK dan CB yang belum terinventaris dengan baik sehingga upaya pelindungannya terhambat (memperbanyak kegiatan inventaris OPK dan CB yang direncanakan hingga mendapatkan data OPK dan CB yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan terkait pemajuan kebudayaan: inventarisasi CB dan/atau ODCB, seni, sejarah tradisi).

2. Belum semua daerah memiliki produk hukum dan/atau SOP sebagai landasan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan OPK dan CB;

3. Kurangnya sinergitas para pemangku kebudayaan baik di pusat maupun di daerah;

a. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan OPK dan CB (memberikan hibah d kesenian dan tbjt, museum untuk

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI

Lampiran

Daftar PPKD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 12. Status Dokumen PPKD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

(Sumber: <https://ppkd.kemdikbud.go.id/dokumen-ppkd> diakses 17 Desember 2023)

NAMA DOKUMEN	STATUS	TAHUN	SK PENETAPAN
Dokumen PPKD Provinsi JAWA TENGAH	DISUSUN		
Dokumen PPKD JAWA TENGAH	DISAHKAN	2018	430/160 Tahun 2018
Dokumen PPKD KAB. CILACAP	DISAHKAN	2018	NOMOR 430/552 /15/TAHUN 2018
Dokumen PPKD KAB. BANYUMAS	DISUSUN	2019	
Dokumen PPKD KAB. PURBALINGGA	DISAHKAN	2018	430/400 TAHUN 2018
Dokumen PPKD KAB. KEBUMEN	DISAHKAN	2018	NOMOR 431/254 TAHUN 2018
Dokumen PPKD KAB. BANJARNEGARA	DISAHKAN	2019	NOMOR 556/862 TAHUN 2018
Dokumen PPKD KAB. PURWOREJO	DISAHKAN	2019	NOMOR 160.18/216/2019
Dokumen PPKD KAB. WONOSOBO	DISAHKAN	2018	430/321/2018
Dokumen PPKD KAB. MAGELANG	DISUSUN	2018	
Dokumen PPKD KAB. BOYOLALI	DISAHKAN	2018	430/546 TAHUN 2018
Dokumen PPKD KAB. KLATEN	DISUSUN	2019	
Dokumen PPKD KAB. SUKOHARJO	DISAHKAN	2018	430/468/2018

Dokumen PPKD KAB. WONOGIRI	DISAHKAN	2018	NOMOR 474 TAHUN 2018
Dokumen PPKD KAB. KARANGANYAR	DISUSUN	2019	
Dokumen PPKD KAB. SRAGEN	DISUSUN	2019	
Dokumen PPKD KAB. SRAGEN	DISAHKAN	2018	NOMOR 430/479 /003/2018
Dokumen PPKD KAB. GROBOGAN	DISAHKAN	2018	430/550/2018
Dokumen PPKD KAB. BLORA	DISAHKAN	2018	430/408/2018
Dokumen PPKD KAB. REMBANG	DISUSUN	2018	
Dokumen PPKD KAB. PATI	DISAHKAN	2018	430/1929 Tahun 2018
Dokumen PPKD KAB. KUDUS	DISAHKAN	2018	430/164/2018
Dokumen PPKD KAB. JEPARA	DISUSUN	2018	
Dokumen PPKD KAB. DEMAK	DISUSUN	2018	
Dokumen PPKD KAB. SEMARANG	DISUSUN	2018	
Dokumen PPKD KAB. TEMANGGUNG	DISAHKAN	2019	430.1/95 Tahun 2019
Dokumen PPKD KAB. KENDAL	DISAHKAN	2018	420/406/2018
Dokumen PPKD KAB. BATANG	DISUSUN	2018	

Dokumen PPKD KAB. PEKALONGAN	DISUSUN	2018	
Dokumen PPKD KAB. PEMALANG	DISUSUN	2018	
Dokumen PPKD KAB. TEGAL	DISAHKAN	2019	420/615 Tahun 2021
Dokumen PPKD KAB. BREBES	DISUSUN	2018	
Dokumen PPKD KOTA MAGELANG	DISAHKAN	2018	NOMOR 430/138/112 TAHUN 2018
Dokumen PPKD KOTA SURAKARTA	DISUSUN	2021	
Dokumen PPKD KOTA SURAKARTA	DISAHKAN	2018	NOMOR 430/47.5 TAHUN 2018
Dokumen PPKD KOTA SALATIGA	DISAHKAN	2018	NOMOR 430/173/2022
Dokumen PPKD KOTA SEMARANG	DISUSUN	2021	
Dokumen PPKD KOTA SEMARANG	DISAHKAN	2018	NOMOR 430/994 TAHUN 2018
Dokumen PPKD KOTA PEKALONGAN	DISAHKAN	2018	430/387/2018
Dokumen PPKD KOTA TEGAL	DISUSUN	2018	

Notulensi FGD Presentasi Hasil Evaluasi

Acara	Pemantauan dan Evaluasi
Hari/Tanggal	Senin/18 Desember 2023
Pukul	15.30-17.00
Tempat	Hotel Syariah Solo
Peserta	<p>a. Narasumber :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fertilia Budi Pradnyaparamita, S.T., M.Kom (Bappeda Provinsi Jawa Tengah)2. Arie Wahyu Haryanto, S.T. (Biro Bangda Provinsi Jawa Tengah)3. Jusman Mahmud, S.S., M.URP (BPK Wilayah X)4. Septi Inrawati, S.S., M.A. (BPK Wilayah X)5. Bambang Sulanjari, S.S., M.A (UPGRIS) <p>b. Tim Pemutakhiran PPKD Tahun 2023</p> <p>c. Tim Input PPKD Tahun 2023</p> <p>d. Perwakilan Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah</p> <p>e. Perwakilan BAPPEDA Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah</p>
Nama Notulis	Nabila Maharani Anis Muhammad Azzam Al-Haq
File dokumentasi	<ul style="list-style-type: none">- Rekaman suara- Foto kegiatan yg mewakili- Materi semisal ada ppt atau file lain dr pemateri/tim penyusun

Nama/Asal	Materi	Catatan utk tindak lanjut
Bapak Jusman - BPK Wilayah X	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi --> dilakukan oleh 5 orang, masing-masing mendapat bagaian 7 kabupaten - Evaluasi ini didasari oleh PERMENDIKBUD No. 1 Tahun 2022 dan yang menjadi alat ukur untuk menilai adalah borang identifikasi dan borang capaian tahun 2022 <p>➤ Penyusunan PPKD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi tahun 2023 = 35 kota/kab sudah menyusun dan mengumpulkan dokumen PPKD; - Terdapat 5 kota/kab yakni Brebes, Demak, Pekalongan, Semarang, Batang belum ada SK Bupati - 2 kota/kab yakni Boyolali dan Temanggung tidak mengumpulkan borang - Kesesuaian Penyusunan PPKD dengan panduan dari Kemdikbud (poin maksimal 17) - Susunan Tim Penyusun PPKD belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku : - Tidak diketuaui Sekretaris Daerah - Sistematika membingungkan/tidak jelas 	-

	<ul style="list-style-type: none"> - Komposisi Tim Penyusun PPKD Kab/Kota tidak mewakili unsur para ahli - Beberapa dokumen PPKD tidak dilengkapi dokumentasi penunjang - Tidak semua dokumen PPKD menonjolkan isu spesifik yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan di daerah - Tidak semua dokumen PPKD mencakup unsur pemajuan kebudayaan (plindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan) 	
Ibu Fertilia - BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> - BAPEDA kab/kota yang hadir pada FGD, baru pertama kali menghadiri undangan yang berkaitan dengan PPKD <p>➤ Dokumen Perencanaan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan telaah pada permasalahan dan rekomendasi dalam PPKD Kab/Kota terhadap RPJMD dan RKPD Kab/Kota (poin maksimal 24) 	
Bapak Arie - BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan instrumen penilaian ini untuk melihat sejauh mana rekomendasi dalam PPKD diakomodasi dalam RPJMD dan RKPD - Permasalahan dan rekomendasi dalam PPKD tidak terakomodasi dalam RPJMD dan RKPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Agar PPKD disusun dengan baik , sehingga dapat dijadikan acuan untuk menyusun dokumen RPJMD dan RKPD - Memunculkan isu-isu aktual terhadap 11 OPK

	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya sedikit program/kegiatan RKPD untuk menjawab rekomendasi PPKD 	
Ibu Septi - BPK Wilayah X	<p>➤ Capaian Pelaksanaan PPKD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan telaah pada target dan realisasi capaian serta anggaran (poin maksimal 100) - Tidak ada keseragaman dalam pengisian borang capaian sehingga banyak terjadi kesalahan dalam pengisian - Target capaian program/kegiatan di beberapa kab/kota tidak tercapai - Alokasi anggaran program/kegiatan tidak terserap secara maksimal 	<p>➤ Rekomendasi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen PPKD disesuaikan dengan regulasi Permendikbud Npo.6 Tahun 2023 - Harus ada komunikasi antara BAPEDA dan Disbud agar dokumen perencanaan yang sudah di susun PPKD sinkron dengan dokumen RPJMD dan RKPD - Tim Penyusunan, sistematika penulisan, substansi, data dukung disesuaikan dengan aturan PERMENDIKBUD No.45 tahun 2018 - Memanfaatkan aplikasi DAPOBUD - Tim Penyusunan dokumen PPKD diharapkan mewakili/melibatkan PEMDA (dinasbud, asisten Bupati/Walikota yang membidangi kebudayaan, Bapeda, BPKAD) dan unsur pada ahli yang mewakili masyarakat - Tim Penyusun dokumen PPKD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah - Setelah penyusunan PPKD selesai, segera tetapkan melalui SK Kepala Daerah

		<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dokumen PPKD kepada stakeholder terkait dan masyarakat serta pelaksanaan rekomendasi permasalahan kebudayaan dalam PPKD - Melakukan pengisian borang identifikasi dan capaian dengan baik
Bapak Bambang Sulanjari UPGRIS	-	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya sinkronisasi antara PPKD dengan RPJMD dan RKPD - Pengisian borang identifikasi, di bagian akhir ada checklist yang sudah menuntun secara sistematika sehingga tinggal mengikuti acuan tersebut - Borang Capaian diisi setiap tahun - Permasalahan dan rekomendasi diisi dengan permasalahan dan rekomendasi per-OPK - Sinkronkan borang capaian dengan permasalahan dan rekomendasi yang ada di dokumen - Bahasa rekomendasi diubah menjadi program yang harus mencakup pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan
Ibu Fertilia BAPPEDA	-	<ul style="list-style-type: none"> - Menambahkan isu pada indikator Permasalahan dan Rekomendasi sehingga menjadi Permasalahan, Isu, dan Rekomendasi

	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun permasalahan merupakan tahap analisis data- Permasalahan yang sudah ada diklasterisasi ke dalam beberapa kelompok, seperti pengamanan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan	
--	---	--

Sesi Diskusi

Identitas Penanya	Pertanyaan	Tanggapan
Bapak Edi - BAPEDA Kudus	Di RPJMP Provinsi hanya ada indeks kebudayaan bukan PPKD. Apakah PPKD sejajar dengan indeks kebudayaan atau bagaimana? Dan apakah PPKD harus dimasukan ke RPJMP? Jika dimasukan, nanti bagaimana menerjemahkan PPKD tersebut dalam RPJMP? Karena kami, saat ini dalam proses penyusunan RPJMP.	<ul style="list-style-type: none"> • Ibu Fertilia : <ul style="list-style-type: none"> - Besok akan ada konsultasi publik rancangan awal RPJPD Jawa Tengah - Jawa Tengah untuk 20 tahun ke depan maju, mandiri, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan. RPJMP Kabupaten kota dan provinsi harus selaras. - Perhitungan IPK dilakukan oleh pusat (BPS dan Bappenas) - Kab/kota tidak harus membuat IPK, boleh membuat asalkan sesuai dengan visi dan misi kab/kota itu sendiri • Bapak Bambang Irawan, menambahkan : <ul style="list-style-type: none"> - Indeks pembangunan kebudayaan tidak terkait langsung dengan PPKD karena turunan indeks dari UNESCO, hanya kedepannya perlu dipikirkan agar sinkron



Gambar 1. Narasumber Mempresentasikan Hasil Evaluasi



Gambar 2. Peserta FGD

Notulensi FGD Paparan Internalisasi PPKD dalam Dokumen Perencanaan Provinsi Jawa Tengah

Acara/Sesi	FGD SESI 3 “Paparan Internalisasi PPKD dalam Dokumen Perencanaan Provinsi Jawa Tengah”		
Hari/Tanggal	Senin, 18 Desember 2023		
Pukul	19.30 - 21.30		
Tempat	Hotel Syariah Solo		
Peserta	BAPPEDA dan DISDIKBUD se- Jawa Tengah		
Nama Notulis	Diar Bagus Yurianto Rizal	Yoga	Prayoga
File dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekaman suara - Foto kegiatan yg mewakili - Materi semisal ada ppt atau file lain dr pemateri/tim penyusun 		

Nama/Asal	Materi	Catatan utk tindak lanjut
Bapak Muryadi – DISBUDPAR SURAKARTA	<ul style="list-style-type: none"> - PPKD menjadi momen dalam menonjolkan kebudayaan daerah yang selama ini cukup di marginalkan - Permasalahan yang cukup sering dijumpai yaitu kurangnya sosialisasi, SDM dan anggaran, serta kurangnya komunikasi antar stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi, penganggaran yang terencanakan, singkronisasi data antar stakeholder menjadi cara yang wajib diprioritaskan dalam perancangan PPKD

	<ul style="list-style-type: none"> - Keuntungan penggunaan PPKD yaitu panduan kebijakan yang jelas, dapat menjadi tolok ukur pencapaian target, efisiensi sumber daya, daya tarik investasi, meningkatkan identitas serta citra daerah yang menyusun PPKD 	<ul style="list-style-type: none"> - Strategi pengaplikasian yaitu melakukan pendekatan Holistik, pengukuran kinerja, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan penerapan PPKD
Bapak Nanang - BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Kebudayaan menjadi isu yang penting dalam internalisasi PPKD dalam dokumen perencanaan - Kebijakan mengenai pembangunan Jawa Tengah 2024 – 2026 (meningkatkan ekonomi yang tangguh, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan sumber daya alam, kestabilan sistem pemerintahan) - Keselarasan RPJPN 2025 – 2045 dalam hal sosial, budaya, dan ekologi - PPKD menjadi data faktual untuk menyusun perencanaan dan transformasi daerah - Permasalahan yaitu partisipasi kebudayaan yang masih rendah dan belum optimal nya tata kelola setiap daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Keselarasan kebijakan dengan pusat yang harus diperhatikan - IPM menjadi ukuran mutlak dalam pengambilan kebijakan yang selaras - Aspek spasial menjadi kunci penyusunan RPJPN dan RPJPD - IPK menjadi data yang harus dimuat dan di validasi - PPKD harus bisa diterjemahkan menjadi bahasa yang bisa menjawab isu strategis pembangunan - Budaya menjadi sumber mengetahui karakter setiap daerah - Upaya peningkatan ekspresi kebudayaan yang optimal dan selaras serta penguatan nilai budaya dalam setiap daerah

Nama/Asal	Pertanyaan	Tanggapan
Ibu Diah - Bappeda Kebumen	IPK memiliki indikator perhitungan, bagaimana perumusan dan interlisasi PPKD yang tepat?	Kemendagri, Kemendikbud dan Bappenas memiliki indikator yang sudah dibuat dalam SEB. Ipk menjadi tanggung jawab provinsi yang dibimbing oleh pusat dan bukan menjadi kewenangan kabupaten/ kota. Kabupaten dan kota berkewajiban menyelaraskan perancangan PPKD dengan hasil IPK yang sudah dibuat.
Bapak Joni - Disdikbud Sragen	Bagaimana solusi interlisasi dalam hal PPKD yang tepat dan sesuai dengan keadaan suatu daerah? Bagaimana menyamakan indikator perumusan PPKD?	Interlisasi dan perumusan PPKD perlu adanya sinkronisasi setiap stakeholder dalam menyesuaikan kegiatan lintas sektor guna mencapai target yang maksimal Perlu adanya penentuan prioritas awal yang harus dilakukan dan disamakan untuk menentukan garis besar hasil PPKD yang ingin dicapai

Notulensi FGD Permasalahan dan Rekomendasi per OPK dan CB Sesi 1

Acara/Sesi	Permasalahan dan Rekomendasi per OPK dan CB – Sesi 1
Hari/Tanggal	Selasa/ 19 Desember 2023
Pukul	09.00-11.00
Tempat	Syari'ah Hotel Solo
Peserta	<p>Tim Pemutakhiran SKPD Daerah se-Jawa Tengah</p> <p>Pembicara Tim Pemutakhiran Data</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prof. Alamsyah, M.Hum (Dasen Sejarah - UNDIP);2. Drs. Tri Hartono, M.Hum. (TACB Provinsi Jawa Tengah)3. Wardiyah, S.Hum (BPK Wilayah X)4. Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si. (Dasen FEB - Universitas Sebelas Maret)5. Basuki Teguh Yuwono, S.Sn., M.Sn. (Dasen Prodi Keris FSRD - ISI Surakarta)
Nama Notulis	Siti Nur Aqidatul Izza, S.Ark Kukuh S. Wiyamto
File dokumentasi	<ul style="list-style-type: none">- Rekaman suara- Foto kegiatan yg mewakili- Materi semisal ada ppt atau file lain dr pemateri/tim penyusun

Nama/Asal	Materi	Catatan utk tindak lanjut
Pembukaan 09.00 Prof. Alamsyah, M.Hum - Sejarah UNDIP	<ul style="list-style-type: none"> - Merujuk UU No. 11 th. 2010 dan UU No. 5 Th. 2017 - Akan menerima masukan Bapak Ibu; status cagar budaya - Fokus pada permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten dan kota - Kami memahami ada kesulitan pengelompokan OPK, berharap dapat memahami betul tentang definisi masing-masing OPK sehingga tidak terjadi kesalahan input - Dalam setiap OPK akan ada upaya pelindungan, dalam upaya tersebut terdapat proses yang berpotensi menjadi permasalahan - Pelindungan meliputi: Inventarisasi > pengamanan > pemeliharaan > Penyelamatan dan Publikasi - Diharapkan dapat mengkategorikan per item - Contoh pelindungan pengamanan: bagaimana merevitalisasi dan lain-lain - OPK disebarluaskan, melakukan pendalaman melalui pengkajian - Terkait dengan pemanfaatan; meningkatkan kesejahteraan masayarakat dan membangun karakter bangsa - Pembinaan; meliputi pembinaan Sumber daya, termasuk sertifikasi SDM 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Melihat UU cagar budaya, pasti di daerah ada CB dan ODCB akan bermuara pada Upaya Pelestarian 	
Pak Bambang Irawan - FEB UNS	<ul style="list-style-type: none"> - Clue dari tim evaluasi sudah jelas, pemutakhiran bisa nyambung dengan RPJMD Jateng - Masalah: menerjemahkan konseptual ke praktikal - Penyampaian tetap mengacu pada UU No. 5, meskipun pemasalahan spesifik diharapkan dapat disampaikan secara lebih macro - Program untuk mengatasi permasalahan harus berkaitan dengan nomenklatur yang ada pada Kepmendagri - Bagaimana melengkapi dokumen PPKD sesuai petunjuk - Usul Bu Fertilia: isu-isu strategis yang akan dimunculkan ke depannya - Urusan data tidak mudah, idealnya dilakukan sebuah riset - Dari kota permintaan top-down sehingga yang terjadi adalah observasi bukan riset 	
Basuki Teguh Yuwono - FSRD ISI Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> - WB adalah tanggung jawab bersama. - Yg mengetahui lapangan adalah daerah sampaikan secara proporsional antara masalah komunitas, daerah, pusat shg ada pembagian prioritas - Masukan, harapan sampaikan sesuai UU Pemajuan Kebudayaan 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terjebak di idealisme besar tp jgn lupakan masalah realitas konkret sehingga solusi terpetakan. 	
Bu Wardiyah - BPK X	<ul style="list-style-type: none"> - PPKD pada dasarnya rencana untuk menyusun pelestarian dan pengelolaan OPK dan CB - Persoalan tentang pelestarian OPK dan CB masih cukup mustahil, sejak munculnya UU tentang OPK dan CB - Bapak Ibu selalu mengeluh tentang anggaran yang tidak ada, diharapkan penyampaian masalah bukan tentang anggaran, namun kebijakan terkait program yang diadakan kedepannya - Penyusunan PPKD tidak berhenti pada 2024 namun sampai 2039, sehingga dapat menjadi pijakan negosiasi - Permasalahan agak rumit, DAPOBUD belum bisa membantu bapak ibu menyusun PPKD dengan baik - Kita harus punya data dasar, jika pada saat ini sampai pada tahap pelindungan, maka harus ada target kedepannya - SDM menjadi suatu yang sangat penting karena ada perubahan-perubahan SDM yang kemungkinan belum mengetahui tentang PPKD 	<ul style="list-style-type: none"> - Daerah perlu memperbaiki data dasar kebudayaan > inventarisasi - Perlu transfer knowledge
Tri Hartono - TACB Jateng	<ul style="list-style-type: none"> - Bab 7.1.11. PPKD 2018 bagian Cagar Budaya - Permasalahan: Belum setiap daerah punya TACB > masih relevan - Regulasi baru > Regnas bisa pinjam TACB ke daerah terdekat, ada tatacaranya buat surat, buat SK dan tanggung biaya 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan: Belum semua peninggalan purbakala ditetapkan sebagai cagar budaya > perlu diskusi - Tambahan utk ppkd 2018. Masalah: Regulasi baru >, UU No 5 th 2017, Peraturan Registrasi dan Pelestarian CB daerah. Rekomendasi: perlu memperbaharui regulasi daerah Peraturan daerah no 10 tahun 2013 tentang pelestarian dan pengelolaan CB 	
	Pemantik diskusi: silahkan menyampaikan	

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator capaian			
					2024	2029	2034	2039
Pelindungan:								
1. Belum semua Kabupaten/Kota memiliki Tim Ahli Cagar Budaya <MASIH RELEVAN>	1. Membentuk Tim TACB Kabupaten/Kota	1. Melakukan penetapan n, peninggalan	1. Ahli yang memiliki kompetensi cagar budaya	1. Merekrut ahli cagar budaya TACB, dan 105 Bupati/Walikota/ Gubernur/ Menteri	Tetuknya TACB di Kab/Kota yang mengikuti asesmen untuk Cagar Budaya	Tim TACB di Kab/Kota yang bersertifikasi; yang mengikuti tetapkan; 105 Bupati/Walikota/ Gubernur/ Menteri	Tim TACB di Kab/Kota yang bersertifikasi; yang mengikuti tetapkan; 105 Bupati/Walikota/ Gubernur/ Menteri	Tim TACB di Kab/Kota yang bersertifikasi; yang mengikuti tetapkan; 105 Bupati/Walikota/ Gubernur/ Menteri
2. Belum semua peninggalan purbakala sebagai cagar budaya sebagai cagar budaya	purbakala	sebagai cagar budaya	2. Memberikan status cagar budaya	3. Masyarakat dan pemerintah	memperoleh yang h sertifikat dilindungi	Cagar Budaya yang dilindungi	1105 Cagar Budaya yang dilindungi	1605 Cagar Budaya yang dilindungi
3. Banyak cagar budaya dan peninggalan	3. Melakukan pemugaran dan pemeliharaan	agar nilai terkandung di dalam cagar		2. Menetapkan n SK TACB oleh Bupati/ Walikota/ Gubernur				

<p>purbakala yang tidak terawat dan rusak</p>	<p>budaya tetap lestari 3. Menjaga dan merawat</p>		<p>3. Melakukan kajian terhadap benda yang diduga sebagai</p>				
---	--	--	---	--	--	--	--

Nama/Asal	Pertanyaan	Tanggapan
Hariyadi Dwi Prasetyo – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas sudah menyusun naskah akademis perda PPKD 2024, Kami juga akan melakukan pemutakhiran, Diawali dengan SK Walikota <p>Pertanyaan:</p> <p>Sinkronisasi PPKD, RKPD, dan RPJMD dari kemendikbud dan bappenas, highlight sudah sejauh apa terkait pppkd kabupaten/kota hal ini diperlukan untuk penyelarasan PPKD yang akan dimutakhirkhan tiap 5 tahun.</p>	<p>Prof. Alamsyah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terima kasih sudah menyusun naskah akademis dan pemutakhiran PPKD - Sinkronisasi dokumen RPTMD dan RKPD kami serahkan pada pusat dan provinsi <p>Bu Wardiyah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada saat uu OPK 2017 ditetapkan salah satu tujuannya adalah integrasi, PPKD sebenarnya baiknya dari tingkat paling bawah; kecamatan dan desa - Pusat memerlukan data dari tingkat bawah untuk dijadikan sebagai dasar - Harapannya dapat terintegrasi sampai pusat - Pertanyaan dapat disampaikan kembali pada narsum kemdikbud - Regnas sudah tidak ada, gabung dengan DAPOBUD

Mohtar - Bapeda Pati	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya karakter jd tdk hanya aspek fisik mk pelestarian dan pengembanganya benda dan nonbendanya. - Perlu respon: ada pergeseran nilai budaya, pengaruh media asing, ilmu akses terbuka berdampak menurunnya nilai budaya kita - Jangan bertumpu hanya pada kesediaan anggaran tp kesadaran. - Perlu dikembangkan penanaman karakteristik sejak dini. Pembuatan konten konten budaya untuk isi media <digital> 	
Adi - Bapeda Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> - Sepakat dg Pati, budaya hasil cipta rasa karsa disepakati oleh manusia - Temanggung baru nyusun RPJMD berbudaya jadi terdepan - Visi Temanggung: Berbudaya maju berkelanjutan - Apakah perlindungan budaya di Jateng sudah maksimal? - Terkait PPKD, saya melihat budaya yg sma dg magelang, singgungan dg semarang, kendal ktk 	<p>Alamsyah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelindungan belum maksimal maka prlu dirumuskan nanti dalam pppk <p>Basuki teguh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Irisan WB antar daerah, tips apa yg bs digarap dan caranya? - Untuk Pati, silakan jg beri masukan <p>Adi Bapeda Temanggung</p>

	<p>bicara budaya daerah tdk terbatas wilayah admin, melihat kesamaan budaya dari suatu masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mencari data inventarisasi untuk melihat kesamaan antar daerah - Di temanggung ada 6 wilayah pengembangan - Perlu pengajuan HAKI untuk pengembangan kebudayaan <p>Mohtar – Bapeda Pati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Praktek yg sdh jalan di Pati, ada mulok. Ke depan di tingkatan nasional lewat regulasi semisal ada warisan budaya takbenda seperti bahasa jawa. Pelajaran di sekolah ada pelajaran tata krama shg perkuat karakter. Dikuatkan dari lokal, nasional, regional. Menekankan pondasi budaya sejak anak. - Budaya adalah media pembentuk karakteristik budaya bangsa
Joni Ariawan - Sragen	<ul style="list-style-type: none"> - Kunci dari internalisasi PPKD adalah persepsi dari pemangku kebijakan yang lain terkait kebudayaan, budaya tidak dipahami secara parsial hanya OPK 	<p>Basuki Teguh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tertarik tentang keterputusan informasi dari pusat ke daerah <p>Joni Sragen:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Kebudayaan dianggap sebagai kegiatan yang happy-happy, tidak memperhatikan unsur 10 yang lain, berimbang pada visi-misi daerah - Sebagus apapun ppkd disusun tanpa ada penjembatan dengan pemangku kebijakan yang lain maka tidak akan optimal - Setelah ini, meminta pendapat tentang Indeks Kinerja Utama Kebudayaan, menjembatani - Ada stakeholder di daerah yang bisa menjembatani tentang penggunaan anggaran - Kemdikbudristek sudah punya MoU dengan PUPR, tetapi di daerah belum banyak yang memanfaatkan. Entah karena ada keterputusan atau bagaimana. MoU-MoU ini harusnya bisa lebih dimanfaatkan lagi di daerah, sehingga masalah pendanaan dapat tertutupi - Masalah bahasa, bahasa ini kan bahasa Jawa, ketika dilaporkan apakah dicatat teta[p satu atau bagaimana - Perlu indeks kinerja pembangunan kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Di level praktis kami melakukan kegiatan" secara siklus, contoh: dari kajian tradisi lisan kami dapat pengembangan festival, motif batik, dan resep kuliner > tradisi lisan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat <p>Basuki Teguh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formula apa agar PPKD dapat menjadi frame visi-misi kepala daerah <p>Joni Sragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilekatkan pada peningkatkan SDM, melalui dunia pendidikan
--	---	--

Sarwono - disdikbud Demak	<ul style="list-style-type: none"> - SDM sering mutasi. Lima kepala bidang dan empat dinas dlm waktu singkat. Yg trcantum di SK banyak pensiun, mutasi ke OPD lain, meninggal. Apa langkah untuk menyusun PPKd berikutnya? - Sedang bahas perbub kebudayaan, smp mana wewenang disdikbud jateng ke daerah utk PPKd? - Di tingkat nasional sdh ditetapkan, apa cagar itu prlu ditetapkan di daerah lg? atau prlu dikaji ulang? - 	<p>Pak Tri Hartono</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masjid demak sdh peringkat nasional ditetapkan lewat SK menteri, jd msh terlindungi, jk diperbaiki kajianya jk mengacu UU no 5 2010, lebih baik. Jk tdk ada, sdh terlindung. Contoh borobudur, ditetapkan warisan dulu baru dikaji <sbg CB>. -
Yessy - Disdikbud Pemalang	<ul style="list-style-type: none"> - Jadi di PPKD 2018 disusun sebelum saya masuk di bidang kebudayaan, kami selalu menyambung komunikasi dengan bappeda - Di tahun 2021 ada pilkada, tim penyusun RPTMD, indikator yang dimasukkan adalah IPK, sehingga kami sedikit kaget karena setalah mencari informasi, kami menyimpulkan bahwa IPK hanya sampai provinsi, akhirnya kami hanya memasukkan indikator terkait WB 	<p>Pak Bambang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tadi Sragen mengusulkan adanya indeks kinerja pemajuan kebudayaan - Angka indeks sama dengan indeks Jawa Tengah, kalau data provinsi ada, bisa dipakai - IPK tidak ada hubungannya dengan pemajuan kebudayaan kita, karena indikatornya diturunkan dari UNESCO (7 POIN) yang kemudian diadaptasi oleh BPS - Saya setuju dengan pak sragen, karena indeks tersebut dapat diajadikan alat ukur sejauh mana kinerja kita

	<ul style="list-style-type: none"> - Kami mulai menjalin komunikasi dengan bappeda terkait pemutakhiran PPKD, 2022 sampai sekarang pemutakhiran belum terlaksana - Data CB, dimasukkan ke regnas namun tidak backup secara lengkap, sehingga ketika terjadi integrasi ke DAPOBUD jadi bingung - Kami belum punya TACB, kami meminta bantuan TACB Provinsi, setelah permendikbud keluar kami tidak bisa pinjam provinsi, bisanya pinjam tetangga. Kami mau pinjam untuk tahun ini, tapi sudah mepet jadi tidak bisa, jadi masih ada 3 objek yang kajiannya masih disimpan 	<ul style="list-style-type: none"> terkait pemajuan kebudayaan, hal ini tidak tercermin di PPKD - Bappeda Surakarta sudah menyusun rencana induk pemajuan kebudayaan, nanti sharing ya
Sigit Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> - 2023 surakarta susun pemajuan kebudayaan lima tahun 24-29, rencana induk pemajuan kebudayaan sesuai akhir periode RPJMD sehingga harapannya mjd visi misi kepala daerah pada pemilu 24. - PPKD, RPJMD, RPJMP kebetulan bersamaan momen periodenya 	<p>Bambang Irawan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan, sasaran dan program dimasukkan ke RPJMD - Jika rencana induk pembangunan kebudayaan sebagai apa? Apakah peta jalan PPKD atau reference dari berbagai program di PPKD? <p>Sigit</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Multipliers effect dari budaya ke ekonomi, Surakarta adalah kota jasa dan wisata pengembangannya/ 	<ul style="list-style-type: none"> - Sementara ini menjadi reference PPKD, menyinkronkan antara rencana induk - Saat penyusunan RPJMD bingung acuan indeksnya maka menggunakan 4 hal pelindungan, pemanfaatan, pengembangan, pembinaan. <p>Bambang Irawan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana induk belum ada juknik, jk ppkd sdh ada. Ini menjadi isu masalah. - Contoh praktik di Surakarta menjadi contoh positioning PPKD dan rencana induk pemajuan kebudayaan
Tri - Bappeda Pemalang	<ul style="list-style-type: none"> - Pemajuan kebudayaan tidak bisa hanya dibebankan pada dinas kebudayaan, karena ada berbagai indikator yang berkaitan dengan pihak lain - Dalam Kepmendagri, pada tahun 2026, IPK menjadi indeks wajib yang harus dipenuhi, indeks fokus yang harus dilaksanakan - Indikator: tampilan kuantitatif dari narasi kualitatif 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana induk adalah penerjemahan RPJMD, roadmap 	
Seto disdikbud semarang	<ul style="list-style-type: none"> - Terima kasih utk evaluasi ppkd kemarin, penilain dr evaluator utk susun ppkd semarang ke depan - Apakah di jateng sudah terfasilitasi komunitas yg minoritas mengacu pada inklusivitas kebudayaan? Smg pinggiran ada sunda, tionghoa, apakah komunitas ini sdh terfasilitasi kebudayaannya? Monitoring. - Ekspresi sudah difasilitasi? Spt dalam muatan lokal 	<p>Prof. alamsyah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahasa OPK komunikasi universal <p>Basuki Teguh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banyak kasus ada mutasi dll, apakah PPKD sudah ditempatkan mjd acuan penyusunan pemajuan daerah? Apakah PPKD sdh familiar? >> <i>jawaban forum belum.</i> - Karena dari forum pagi tadi, sepertinya ppkd belum menjadi familiar dan belum menjadi pijakan pemajuan kebudayaan - Silakan memberi masukan ke tim jk butuh sosialisasi atau maslah apa shg tim pemutakhir <p>Alamsyah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masalah yang ditemui di daerah banyak penyusun ppkd dimutasi <p>Bambang Irawan</p>
Toto Baperindag Semarang	<ul style="list-style-type: none"> - Mohon maaf, dari kabupaten semarang belum memberikan poin yang memuaskan. Baru kali ini mengikuti acara ppkd. Sudah ada ppkd tp belum diundangkan - Kesulitan mencari proxy, IPK indikator baru pusat mewajibkan untuk provinsi blum untuk kab.daerah. 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaiman kebudayaan bisa menjadi frame utama kepala daerah untuk susun pembangunan daerah? Ini plu ditinjau lagi input dan outcome. Mengacu uu pemajuan kebudayaan dan uu cagar budaya, agar mindset perlu ditekankan untuk budaya dapat memberikan dongkrak PAD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Di uu pemajuan masyarakat, tdk membedakan etnis dll, yg penting dapat masuk ke WB benda dan takbenda yg ada di pemajuan kebudayaan atau turunan dari proxy UNESCO <indeks pembangunan kebudayaan>, - Masih terlalu banyak juga budaya mayoritas belum terungkap, sedang yg minoritas tersilap. Contoh, Cap ji kia di Solo istilah nya sangat lokal petik, babi, kantong sebagai permainan tdk selalu judi. Tradisi tjisuak? buang belut dan anakan lele ke kali di Solo masih hidup tapi tdk kelihatan, yang melakukan etnis jawa juga. - Masjid di Solo ada yg menggunakan kemenyan, terjadi di kampung arab, tradisi ini tidak kelihatan. Yang terecord haul, tokoh dimakamkan di Yaman tapi tiap haul rame okupansinya di Solo sehingga berdampak ekonomi, - Perlu direncanakan, karena constraint nya di dana, campur DPRD besar. Pengalaman sbg kepala badan promosi parwi dan Dewan Kesenian Surakarta, ketika menyampaikan usulan langsung ke anggota DPRD bisa meningkat anggarannya.
--	---	--

<p>Fertilia Budi Pradnyaparamita, S.T., M.Kom. (Bappeda Provinsi Jawa Tengah)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - TERKAIT BAGAIMANA nanti PPKD mewarnai visi-misi <p>Minimal calon-calon kepala daerah melirik kebudayaan, perlu RPJMD, saran kami, ketika menyusun dokumen perencanaan pembangunan. BAPPEDA sudah menyerahkan dokumen rancangan teknokratik ke KPU, jika kebudayaan dianggap prioritas maka munculkan dalam rancangan teknokratik, disitulah nanti warna kebudayaan masuk dan diperhatikan oleh calon kepala daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan kebudayaan di OPD-OPD lain <p>Sebagai leading sektor, kami tetap meminta dinas kebudayaan sebagai koordinator. Capaian kinerja pembangunan cenderung lintas sektor, IPN ada pendidikan dan kesehatan. Ketika lintas sektor kenapa berujung di BAPPEDA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinkronisasi harus berbasis data-data yang valid sehingga dapat dijadikan prioritas - Melihat uu no.5 2017, konsetrasi pada objek. Untuk IPK, PPKD adalah objek 10 OPK + CB, sebagian besar datanya berdasar pada bappenas. 	
---	---	--

	<p>IPK, Sebagian besar indikatornya adalah partisipasi, bicara tentang impact. Daerah dibebankan 26 insdikator untuk penyusunan RPJD. IPK dirilis oleh 3 lembaga: Kemdikbud, Kemendagri, BPS, jadi ketika ingin membuat indikator proksi perlu konsultasi ke BPS</p>	
--	--	--

Foto



Notulensi FGD Permasalahan dan Rekomendasi per OPK dan CB Sesi 2

Acara/Sesi	Permasalahan dan Rekomendasi per OPK dan CB sesi 2
Hari/Tanggal	Selasa / 19 Desember 2023
Pukul	11.30 – 12.00
Tempat	Hotel Syariah
Peserta	Tim Pemutakhiran PPKD 2023 Tim Evaluasi PPKD 2023 Tim Input PPKD 2023 Disdikbud Prov. Jateng BAPPEDA Provinsi dan Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten /Kota se – Jawa Tengah.
Nama Notulis	Yulvian Prastyanto Diar Bagus Y.
File dokumentasi	<ul style="list-style-type: none">- Rekaman suara- Foto kegiatan yg mewakili- Materi semisal ada ppt atau file lain dr pemateri/tim penyusun

Nama/Asal	Materi	Catatan utk tindak lanjut
	<p><i>Bagian materi telah disampaikan di sesi 1 > lihat notulen Permasalahan dan Rekomendasi per OPK dan CB sesi 1</i></p>	

Nama/Asal	Pertanyaan	Tanggapan
Ibu Maria (Kab. Klaten)	<p>1. Masalah cagar budaya di Klaten salah satunya yaitu tentang Gereja Delanggu. Masalah timbul ketika gereja tersebut hendak melakukan beberapa renovasi namun terhambat karena sudah ditetapkannya sebagai sebuah cagar budaya. Oleh karena itu saat ini pihak pengelola gereja sedang melakukan upaya untuk pembatalan status cagar budayanya.</p> <p>2. Mengenai Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kabupaten Klaten masih harus digali lagi terutama berkaitan dengan aspek seni dan budaya.</p>	<p>Tanggapan Dari Bapak Bambang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klaten memiliki kegiatan budaya yang cukup pesat dalam perkembangannya, namun masih belum terintegrasi dengan PPKD 2. Dalam cagar budaya yang dimiliki swasta tetap perlu dilakukan pendataan dan pemeliharaan namun bukan menggunakan sistem hibah, karena upaya pemeliharaan cagar budaya merupakan amanat dalam UU. 3. Perlu dilakukan konversi dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. <p>Tanggapan dari Bapak Tri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya produk hukum yang menjadi landasan kegiatan perumusan PPKD karena menjadi dasar setiap

	<p>3. Dulu Kabupaten Klaten juga sempat mengajukan 7 WBTB untuk ditetapkan namun karena kajian akademis kurang maka pengajuan tersebut akhirnya gagal.</p> <p>4. Pejabat yang bertugas di Dinas Kebudayaan Klaten sudah pernah mengalami pergantian pejabat, dan saat ini banyak pegawai baru yang bertugas. Bahkan mengenai PPKD sendiri para pegawai baru tersebut baru tahu sekira tahun 2021 sehingga tidak terlibat dalam penyusunan.</p> <p>5. Kami dari Disbud Kabupaten Klaten masih merasa kebingungan menyusun PPKD, dibuktikan dengan hasil evaluasi dokumen PPKD kemarin. Apakah ada seperti juknis atau petunjuk khusus pembuatan PPKD ? terutama dalam menyusun bab 4 dan 7 karena terlihat sangat krusial dalam naskah ini.</p>	<p>kegiatan dan tidak menyebabkan tumpah tindih kewenangan antar stake holder</p>
Ibu Lia (Jepara).	<p>1. Dari Disbud Kabupaten Jepara sekarang sudah memulai pemutakhiran kembali unntuk dokumen PPKD melalui</p>	

	<p>kegiatan dokumentasi dan pemutakhiran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sebaiknya dalam penyusunan PPKD yang lintas sektoral ini dapat diawali dengan memberikan pemahaman kepada OPD diluar kebudayaan tentang kebudayaan sehingga persepsi dari masing OPD dapat selaras. Karena secara pengalaman ada keterbatasan tentang pemahaman tentang PPKD, kebudayaan, dan OPK bagi pihak – pihak OPD yang bertugas di luar urusan kebudayaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi lagi mengenai apa itu kebudayaan, OPK, cagar budaya (CB) dan urusan lainnya. 3. Setelah dokumen PPKD ini jadi dan disahkan diharapkan agar nantinya Bappeda bisa mengawal pelaksanaan PPKD dengan dinas terkait. 	
--	--	--

Ibu Nurul Farida (Disbud Kabupaten Kendal)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di Kabupaten Kendal terdapat sebuah masalah mengenai cagar budaya yaitu terkait alih fungsi bangunan cagar budaya yaitu kantor Kawedanan Mbodha. Bangunan tersebut tiba - tiba sudah masuk dalam program pekerjaan revitalisasi untuk membangun uang terbuka hijau (RTH). Pada akhirnya gandhok kanan dan kiri dihancurkan untuk dibangun sebuah RTH. 2. Kedepan kami mengharapkan agar Disbud bisa melakukan kajian untuk pembangunan kembali bangunan CB yang sudah rusak khususnya kantor Kawedanan Mbodha. 3. Beberapa waktu yang lalu Tim Pusdatin datang ke Kabupaten Kendal untuk melakukan verifikasi data OPK yaitu tradisi kalang obong. Dalam ritualnya tradisi ini menggunakan banyak <i>uba rampe</i> dan mantra mantra untuk 	<p>Tanggapan dari Ibu Wardiyah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya penyamaan penerjemahan bahasa budaya maupun perencanaan di dalam PPKD. Sehingga tercipta indikator dan garis besar perencanaan serta visi misi yang ingin dicapai.
--	---	--

	<p>pemanggilan arwah. Dalam pelaksanaannya upacara ini selalu dipimpin seorang dukun yang nasabnya selalu diturunkan ke anak keturunannya. Ada kekhawatiran dari si dukun apakah tradisi ini bisa berlangsung sampai ke anak cucu karena ada kekhawatiran dengan nilai - nilai agama Islam. Bagaimanakah kemudian cara agar tradisi semacam ini tidak hilang ?</p>	
Bpk. Fathul wahid (Purworejo)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah penyusunan PPKD di Kabupaten Purworejo utamanya terletak pada keberadaan pejabat pembuat PPKD yang lama yang sudah tidak bergerak di bidang budaya lagi dan telah berganti. Akhirnya kewajiban menyusun PPKD ini diserahkan kepada pegawai - pegawai yang tidak terlalu paham dengan PPKD ini. 2. Kami dari Disbud Purworejo menyarankan sebaiknya ada sebuah diskusi tentang penyusunan PPKD antara bappeda dengan bidang kebudayaan sehingga dapat diselaraskan. 	

Ibu Fahriza, (Bappeda Kab. Banyumas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penyusunan PPKD pihak Bappeda Kab. Banyumas masih belum dilibatkan bahkan baru mendengar dan tau apa itu PPKD. 2. Berbagai masalah mengenai kebudayaan di Kab. Banyumas sudah ada di RPDP 2024 2026. 3. Di Kab. Banyumas sendiri aspek kebudayaan memang belum menjadi prioritas pembangunan karena di Banyumas sendiri masih terdapat masalah yang lebih krusial seperti misalnya kemiskinan dan stunting. 4. Dari sisi pelestarian dan pengembangan kami dari pihak pemerintah Kab. Banyumas terhalang regulasi terutama cagar budaya khususnya di bidang pelestarian dan pengembangan. Hal ini dikarenakan sebagian besar ODCB yang ada masih dimiliki oleh pribadi dan bukan 	<p>Tanggapan dari Bapak Basuki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman aspek sosial dan budaya perlu dilakukan penentuan prioritas yang ingin diselesaikan dan perlu adanya sinergitas antar segala stakeholder yang berkecimpung dalam perumusan
--------------------------------------	--	--

	<p>pemda. Sehingga kami mengalami kesulitan dalam pemberian dana dll.</p>	
Bappeda Kudus	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPKD kudus sudah dibuatkan Surat Keputusan (SK) sejak tahun 2018 namun masih belum sesuai dengan regulasi dari sisi keketuaan dan belum dilakukannya pemutakhiran. 2. Rencananya dokumen yang ada akan direvisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bappeda (khususnya kab. Kudus) selama ini tidak terlibat dalam PPKD karena tidak dilibatkan di dalam keanggotaan tim. Hal ini juga dikarenakan oleh adanya aturan di dalam permendikbud yang tidak mensyaratkan Bappeda dalam keanggotaannya. Maka kedepannya regulasi mengenai pembentukan tim ini bisa direvisi (permendikbud). 	

<p>Ibu Diah (Bappeda Kab. Kebumen).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di tahun 2018 Kab. Kebumen sudah menyusun PPKD sesuai dengan hasil penilaian. 2. Proses review untuk pembaharuan PPKD di Kab. Kebumen akan disegerakan untuk disusun dan dianggarkan. 3. Dalam RPJPD kab. Kebumen unsur budaya sudah diikutkan dan dikategorikan kembali menjadi 7 dimensi. Penyusunan ini sudah dimasukkan sesuai dengan arahan dari Bappeda provinsi. Beberapa contoh mengenai unsur budaya dalam RPJD adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Di kebumen untuk yang bidang ekonomi budaya terdapat masalah yaitu belum maksimalnya branding dan marketing produk lokal. ➤ Ketahanan sosbud: kemampuan budaya untuk mengembangkan identitas belum optimal 	
---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Di ekspresi budaya: belum optimalnya peng-HAKI an atas karya masyarakat ➤ Literasi: masyarakat rendah literasi sehingga minim dilakukan kajian atas budaya masyarakat. ➤ Pendidikan: jarang ada anak muda yang suka budaya, regenerasi kurang. 	
Kabid Kebudayaan (Disbud Kab. Kebumen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada prinsipnya setelah pertemuan ini kami akan menindaklanjuti PPKD dengan pemutakhiran data 2. Salah satu masalah penting di Kab. Kebumen adalah kita belum punya tim ahli cagar budaya, 3. Bisa dianggarkan dari bappeda untuk membentuk TACB. 	
Bpk. Sofan (Disdik Kab. Sukoharjo).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah terkeit budaya di Kab. Sukoharjo utamanya berkaitan dengan proses inventarisasi (OPK & CB) yang masih belum optimal 2. Dari Kab. Sukoharjo sendiri sudah memiliki TACB sendiri. Salah satu 	

	<p>capaiannya adalah pada tahun 2022 berhasil menetapkan 7 ODCB, bahkan di tahun 2023 ini telah masuk lagi 6 dari total 9 cagar budaya untuk ditetapkan.</p>	
Bpk Toni (Cilacap)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah terkait OPK dan CB yang ada di Kab. Cilacap berada pada tahapan inventarisasi yang masih kurang optimal. 2. Selain itu, masih kosongnya TACB, karena masalah birokrasi yang pada kala itu terlewat untuk melakukan perpanjangan. 	



Lampiran Foto

Notulensi FGD Paparan Panel Penguatan PPKD

Acara/Sesi	FGD	Pemutakhiran	Data	Pokok	Pikiran	Kebudayaan	Daerah	Provinsi	Jawa	Tengah
(Moderator: Pak Eko Punto dari TACB Provinsi; Paparan Materi Pak Wildan dari Kemendikbud dan Pak Wahyu dari Kemendagri)										
Hari/Tanggal	Selasa, 19 Desember 2023									
Pukul	13.00 - 16.00									
Tempat	Hotel Syariah									
Peserta	<ul style="list-style-type: none"> - Kemendikbud - Kemendagri - TACB Provinsi - Bappeda - Dinas Kebudayaan 									
Nama Notulis	Lazuardi Ramadhan Jalu Naufal Falah									
File dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekaman suara - Foto kegiatan yg mewakili - Materi semisal ada ppt atau file lain dr pemateri/tim penyusun 									

Nama/Asal	Materi	Catatan utk tindak lanjut
Pak Eko Punto-IAAI/TACB Provinsi sebagai moderator	<ul style="list-style-type: none"> - Masalah kebudayaan cukup penting sebagai landasan terhadap gempuran kebudayaan asing 	
Pak Wildan - Kemendikbud	<ul style="list-style-type: none"> - PPKD memang seperti barang lama namun terus menerus mendapatkan momentum - Beberapa minggu lalu menyelenggarakan Munas Dewan Kesenian yang hasilnya mendesak pemerintah daerah untuk bisa terlibat secara kelembagaan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah - Perencanaan kemajuan kebudayaan dasarnya adalah PPKD. PPKD berisi data yang ada di tiap wilayah dan dokumen perencanaan. - Kemendagri dan BAPPENAS telah memantau dan mengawasi PPKD di tiap provinsi - Pemantauan dan evaluasi 2022 baru 22 provinsi yang menyusun PPKD - Borang capaian untuk 2023 seharusnya sudah jadi karena sudah bulan Desember 	<ul style="list-style-type: none"> -

	<ul style="list-style-type: none"> - Catatan dan Rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 : Tim penyusun belum diketuai oleh sekda, melainkan diketuai oleh Bapelitda, Komposisi tim penyusun belum mencerminkan keterwakilan dari seluruh kabupaten/kota, Rekomendasi PPKD yang disebutkan di dalam Borang Identifikasi dan Borang Capaian tidak tercantum di dalam rekomendasi per OPK kemungkinan besar yang diambil adalah rekomendasi umum - Rekomendasi: Tim Penyusun Pemutakhiran Dokumen PPKD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, Pasal 8 Permendikbud No.45 tahun 2018; anggota tim penyusun PPKD provinsi terdiri dari unsur pemerintah daerah provinsi, wakil para ahli yang menyusun PPKD kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan. Pasal 9 Ayat 2 Permendikbud 45 tahun 2018; unsur wakil para ahli yang menyusun PPKD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 4 huruf b merupakan perwakilan Tim penyusun PPKD kabupaten/kota yang ditunjuk oleh bupati/walikota. - Timeline PPKD: Agustus 2023 – Pemutakhiran Data PPKD melalui Dapobud, Januari 2024 – Pengiriman Borang Capaian 2023, Februari hingga Maret 2024 – Penilaian Pemantauan dan 	
--	--	--

	<p>Evaluasi PPKD Kab/Kota, November 2024 hingga April 2025 – Penetapan RPJMD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struktur Dokumen PPKD Provinsi: nilai rata-rata 46,71 - Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Hasil Rekomendasi PPKD: nilai rata-rata 45,76 - Evaluasi umum: Nilai rata-rata jika pembaginya jumlah provinsi yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi adalah 75,16 dengan rata-rata nilai 43,71 - Urgensi Pemutakhiran PPKD: Pemutakhiran Data (Identifikasi OPK, SDM Lembaga/Pranata, dan Sarpras), Pemutakhiran Permasalahan dan Rekomendasi, Pemutakhiran Dokumen PPKD secara keseluruhan, Pemutakhiran Dokumen PPKD Provinsi karena beberapa kab/kota baru menyusun PPKD menyusul setelah PPKD Provinsi selesai disusun - Kabupaten/Kota semestinya sudah menyelesaikan PPKD sebelum Provinsi akan melakukan pemutakhiran PPKD - Tugas tim penyusun yaitu memberikan analisis terhadap masalah yang dihadapi. Tim penyusun bersifat ad-hoc. - Komposisi tim penyusun PPKD sesuai dengan Permendikbud No. 45 Tahun 2018 	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan dan rekomendasi berawal dari data yang faktual di lapangan sehingga permasalahan dan rekomendasi akan sinkron. - Tujuan adalah kondisi ideal yang diharapkan berdasarkan analisis potensi yang dimiliki dan masalah yang menghambat - Sasaran diisi dengan sasaran spesifik dari rekomendasi yang dibuat - Tahapan kerja berisi dengan tahapan-tahapan kerja yang perlu dilewati untuk menjalankan rekomendasi yang diusulkan. - Dokumen PPKD merupakan dokumen imajinatif yang sifatnya bebas nilai dari masyarakat atau pelaku kebudayaan wilayah setempat - Indikator capaian diisi dengan indikasi ketercapaian rekomendasi (kuantitatif). Indikator capain dibagi ke dalam idikasi dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, dan 20 tahun ke depan. - Saran pemutakhiran PPKD IPK Provinsi Jawa Tengah: Perhatikan dimensi-dimensi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), dimensi mana yang perlu untuk ditingkatkan. Dimensi ekonomi budaya serta dimensi ekspresi budaya perlu mendapat perhatian lebih. Dimensi ekonomi 	
--	--	--

	<p>budaya berisi persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan. Dimensi ekspresi budaya berisi persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir dan persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir.</p>	
<p>Pak Wahyu- Kemendagri</p>	<p>Tema yang diampaikan: Penguatan PPKD bagi pemerintah daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemendagri memberikan apresiasi terhadap penyusunan dokumen PPKD jateng - Penyusunan PPKD mengacu pada uu no.5 tahun 2017 - Pada penyusunan teknokratik 2025 dokumen PPKD ini sebagai dasar acuan bagi pemerintahan yang akan datang - Pemutakhiran PPKD 2023 dapat merubah peraturan daerah agar PPKD dapat diacu secara berkelanjutan. - Dokumen yang diacu tidak menyalahi aturan agar tidak bersebrakang dengan RPJMD - PPKD memiliki konsekuensi perubahan/penambahan sub sub kegiatan sehingga mempengaruhi indeks capaian daerah. 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Urgensi PPKD: PPKD memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi, PPKD agar diselaraskan dengan IKK, Upaya Pemajuan kebudayaan, Operasional PPKD (pelaksanaan operasionalisasi dituangkan lebih lanjut pada RKPD) - PPKD sudah memiliki nomenklatur dari kemendagri - OPD harus dikonvergenkan walaupun memiliki tupoksi masing-masing - Tahun 2024 kemendagri akan melakukan rakortek, jadi mohon untuk unsur budaya dimasukan teknokratik RPJMD pada tahun 2024. 	
--	---	--

Nama/Asal	Pertanyaan	Tanggapan
Pak Maryadi - Disbud Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak bertentangan UU Perlindungan Anak karena memperkerjakan anak dibawah umur? 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu dibedakan antara anak pelaku seni dan mendapatkan penghasilan dari seni. Harapannya, BPK melakukan pendampingan terhadap hal tersebut karena menyangkut dengan kebebasan berekspresi. - Akan kami telusuri kembali mengenai IPK tersebut karena berkaitan dengan indeks-indeks lain seperti indeks demokrasi dan indeks pembangunan manusia.

Bu Anjar -Disbud Sragen	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah nomenlatur yang sudah keluar dari kemendagri sudah disampaikan ke seluruh kepala daerah? - Di daerah kesulitan untuk melakukan penentapan Cagar Budaya karena instansi pemerintah yang lain masih asing dengan penetapan CB, Apakah MOU antara Kemendikbud dengan PUPR tentang revitalisasi PUPR bisa dibreakdown ke bawah sampai tingkat kabupaten? karena daerah Sragen kemarin sempat menemui kesulitan ketika revitalisasi CB yang bersinggungan dengan PUPR Sragen 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemendagri sudah memberitahukan kepada kepala daerah bisa di konfirmasi melalui bappeda, dan bisa menjadi acuan penyusunan program. - Penetapan CB tetap mengacu pada uu cagar budaya. MOU tidak dapat diturunkan sampai bawah (daerah) karena pada UU CB sudah cukup jelas mengatur mengenai penetapan CB.
----------------------------	---	--

FGD OPK Bahasa, Manuskrip, Tradisi Lisan

Acara/Sesi	FGD OPK Bahasa, Manuskrip, Tradisi Lisan
Hari/Tanggal	Selasa, 19 Desember 2023
Pukul	16:00
Tempat	Hotel Syariah
Peserta	Pak Alamsyah, Disdikbud Kabupaten Sragen, Disdikbud Kabupaten Batang, Bappeda Tegal, Disdikbud Kabupaten Pekalongan, B appeda Kabupaten Banyumas
Nama Notulis	Unggul Satrio Nabila Maharani Anis
File dokumentasi	<ul style="list-style-type: none">– Rekaman suara– Foto kegiatan yg mewakili– Materi semisal ada ppt atau file lain dr pemateri/tim penyusun

Nama/Asal		Materi	Catatan untuk Tindak Lanjut
TRADISI LISAN			
Pelindungan			
	Inventarisasi	Belum optimalnya inventarisasi tradisi lisan	Melakukan upaya inventarisasi tradisi lisan
	Pengamanan	Belum optimalnya pengamanan tradisi lisan	MengHAKI kan tradisi lisan
	Pemeliharaan	Belum optimalnya upaya pemeliharaan tradisi lisan	Mewujudkan pemeliharaan tradisi agar tidak hilang dan musnah
	Penyelamatan	Belum optimalnya upaya digitalisasi tradisi lisan	Melakukan Digitalisasi data base
		Belum optimalnya upaya menghidupkan dan menjaga ekosistem tradisi lisan	Pewarisan pada generasi berikutnya
		Masih belum optimal upaya penyelamatan tradisi lisan	Dilakukan upaya revitalisasi tradisi lisan
Pengembangan			
	Kajian	Belum optimalnya kajian terhadap tradisi lisan	Tersedianya kajian tradisi lisan
	Inovasi	Belum optimalnya pengayaan keberagaman- inovasi tradisi lisan	Terciptanya pengayaan keberagaman/ inovasi tradisi lisan
Pemanfaatan			
	Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan tradisi lisan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat	Menjadikan substansi tradisi lisan sebagai sumber pendapatan masyarakat

	Membangun Karakter Bangsa	Belum optimalnya tradisi lisan sebagai media membangun karakter bangsa	Menjadikan tradisi lisan sebagai salah satu muatan lokal dalam pendidikan baik formal maupun non formal
	Sumber Daya Manusia	Belum tersedianya SDM yang kompeten	Peningkatan kapasitas SDM tradisi lisan
	Sarana dan Prasarana	Belum tersedianya pranata tradisi lisan yang memanfaatkan teknologi	Teknologi digunakan dalam pranata tradisi lisan

NAMA/ASAL	MATERI	CATATAN UNTUK TINDAK LANJUT	
MANUSKRIPT			
Pelindungan			
	Inventarisasi	Terbatasnya jumlah manuskrip yang diinventarisasi	Melakukan upaya inventarisasi keberadaan manuskrip
	Pengamanan	Belum optimalnya upaya pemutakhiran data manuskrip dalam sistem pendataan terpadu	- Mewujudkan pemutakhiran data dalam sistem pendataan terpadu
	Pemeliharaan	Belum optimalnya upaya pemeliharaan manuskrip	'- Mewujudkan pemeliharaan manuskrip agar tidak rusak, hilang dan musnah
		Belum optimalnya upaya digitalisasi tradisi lisan	Digitalisasi data base
Penyelamatan			
	Restorasi	Masih banyak yang mengalami kerusakan	Mewujudkan restorasi manuskrip
Pengembangan			

	Kajian	Belum optimalnya kajian tentang manuskrip	Transliterasi, transkripsi, ahir bahasa, pengkajian, sosialisasi
Pemanfaatan			
	Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan manuskrip yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat	Menjadikan substansi manuskrip sebagai sumber pendapatan masyarakat
	Membangun Karakter Bnagsa	Belum optimalnya manuskrip sebagai media membangun karakter bangsa	Menjadikan substansi manuskrip sebagai salah satu muatan lokal dalam pendidikan baik formal maupun non formal
Pembinaan			
	SDM	Terbatasnya SDM yang mampu melakukan transliterasi, hali aksara, dan alih bahasa untuk manuskrip	Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan

NAMA/ASAL		MATERI	CATATAN UNTUK TINDAK LANJUT
Pelindungan			
	Inventarisasi	Belum optimalnya inventarisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Melakukan upaya inventarisasi dialek lokal dalam bahasa daerah

	Pengamanan	Belum optimalnya upaya pemutakhiran data dialek lokal dalam bahasa daerah dalam sistem pendataan terpadu	Mewujudkan pemutakhiran data dialek lokal dalam bahasa daerah dalam sistem pendataan terpadu
	Pemeliharaan	Belum optimalnya upaya pemeliharaan dialek lokal dalam bahasa daerah	Mewujudkan pemeliharaan dialek lokal dalam bahasa daerah agar tidak hilang dan musnah
		Belum dilakukan upaya digitalisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Melakukan digitalisasi
Pengembangan			
	Kajian	Belum optimalnya kajian tentang dialek	Melakukan kajian
	Pemanfaatan		
	Kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat	Menjadikan sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat
	Meningkatkan ketahanan budaya	Belum optimalnya dialek lokal dalam meningkatkan ketahanan budaya	Menjadikan dialek lokal dalam bahasa daerah sebagai salah satu muatan lokal
Pembinaan			
	SDM	Semakin berkurangnya penutur dialek lokal dalam bahasa daerah	Mewujudkan transfer knowledge dialek lokal dalam bahasa daerah pada generasi penerus terkait dengan dialek lokal dalam bahasa daerah

Foto



FGD OPK Adat Istiadat, Ritus

Acara/Sesi	FGD mengenai upaya yang perlu dilakukan
Hari/Tanggal	Selasa, 19 Desember 2023
Pukul	16.00 - 21.00
Tempat	Hotel Syariah
Peserta	<ul style="list-style-type: none">- Ika Puspitasari (DISBUDPAR Salatiga)- Adhie Wibowo (BAPPEDA kota Salatiga)- Anggara Putra (DISDIKBUD kota Magelang)- Adhi Isa (BAPPEDA kota Magelang)- Dewi (BAPPEDA kota Magelang)- Wahyu Seto (DISDIKBUD kab. Semarang)- Samartoto (BAPPEDA kab. Semarang)- Anum Gianingsih (BAPPEDA kota Semarang)- Nur Ikhtiaroh (DINPARBUDPORA kota Pekalongan)- Bambang Irawan (Dosen FEB UNS)
Nama Notulis	<ul style="list-style-type: none">- Diar Bagus Yurianto- Jalu Naufal Falah
File dokumentasi	<ul style="list-style-type: none">- Rekaman suara- Foto kegiatan yg mewakili- Materi semisal ada ppt atau file lain dr pemateri/tim penyusun

Nama/Asal	Materi	Catatan utk tindak lanjut
bapak Drs. BRM BAMBANG IRAWAN, M.Si	<p>*ADAT ISTIADAT</p> <p>*PERLINDUNGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pentingnya penyusunan ROAD MAP - Pemahaman nilai budaya yang dijadikan landasan pemikiran perumusan PPKD <p>Tahapan kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membuat roadmap 2. membuat detail perencanaan dari road map yang dibuat 3. pelaksanaan inventarisasi 4. publikasi 5. evaluasi secara menyeluruh <ul style="list-style-type: none"> - Draft roadmap harus tersusun - Pentingnya prioritas perlindungan nilai budaya pada awal penyusunan <p>*PENGEMBANGAN dan PEMANFAATAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun road map (peta jalan) dan SOP yang terintegrasi antara inventarisasi, pemeliharaan - Tujuan nya menyusun peta jalan dan SOP sebagai pedoman dalam melakukan inventarisasi, pemeliharaan - Sasaran yang dituju : OPD (dinas yang berkaitan), pelaku adat dan masyarakat (aspek tempat/ spasial),akademisi (yang berkaitan), pegiat budaya,

<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersusunnya road map bagi penelitian yang komprehensif mengenai adat istiadat yang menjadi dasar dalam mewariskan nilai luhur budaya yang memperkuat karakter bangsa - Menyusun road map untuk penelitian yang komprehensif <p>Tujuan menyusun road map riset yang bisa menciptakan ekosistem adat istiadat yang baik serta upaya implementasi hasil riset untuk keberlanjutan terjaganya nilai-nilai karakter bangsa</p> <p>Sasaran nya para peneliti, lembaga penelitian dan pengembangan, peggiat, lembaga riset pemerintah</p> <p>Tahapan kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Menyusun roadmap riset dan pengkajian mengenai adat istiadat yang mencangkup kekayaan budaya 8. Melaksanakan hasil roadmap agar dapat mendesiminasi hasil kajian 9. melaksanakan evaluasi riset dan kajian adat istiadat 	<p>*PEMBINAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan karena masih kurangnya upaya yang mendorong masyarakat dalam menghidupi dan melestarikan adat istiadat sehingga masih kurangnya terciptanya kreasi, inovasi, dan variasi yang dapat mendorong upaya masyarakat untuk menghidupi, memelihara, dan melestarikan adat istiadat 	<p>Dengan menyusun peta jalan penelitian yang cukup komprehensif mengenai adat istiadat dan digunakan untuk pewarisan nilai-nilai budaya guna mencapai tujuan memperkuat karakter bangsa</p>
--	--	--

		memelihara, dan melestarikan adat istiadat dapat tercapai
	<p>*RITUS</p> <p>*PELINDUNGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penyusunan peta jalan inventarisasi dan optimalnya inventarisasi yang termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, serta perlindungan di bidang ritus untuk terciptanya publikasi yang terintegrasi. <p>*PENGEMBANGAN dan PEMANFAATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permasalahannya yaitu belum tersusunnya peta jalan penelitian yang komprehensif di bidang Ritus yang dimana di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur budaya yang dapat dijadikan sebagai penopang karakter bangsa 	<p>Melakukan penyusunan peta jalan dan SOP mengenai Inventarisasi yang terintegrasi dengan upaya penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan serta publikasi mengenai Ritus yang ditujukan untuk OPD dinas terkait hingga melibatkan tokoh adat, masyarakat adat hingga akademisi yang berkaitan</p> <p>Melakukan upaya penyusunan peta jalan penelitian yang cukup komprehensif di bidang ritus yang berisi mengenai nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dapat menjadi penopang karakter bangsa sehingga hasil penelitian tersebut dapat</p>

	<p>*PEMBINAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat masih kurang dalam upaya memelihara dan melestarikan Ritus sehingga diperlukan dorongan bagaimana memberikan informasi ke masyarakat bagaimana pentingnya keberadaan Ritus sebagai identitas budaya yang perlu diperhatikan. 	<p>diimplementasikan secara maksimal serta upaya ini dapat menjadi perhatian bagi OPD dinas terkait, para peneliti, maupun pegiat swasta atau kebudayaan</p> <p>Melakukan banyak upaya dorongan ke masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas dalam memelihara dan melestarikan Ritus sehingga dapat tercipta kreasi, inovasi, dan variasi untuk keberlangsungan keberadaan dari Ritus sebagai identitas budaya</p>
--	--	---

Lampiran



FGD OPK Pengetahuan Tradisional, Permainan Rakyat, Dan Olah Raga Tradisional

Acara/Sesi	FGD Pengetahuan Tradisional, permainan rakyat dan olah laga tradisional
Hari/Tanggal	Selasa, 19 Desember 2023
Pukul	17.00-22.00
Tempat	Hotel Syariah
Peserta	Wardiyah Sulaiman, BPK X, Guritno, Dinas Pendidika dan Kebudayaan Wonogiri, 081234895615 Aris Sutopo, Bappeda dan Litbang Wonogiri, 082242170049 Fathul Wachid, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purworejo, 0882005383987 Sarono, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Demak, 081329191366 Puryadi, Bappeda Demak, 081325660364 Istiyadi, Disparbud Kebumen, 081328551064 Dyah, Bappeda Kebumen, 08128585742 Rafiudin, Disdikbud Kendal, 085290109919 Khotijah, Disparbud Banjarnegara, 082136300028 Syarief Achmad H, Disparbud Kudus, 085640503292 Edhie Wibowo, Bappeda Kudus, 081329960945
Nama Notulis	Muhammad Azzam Al-Haq, S.Ark. Kukuh S. Wiyamto

File dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekaman suara - Foto kegiatan yg mewakili - Materi semisal ada ppt atau file lain dr pemateri/tim penyusun
------------------	--

Nama/Asal	Materi	Catatan utk tindak lanjut						
Wardiyah/ BPK X	<ul style="list-style-type: none"> - Pemikiran dari FGD ini adalah mencapai sesuatu yang ideal, perkara keterbatasan sumberdaya bisa diatasi lewat perencanaan <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">BAGAIMANA MERUMUSKAN MASALAH?</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center; font-size: small;">UNTUK MEMPERMUDAH PERUMUSAN MASALAH, PERMASALAHAN PEMAJUAN TIAP OBIEK DAPAT DIKELOMPOKKAN DALAM EMPAT KATEGORI:</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <p>1. Masalah Pelindungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi • Penyelamatan • Pengamanan • Pemeliharaan • Publikasi </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <p>2. Masalah Pengembangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kajian • Pengayaan keragaman • Penyebarluasan </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <p>3. Masalah Pemanfaatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesejahteraan masyarakat • Peningkatan ketahanan budaya • Peningkatan pengaruh budaya Indonesia di dunia </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; vertical-align: top;"> <p>4. Masalah Pembinaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan mutu SDM di bidang pemajuan objek tersebut • Peningkatan mutu tata kelola lembaga yang berurusan dengan pemajuan objek tersebut </td> </tr> </table> </div> <ul style="list-style-type: none"> - Permainan rakyat dan olahraga tradisional bisa dianggap sebagai hal yang sama - Ada OPK yang bisa masuk lebih dari satu kategori OPK - Perbedaan antara olahraga dan permainan terletak pada fisik (olahraga) dan rasa (permainan) - Secara permasalahan dan penganggaran relatif sama 	<p>1. Masalah Pelindungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi • Penyelamatan • Pengamanan • Pemeliharaan • Publikasi 	<p>2. Masalah Pengembangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kajian • Pengayaan keragaman • Penyebarluasan 	<p>3. Masalah Pemanfaatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesejahteraan masyarakat • Peningkatan ketahanan budaya • Peningkatan pengaruh budaya Indonesia di dunia 	<p>4. Masalah Pembinaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan mutu SDM di bidang pemajuan objek tersebut • Peningkatan mutu tata kelola lembaga yang berurusan dengan pemajuan objek tersebut 			<p>Penyesuaian isi PPKD agar dapat masuk ke dalam dokumen perencanaan yang dibuat oleh Bappeda (RPJMD dan RKPD)</p>
<p>1. Masalah Pelindungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi • Penyelamatan • Pengamanan • Pemeliharaan • Publikasi 	<p>2. Masalah Pengembangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kajian • Pengayaan keragaman • Penyebarluasan 	<p>3. Masalah Pemanfaatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesejahteraan masyarakat • Peningkatan ketahanan budaya • Peningkatan pengaruh budaya Indonesia di dunia 						
<p>4. Masalah Pembinaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan mutu SDM di bidang pemajuan objek tersebut • Peningkatan mutu tata kelola lembaga yang berurusan dengan pemajuan objek tersebut 								

	<ul style="list-style-type: none"> - Pemutakhiran tidak hanya mencakup jumlah, tapi juga kondisi terkini (komunitas, dll) - Data perlu ditindaklanjuti dengan upaya pelestarian lainnya, tidak hanya sekadar dicollect saja - Inventarisasi perlu diupdate dengan data baru (pemutakhiran data) - Pendataan OPK perlu dilanjutkan dengan publikasi dan perekaman data - Permasalahan dalam pelindungan: Belum ada olahraga trasional yang ditetapkan sebagai WBTB tingkat nasional - Rekomendasi: Penetapan olahraga tradisional sebagai WBTB tingkat nasional - Tujuan: Terjadinya olahraga tradisional yang ditetapkan sebagai WBTB - Sasaran: Dikbud, BPK X - Indikator capaian: 1 penetapan per 1 tahun <p>Permainan rakyat & Olahraga Tradisional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan dalam pelindungan: Kurangnya pemahaman dan kesadaran generasi muda tentang olahraga tradisional - Rekomendasi: Penyebarluasan informasi dan sosialisasi dalam bentuk yang sesuai dengan kondisi di lapangan - Tujuan: Peningkatan pemahaman dan kesadaran generasi muda tentang olahraga tradisional 	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Sasaran (pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan): Dinas yang menangani kebudayaan, pendidikan, pemuda, dan olahraga; masyarakat; generasi muda - Tahapan kerja: Pendataan, Kajian, FGD, Sosialisasi - Permasalahan dalam pengembangan: Kurangnya event untuk pengenalan olahraga tradisional - Rekomendasi: Penyelenggaraan event untuk olahraga tradisional - Tujuan: Penyebarluasan informasi dan terbentuknya ekosistem mengenai olahraga tradisional kepada generasi muda yang berkelanjutan - Tahapan kerja: Melakukan koordinasi lintas sektor terkait penyelenggaraan event, Penentuan olahraga yang akan dimasukkan ke dalam event, Publikasi kegiatan, Penyelenggaraan event - Indikator capaian: 5 event dalam jangka waktu 2024-2029, kemudian 10 event per 5 tahun berikutnya - Permasalahan dalam pembinaan: Belum optimalnya pembinaan terhadap olahraga tradisional - Rekomendasi: Melakukan pembinaan terhadap olahraga tradisional 	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan: Meningkatkan pembinaan terhadap olahraga tradisional melalui komunitas - Tahapan kerja: Melakukan koordinasi lintas sektor terkait pembinaan, Penentuan olahraga yang akan dimasukkan ke dalam pembinaan, Publikasi kegiatan, Pembinaan <p>Pengetahuan Tradisional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan dalam pelindungan: Belum optimalnya inventarisasi terhadap pengetahuan tradisional - Rekomendasi: Meningkatkan inventarisasi terhadap pengetahuan tradisional - Tujuan: Peningkatan data dan inventarisasi terhadap pengetahuan tradisional - Tahapan kerja: Pemutakhiran data, sosialisasi/FGD <p>Pengetahuan Tradisional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan dalam pelindungan: ketersediaan bahan baku untuk menunjang pengetahuan tradisional (misal. pembuatan jamu) - Rekomendasi: Menyediakan bahan baku untuk pembuatan jamu - Tujuan: Jamu sebagai pengetahuan tradisional yang lestari dan dapat dimanfaatkan - Sasaran: OPD terkait, Dinas yang menangani kebudayaan, masyarakat 	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Tahapan kerja: Koordinasi lintas sektoral, penyediaan bibit tanaman, sosialisasi, penanaman tanaman bahan baku jamu <p>Pengetahuan Tradisional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan dalam pelindungan: Penetapan pengetahuan tradisional sebagai WBTB masih terbatas - Rekomendasi: Melakukan pengusulan penetapan pengetahuan tradisional sebagai WBTB - Tujuan: Pengetahuan tradisional yang dilindungi dan siap untuk dikembangkan dan dimanfaatkan - Sasaran: Dinas yang menangani kebudayaan, BPK X, Kemendikbudristek, masyarakat - Tahapan kerja: Pendataan dan dokumentasi, kajian, FGD, usulan penetapan <p>Pengetahuan Tradisional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan dalam pengembangan: Kurangnya penyelenggaraan event atau festival pengetahuan tradisional - Rekomendasi: Penyelenggaraan event atau festival olah raga tradisional - Tujuan: Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan pengetahuan tradisional yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya generasi muda - Sasaran: Dinas yang menangani kebudayaan, masyarakat, generasi muda 	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Tahapan kerja: Koordinasi lintas sektoral, publikasi dan dokumentasi, penyelenggaraan event <p>Pengetahuan Tradisional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan dalam pemanfaatan: Belum optimalnya pemasaran produk pengetahuan tradisional - Rekomendasi: Mengoptimalkan pasar-pasar untuk menjual produk pengetahuan tradisional - Tujuan: Tersedianya pasar-pasar untuk menjual produk pengetahuan tradisional - Sasaran: Dinas yang menangani kebudayaan, OPD terkait, masyarakat - Tahapan kerja: Koordinasi lintas sektoral, publikasi dan dokumentasi, penjualan produk <p>Pengetahuan Tradisional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan dalam pemanfaatan: Belum optimalnya sertifikasi terhadap produk pengetahuan tradisional - Rekomendasi: Mengoptimalkan sertifikasi terhadap produk pengetahuan tradisional - Tujuan: Tersedianya produk pengetahuan tradisional yang telah tersertifikasi - Sasaran: Dinas yang menangani kebudayaan, OPD terkait, masyarakat 	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Tahapan kerja: Koordinasi lintas sektoral, publikasi dan dokumentasi, sertifikasi produk <p>Pengetahuan Tradisional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan dalam pembinaan: Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku pengetahuan tradisional - Rekomendasi: Melakukan pembinaan kepada para pelaku pengetahuan tradisional - Tujuan: Terselenggaranya pembinaan dan sertifikasi kepada para pelaku pengetahuan tradisional yang sesuai dengan standar dan prosedur - Sasaran: Dinas yang menangani kebudayaan, lembaga sertifikasi, masyarakat - Tahapan kerja: Koordinasi lintas sektoral, pembinaan kepada pelaku pengetahuan tradisional, sertifikasi kepada pelaku pengetahuan tradisional 	
Guritno/ Dikbud Wonogiri	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan olahraga tradisional dan permainan rakyat? Batasnya seperti apa? 	<ul style="list-style-type: none"> - Wardiyah: apa daerah sudah ada
Aris Sutopo/Bappeda Wonogiri	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya event-event terkait dengan olahraga tradisional sehingga dapat meningkatkan minat anak-anak terhadap olahraga tradisional. - Ada agenda sekolah sehat memanfaatkan permainan rakyat untuk olah raga. 	Masalah: perlu pemutakhiran data

	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelumnya sudah ada event-event di tingkat sekolah (kerjasama dengan sektor pendidikan) - Perlu adanya regulasi yang memungkinkan implementasi pelindungan olahraga tradisional di tingkat sekolah - Penguatan komunitas dan grup-grup terkait olahraga tradisional 	
Fathul Wachid/ Dikbud Purworejo	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya update atau pemutakhiran data dan kondisi OPK - Penekanan pentingnya pelestarian terutama pada generasi muda - Dinas perlu jemput bola terkait dengan pengajuan WBTB 	
Sarono/ Dikbud Demak	<ul style="list-style-type: none"> - Demak belum inventarisasi, namun sudah melakukan festival-festival untuk olahraga tradisional seperti <i>penekan</i> - Penetapan olahraga tradisional sebagai WBTB terdapat kendala karena bisa jadi daerah lain juga memiliki olahragan tradisional yang sama (mungkin dengan nama yang berbeda) - Olahraga mengenai raga, permainan rakyat lebih ke rasa. 	
Puryadi/ Bappeda Demak	<ul style="list-style-type: none"> - Kesulitan membedakan antara olah raga dan permainan rakyat. 	
Dyah/ Bappeda Kebumen	<ul style="list-style-type: none"> - Ranah pemutakhiran data itu apakah hanya update jumlah saja atau dengan pelestarian juga? - Kurangnya pemahaman dari generasi muda (perlu regenerasi) 	

Edhie Wibowo/ Bappeda Kudus	Dalam dokumen perencanaan, arah luaran adalah outcome dan impact, sementara dalam dokumen PPKD sejaun ini arah luaran baru sebatas output	
--------------------------------	---	--

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					202	2029	203	203
Olah Raga Tradisional								
Pelindungan: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang olah raga tradisional	Melakukan sosialisasi tentang olah raga tradisional	Menyebarluaskan informasi mengenai olah raga tradisional kepada masyarakat, khususnya generasi muda		5. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olah raga 6. Masyarakat 7. Generasi muda	4. Pemutakhiran data tentang olah raga tradisional 5. Penyelenggaraan FGD/DKT 6. Sosialisasi			

Pelindungan: Belum adanya penetapan olah raga tradisional sebagai WBTB	Melakukan pengusulan penetapan olah raga tradisional sebagai WBTB	Olah raga tradisional yang dilindungi dan siap untuk dikembangkan dan dimanfaatkan	6. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olah raga. 7. Kemendikbud ristek 8. BPK Wilayah X 9. Masyarakat	5. Pendataan dan pendokumen tasian tentang olah raga tradisional 6. Kajian tentang olah raga tradisional 7. Penyelengga raan FGD/DKT 8. Usulan penetapan			
--	---	--	--	---	--	--	--

<p>Pengembangan: Kurangnya penyelenggaraan event atau festival olah raga tradisional</p>	<p>Penyelenggaraan event atau festival olah raga tradisional</p>	<p>Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan olah raga tradisional yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.</p>	<p>4. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olah raga</p>	<p>4. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta</p>			
<p>Pemanfaatan: Kurangnya sarana prasana penunjang olah raga tradisional</p>	<p>Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang olah raga tradisional</p>	<p>Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang olah raga</p>	<p>3. Dinas yang menangani bidang kebudayaan,</p>	<p>3. Melakukan koordinasi lintas sektor</p>			

		tradisional yang sesuai standar.	pendidikan, pemuda dan olah raga 4. OPD terkait 5. Masyarakat	4. Pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap				
Pemanfaatan: Kurang optimalnya pemanfaatan olah raga tradisional sebagai atraksi wisata daerah	Mengoptimalkan olah raga tradisional sebagai atraksi wisata daerah	Olah raga tradisional yang dapat dimanfaatkan sebagai atraksi wisata daerah	3. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olah raga 4. Masyarakat	3. Publikasi dan dokumentasi 4. Penyelenggaraan event wisata				
Pembinaan: Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional	Melakukan pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional	Terselenggaranya pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional	5. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, pendidikan,	3. Melakukan koordinasi lintas sektor 4. Pembinaan kepada para pelaku olah				

			pemuda dan olah raga 6. Komunitas Budaya 7. Masyarakat	raga tradisional				
Permainan Rakyat								
Pelindungan: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang permainan rakyat	Melakukan sosialisasi tentang permainan rakyat	Menyebarluaskan informasi mengenai permainan rakyat kepada masyarakat, khususnya generasi muda	1. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olah raga 2. Masyarakat 3. Generasi muda	3. Pemutakhiran data tentang permainan rakyat, 4. Penyelenggaraan FGD/DKT Sosialisasi				

<p>Pelindungan: Belum adanya penetapan permainan rakyat sebagai WBTB</p>	<p>Melakukan pengusulan penetapan permainan rakyat sebagai WBTB</p>	<p>Permainan rakyat yang dilindungi dan siap untuk dikembangkan dan dimanfaatkan</p>	<p>1. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olah raga</p> <p>2. Kemendikbud ristek</p> <p>3. BPK Wilayah X</p> <p>4. Masyarakat</p>	<p>5. Pendataan dan pendokumen tasian tentang permainan rakyat,</p> <p>6. Kajian tentang permainan rakyat,</p> <p>7. Penyelengga raan FGD/DKT,</p> <p>8. Usulan penetapan.</p>			
<p>Pengembangan: Kurangnya penyelenggaraan event atau festival permainan rakyat</p>	<p>Penyelenggaraan event atau festival permainan rakyat</p>	<p>Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan</p>	<p>5. Dinas yang menangani bidang kebudayaan,</p>	<p>4. Melakukan koordinasi dan pelibatan</p>			

		permainan rakyat yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya generasi muda	pendidikan, pemuda dan olah raga, 6. Masyarakat, 7. Generasi muda.	para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta, 5. Publikasi dan dokumentasi, 6. Penyelenggaraan event.			
Pembinaan: Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Melakukan pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Terselenggaranya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	4. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olah raga	3. Melakukan koordinasi lintas sektor 4. Pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat			

			5. Komunitas Budaya 6. Masyarakat 8. Generasi muda				
Pemanfaatan: Kurang optimalnya pemanfaatan permainan rakyat sebagai atraksi wisata rakyat sebagai atraksi wisata daerah	Mengoptimalkan permainan rakyat sebagai atraksi wisata daerah	permainan rakyat yang dapat dimanfaatkan sebagai atraksi wisata daerah	3. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olah raga 4. Masyarakat	3. Publikasi dan dokumentasi 4. Penyelenggaraan event wisata			
Pembinaan: Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Melakukan pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Terselenggaranya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	4. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olah raga	3. Melakukan koordinasi lintas sektor, 4. Pembinaan kepada para pelaku			

			5. Komunitas Budaya 6. Masyarakat	permainan rakyat.				
Pengetahuan Tradisional								
Pelindungan: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengetahuan tradisional.	Melakukan sosialisasi tentang pengetahuan tradisional.	Menyebarluaskan informasi mengenai pengetahuan tradisional kepada masyarakat, khususnya generasi muda.	5. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, 6. Masyarakat, 7. Generasi muda.	4. Pemutakhiran data tentang pengetahuan tradisional 5. Penyelenggaraan FGD/DKT 6. Sosialisasi				
Pelindungan: Keterbatasan bahan baku untuk pembuatan jamu tradisional	Menyediakan bahan baku untuk pembuatan jamu tradisional	Jamu sebagai pengetahuan tradisional yang lestari dan dapat dimanfaatkan.	3. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, 4. OPD terkait, 5. Masyarakat.	5. Melakukan koordinasi lintas sektoral 6. OPD terkait menyediakan				

				n tanaman untuk pembuatan jamu tradisional, 7. Sosialisasi kepada petani untuk menanam tanaman yang dibutuhkan dalam pembuatan jamu tradisional, 8. Penanaman tanaman yang dibutuhkan			
--	--	--	--	---	--	--	--

				dalam pembuatan jamu tradisional.				
Pelindungan: Penetapan pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya takbenda (WBTB) masih terbatas.	Melakukan pengusulan penetapan pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya takbenda (WBTB).	Pengetahuan tradisional yang dilindungi dan siap untuk dikembangkan dan dimanfaatkan.	6. Dinas yang menangani bidang kebudayaan 7. Kemendikbud ristek 8. BPK Wilayah X 9. Masyarakat	5. Pendataan dan pendokumen ntasian tentang pengetahua n tradisional, 6. Kajian tentang pengetahua n tradisional,				

				7. Penyelenggaraan FGD/DKT, 8. Usulan penetapan.			
Pengembangan: Kurangnya penyelenggaraan event atau festival pengetahuan tradisional	Penyelenggaraan event atau festival pengetahuan tradisional.	Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan pengetahuan tradisional yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.	4. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, 5. Masyarakat, 6. Generasi muda.	4. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta, 5. Publikasi dan dokumentasi,			

				6. Penyelenggaraan event.				
<p>Pemanfaatan: Belum optimalnya pemasaran produk pengetahuan tradisional.</p>	<p>Mengoptimalkan pasar-pasar untuk menjual produk pengetahuan tradisional.</p>	<p>Tersedianya pasar-pasar untuk menjual produk pengetahuan tradisional.</p>	<p>3. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, 4. OPD terkait, 5. Masyarakat.</p>	<p>4. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta, 5. Publikasi dan dokumentasi, 6. Penjualan produk.</p>				

Pemanfaatan: Belum optimalnya sertifikasi terhadap produk pengetahuan tradisional.	Mengoptimalkan sertifikasi terhadap produk pengetahuan tradisional.	Tersedianya produk pengetahuan tradisional yang telah tersertifikasi.	3. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, 4. OPD terkait, 5. Masyarakat.	4. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, 5. Publikasi dan dokumentasi, 6. Sertifikasi produk.			
Pembinaan: Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku pengetahuan tradisional.	Melakukan pembinaan kepada para pelaku pengetahuan tradisional.	Terselenggaranya pembinaan dan sertifikasi kepada para pelaku pengetahuan tradisional yang sesuai dengan	4. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, 5. Lembaga sertifikasi, 6. Masyarakat.	4. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait pembinaan dan sertifikasi,			

		standar prosedur.	dan	5. Pembinaan kepada para pelaku pengetahua n tradisional, 6. Sertifikasi kepada para pelaku pengetahua n tradisional.				
--	--	----------------------	-----	--	--	--	--	--

Foto



FGD OPK Teknologi Tradisional dan Cagar Budaya

Acara/Sesi	FGD, Teknologi Tradisional dan Cagar Budaya
Hari/Tanggal	Selasa, 19 Desember 2023
Pukul	Sesi 1: 16.00 – 18.00 Sesi 2: 19.00 - 22.00
Tempat	Hotel Syariah Solo
Peserta	<ul style="list-style-type: none"> - Narsum: Pak Tri Hartono - Trimarto – (BAPEDA Kab. Pemalang) - Suharsono (DISDIKBUD Kab. Sukoharjo) - Asri K. Tyas – (DINDIKBUD Kab. Pemalang) - Maria Yakuba – (DISBUDPORAPAR Klaten) - Lia S. – (DISPARBUD Kab. Jepara) - Endang Darwati – (DISPORABUDPAR Grobogan) - Hastutiningdyah (DISDIKBUD Kab. karanganyar) - Sofan Susanto – (DISDIKBUD Kab. Sukoharjo) - Myta R – (BAPEDALITBANG Kab. Klaten) - Basuki R (BAPPEDA Kab. Magelang) - Seto Sanjoyo (BAPPEDALITBANG Kab. Grobogan) - Dodik (BAPPEDALITBANG Kab. Karanganyar)
Nama Notulis	<ul style="list-style-type: none"> - Rizal Yoga Prayoga

	<ul style="list-style-type: none"> - Yulvian Prastyanto
File dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekaman suara - Foto kegiatan yg mewakili - Materi semisal ada ppt atau file lain dr pemateri/tim penyusun

Nama/Asal	Materi	Catatan utk tindak lanjut
Pak Sofan	(Isu) penerus tidak mau menerima teknologi lama karena tidak sesuai dengan kemajuan jaman / pergeseran nilai	-
	<p>Pelindungan nomor 1 Minimnya data mengenai teknologi tradisional – masih relevan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi: reinventarisasi dan inventarisasi berkala data teknologi tradisional b. Tujuan: terhimpunnya data yang valid untuk mengidentifikasi jenisnya c. Sasaran: OPD terkait d. Tahapan kerja inventarisasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk tim 	

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Identifikasi dan dicatat (Pendataan secara jelas), di verifikasi dan divalidasi (termasuk dengan data piktoral objek dan pelaku budaya) 3. Ditetapkan oleh kementerian 4. Pemutakhiran data 5. Diamankan 	
	<p>Perlindungan no 2 lemahnya pelindungan hukum (terkait dengan pengamanan) – masih relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan dalam artian untuk menjamin keberadaannya oleh pihak asing <ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi: memberikan pendampingan hukum teknologi tradisional, b. Tujuan: menjamin terwujudnya payung hukum dari pengambilan pihak asing c. Sasaran: lembaga, masyarakat, akademisi, pelaku teknologi tradisional dan pemerintah d. Tahapan kerja dari pelindungan hukum: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan/pengajuan sebagai kekayaan intelektual 2. Penetapan karya intelektual 3. Pemutakhiran data 4. Sosialisasi 	

	<p>Pelindungan nomor 3 diganti dengan pembinaan nomor 1 – terkait dengan minimnya publikasi kepada masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> Rekomendasi: mempublikasikan melalui medsos Tujuan: mempublikasikan hasil melalui media sosial Sasaran: lembaga, masyarakat, akademisi, pelaku teknologi tradisional dan opd terkait <p>Pelindungan no 4 dicoret</p>	
	<p>Pengembangan no 1 – penyebaran pengetahuan tradisional yang belum merata</p> <ol style="list-style-type: none"> Rekomendasi: melakukan sosialisasi / penyebarluasan informasi pengetahuan tradisional Tujuan: <ol style="list-style-type: none"> menyebarluaskan nilai-nilai budaya teknologi tradisional Penyebarluasan dilakukan secara desiminasi: melalui nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, maupun festival dan diaspora: melalui penyebarluasan pelaku budaya dan identitas budaya Publikasi disebarluasan dapat melalui media massa, penyebarluasan: disebarluaskan melalui informasi budaya, transfer ilmu budayanya 	

	<p>c. Sasaran : lembaga, masyarakat, akademisi, pelaku teknologi tradisional, pemerintah</p> <p>d. Tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyiapan bahan informasi Seleksi data/informasi, dikurasi (penyeleksi secara detail) Ditindaklanjuti melalui festival 	
	<p>Pengembangan no 2 Rendahnya kajian tentang teknologi tradisional</p> <ol style="list-style-type: none"> Rekomendasi: Melakukan kajian tentang teknologi tradisional Tujuan: <ol style="list-style-type: none"> tergalinya nilai-nilai budaya pada teknologi tradisional, memberikan fakta secara valid dan akuntabel sasaran: SDA tahapan kajian: <ol style="list-style-type: none"> penyusunan tim kajian penulusuran sumber sejarah verifikasi lapangan: pelaku budaya/maestro, dokumentasi penyusunan ikhtisar kajian penyampaian rencana awal dengan menyampaikan hasil lapangan / kanwal penyusunan sosialisasi hasil akhir 	

Lia	<p>Peningkatan akses masyarakat terhadap museum</p> <p>Pengelolaan sarpras museum</p> <p>Pengelolaan koleksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kita tidak bisa menyamakan karakteristik museum tiap daerah - Sebagai sebuah museum dituntut untuk meningkat PAD dll, tentu impikasinya berkaitan dengan akses museum <p>Jika kembali ke undang-undang, CB dan museum tidak bisa dipisahkan</p>	
	<p>Pemanfaatan no 1 rendahnya pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi : melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi tradisional b. Tujuan : memberdayakan masyarakat sekitar untuk kesejahteraan atau peningkatan kesejahteraan c. Sasaran : SDA, dinas pariwisata d. Tahapan kerja: <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi manfaat teknologi tradisional b. Sosialisasi dari hasil identifikasi manfaat 	
	<p>Pembinaan no 1 - belum optimalnya pembinaan SDM tentang teknologi tradisional</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi : 	

	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan grand design pelatihan b. melakukan pelatihan SDM c. melakukan sosialisasi melalui demplot <p>b. Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kompetensi SDM c. Sasaran : SDA d. Tahapan kerja: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan grand design b. Sosialisasi pelatihan c. Melakukan pelatihan d. Evaluasi 	
	<p>Cagar Budaya</p> <p>Pelindungan no 1 belum semua Kab Kota memiliki Tim Ahli Cagar Budaya – masih relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi : Membentuk TACB Kab Kota b. Tujuan : Melakukan penetapan, pemeringkatan dan c. Sasaran : Ahli yang memiliki kompetensi cagar budaya, Pemerintah, Akademisi, Masyarakat d. Tahapan kerja: <ul style="list-style-type: none"> a. Merekrut ahli menjadi TACB 	

	<ul style="list-style-type: none"> b. mengikuti asesmen untuk memperoleh sertifikat c. meminjam TACB kab terdekat atau provinsi dengan masa kerja 1 tahun dan boleh diperpanjang 	
	<p>pelindungan no 2 belum semua ODCB ditetapkan sebagai cagar budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rekomendasi: ditetapkan ODB menjadi CB b. tujuan : <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan status CB agar nilai yang terkandung didalamnya dapat lestari b. perlindungan hukum c. sasaran: SDA d. Tahapan kerja: <ul style="list-style-type: none"> a. Diinventarisasi b. Dikaji c. Direkomendasikan d. Ditetapkan e. Sosialisasi f. Pemutakhiran 	
	<p>Pelindungan no 3 tentang PERDA nomor 10 th 2013 sudah tidak sesuai dengan undang-undang no 5 th 2017 ttg pemajuan kebudayaan dan PP no 1 th 2022 ttg registrasi nasional dan cagar budaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi: 	

	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan revisi/perubahan perda no 10 th 2013 b. Penyusunan rencana induk b. Tujuan: untuk pemajuan kebudayaan pelestarian CB c. Sasaran: SDA d. Tahapan kerja: <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan 2. Pembahasan 3. Penetapan 4. Pengesahan 5. Pengundangan 6. Penyebarluasan/sosialisasi 7. Menyusun rencana induk 	
	<p>Pengembangan no 1 Belum optimal nya pengembangan nilai cagar budaya melalui Penelitian, Adapatisasi, Revitalisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi: sesuai b. Tujuan ; sesuai e. Sasaran ; SDA f. Tahapan kerja: sesuai <p>Pembinaan no 1 Belum optimalnya pembinaan SDM terhadap pelestarian cagar budaya</p>	

	<p>a. Rekomendasi: Melakukan optimalisasi pembinaan SDM terhadap pelestarian cagar budaya</p> <p>b. Tujuan: Meningkatkan pelestarian cagar budaya melalui pembinaan SDM</p> <p>c. Sasaran: SDA</p> <p>d. Tahapan kerja:</p>	
	<p>Bu Lia :</p> <p>Peningkatan akses masyarakat terhadap museum</p> <p>Pengelolaan sarpras museum</p> <p>Pengelolaan koleksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kita tidak bisa menyamakan karakteristik museum tiap daerah - Sebagai sebuah museum dituntut untuk meningkat PAD dll, tentu impikasinya berkaitan dengan akses museum <p>Ketika berbicara museum tidak hanya berbicara ttg CB, tapi juga OPK</p>	

Teknologi tradisional

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja
Pelindungan 2. Minimnya data data mengenai teknologi tradisional	Inventarisasi berkala teknologi tradisional	Terhimpunnya data yang valid	e. Lembaga, masyarakat, Akademisi, Pelaku teknologi tradisional dan Pemerintah / OPD terkait	7. Membentuk tim pendataan 8. Identifikasi dan dicatatkan, diverifikasi dan divalidasi 9. Ditetapkan oleh Kepala Daerah 10. Diusulkan untuk mendapatkan penatapan 11. Pelaporan secara berkala 12. Evaluasi

3. Lemahnya pelindungan hukum (terkait dengan pengamanan)	Memberikan pendampingan hukum teknologi tradisional	Menjamin terwujudnya payung hukum pengakuan dari pihak lain/asing	c. Lembaga masyarakat, Akademisi d. Pelaku teknologi tradisional e. dan pemerintah / OPD terkait	1. Pengusulan/pengajuan sebagai kekayaan intelektual 2. Mendapatkan pengakuan kekayaan intelektual 3. Pemutakhiran data 4. Sosialisasi 5. Evaluasi
---	---	---	--	--

4. Minimnya publikasi kepada masyarakat	Mempublikasikan melalui media massa	Mempublikasikan hasil melalui media massa	d. Lembaga masyarakat e. Akademisi f. Pelaku teknologi tradisional dan g. Pemerintah/OPD terkait	5. Membentuk tim publikasi 6. Menyiapkan bahan publikasi 7. Mempublikasikan 8. Evaluasi
Pengembangan 1. Penyebarluasan pengetahuan tradisional yang belum merata	Melakukan penyebarluasan informasi pengetahuan tradisional	d. Menyebarluaskan nilai-nilai budaya teknologi tradisional e. Penyebaran dilakukan secara desiminasional:	d. Lembaga masyarakat e. Akademisi f. Pelaku teknologi tradisional dan g. Pemerintah/OPD terkait	1. Penyiapan bahan informasi 2. Seleksi data/info rmasi, dikurasi (penyeleksi secara detail)

	<p>melalui nilai - nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, maupun festival dan diaspora: melalui penyebaran pelaku budaya dan</p>	<p>3. Ditindaklanjuti melalui pameran</p> <p>4. Evaluasi</p>
--	--	--

			identitas budaya f. Penyebar luasan melalui media massa, informas i budaya, transfer ilmu budayan ya		
2. Rendahnya kajian tentang teknologi tradisional	Melakukan kajian tentang teknologi tradisional	Tergalinya nilai-nilai budaya pada teknologi tradisional secara faktual.	d. Lembaga masyarakat e. Akademisi f. pelaku teknologi tradisional dan	9. Penyusu nan tim kajian 10. Penulusu ran sumber	

			g. pemerintah/operd terkait	11. Verifikasi lapangan 12. Pendokumentasi n 13. Penyusunan kajian 14. Penyampaian hasil kajian 15. Sosialisasi hasil kajian 16. Evaluasi
Pemanfaatan 1. Rendahnya pemanfaatan teknologi tradisional	Melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi tradisional	Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan	e. Lembaga masyarakat f. Akademisi g. pelaku teknologi tradisional dan	1. Identifikasi manfaat teknologi

untuk kesejahteraan masyarakat			h. pemerintah/op d terkait i. Dinas Pariwisata	tradision al 2. Mensosia lisasikan hasil identifika si 3. Evaluasi
Pembinaan 1. Belum optimalnya pembinaan SDM tentang teknologi tradisional	Penyusunan <i>grand</i> <i>design</i> pelatihan	Meningkatnya kompetensi SDM	f. Lembaga masyarakat g. Akademisi h. pelaku teknologi tradisional dan i. pemerintah/op d terkait j. Dinas Pariwisata	1. Perencan aan <i>grand</i> <i>design</i> 2. Pelaksan aan latihan 3. Evaluasi

Cagar Budaya

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja
--------------	-------------	--------	---------	---------------

Pelindungan 1. Belum semua kabupaten/kota memiliki Tim Ahli Cagar Budaya	Membentuk TACB Kab/Kota	Melakukan penetapan, pemeringkatan	e. Ahli yang memiliki kompetensi Cagar Budaya, f. Pemerintah, g. Akademisi, h. Masyarakat	1. Merekrut ahli menjadi TACB 2. mengikuti i asesmen untuk memperoleh sertifikat 3. meminta TACB kab terdekat atau provinsi dengan masa
--	-------------------------	------------------------------------	--	---

					kerja 1 tahun dan boleh diperpan jang 4. Evaluasi
2. Belum semua ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya) ditetapka n sebagai Cagar Budaya	Ditetapkan ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya) menjadi Cagar Budaya	c. Memberikan status Cagar Budaya agar nilai yang terkandung didalamnya dapat lestari d. Perlindungan hukum	b. Objek Diduga Cagar Budaya / Cagar Budaya		1. Inventari sasi 2. Kajian 3. Rekomen dasi 4. Penetapa n 5. Sosialisa si 6. Pemutak hiran 7. Evaluasi

<p>3. PERDA Jateng Nomor 10 th 2013 sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 th 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 1 th 2022</p>	<p>a. Melakukan revisi/perubahan perda no 10 th 2013 b. Penyusunan rencana induk</p>	<p>Untuk pemajuan kebudayaan dan pelestarian CB</p>	<p>e. Ahli yang memiliki kompetensi Cagar Budaya, f. Pemerintah, g. Akademisi, h. Masyarakat i. Cagar Budaya</p>	<p>8. Penyusunan 9. Pembahasan 10. Penetapan 11. Pengesahan 12. Pengundangan 13. Penyebarluasan /sosialisasi 14. Menyusun rencana induk 15. Evaluasi</p>
--	--	---	--	--

<p>tentang registrasi nasional dan Cagar Budaya.</p>				
<p>Pengembangan Belum optimalnya pengembangan nilai Cagar Budaya melalui Cagar Budaya melalui Penelitian, Adapatisi, Revitalisasi</p>	<p>Melakukan optimalisasi Pengembangan nilai Cagar Budaya melalui Cagar Budaya melalui Penelitian, Adapatisi, Revitalisasi</p>	<p>Meningkatkan nilai Cagar Budaya melalui Penelitian, Adapatisi, Revitalisasi</p>	<p>Objek Diduga Cagar Budaya / Cagar Budaya</p>	<p>5. Penelitian 6. Adpatasi, 7. Revitalisasi 8. Evaluasi</p>
<p>Pemanfaatan Belum optimalnya pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian untuk meningkatkan</p>	<p>Melakukan optimalisasi pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian untuk meningkatkan</p>	<p>Tercapainya pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian untuk meningkatkan</p>	<p>Semua Cagar Budaya yang ada di Jawa Tengah</p>	<p>Regulasi dan fasilitasi Cagar Budaya melalui perizinan, pemanfaatan koleksi, Evaluasi</p>

kesejahteraan masyarakat	kesejahteraan masyarakat	kesejahteraan masyarakat			
Belum semua kabupaten kota mempunyai museum	Mendirikan/merintis museum	Sebagai tempat untuk menyimpan, memelihara, memanfaatkan koleksi Cagar Budaya / Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Cagar Budaya yang ada di Jawa Tengah	6. Merencakan/melakukan kajian pendirian museum, 7. Menyiapkan sarana prasarana dan/SDM, 8. Menyiapkan Koleksi	

				9. Mengisi/ menata museum, 10. Menyusun SOP pengelolaan Museum 11. Evaluasi
Pembinaan Belum optimalnya pembinaan SDM yang menangani Cagar Budaya	Melakukan optimalisasi pembinaan SDM untuk pelestarian Cagar Budaya	Meningkatkan kompotensi pelestari Cagar Budaya melalui pembinaan SDM	Seluruh komponen Masyarakat	7. Sosialisasi 8. Workshop 9. Lokakarya 10. Seminar dan 11. Bimtek 12. Evaluasi

Permasalahan Umum dan Rekomendasi

Isu umum dalam objek pemajuan kebudayaan terkait Teknologi Tradisional yakni penerus tidak mau menerima teknologi lama karena tidak sesuai dengan kemajuan jaman / pergeseran

1. Dari aspek Pelindungan
 - a. Minimnya data mengenai teknologi tradisional
 - b. Lemahnya pelindungan hukum (terkait dengan pengamanan)
 - c. Minimnya publikasi kepada masyarakat
2. Pengembangan
 - a. Penyebaran pengetahuan tradisional yang belum merata
 - b. Rendahnya kajian tentang teknologi tradisional
3. Pemanfaatan
 - a. Rendahnya pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat
4. Pembinaan
 - a. Belum optimalnya pembinaan SDM tentang teknologi tradisional

Terkait Cagar Budaya

1. Pelindungan
 - a. Belum semua kabupaten kota memiliki Tim Ahli Cagar Budaya
 - b. Belum semua ODCB ditetapkan sebagai Cagar Budaya
 - c. PERDA Jateng Nomor 10 th 2013 sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 th 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 1 th 2022 tentang registrasi nasional dan Cagar Budaya.
2. Pengembangan

- a. Belum optimalnya pengembangan nilai Cagar Budaya melalui Penelitian, Adapatisasi, Revitalisasi
- 3. Pemanfaatan
 - a. Belum optimalnya pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - b. Belum semua kabupaten kota mempunyai museum
- 4. Pembinaan
 - a. Belum optimalnya pembinaan SDM terhadap pelestarian Cagar Budaya

Foto



FGD OPK Seni

Acara/Sesi	FGD OPK Seni
Hari/Tanggal	Selasa, 19 Desember 2023
Pukul	16.25
Tempat	Hotel Syariah
Peserta	Pak Basuki, Mbak Iwuk, Ilham Bintang Disbudpar Kabupaten Temanggung - 085728553676 Tony Agus S. - PKK Kabupaten Cilacap - 085640192302 Eko Sumardiyanto – Disdikbud Kabupaten Boyolali – 082123722489 Muryadi - Disbudpar Kota Surakarta - 085786338556 Sigit Wardoyo - Bappeda - 085293433999
Nama Notulis	Siti Nur Aqidatul Izza, S.Ark. Lazuardi Ramadhan, S.Ark.
File dokumentasi	<ul style="list-style-type: none">- Rekaman suara- Foto kegiatan yg mewakili- Materi semisal ada ppt atau file lain dr pemateri/tim penyusun

Nama/Asal	Sampaian	Tanggapan
Pak Basuki	<ul style="list-style-type: none"> - Enaknya seperti apa untuk pembahasannya, apakah akan secara general atau satu per satu 	<ul style="list-style-type: none"> -
Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> - Masalahnya terlalu jaran kepang sentris, sebenarnya ada 79 OPK namun 2400 kelompok yang 601 jaran kepang, sehingga terjadi ketimpangan - Ketika mencoba menyelemanat yang lain, wadahnya belum ada karena cenderung lebih fokus ke jaran kepang, wadah yang dimaksud semisal event. OPK yang lain tidak diberi panggung yang cukup - Contoh seni yang lain: topeng ireng, banyon (?) - Pola pewarisannya tidak terkendela, indentitas desa - Pembakuan maestro - Wayang kedu pernah mengajukan pembakuan maestro 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan organisasi, pembuatan event - Apakah mereka siap berekspresi >> mereka siap - Untuk berekspresi apakah siap? >> mereka ada kelompok, tapi belum ada legal formal organisasi - Ketika ada ketimpangan jauh, baiknya ada organisasi terstruktur, agar bisa disambungkan dengan pihak-pihak yang dapat mendukung - Langkah aksi: pembuatan legal formal organisasi - Skala prioritas untuk OPK lain yang ingin diangkat: Bangilun (?), topeng ireng - Mendorong pembakuan maestro dalam ranah kabupaten, provinsi, dan pusat
Cilacap	<ul style="list-style-type: none"> - Kendala lebih ke geografis karena dekat dengan Banyumas sehingga tidak punya ciri khusus - Bedanya dengan Banyumas: kostum, gerakan. Contoh: lengger - Pernah mengadakan festival banjarwari 	<p>Langkah aksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya kajian identitas kesenian Cilacap - Perlu promosi kesenian - Pembakuan kesenian - Penggalian motif khas Cilacap (Seni Rupa)

	<ul style="list-style-type: none"> - Di Cilacap juga dominan di satu kesenian: Ebeg (sama dengan kasus Temanggung) - Ekosistem sudah tebangun dengan baik, sudah kerjasama dengan ISI Solo - Seni rupa belum terdata - Permasalahan legalitas dari dinas, seperti surat registrasi kesenian, hanya ada surat keterangan, tidak ada monitoring satu per satu 	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian pelaku seni rupa - Kajian dan pemetaan seni rupa di Cilacap - Pembenahan tata kelola
Boyolali	<ul style="list-style-type: none"> - Ada masalah terkait dengan pelindungan hukum pelaku seni; - Kode etik belum ada - Permasalahan biasanya ada di penontonnya, ada yang gamau berhenti - Kadang organisasi memenuhi administrasi hanya untuk mencairkan anggaran bantuan - Seni rupanya masih banyak di logam, timah - Seragam batik Boyolali dibuat oleh orang Boyolali - Mengadakan festival; festival tek-tek (semua serba bambu), belum bisa mewadahi semua kesenian Boyolali - Kartu seniman 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan hukum, lebih ke sertifikasi atau bagaimana? >> pendampingan hukum saat beraktifitas kesenian - Pembentukan kode etik kesenian; belum banyak dilakukan karena akan berdampak besar pada ekonomi kreatif, kurang lebih proses 2 tahun penyusunan - Membuat peraturan daerah untuk batasan penyelenggaran pertunjukkan kesenian - Pendampingan legal formal oraganisasi - Patung kuda yang ikon Boyolali itu buatan orang Jogja, kalau misal untuk selanjutnya mengedepankan seniman-seniman setempat

		<p>untuk membangun identitas daerah melalui kesenian daerah, bangunan monumental</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan ruang ekspresi (Festival) yang lebih bisa mewadahi seluruh kesenian serta mengelola
Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan sanggar seni di Surakarta belum merata, masih ada pilih kasih, mungkin karena orang dinas merangkap sebagai pelaku budaya - Belum punya data base yang valid untuk sanggar seni dan sanggar budaya, masih tumpang tindih - Kehidupan sanggar masih tahap ketergantungan, belum mandiri; kemarin sempat melakukan workshop promosi media sosial - Regerenasi tatak sungging wayang belum ada, di Solo hanya ada dua sanggar - Legalitas sanggar perlu didorong - Kesulitan sertifikasi pelaku kesenian; bingung masalah prosedur dan lembaga yang akan memberikan sertifikasi - Terkait dengan pelindungan anak, ada anak-anak main jaranan kemudian dituntut eksploitasi anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerataan pembinaan ruang ekspresi, fasilitas, dan pendanaan - Pemberian sistem internal terkait distribusi fasilitas; serta melakukan pendataan dan promosi agar data bertambah sehingga tidak hanya itu-itu saja yang menerima pembinaan - Publikasi terhadap kesenian yang belum populer dan hampir - Pendampingan tata kelola organisasi - Upaya mendorong pewarisan - Perlu adanya sosialisasi sertifikasi bidang kesenian - UNESCO menyebutkan tergantung dengan persepsi masyarakat pendukung, sehingga kegiatan kesenian yang mengikutsertakan anak harus melihat dari sudut pandang masyarakat

		pendukung, mengedapankan HAM dan apresiasi, menghindarkan eksplorasi anak serta kekerasan
Mbak Iwuk	Administrasi pelaku seni untuk mendapatkan dukungan pemerintah, bisa jadi yang dapat itu-itu saja karena administrasi yang baik hanya itu	Itu bisa terwadahi melalui kode etik
Pak Basuki	<p>Perlu adanya sosialisasi LSP</p> <p>Metode uji LSP ada 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ujian kompetensi secara tulis dan praktik - Melalui CV / kiprah <p>Dengan adanya sertifikasi, pemerataan pekerjaan akan lebih mudah</p>	<p>Mbak Iwuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalau OPD yang mengadakan LSP, tapi nanti kan manfaatnya hanya dirasakan secara individu bukan secara komunal <p>Pak Basuki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketika individu-individu tersertifikasi profesi maka sistem akan perlahan sehat
Pak Basuki	Transmisi makna nilai ada kendala tidak? Atau apakah ada metode lain untuk menstransmisikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh agama akan membuat masyarakat lebih mengerti
Pak Basuki	Porsi mana yang bisa diwadahi oleh BAPPEDA	<p>Pak Sigit Bappeda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebetulnya selama ini, kita selalu berusaha melibatkan perangkat daerah untuk mengetahui OPD mana yang terlibat dengan kebudayaan - Kita mengawal - Kendalanya anggaran dan SDM terbatas

		<ul style="list-style-type: none"> - CSR ditangani dengan OPD masing-masing - Kontrol pelaksanaan ada monev - Bagaimana cara mengetahui para pelaku seperti guru bahasa jawa kompeten untuk mengajar

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian					Keterangan (Kepmendagri No. 900.1.15.5.13 17)
					2024	2029	2034	2039	2044	
PELINDUNGAN										
Seni rupa belum terdata	Perlu kajian dan pemetaan seni rupa									
	Publikasi terhadap kesenian yang belum populer									

	dan hampir punah								
PEMANFAATAN									
Terbatasnya ruang ekspresi	Pengadaan ruang ekspresi atau festival yang lebih bisa mewadahi seluruh kesenian								
Seni rupa masih dibuat oleh pelaku seni luar daerah	Mengedepankan seniman-seniman setempat untuk membangun identitas daerah melalui kesenian daerah, bangunan								

	monumental, dan ornamentik								
PENGEMBANGAN									
Terdapat kesamaan dan kemiripan antar daerah	Perlu adanya kajian identitas kesenian								
Terdapat kesamaan dan kemiripan kesenian di wilayah yang beririsan	Promosi kesenian Pembakuan kesenian								
PEMBINAAN									
Pihak Kabupaten dan Provinsi belum melakukan pembakuan maestro.	Mendorong pembakuan maestro dalam ranah kabupaten, provinsi dan pusat.								

Terjadinya ketimpangan antar opk yang satu dengan yang lain dan ada kelompok opk tapi belum memiliki legal formal	Pembuatan legal formal organisasi dan pembuatan ruang berekspresi								
Kurangnya pemantauan organisasi seni	Pemebenahan tata kelola								
Masalah terkait perlindungan hukum pelaku seni	Pendampingan hukum								
Perundungan kegiatan kesenian	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kode etik • Membuat perda 								

	untuk batasan penyelen ggaraan pertunju kan kesenian								
<ul style="list-style-type: none"> • Belum terukurnya kompetensi pelaku seni • Kesulitan sertifikasi pelaku seni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan sertifikasi pelaku seni • Sosialisasi sertifikasi bidang kesenian • Perlu adanya 								

	sosialisasi LSP								
Pembinaan pelaku seni atau sanggar belum merata	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan ruang ekspresi, fasilitas, dan pendanaan • Pembahan sistem internal terkait distribusi fasilitas serta melakukannya pendataan 								

	n dan promosi								
Kehidupan sanggar seni masih tahap ketergantungan dan belum mandiri	Pendampingan tata kelola organisasi								
Regenerasi	Upaya mendorong pewarisan								
Perlindungan anak dan eksplorasi anak	Mengedepankan HAM dan apresiasi, menghindari eksplorasi, serta kekerasan								

Foto



Notulensi Penajaman Hasil Review FGD

Acara/Sesi	Penajaman Hasil Review FGD
Hari/Tanggal	Rabu, 20 Desember 2023
Pukul	08.00-11.00
Tempat	Hotel Syariah
Peserta	OPD bidang Pendidikan, Kebudayaan, Bappeda se-Jawa Tengah
Nama Notulis	Unggul Satrio Jalu Naufal Falah
File dokumentasi	<ul style="list-style-type: none">- Rekaman suara- Foto kegiatan yg mewakili- Materi semisal ada ppt atau file lain dr pemateri/tim penyusun

1. Manuskrip

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					202	202	203	203
					4	9	4	9
Pelindungan								
Inventarisasi	Terbatasnya jumlah manuskrip yang diinventarisasi	Melakukan upaya inventarisasi	Terinventarisasi keberadaan manuskrip	Dinas kebudayaan, dinas arsip dan perpusatkan, pemerintah desa	- Pencarian dan penemuan manuskrip - Penyusunan template/ form pendataan - Inventarisasi Manuskrip			
Pengamanan	Belum optimalnya upaya pemutakhiran data manuskrip dalam sistem pendataan terpadu	Mewujudkan pemutakhiran data manuskrip dalam sistem pendataan terpadu	Terwujudnya pemutakhiran data manuskrip dalam sistem pendataan terpadu	Dinas kebudayaan, dinas arsip dan perpusatkan	- Pengumpulan data - Memasukan data dalam sistem - Pemutakhiran data			

		pendataan terpadu						
Pemeliharaan	Belum optimalnya upaya pemeliharaan manuskrip	Mewujudkan pemeliharaan manuskrip agar tidak rusak, hialng dan musnah	Terselamatkan manuskrip dari kerusakan, kehilangan, dan kemusnahan	Dinas kebudayaan, dinas arsip dan perpusatkaan, perpustakaan, pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi jenis dan ragam manuskrip - Melakukan upaya preventif - Melakukan upaya kuratif - Terpeliharanya manuskrip 			
	Belum optimalnya upaya digitalisasi manuskrip	Digitalisasi data base	Terdigitalisasi data base, manuskrip	Admin database, IT	<ul style="list-style-type: none"> - Digitalisasi data base - Tersusunnya data base secara terintegrasi 			
Penyelamatan								

Restorasi	Masih banyak manuskrip yang mengalami kerusakan	Mewujudkan restorasi manuskrip	Terwujudnya restorasi manuskrip yang rusak	Dinas kebudayaan, dinas aris dan perpusatkan, perpusatakan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi kerusakan manuskrip - Dilakukan upaya restorasi - Manuskrip terselamatkan 			
Pengembangan								
Kajian	Belum optimalnya kajian tentang manuskrip	Transliterasi, transkripsi, alih bahasa, pengkajian, sosialisasi	Tersedia kajian manuskrip	Pemilik manuskrip baik dari dinas terkait maupun individu	<ul style="list-style-type: none"> - Transkripsi, transliterasi, alih bahasa - Analisis isi dan fisik manuskrip 			
Pemanfaatan								
Kesejahteraan	Belum optimalnya pemanfaatan manuskrip yang	Menjadikan substansi manuskrip	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Pemilik manuskrip	<ul style="list-style-type: none"> - Pengemasan manuskrip sebagai daya tarik - Penyajian/display 			

Masyarakat	berdampak pada kesejahteraan masyarakat	sebagai sumber pendapatan masyarakat		masyarakat						
Membangun Karakter Bangsa	Belum optimalnya manuskrip sebagai media membangun karakter bangsa	Menjadikan substansi manuskrip sebagai salah satu muatan lokal dalam pendidikan baik formal maupun non formal	Menjadikan substansi manuskrip sebagai agai media membangun karakter bangsa	Peserta didik, guru, masyarakat	- Sosialisasi					
Pembinaan										
SDM	Terbatasnya SDM yang mampu melakukan transliterasi, aksara, dan alih	Peningkatan kapasitas SDM melalui alih pendidikan	Tersedianya SDM kompeten	Pengelola manuskrip	- Pelatihan sertifikasi SDM	- Standarisasi dan				

	bahasa untuk manuskrip	dan pelatihan							
--	---------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

2. Tradisi Lisan

	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						202	202	203	203
Pelindungan									
Inventarisasi	Belum optimalnya inventarisasi tradisi lisan	Melakukan upaya inventarisasi tradisi lisan	Melakukan pendataan tradisi lisan	Dinas kebudayaan	- Pencarian dan penemuan tradisi lisan - Penyusunan template/ form pendataan - Inventarisasi Tradisi Lisan				
Pengamanan	Belum optimalnya upaya pemutakhiran data tradisi lisan dalam sistem	Mewujudkan pemutakhiran data tradisi lisan dalam sistem	Terwujudnya pemutakhiran data tradisi lisan dalam sistem terpadu	Dinas kebudayaan	- Pengumpulan data - Memasukan data dalam sistem - Pemutakhiran data				

	pendataan terpadu	sistem pendataan terpadu						
Pemeliharaan	Belum optimalnya upaya pemeliharaan tradisi lisan	Mewujudkan pemeliharaan tradisi agar tidak hilang dan musnah	Terselamatkan dari kehilangan, kemusnahan	Masyarakat	- lisan	Mengidentifikasi tradisi - Terpeliharanya dialek lokal dalam bahasa daerah		
	Belum optimalnya upaya digitalisasi tradisi lisan	Melakukan digitalisasi data base	Terdigitalisasinya database, tradisi lisan	Admin	- IT	- Digitalisasi data base secara terintegrasi	- Tersusunya data base	
Penyelamatan	Belum optimalnya upaya menghidupkan dan menjaga ekosistem tradisi lisan	Pewarisan pada generasi berikutnya	Terwariskannya tradisi lisan ke generasi berikut	Masyarakat	- umum	- Sosialisasi Pembelajaran dan generasi muda	- Proses - Penyebaran desiminasi	

Masih belum optimal upaya penyelamatan tradisi lisan	Dilakukan upaya revitalisasi tradisi lisan	Terselamatkan nyा tradisi lisan	Penutur tradisi lisan	- Menghidupkan kembali tradisi lisan			
--	--	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--

Pengembangan

Kajian	Belum optimalnya kajian terhadap tradisi lisan	Tersedianya kajian tradisi lisan	Tersedia kajian tradisi lisan	Pelaku tradisi lisan	- Melakukan wawancara/ penggalian informasi tradisi lisan - Penulisan Kajian	- Proses		
Inovasi	Belum optimalnya pengayaan keberagamaan/ inovasi tradisi lisan	Terciptanya pengayaan keberagaman/ inovasi tradisi lisan	Terciptanya pengayaan keberagaman/ inovasi tradisi lisan	Pelaku tradisi lisan	- Rekonstruksi aslinya keberagaman teknik kajian, pengayaan performen, pengayaan teknologi yang digunakan	- Pengayaan Kajian, pengayaan teknik kajian, pengayaan performen, pengayaan teknologi yang digunakan		

Pemanfaatan

Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan tradisi lisan yang berdampak	Menjadikan substansi tradisi lisan sebagai sumber pendapatan masyarakat	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Pelaku tradisi lisan masyarakat	- Pengemasan tradisi dan lisan	Pengemasan tradisi lisan	
--------------------------	---	---	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------	--

		pada kesejahteraan masyarakat				
Membangun Karakter Bangsa	Belum optimalnya tradisi lisan sebagai media membangun karakter bangsa	Menjadikan tradisi lisan sebagai salah satu muatan lokal dalam pendidikan baik formal maupun non formal	Menjadikan tradisi lisan sebagai media membangun baik formal maupun non formal	Peserta didik, guru, masyarakat	- Sosialisasi Pembuatan Kurikulum Pengajaran di kelas	-
Sumber Daya Manusia	Belum tersedianya SDM yang kompeten	Peningkatan kapasitas SDM tradisi lisan	Tersedianya SDM yang kompeten	Pelaku tradisi lisan	- Pelatihan Standarisasi dan sertifikasi	-
Sarana dan Prasarana	Belum tersedianya pranata tradisi lisan yang memanfaatkan teknologi	Teknologi digunakan dalam pranata tradisi lisan	Terwujudnya pemanfaatan teknologi dalam pranata tradisi lisan	Pelaku tradisi lisan	- Pengenalan teknologi - Implementasi Teknologi	-

3. Adat-Istiadat

	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian
--	-------------	--------	---------	---------------	-------------------

Permasalahan					2024	2029	2034	2039
Perlindungan: Belum tersusunnya peta jalan yang terintegrasi inventarisasi termasuk upaya dan belum optimalnya inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi di	Menyusun peta jalan dan SOP inventarisasi yang terintegrasi inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi di	Menyusun peta jalan dan standar operasional produk sebagai pedoman dalam terkait inventarisasi upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi di	1.0PD atau pemangku kepentingan atau dinas yang meliputi upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi di	1. Menyusun peta jalan inventarisasi di bidang adat istiadat dan publikasi secara terintegrasi di 2. Tokoh pengamanan, upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi. 3. Melakukan inventarisasi secara rinci dan detail berbasis peta jalan dan publikasi secara terintegrasi di 4. Pegiat budaya optimalisasi inventarisasi, pelaksanaan	Tersusunnya rencana peta jalan yang meliputi upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi di 1. Menyusun peta jalan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi. 2. Tokoh pengamanan, upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi. 3. Pelaksanaan dan istiadat dan publikasi secara terintegrasi di 4. Pegiat budaya optimalisasi inventarisasi, pelaksanaan	Telah dilaksanakannya peta jalan inventarisasi yang meliputi upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi di 1. Menyusun peta jalan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi. 2. Tokoh pengamanan, upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi. 3. Pelaksanaan dan istiadat dan publikasi secara terintegrasi di 4. Pegiat budaya optimalisasi inventarisasi, pelaksanaan	Peta jalan dengan baik yang melibatkan kelompok sasaran pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi di 1. Menyusun peta jalan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi. 2. Tokoh pengamanan, upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi. 3. Pelaksanaan dan istiadat dan publikasi secara terintegrasi di 4. Pegiat budaya optimalisasi inventarisasi, pelaksanaan	Terwujudnya mekanisme SOP yang telah mapan sebagai ekosistem perlindungan adat istiadat yang berkelanjutan

bidang Istiadat	Adat			pemeliharaan termasuk publikasi khasanah adat istiadat 4. Evaluasi secara keseluruhan mengenai pelaksanaan inventarisasi, pelaksanaan pemeliharaan termasuk publikasi khasanah adat istiadat				
Pengembangan & Pemanfaatan: Belum tersusunnya peta jalan bagi istiadat dan serta melakukan	Menyusun peta jalan penelitian yang komprehensif mengenai adat istiadat dan	Menyusun peta jalan penelitian di bidang adat istiadat secara komprehensif	Para peneliti, lembaga riset dan pegiat	1. Menyusun peta jalan penelitian dan pengkajian	Menyusun rancangan peta jalan penelitian tentang penelitian istiadat dan pengkajian	Telah dilaksanakannya peta jalan penelitian tentang penelitian istiadat serta dapat diseminasi dan	Penelitian dan pengkajian adat istiadat telah dilakukan yang dijalankan	Terwujudnya pengkajian di ekosistem bidang adat istiadat telah pengkajian di bidang adat istiadat

<p>penelitian yang dapat dijadikan dasar dalam mengenai adat istiadat dan nilai luhur dapat dijadikan dasar dalam memperkuat mewariskan nilai-nilai luhur budaya untuk memperkuat karakter bangsa</p>	<p>upaya agar hasil penelitian dapat diimplementasikan</p>	<p>kebudayaan</p>	<p>mencakup adat istiadat yang mencakup kekayaan budaya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melaksanakan riset tersebut termasuk mendiseminasi hasil kajian tersebut agar bermanfaat bagi 3. Melakukan evaluasi dan pelaksanaan riset yang melibatkan 	<p>pengkajian adat istiadat yang mencakup kekayaan budaya.</p>	<p>dapat memperkuat karakter bangsa dan ketahanan budaya.</p>	<p>secara baik dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai luhur budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan ketahanan budaya</p>	<p>secara efektif berkelanjutan</p>
---	--	-------------------	--	--	---	---	-------------------------------------

				para peneliti, lembaga riset pemerintah, dan pegiat kebudayaan.				
Pembinaan: Masih kurangnya upaya yang mendorong masyarakat dalam menghidupi, memelihara, dan melestarikan adat istiadat	Memperbanyak upaya dan meningkatkan kualitas upaya yang mendorong masyarakat dalam menghidupi, memelihara, dan melestarikan adat istiadat	Menciptakan berbagai upaya kreatif, inovatif, dan variatif yang tinggi, mendorong masyarakat dalam menghidupi, memelihara, dan melestarikan adat istiadat	Dinas dan OPD terkait, perguruan tinggi, akademisi, pegiat budaya, LSM, komunitas, pemangku adat	1. Menciptakan berbagai kegiatan yang meningkatkan kesadaran dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi a gen-z dalam melestarikan adat istiadat dan partisipasi adat istiadat masyarakat dalam menghidupi, merawat, dan	Terciptanya berbagai program dan kegiatan yang meningkatkan kesadaran dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi a gen-z dalam melestarikan adat istiadat dan partisipasi adat istiadat masyarakat dalam menghidupi, merawat, dan	Terlaksananya berbagai program yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat khususnya dalam melestarikan adat istiadat	Terciptanya berbagai program yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat khususnya dalam melestarikan adat istiadat	Terciptanya keberlanjutan program pembinaan sumber daya manusia dalam menghidupi, memelihara, dan melestarikan adat istiadat

				<p>melestarikan adat istiadat.</p> <p>2. Melaksanakan kerja gotong royong seluruh pemangku kepentingan dalam menghidupi, merawat, dan melestarikan adat istiadat</p> <p>3. Menciptakan berbagai program yang berfokus pada peningkatan kesadaran</p>		program pembinaan.	
--	--	--	--	--	--	--------------------	--

					dan partisipasi Gen-Z dalam menghidupi, merawat, dan melestarikan adat istiadat.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Ritus

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					2024	2029	2034	2039
Pelindungan : Belum tersusunnya inventarisasi peta jalan dan sekaligus inventarisasi mengoptimalkan optimalnya inventarisasi	Menyusun SOP inventarisasi	Menyusun peta jalan dan SOP sebagai pedoman dalam melakuk inventarisasi	1.0PD atau dalam atau dinas meliputi terkait penyelamatan, 2. Tokoh adat termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemeliharaan adat istiadat.	1. Menyusun peta jalan inventarisasi di bidang Ritus yang meliputi upaya termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi secara	Tersusunnya jalan inventarisasi di bidang Ritus yang meliputi upaya termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi secara	Telah dilaksanakannya peta jalan inventarisasi yang termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi secara	Peta jalan dengan baik yang melibatkan kelompok sasaran	Terwujudnya mekanisme SOP yang telah mapan sebagai ekosistem perlindungan Ritus yang

inventarisasi	secara terintegrasi	pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi di	masyarakat adat	publikasi terintegrasi	secara terintegrasi	terintegrasi	publikasi terintegrasi	secara terintegrasi	berkelanjutan
termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan pemeliharaan dan publikasiin secara publikasi di	termasuk upaya penyelamatan	bidang Ritus	Akademisi	3. Melakukan inventarisasi secara (antropolog, rinci dan detail filolog, dan berbasis peta jalan arsitek) yang telah disusun	4. Pegiat budaya	3. Pelaksanaan dan optimalisasi inventarisasi, pelaksanaan pemeliharaan termasuk publikasi khasanah Ritus	3. Pelaksanaan dan jalan dan perbaikan serta penyesuaiannya	bidang Ritus	termasuk mekanisme evaluasi pelaksanaan peta jalan dan perbaikan serta penyesuaiannya

				pemeliharaan termasuk publikasi khasanah Ritus				
Pengembangan & Pemanfaatan: Menyusun peta jalan penelitian yang komprehensif. Belum tersusunnya mengenai peta jalan Ritus yang diupaya agar hasil penelitian dalamnya yang terdapat nilai-nilai luhur budaya sebagai	Menyusun peta jalan penelitian di bidang Ritus yang komprehensif. Ritus yang diupaya agar hasil penelitian dalamnya terdapat karakter nilai-nilai luhur budaya sebagai	Para peneliti, lembaga riset pemerintah dan	1. menyusun peta jalan penelitian dan secara melakukannya. Ritus yang diupaya agar hasil penelitian dalamnya yang terdapat nilai-nilai luhur budaya sebagai	Tersusunnya rancangan penelitian dan pengkajian di bidang Ritus yang komprehensif. Ritus yang diupaya agar hasil penelitian dalamnya terdapat nilai-nilai luhur budaya sebagai	Telah dilaksanakannya penelitian dan pengkajian di bidang Ritus yang komprehensif. Ritus yang diupaya agar hasil penelitian dalamnya terdapat nilai-nilai luhur budaya sebagai	Penelitian dan pengkajian di bidang Ritus yang komprehensif. Ritus yang diupaya agar hasil penelitian dalamnya terdapat nilai-nilai luhur budaya sebagai	Terwujudnya penelitian dan pengkajian di bidang Ritus yang komprehensif. Ritus yang diupaya agar hasil penelitian dalamnya terdapat nilai-nilai luhur budaya sebagai	

penopang karakter bangsa.				termasuk mendiseminasi hasilnya. 3. Melakukan evaluasi dan pelaksanaan riset yang melibatkan para peneliti, lembaga riset pemerintah, dan pegiat kebudayaan.				
Pembinaan: Masih kurangnya upaya yang mendorong masyarakat dalam	Memperbaik ak upaya dan meningkatkan kualitas upaya yang mendorong masyarakat dalam	Menciptakan berbagai upaya kreatif, inovatif dan variatif untuk mendorong masyarakat dalam	OPD terkait, perguruan tinggi, akademisi, pegiat budaya, LSM,	4. Menciptakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendorong dan	Terciptanya berbagai program yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan Ritus.	Terlaksananya berbagai program yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat khususnya dalam	Terciptanya keberlanjutan berbagai program yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat khususnya dalam	Terciptanya keberlanjutan pembinaan sumber daya manusia dalam

memelihara dan melestarikan Ritus.	dalam memelihara dan melestarikan Ritus	dalam memelihara dan melestarikan Ritus	komunitas, dan tokoh adat	meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam merawat dan melestarikan Ritus.	5. Melaksanakan kerja gotong royong seluruh pemangku kepentingan dalam merawat dan melestarikan Ritus	sya gen-z dalam melestarikan Ritus	masyarakat dalam melestarikan Ritus yang meliputi evaluasi dan pembaruan program pembinaan.	memelihara dan melestarikan Ritus.
------------------------------------	---	---	---------------------------	---	---	------------------------------------	---	------------------------------------

				6. Menciptakan berbagai program yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan partisipasi Gen-Z dalam merawat dan melestarikan Ritus				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

5. Seni

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian					Keterangan (Kepmendagri No. 900.1.15.5.1317)
					2025	2026	2027	2028	2029	
PELINDUNGAN										

Objek seni rupa belum terdata dengan baik	Perlu kajian, inventarisasi, dokumentasi dan pemetaan seni rupa	Mengetahui jumlah dan kondisi objek seni rupa	Objek seni rupa tradisi terutama seni rupa	Inventarisasi, dokumentasi, pemetaan dan spesifikasinya	Inventarisasi, dokumentasi, pemetaan dan kajian						
Objek seni rupa banyak yang belum diangkat dan terancam punah	Publikasi terhadap kesenian yang belum populer dan hampir punah	Mengangkat kembali melalui informasi meluas dan menumbuhkan minat pemajuan kesenian	Objek seni yang terancam punah dan informasi yang kurang meluas dan populer menumbuhkan minat pemajuan kesenian	Inventarisasi, pemetaan, perumusan publikasi dan menyusun bentuk publikasi baik foto, video, radio, dll							
PEMANFAATAN											
Terbatasnya ruang ekspresi	Pengadaan ruang ekspresi atau yang lebih besar	Menumbuhkan berbagai event bisaterutama festival	Membuka berbagai event ruang ekspresi terutama festival	Pemetaan kebutuhan ruang ekspresi, penentuan							

	mewadahi seluruh kesenian		apresiasi secara meluas	tempat, waktu, anggaran dan keterlibatan berbagai pihak					
Seni rupa masih dibuat oleh pelaku seni luar daerah	Mengedepankan seniman-seniman setempat untuk membangun identitas daerah melalui kesenian daerah, bangunan monumental, dan ornamentik	Kemandirian pemenuhan produk untuk seniman-seniman setempat untuk membangun identitas daerah melalui kesenian daerah, bangunan monumental, dan ornamentik	Pelaku seni rupa dan masyarakat rupa di daerah penggunaanya, serta pemerintah daerah setempat	Sosialisasi produk, seniman dan masyarakat rupa di daerah penggunaanya, serta pemerintah daerah setempat					
PENGEMBANGAN									
Terdapat kesamaan dan kemiripan antar identitas kesenian daerah	Perlu adanya kajian identitas kesenian daerah	Menggali dan menumbuhkan identitas dan kekhasan	Pelaku seni, peneliti dan pemerintah daerah	Identifikasi dan kajian rupa, motif, teknologi, dan pengetahuan.					

		produk dan objek seninya		Publikasi dan ekspresi secara meluas						
Terdapat kesamaan dan kemiripan kesenian di wilayah yang beririsan	Promosi kesenian Pembakuan kesenian	Menumbuhkan identitas kekhasan	Pelaku seni, peneliti, akademisi, masyarakat dan pemerintah daerah	Pemetaan persebaran, identifikasi kemiripan, identifikasi pelaku, penggalian identitas, pembakuan, promosi secara meluas						
PEMBINAAN										
Pihak Kabupaten dan Provinsi belum melakukan pembakuan maestro.	Mendorong pembakuan maestro dalam ranah kabupaten, provinsi dan pusat.	Mengapresiasi maestro dan penjaminan pewarisan, serta	Pelaku seni, pemerintah daerah	Penentuan kriteria maestro sesuai tingkatan, pembentukan tim, penilaian						

		menumbuhkan motivasi		dan pembakuan maestro secara berkala tiap tahun					
Terjadinya ketimpangan antar opk yang satu dengan yang lain dan adaberekspresi kelompok opk tapi belum memiliki legal formal	Pembuatan legal formal organisasi pembuatan yang lain dan adaberekspresi	Menumbuhkan dan kesadaran ruang berorganisasi yang legal formal dan payung hukum	Pelaku seni dan sanggar seni yang legal formal dan sanggar seni	Publikasi standarisasi organisasi, langkah pendampingan, akta notaris dan kemenkumham					
Kurangnya pemantauan organisasi seni	Pembenahan kelola	tata Organisasi seni yang sehat dengan tata kelola yang baik	Organisasi seni yang sehat dengan tata kelola yang baik	Penataan pengurus organisasi, manajemen tata kelola					
Masalah terkait perlindungan hukum pelaku seni	Pendampingan hukum	Kenyamanan dan kebebasan dan dalam	Pelaku seni dan dalam	Pembentukan LSP Kesenian					

		beraktivitas seni	pemerintah daerah							
Perundungan kegiatan kesenian	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan kode etik Membuat perda dalam untuk batasan penyelenggaraan seni pertunjukan kesenian 	Kenyamanan dan kebebasan dalam beraktivitas seni	Pelaku seni dan pemerintah daerah	Konsorsium pelaku seni, pembentukan tim perumus, perumusan, uji publik dan pembakuan kode etik						
<ul style="list-style-type: none"> Belum terukurnya kompetensi pelaku seni Kesulitan sertifikasi pelaku seni 	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan sertifikasi pelaku seni Sosialisasi sertifikasi bidang kesenian Perlu adanya sosialisasi LSP 	Standarisasi profesi seni	Pelaku seni dan organisasi seni	Pembentukan KKNI, RSKKNI, pendirian LSP, pembentukan asesor, pelatihan dan penyelenggaraan UJI Kompetensi						

Pembinaan pelaku seni atau sanggar belum merata	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan ruang ekspresi, fasilitas, dan pendanaan secara merata • Pemberahan sistem internal terkait distribusi fasilitas serta melakukan pendataan dan promosi 	Kemandirian pelaku dan organisasi seni, secara merata	Pelaku dan organisasi seni, pemerintah daerah dan stakeholder	Pemetaan kondisi pelaku dan sanggar seni, program kegiatan dan pembinaan yang dibutuhkan						
Kehidupan sanggar seni masih tahap ketergantungan dan belum mandiri	Pendampingan tata kelola organisasi	Kemandirian organisasi kesenian	Organisasi seni, pelaku seni dan pemerintah daerah	Pemetaan kondisi sanggar seni, pendampingan tata kelola						
Regenerasi	Upaya mendorong pewarisan	Pewarisan yang berlangsung dengan baik	Generasi pewaris, pelaku seni dan maestro	Pemetaan sistem pewarisan, dukungan pembuatan						

		diminati generasi muda		bahan ajar, publikasi, penyelenggaraan edukasi					
Perlindungan anak dan eksploitasi anak	Mengedepankan HAM dan menghindari eksploitasi, kekerasan	Mengedepankan HAM dan menghindari eksploitasi, kekerasan	Kenyamanan, apresiasi, keamanan dan kebebasan serta ekspresi seni, hak seni, penghargaan dalam ekspresi seni	Pelaku seni, masyarakat, dan generasi	Pembakuan wilayah keterlibatan anak dalam ekspresi seni, kode etik, pelindungan hukum, pendampingan				

6. Bahasa

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					202	202	203	203
Pelindungan					4	9	4	9

Inventarisasi	Belum optimalnya inventarisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Melakukan upaya inventarisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Terinventarisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Masyarakat, BAPEDA, dinas kebudayaan	- Pencarian dan penemuan dialek lokal dalam bahasa daerah - Penyusunan template/ form pendataan Inventarisasi Dialek lokal dalam bahasa daerah				
Pengamanan	Belum optimalnya upaya pemutakhiran data dialek lokal dalam data dialek bahasa daerah lokal dalam bahasa daerah dalam sistem pendataan dalam sistem terpadu	Mewujudkan pemutakhiran data dialek lokal dalam bahasa daerah dalam sistem pendataan terpadu	Terwujudnya pemutakhiran data dialek lokal dalam bahasa daerah dalam sistem pendataan terpadu	Dinas kebudayaan	- Pengumpulan data Memasukan data dalam sistem data	- - Pemutakhiran			
Pemeliharaan	Belum optimalnya upaya pemeliharaan	Mewujudkan pemeliharaan dialek lokal dalam bahasa daerah	Terselamatkan nya dialek lokal dalam bahasa daerah	Masyarakat penutur dialek bahasa daerah	- Mengidentifikasi dialek lokal dalam bahasan -Terpeliharanya dialek lokal dalam bahasa daerah				

	dialek lokal dalam bahasa daerah	daerah agar tidak hilang dan musnah	dari kehilangan dan kemusnahannya						
	Belum dilakukan upaya digitalisasi dialek lokal dalam bahasa dialek lokal dalam bahasa daerah dalam bahasa daerah	Melakukan digitalisasi dialek lokal dalam bahasa dialek lokal dalam bahasa daerah	Terdigitalisasi nya dialek lokal dalam bahasa dialek lokal dalam bahasa daerah	-Dinas pendidikan -Dinas Kebudayaan -Kominfo	- Perekaman dialek lokal dalam berbahasa daerah - Memasukan ke sistem lokal dalam bahasa daerah				
Pengembangan									
Kajian	Belum optimalnya kajian kajian tentang dialek	Melakukan kajian dialek lokal dalam bahasa daerah	Tersedia kajian dialek lokal dalam bahasa daerah	BAPEDA, dinas kebudayaan	- Penggalian informasi Proses penulisan kajian Hasil kajian	-	-		
Pemanfaatan									

Kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat	Menjadikan dialek lokal dalam bahasa daerah sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dialek lokal dalam bahasa daerah	Masyarakat	- Inventarisasi lokal Mengimplementasikan kontenMengimplemntasikan seni penghasilan	dialek - Masyarakat mendapatkan		
Meningkatkan ketahanan budaya	Belum optimalnya dialek lokal dalam meningkatkan ketahanan budaya	Menjadikan dialek lokal dalam bahasa daerah sebagai salah satu muatan lokal	Menjadikan dialek lokal dalam bahasa daerah sebagai media ketahanan budaya	Peserta didik, guru, masyarakat	- Sosialisasi Kurikulum bahan ajar Pengajaran di kelas	Pembuatan - Pembuatan		
Pembinaan								

SDM	Semakin berkurangnya penutur dialek lokal dalam bahasa daerah	Mewujudkan transfer <i>knowledge</i> dialek lokal dalam bahasa daerah pada penutur dialek lokal dalam bahasa daerah generasi penerus terkait dengan dialek lokal dalam bahasa daerah	Meningkatnya penutur dialek lokal dalam bahasa daerah	Ibu-ibu masyarakat	PKK,	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi dialek lokal dalam bahasa daerah - Membangun komunitas dialek lokal dalam bahasa daerah - Melakukan transfer dialek lokal dalam bahasa daerah pada generasi penerus - Dialek lokal menjadi bahasa keseharian masyarakat 				

7. Olah Raga Tradisional

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					2024	2029	2034	2039

Pelindungan: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang olah raga tradisional	Melakukan sosialisasi tentang olah raga tradisional	Menyebarluaskan informasi mengenai olah raga tradisional kepada masyarakat, khususnya generasi muda	<ol style="list-style-type: none"> OPD terkait Akademisi Masyarakat Generasi muda 	<ol style="list-style-type: none"> Pemutakhiran data tentang olah raga tradisional Penyelenggaraan FGD/DKT Sosialisasi 			
Pelindungan: Belum adanya penetapan olah raga tradisional sebagai WBTB	Melakukan pengusulan penetapan olah raga tradisional sebagai WBTB	Olah raga tradisional yang dilindungi dan siap untuk dikembangkan dan dimanfaatkan	<ol style="list-style-type: none"> OPD terkait Kemendikbudristek BPK Wilayah X Akademisi Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Pendataan dan pendokumentasian tentang olah raga tradisional Kajian tentang olah raga tradisional Penyelenggaraan FGD/DKT Usulan penetapan 			

Pengembangan: Belum terbentuknya ekosistem kebudayaan olah raga tradisional dan kolaborasi antar tradisional pemangku kepentingan terkait pelestarian olah raga tradisional	Penyelenggaraan event atau festival olah raga tradisional	Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan olah raga tradisional yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.	1. OPD terkait 2. Masyarakat 3. Generasi muda	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta 2. Publikasi dan dokumentasi 3. Penyelenggaraan event			
Pemanfaatan: Kurangnya sarana dan prasarana penunjang olah raga tradisional	Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang olah raga tradisional	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang olah raga tradisional yang sesuai standar.	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektor 2. Pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap			

Pemanfaatan: Kurang optimalnya pemanfaatan olah raga tradisional sebagai atraksi wisata daerah atraksi wisata daerah	Mengoptimalkan olah raga tradisional sebagai atraksi wisata daerah	Olah raga tradisional yang dapat dimanfaatkan sebagai atraksi wisata daerah	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Publikasi dan dokumentasi 2. Penyelenggaraan event wisata			
Pembinaan: Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional	Melakukan pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional	Terselenggaranya pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional	1. OPD terkait 2. Komunitas Budaya 3. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektor 2. Pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional			

8. Permainan Rakyat

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					2024	2029	2034	2039

Pelindungan: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang permainan rakyat permainan rakyat	Melakukan sosialisasi tentang permainan rakyat	Menyebarluaskan informasi mengenai permainan rakyat kepada masyarakat, khususnya generasi muda	1. OPD terkait 2. Akademisi 3. Masyarakat 4. Generasi muda	1. Pemutakhiran data tentang permainan rakyat, 2. Penyelenggaraan FGD/DKT Sosialisasi			
Pelindungan: Belum adanya penetapan permainan rakyat sebagai WBTB	Melakukan pengusulan penetapan permainan rakyat sebagai WBTB	Permainan rakyat yang dilindungi dan siap untuk dikembangkan dan dimanfaatkan	1. OPD terkait, 2. Kemendikbudristek 3. BPK Wilayah X 4. Akademisi 5. Masyarakat	1. Pendataan dan pendokumentasian tentang permainan rakyat, 2. Kajian tentang permainan rakyat, 3. Penyelenggaraan FGD/DKT, 4. Usulan penetapan.			
Pengembangan: Belum terbentuknya ekosistem kebudayaan permainan rakyat dan kolaborasi antar	Penyelenggaraan event atau festival	Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan	1. OPD terkait 2. Masyarakat 3. Generasi muda	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku			

pemangku kepentingan terkait pelestarian permainan rakyat		permainan rakyat yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya generasi muda		kepentingan, baik pemerintah maupun swasta, 2. Publikasi dan dokumentasi, 3. Penyelenggaraan event.			
Pembinaan: Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Melakukan pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Terselenggaranya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	1. OPD terkait 2. Komunitas Budaya 3. Masyarakat 4. Generasi muda	1. Melakukan koordinasi lintas sektor 2. Pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat			
Pemanfaatan: Kurang optimalnya pemanfaatan permainan rakyat sebagai atraksi wisata daerah	Mengoptimalkan permainan rakyat sebagai atraksi wisata daerah	permainan rakyat yang dapat dimanfaatkan sebagai atraksi wisata daerah	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Publikasi dan dokumentasi 2. Penyelenggaraan event wisata			

Pembinaan: Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Melakukan pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Terselenggaranya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	1. OPD terkait 2. Komunitas Budaya 3. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektor 2. Pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat			
---	---	--	--	---	--	--	--

9. Pengetahuan Tradisional

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					2024	2029	2034	2039
Pelindungan: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengetahuan tradisional.	Melakukan sosialisasi tentang pengetahuan tradisional.	Menyebarluaskan informasi mengenai pengetahuan tradisional kepada masyarakat, khususnya generasi muda.	1. OPD terkait 2. Akademisi 3. Masyarakat 4. Generasi muda	1. Pemutakhiran data tentang pengetahuan tradisional 2. Penyelenggaraan FGD/DKT 3. Sosialisasi				

<p>Pelindungan: Keterbatasan bahan baku untuk pembuatan jamu tradisional</p>	<p>Menyediakan bahan baku untuk pembuatan jamu tradisional</p>	<p>Jamu sebagai pengetahuan tradisional yang lestari dan dapat dimanfaatkan.</p>	<p>1. OPD terkait 2. Masyarakat</p>	<p>1. Melakukan koordinasi lintas sektoral 2. OPD terkait menyediakan bibit tanaman untuk pembuatan jamu tradisional, 3. Sosialisasi kepada petani untuk menanam tanaman yang dibutuhkan dalam pembuatan jamu tradisional, 4. Penanaman tanaman yang dibutuhkan dalam pembuatan jamu tradisional.</p>			
---	--	--	---	---	--	--	--

<p>Pelindungan: Penetapan pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya takbenda (WBTB) masih terbatas.</p>	<p>Melakukan penetapan pengusulan pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya takbenda (WBTB).</p>	<p>Pengetahuan tradisional yang dilindungi dan siap untuk</p>	<p>dikembangkan dan dimanfaatkan.</p>	<p>1. OPD terkait</p>	<p>1. Pendataan dan pendokumentasian tentang pengetahuan tradisional, 2. Kajian tentang pengetahuan tradisional, 3. Penyelenggaraan FGD/DKT, 4. Usulan penetapan.</p>			
<p>Pengembangan: Belum terbentuknya ekosistem kebudayaan dan kolaborasi antar pemangku tradisional. Kepentingan terkait pelestarian pengetahuan tradisional</p>	<p>Penyelenggaraan event atau festival pengetahuan tradisional.</p>	<p>Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan pengetahuan tradisional yang berkelanjutan kepada masyarakat,</p>	<p>1. OPD terkait 2. Masyarakat 3. Generasi muda</p>	<p>1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta,</p>				

		khususnya generasi muda.		2. Publikasi dan dokumentasi, 3. Penyelenggaraan event.			
Pemanfaatan: Belum optimalnya pemasaran produk pengetahuan tradisional.	Mengoptimalkan pasar-pasar untuk menjual produk pengetahuan tradisional.	Tersedianya pasar untuk menjual produk pengetahuan tradisional.	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta, 2. Publikasi dan dokumentasi, 3. Penjualan produk.			
Pemanfaatan: Belum optimalnya sertifikasi terhadap sertifikasi terhadap produk pengetahuan tradisional.	Mengoptimalkan sertifikasi terhadap produk pengetahuan tradisional.	Tersedianya produk pengetahuan tradisional yang telah tersertifikasi.	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan,			

				2. Publikasi dan dokumentasi, 3. Sertifikasi produk.			
Pembinaan: Belum optimalnya pembinaan dan pembinaan kepada para sertifikasi kepada pelaku pengetahuan para pelaku pengetahuan tradisional.	Melakukan pembinaan dan pembinaan kepada para sertifikasi kepada pelaku pengetahuan para pelaku pengetahuan tradisional.	Terselenggaranya dan sertifikasi kepada para pelaku pengetahuan tradisional yang sesuai dengan standar dan prosedur.	1. OPD terkait 2. Lembaga sertifikasi 3. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait pembinaan dan sertifikasi, 2. Pembinaan kepada para pelaku pengetahuan tradisional, 3. Sertifikasi kepada para pelaku pengetahuan tradisional.			

10. Teknologi Tradisional

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					2024	2029	2034	2039
Pelindungan 1. Minimnya data berkala mengenai teknologi teknologi tradisional	Inventarisasi teknologi tradisional	Terhimpunnya data yang valid		1. Lembaga, masyarakat, 2. Akademisi, 3. Pelaku teknologi tradisional dan 4. Pemerintah / OPD terkait	1. Membentuk tim pendataan 2. Identifikasi dan dicatatkan, diverifikasi dan divalidasi 3. Ditetapkan oleh Kepala Daerah 4. Diusulkan untuk mendapatkan penatapan 5. Pelaporan secara berkala 6. Evaluasi			
Lemahnya pelindungan hukum (terkait hukum teknologi dengan pengamanan)	Memberikan pendampingan hukum teknologi tradisional	Menjamin terwujudnya payung hukum pengakuan dari pihak lain/asing		1. Lembaga masyarakat, Akademisi	1. Pengusulan/pengajuan sebagai kekayaan intelektual			

			<p>2. Pelaku teknologi tradisional dan pemerintah / OPD terkait</p>	<p>2. Mendapatkan pengakuan kekayaan intelektual</p> <p>3. Pemutakhiran data</p> <p>4. Sosialisasi</p> <p>Evaluasi</p>				
Minimnya publikasi kepada masyarakat	Mempublikasikan melalui media massa	Mempublikasikan hasil melalui media massa	<p>1. Lembaga masyarakat</p> <p>2. Akademisi</p> <p>3. Pelaku teknologi tradisional dan Pemerintah/OPD terkait</p>	<p>1. Membentuk tim publikasi</p> <p>2. Menyiapkan bahan publikasi</p> <p>3. Mempublikasikan Evaluasi</p>				
Pengembangan Penyebarluasan pengetahuan tradisional yang belum merata	Melakukan penyebarluasan informasi tradisional	<p>1. Menyebarluaskan nilai-nilai budaya teknologi tradisional</p> <p>2. Penyebarluasan dilakukan secara desiminasi:</p>	<p>1. Lembaga masyarakat</p> <p>2. Akademisi</p> <p>3. Pelaku teknologi tradisional dan Pemerintah/OPD terkait</p>	<p>1. Penyiapan bahan informasi</p> <p>2. Seleksi data/informasi, dikurasi (penyeleksi secara detail)</p> <p>3. Ditindaklanjuti melalui pameran</p>				

		<p>melalui nilai - nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, maupun festival dan diaspora: melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya</p> <p>3. Penyebarluasan melalui media massa, informasi budaya, transfer ilmu budayanya</p>	<p>4. Evaluasi</p>				
--	--	---	--------------------	--	--	--	--

Rendahnya kajian tentang teknologi tradisional	Melakukan kajian tentang teknologi tradisional	Tergalinya nilai-nilai budaya pada teknologi tradisional secara faktual.	1. Lembaga masyarakat 2. Akademisi 3. pelaku teknologi tradisional dan pemerintah/opd terkait	1. Penyusunan tim kajian 2. Penulusuran sumber 3. Verifikasi lapangan 4. Pendokumentasian 5. Penyusunan kajian 6. Penyampaian hasil kajian 7. Sosialisasi hasil kajian 8. Evaluasi			
Pemanfaatan Rendahnya pemanfaatan teknologi tradisional untuk kesejahteraan masyarakat	Melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi tradisional	Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan	1. Lembaga masyarakat 2. Akademisi 3. pelaku teknologi tradisional dan pemerintah/opd terkait Dinas Pariwisata	1. Identifikasi manfaat teknologi tradisional 2. Mensosialisasikan hasil identifikasi 3. Evaluasi			
Pembinaan Belum optimalnya pembinaan SDM	Penyusunan <i>grand design</i> pelatihan	Meningkatnya kompetensi SDM	1. Lembaga masyarakat 2. Akademisi	1. Perencanaan <i>grand design</i> 2. Pelaksanaan latihan			

tentang teknologi tradisional			3. pelaku teknologi tradisional dan 4. pemerintah/opd terkait 5. Dinas Pariwisata	3. Evaluasi				
-------------------------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--

11. Cagar Budaya

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					2024	2029	2034	2039
Pelindungan Belum semua kabupaten kota memiliki Tim Ahli Cagar Budaya	Membentuk TACB Kab Kota	Melakukan penetapan, pemeringkatan	1. Ahli yang memiliki kompetensi Cagar Budaya, 2. Pemerintah, 3. Akademisi, 4. Masyarakat	1. Merekrut ahli menjadi TACB 2. mengikuti asesmen untuk memperoleh sertifikat 3. meminjam TACB kab terdekat atau provinsi dengan masa kerja 1 tahun dan boleh diperpanjang				

				4. Evaluasi			
Belum semua ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya) ditetapkan sebagai Cagar Budaya	Ditetapkan ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya) menjadi Cagar Budaya	1. Memberikan status Cagar Budaya agar nilai yang terkandung didalamnya dapat lestari 2. Perlindungan hukum	Objek Diduga Cagar Budaya / Cagar Budaya	1. Inventarisasi 2. Kajian 3. Rekomendasi 4. Penetapan 5. Sosialisasi 6. Pemutakhiran 7. Evaluasi			
PERDA Jateng Nomor 10 th 2013 sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 th 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 1 th 2022 tentang registrasi	1. Melakukan revisi/perubahan perda no 10 th 2013 2. Penyusunan rencana induk	Untuk pemajuan kebudayaan dan pelestarian CB	1. Ahli yang memiliki kompetensi Cagar Budaya, 2. Pemerintah, 3. Akademisi, 4. Masyarakat Cagar Budaya	1. Penyusunan 2. Pembahasan 3. Penetapan 4. Pengesahan 5. Pengundangan 6. Penyebarluasan/sosialisasi 7. Menyusun rencana induk Evaluasi			

nasional dan Cagar Budaya.								
Pengembangan Belum optimalnya pengembangan nilai Cagar Budaya melalui Cagar Budaya melalui Penelitian, Adapatisasi, Penelitian, Adapatisasi, Revitalisasi Revitalisasi	Melakukan optimalisasi Pengembangan nilai Cagar Budaya melalui Penelitian, Adapatisasi, Revitalisasi	Meningkatkan nilai Cagar Budaya melalui Penelitian, Adapatisasi, Revitalisasi	Objek Diduga Cagar Budaya / Cagar Budaya	1. Penelitian 2. Adpatasi, 3. Revitalisasi 4. Evaluasi				
Pemanfaatan Belum optimalnya pemanfaatan pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan Budaya sesuai dengan prinsip-prinsip dengan prinsip-pelestarian prinsip pelestarian meningkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan masyarakat masyarakat	Melakukan optimalisasi pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan prinsip-prinsip untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Tercapainya pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan prinsip-prinsip untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Semua Cagar Budaya yang ada di Jawa Tengah	Regulasi dan fasilitasi Cagar Budaya melalui perizinan, pemanfaatan koleksi, Evaluasi				

Belum semua kabupaten kota mempunyai museum	Mendirikan/merintis museum	Sebagai tempat untuk menyimpan, memelihara, memanfaatkan koleksi Cagar Budaya / Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Cagar Budaya yang ada di Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan/melakukan kajian pendirian museum, 2. Menyiapkan sarana prasarana dan/SDM, 3. Menyiapkan Koleksi 4. Mengisi/menata museum, 5. Menyusun SOP pengelolaan Museum <p>Evaluasi</p>			
Pembinaan Belum optimalnya pembinaan SDM yang menangani Cagar Budaya	Melakukan optimalisasi pembinaan SDM untuk pelestarian Cagar Budaya	Meningkatkan kompetensi pelestari Cagar Budaya melalui pembinaan SDM	Seluruh komponen Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi 2. Workshop 3. Lokakarya 4. Seminar dan 5. Bimtek 6. Evaluasi 			

Nama/Asal	Materi	Catatan utk tindak lanjut

<p>Kelompok Manuskrip Tradisi Lisan</p> <p>2</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kesepakatan tentang komitmen bersama pemutakhiran pokok pikiran kebudayaan daerah (ppkd) kabupaten/kota berdasar hasil evaluasi - 	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah bisa dimajukan bulan Mei 2024 untuk menyelesaikan pemutakhiran draft akhir PPKD - Perlu ada pendekatan kepada para calon kepala daerah agar dalam visi misi mereka terdapat unsur kebudayaan - Pemutakhiran data hanya pada halaman dapobud sedangkan secara fisik tidak berubah - Dalam konteks permasalahan masih menggunakan diksi yang makro sehingga diperlukan penggantian diksi yang lebih praktis. - Pemutakhiran data sebaiknya menunggu road map yang sudah ditetapkan
--	--	---

Nama/Asal	Pertanyaan	Tanggapan
Pak Joni	Teknologi tradisional di Jawa Tengah lebih diriset lagi dan lebih spesifik lagi	Tiap kabupaten akan lebih mengakomodir kekayaan yang ada di daerahnya masing-masing.
Pak Bambang Irawan	<ul style="list-style-type: none"> - Kata kunci katalogisasi - Restorasi manuskrip belum terlalu urgent untuk tiap kabupaten/kota - Pembelian manuskrip perlu digalakkan dari provinsi - Untuk tradisi lisan perlu pemanfaatan dan pengembangan yang lebih positif serta harus didokumentasikan 	
Pak Tri	<ul style="list-style-type: none"> - Pengusulan untuk pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi harus sesuai dengan prosedur yang ada - Sudah ada 31 jenis pelaku jenis yang tercantum di LSP P2 kebudayaan 	

	<ul style="list-style-type: none">- Mendorong kepada disbud untuk membuat LSP untuk siswa SMA/SMK agar setelah lulus bisa langsung bekerja dan diakui keahliannya	
--	---	--

Notulensi FGD Internal Tim Pemutakhiran dan Evaluasi

Acara/Sesi	Rapat internal Tim Pemutakhiran Dan Tim Evaluasi
Hari/Tanggal	Senin, 18 Desember 2023
Pukul	19.00 – 21.00
Tempat	Hotel Syariah
Peserta	Tim Pemutakhiran PPKD 2023 Tim Evaluasi PPKD 2023 Tim Input PPKD 2023 Disdikbud Prov. Jateng
Nama Notulis	Nabila Maharani Anis Yulvian Prastyanto
File dokumentasi	<ul style="list-style-type: none">- Rekaman suara- Foto kegiatan yg mewakili- Materi semisal ada ppt atau file lain dr pemateri/tim penyusun

Nama/Asal	Pernyataan/Pertanyaan	Tanggapan
Bapak Iksan (Disdikbud Jateng)	<p>Data penyusunan PPKD harus mengacu pada laman Dapobud dan PPKD 2022. Sementara, sudah dilakukan update pada kedua laman tersebut, tetapi bukannya bertambah malah mengalami kemerosotan. Sebab, jika dibandingkan data sekarang dengan data pada tahun 2018 banyak yang tidak terisi serta beberapa OPK tidak sesuai penempatannya. Sementara, permintaan dari pusat harus mengambil data yang ada di Dapobud dan PPKD 2022 tidak boleh mengunggah data sendiri. Untuk itu, secara mendasar permasalahan masih dibagian inventarisasi atau dapat dikatakan pelindungan OPK dan CB belum tuntas.</p>	
Ibu Fertilia (Bappeda Jateng)	<p>PPKD adalah SKPD yang ditetapkan oleh kepala daerah berarti hampir sama dengan SKPD. Saya mengimbau agar hati – hati dalam menyusunnya jangan sampai ada dualisme dengan RPJMD. Sebelumnya Bapak Ari juga sudah menjelaskan bahwa di dalam RPJMD dan SKPD berisi tentang visi-misi dan program beseerta seluruh sub kegiatan dari kepala daerah. Namun sayangnya, program dan seluruh sub program tersebut sudah dikunci oleh</p>	

	<p>permendagri sehingga kita tidak bisa dengan leluasa mengotak - atiknya. Saat ini yang bisa dilakukan oleh kita hanya berada dalam koridor sub kegiatan saja yang diwujudkan dalam program yang bentuknya aktivitas riil konkrit. Inilah yang menurut saya menjadi benang merah antara RPJMD dengan PPKD. Untuk mengecek sub - sub kegiatan itu sendiri tidak bisa dilakukan lewat RKPD.</p> <p>Ketika menyusun PPKD ini sebisa mungkin agar aktivitas konkrit ini merujuk pada sub kegiatan apa diatasnya dan seterusnya. Sebagai satu keyakinan kita bahwa tidak ada yang menyeleweng atau tidak sesuai. Hal itu nantinya akan mempermudah bagi teman - teman dinas ketika akan menyusun renstra supaya tidak akan membuat atau menyusun aktivitas yang aneh - aneh dan harus sesuai dengan PPKD. Sehingga diharapkan nantinya program yang disusun itu benar - benar akan menyelesaikan masalah.</p>	
Bapak Bambang (Tim Pemutakhir)	<p>Ketika sebelumnya dilakukan evaluasi saya pribadi sebenarnya mengaharapkan bahwa dalam penyusunan PPKD ini ada semacam algoritmanya atau rumus dan sejenisnya sehingga akan memudahkan rekan - rekan untuk menyusunnya.</p>	

Bapak Tri Hartono (Tim Pemutakhir)	Sebenarnya kegiatan pengembangan, pemanfaatan, pengembangan dan pembinaan itu sudah termaktub dengan jelas di dalam undang – undang maupun peraturan lainnya. Bahkan juga sudah dijelaskan dan disebutkan tentang bentuk – bentuk kegiatan apa yang termasuk ke dalam 4 kategori diatas. Maka menurut saya dalam penyusunan sub – sub kegiatan itu mungkin bisa merujuk langsung pada undang – undang ini.	Bapak Ari (Bappeda Jateng). Menanggapi Bapak Tri, saya juga memahami bahwa di dalam undang – undang sudah terdapat penjelasan secara garis besar mengenai pengembangan, pemanfaatan, pembinaan dst. Namun, masalahnya terletak pada penafsiran dan pengklasifikasian dari tiap bentuk kegiatan ke dalam sub – sub kegiatan. Karena Sebenarnya di dalam dokumen perencanaan itu sudah diatur sedemikian rupa tentang klasifikasi programnya. Misalnya saja kegiatan pembinaan itu nanti di dalam RPJMD kita harus melihat kembali program tersebut masuk ke dalam poin kategori yang mana pemanfaatan kah atau pengembangan.
Bapak Iksan (Disdikbud Jateng)	Jika kita merujuk kepada undang undang no 5 tahun 1992 tentang cagar budaya yang lama sebenarnya sudah terdapat penjelasan mengenai indikator – indikator kegiatan dari masing – masing program.	Bapak Ari (Bappeda Jateng). Maksud saya begini Pak, kami yang bergerak di bidang perencanaan kan memiliki dokumen perencanaan yang terminologinya berasal dari kami sendiri sedangkan dokumen PPKD ini juga memiliki terminologinya sendiri yaitu berkaitan dengan istilah – istilah kebudayaan. Nah maksud saya itu adalah tentang bagaimana kita bisa menyelaraskan dan

		menyamakan pandangan tentang dua dokumen yang berbeda ini. Misalnya saja mulai dari istilah dan definisi yang digunakan. Karena sering kami alami dan temukan ketika hendak menyusun dokumen perencanaan dan kebetulan membaca program dari kebudayaan kami tidak memahami istilah – istilah program/kegiatan yang digunakan alhasil dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut kami lebih banyak mengira – ira masuk ke kategori mana kegiatan tersebut.
Bapak Tri Hartono (Tim Pemutakhiran)	Sebetulnya menurut saya masalah yang bapak sebutkan itu lebih disebabkan karena keengganan untuk membaca dari undang – undang pemajuan kebudayaan itu sendiri. Karena banyak objek – objek pemajuan kebudayaan itu salah masuk kategori. Misalnya saja jamu yang masuk ke teknologi tradisional padahal seharusnya pengetahuan tradisional.	Ibu Fertilia (Tim Pemutakhiran). Betul Bapak Tri, bahwa di undang – undang itu sudah ada penjelasannya. Akan tetapi, yang sebenarnya menjadi permasalahan di kami yang bertugas di bidang perencanaan itu adalah tidak adanya link/petunjuk/panduan mengenai program yang disusun dalam PPKD dengan RPJMD. Sehingga banyak program yang kami memasukkannya kedalam RPJMD itu berdasarkan perkiraan kami sendiri dengan pertimbangan mana yang sekiranya cocok. Kedepan

		seharusnya dalam penyusunan PPKD ini harus dipertegas kembali mengenai klasifikasi setiap program – program kegiatan dan sub – sub kegiatan turunannya. Bahkan ketika kami melihat dokumen PPKD kab/kota penyusunannya dilakukan secara bebas dalam artian tidak ada yang dijadikan acuan dan kami merasa bingung sendiri. Padahal ketika kami melihat permendikbud tentang PPKD ini sudah dijelaskan mengenai klasifikasi dll
Bapak Bambang (Tim Pemutakhir)	Kalau <i>craftsmanship</i> itu dalam OPK ini masuk ke kategori yang mana? Sebagai contoh misalnya adalah jamu. Jamu itu masuk ke kategori pengetahuan tradisional tetapi proses membuat jamunya itu masuk ke dalam <i>craftsmanship</i> .	Bapak Iksan (Disdikbud Jateng). Setahu saya dalam Dapobud itu sebuah objek pemajuan kebudayaan dapat masuk kedalam beberapa kategori berbeda.
Bapak Bambang (Tim Pemutakhir)	Jika seperti itu adanya sebenarnya kita “memperkosa” dari OPK itu sendiri. Maksud saya adalah kita berusaha mengkerdilkan tataran kebudayaan yang bersifat konsepsional ke dalam tataran praksis.	
Bapak Tri Hartono (Tim Pemutakhir)	Objek pemajuan kebudayaan itu kalau sedang dilindungi itu tahapannya hanya di pelindungan saja. Tapi kalau sudah dilindungi itu baru bisa dikembangkan dan dimanfaatkan. Jadi tidak mungkin objek yang baru diinventarisasi ini bisa langsung dimanfaatkan	Bapak Bambang (Tim Pemutakhir). Betul Pak Tri, permasalahan ini sebenarnya masih berkutat pada OPK yang berwujud barang, sedangkan OPK yang sifatnya non – barang permasalahannya ada di <i>values</i> atau nilainya. Sementara itu pada OPK yang

		sifatnya intangible masalahnya berada pada tahap penginternalisasian <i>values</i> ini ke masyarakat agar menjadi lebih dihargai. Oleh karena itu perlu kiranya sebuah re-interpretasi ulang mengenai OPK yang sifatnya intangible ini. Inilah sekiranya yang menjadi masalah utama di dalam kebudayaan karena jika kita gagal dalam proses ini maka akan hilang kebudayaan itu nantinya.
Ibu Fertilia (Bappeda Jateng)	Kita bisa saksikan di layar presentasi di depan (tabel PPKD bab VII) kan itu di bagian atas terdapat program pengembangan kebudayaan nah di bagian bawahnya itu kan terdapat bentuk kegiatan nah di bawahnya lagi kan terdapat sub kegiatan mungkin bisa nantinya di bagian ini diberikan semacam catatan atau kode - kode pada kolom keterangan agar kami dari bappeda lebih mudah memahaminya. Karena apa yang disampaikan di dalam PPKD itu sendiri kan cenderung menggunakan istilah dan terminologi dari kebudayaan sehingga yang bisa menterjemahkan hanya pihak dinas kebudayaan itu sendiri. Artinya disini teman - teman dari dinas juga diharapkan bisa melakukan klasifikasi terhadap	

	banyaknya kegiatan kedalam program – program yang sudah disusun.	
Bapak Iksan (Disdikbud Jateng)	Yang menjadi masalah selanjutnya adalah terkait dengan SK yang didalamnya memuat tentang perlindungan – pengembangan dst, nah permasalahannya ada di bagian berikutnya yang menyebutkan poin tersendiri tentang budaya, dan tradisi.	Bapak Ari (Bappeda Jateng) Untuk masalah ini kita memakai pendekatan yang mudah saja, kira – kira kalau kegiatan ini masuk ke dalam program apa itu sebaiknya dijelaskan sendiri oleh pihak dinas. Agar nantinya kami dari bappeda ketika membuat borang capaian itu juga mudah.
Ibu Fertilia (Bappeda Jateng)	Mas Ikhsan tadi menyampaikan adanya ketidak sesuaian di tabel yang disajikan padahal itu memang produk dari kemendagri yang katanya sudah diskusi dengan kementerian dan lembaga terkait. Jadi nantinya kita akan berfokus saja pada nomenklatur yang terdapat di dalam kolom F yaitu terkait sub kegiatan. Nantinya di sub ini bisa diisikan misal kegiatan A masuk ke dalam klasifikasi program apa.	
Bapak Tri Hartono (Tim Pemutakhiran)	Yang perlu menjadi pertimbangan juga kedepan adalah target yang ingin dicapai dari masing masing program/kegiatan. Misalnya saja manuskrip di tahun pertama targetnya dapat dilindungi berapa, dimanfaatkan berapa, dst. Karena untuk mengelola OPK ini	

	memang harus dilakukan secara bertahap mulai dari pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.	
Ibu Septi (Tim Evaluasi)	Kalau yang ada di depan itu kan dituliskan bahwa pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan itu dijadikan satu nomenklatur nah nantinya apakah di sub – sub kegiatan itu masih bisa dijabarkan lagi ke sub – sub kegiatan?	Ibu Fertilia (Bappeda Jateng). Tidak apa – apa, jika memang nanti ada misalnya saja pada bagian pengembangan kemudian sudah dituliskan sub kegiatan dan sub – sub kegiatannya nanti tidak apa – apa.
Ibu Septi (Tim Evaluasi)	Untuk programnya sendiri kan itu ada pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sementara pembinaan berdiri sendiri. Nah dalam proses menyusunnya kan dari pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan itu memang harus dilakukan secara berurutan sedangkan ada juga OPK yang mungkin saja tidak melalui salah satu poin proses tersebut?	Ibu Fertilia (Bappeda Jateng). Untuk mengakomodir hal itu sebenarnya sudah dicantumkan di dalam kepemdagri jika ada satu sub kegiatan tetapi sub kegiatan ini akan diturunkan lagi menjadi sub – sub kegiatan yang isi kegiatannya beragam. Nah sub – sub kegiatan inilah yang nantinya akan mendapatkan ikutan anggaran
Ibu Fertilia (Bappeda Jateng)	Saya ingin bertanya apakah kabupaten/kota itu punya akses untuk input data di Dapobud ? Jika penginputan jumlah data menjadi indikator kinerjanya dinas maka itu harus ada untuk penilaian.	Bapak Iksan (Disdikbud Jateng). Justru sebenarnya pihak kabupaten/kota lah yang harus menginput sendiri datanya ke Dapobud. Karena untuk menyusun PPKD ini data utamanya diambilkan dari Dapobud dan PPKD Kemdikbud. Sehingga nantinya jika pihak dinas kabupaten menyatakan

		memiliki data banyak tentang kebudayaan tapi nyatanya di Dapobud tidak nampak adanya maka itu berarti kan tidak mengisi. Maka dari pada itu yang kita kunci kan data ini untuk menyusun PPKD khususnya ketika pemutakhiran ini
Bapak Bambang (Tim Pemutakhir).	Dalam menyusun PPKD ini sebaiknya kita berbasis pada data yang ada saja, bahwa tidak ada kewajiban jika sistem itu harus nambah makanya tidak usah kita utak utik. Agar bisa lebih rasional dan juga kedepannya itu dalam menyusun program termasuk penganggaran di dalam RKPD itu bisa lebih baik utamanya dibuatkan skala prioritas.	
Ibu Iwuk (Disdikbud Jateng)	Jik kita lihat dengan seksama di dalam Dapobud ada banyak kekeliruan dan kesalahan dalam mengisikan data, seperti misalnya keris itu masuk ke permainan tradisional padahal sebenarnya merupakan teknologi	Bapak Bambang Kalau itu masalahnya ada di sistem sih Bu yang masih belum sempurna. Ibu Septi Untuk masalah ini memang ada perlakuan khusus terhadap OPK yang sifatnya intangible, berbeda dengan cagar budaya. untuk bisa menentukan klasifikasi OPK sebetulnya perlu dilakukan kajian

		terlebih dahulu. Tetapi jika saya lihat kembali Dapobud dan PPKD di depan sepertinya masalah itu juga berkaitan dengan program migrasi ke sistem yang baru juga.
Bapak Bambang (Tim Pemutakhir)	Apakah untuk penyusunan data ini datanya memang harus bersumber dari Dapobud atau boleh data milik kita sendiri saja ?	Bapak Iksan Untuk menyusun PPKD ini sesuai aturan yang terbaru maka datanya harus berasal dari Dapobud
Bapak Bambang (Tim Pemutakhir)	Jika memang seperti itu addanya ya kita ikuti saja aturannya. Perihal nanti Dapobud itu mempunyai banyak masalah kita tinggal tambahkan sebuah catatan saja. Nah nantinya mulai dari ini lah kita bisa memberikan rekomendasi untuk melakukan inventarisasi ulang mengenai OPK yang ada. Saya juga ingin menanyakan terkait data yang rancu di Dapobud itu apakah disebabkan oleh pihak penginput atau dari sistemnya?	Bapak Sulistiyo Kalau kesalahan itu kiranya dari sistem Pak, karena dulu ketika masih dalam proses penginputan terjadi beberapa kali kegagalan. Misal ketika data sudah diisikan lalu di klik selesai data hilang dan banyak lagi.
Ibu Septi (BPK Wilayah X)	Terkait masalah data ini yang masih banyak kekeliruannya mungkin nanti di rekomendasi kita bisa menuliskan mengenai perbaikan data Dapobud.	
Ibu Iwuk (Disdikbud Jateng)	Berkaitan dengan data yang banyak kelirunya ini juga yang membuat kami kebingungan dalam menyusun PPKD, apakah	Bapak Bambang

	<p>mungkin dengan data yang rancu ini kita bisa menghasilkan rumusan PPKD yang baik.</p>	<p>Nah maka dari pada itu tadi saya tanyakan apakah ada kewajiban bagi kita untuk menggunakan data dari Dapobud itu. Padahal kalau kita menggunakan data dari kita sendiri justru datanya jauh lebih baik. Jika memang harus menggunakan data dari kita sendiri nanti tinggal diberikan saja catatan bahwa data yang terdapat di Dapobud masih banyak keliru dsb.</p>
Ibu Fertilia (Bappeda Jateng)	<p>Saya ingin memastikan sudah sejauh mana Kemendikbud mengidentifikasi Dapobud ? kemudian sudah sejauh mana memperoleh data yang secara manual, jika keduanya disandingkan dan diperbandingkan apakah ada bedanya. Karena kalau masalah data ini masih runyam maka PPKD ini tidak akan jadi – jadi</p>	
Bapak Iksan (Disdikbud Jateng)	<p>Saya ingin menyampaikan sebuah usul berkaitan dengan data yang masih banyak kelirunya ini di Dapobud. Nantinya di dalam PPKD kita tetap akan menuliskannya sesuai dengan ketentuan Permendikbud bahwa data harus berasal dari Dapobud namun kita juga berikan catatan/lampiran tentang data – data manual yang kita miliki karena kondisi sistem Dapobud.</p>	

Bapak Bambang (Tim Pemutakhir)	<p>Kalau ada banyak data yang salah seperti ini apakah bisa dalam sistem itu dilakukan perbaikan semacam edit atau penghapusan ?</p>	<p>Ibu Septi</p> <p>Jika ada data yang perlu dihapus saat ini masih belum bisa dilakukan pak dari Dapobud karena fiturnya belum ada. Kalau untuk revisi kita harus lihat kembali status datanya apakah sudah valid atau masih draft, jika sudah valid maka statusnya harus diturunkan dulu menjadi draft dan itu dilakukan oleh rekan di kabupaten.</p>
Ibu Fertilia (Bappeda Jateng)	<p>Maaf Mas Ikhsan, kalau boleh tau agenda besok itu kira – kira apa ya, berhubung saat ini kita menemukan banyak masalah dalam penyusunan PPKD ini, kalau boleh mungkin kita bisa menyusun poin – poin masalah untuk kemudian besok disampaikan di forum yang juga dihadiri oleh pihak Kemdikbud dan Kemendagri. Mengapa saya usulkan demikian, karena selama ini jika kami di Bappeda mengalami kendala dalam membuat sebuah program atau rencana nanti ketika rapat dengan Bappenas maka kami akan langsung menyampaikan bahwa kami memiliki masalah seperti ini dan solusi yang kami tawarkan adalah ini boleh tidak untuk dilakukan. Kalau dalam kasus PPKD ini misalnya saja kita punya masalah dengan Dapobud karena itu untuk menyusun Dapobud</p>	

	kami akan menggunakan data kami sendiri bagaimana kira – kira tanggapan Kemdikbud.	
Ibu Iwuk (Disdikbud Jateng)	Untuk Dapobud sendiri saya sebenarnya sudah mencatat beberapa permasalahan pertama ada masalah – masalah dalam pengajuan data OPK untuk WBTB yang ditolak masih ingin diajukan kembali sehingga akan divalidasi ulang. Kedua, ada data yang sudah valid namun tidak terlacak dari kabupaten mana, bahkan jumlahnya pun sangat banyak hingga 80 opk. Ketiga, ada data opk yang diinput tetapi tidak diketahui siapa penginputnya. Keempat, ada data OPK yang sudah valid tetapi tidak masuk ke sistem database provinsi.	Bapak Bambang Nah dari masalah yang disampaikan oleh Ibu Iwuk tadi sebaiknya besok kita sampaikan semuanya, kemudian kita minta kebijakan dari pusat, jika tidak bisa memberikan kebijakan maka kita harus putuskan sendiri mengenai PPKD ini.
Bapak Bambang (Tim Pemutakhir)	Saya ingin bertanya berkaitan dengan seberapa besar probabilitas kesalahan yang mungkin terjadi dalam penginputan Dapobud apakah dari sistem ataukah orangnya apakah sesuai kaidah, dan berapa banyak kesalahannya ?	Ibu Iwuk Kalau sepengetahuan saya jika melihat data di Dapobud maka ada kesalahan yang berupa salah jenis 1, tidak bisa veri-val 1, lalu data yang sudah diinput tapi tidak masuk ke provinsi 16, tidak terlacak 80.
Bapak Tri Hartono (Tim Pemutakhir)	Kalau perihal penginputan itu sendiri apakah kegiatan seperti itu masuk ke pekerjaan program inventarisasi, pemeliharaan, atau pengamanan ? Inventarisasi kan. Nah kalau inventarisasi yang menjadi pokok masalah maka nantinya rumusan masalah yang dibuat adalah belum terinventarisasinya data pokok kebudayaan	

	dengan baik. Kemudian didata ada berapa kesalahannya yang seperti itu. Dari sinilah nanti kita bisa mulai menyusun target/capaian bahwa tahun pertama ada berapa banyak jumlah OPK yang sudah diinventarisasi ulang	
Bapak Iksan (Disdikbud Jateng)	Berarti masalah ini nanti akan dipukul rata ke semua OPK Pak?	Bapak Bambang Betul sekali, masalah ini akan disamaratakan ke semua OPK. Karena saya sebenarnya juga khawatir jika kesalahan ini berada di sisi penginputnya. Karena human error ini kan terkadang tidak bisa kita perkirakan, takutnya misal yang menginput ini bukan ahlinya misalnya saja diserahkan ke mahasiswa magang atau siapa.
Bapak Sulis	Perkara data ini Pak, sebenarnya untuk data manual/tertulisnya di kami itu lengkap hanya memang data yang di online inilah yang bermasalah.	Ibu Iwuk Mas Iksan mungkin bisa menghubungi Jawa Timur karena Jawa Timur PPKDnya sudah masuk taraf penandatanganan. Mungkin bisa menanyakan menggunakan data apa
Bapak Bambang (Disdikbud Jateng)	Syarat data dua, valid dan reliable. Sekarang lihat mana data yang reliable yang di dapobud atau di borang manual. Kalau manual, ya	

	<p>pilih yang manual. Kalau manual itu lebih bisa dipertanggung jawabkan sebab pengambilannya langsung.</p>	
Bapak Iksan (Disdikbud Jateng)	<p>Seperti yang terlihat pada layar, data inilah yang akan besok kita fgdkan. Data tersebut merupakan data dari tahun 2018 dan merupakan permasalahan yang sudah provinsi himpun dari 35 kabupaten/kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah besok akan dipantik dari data yang sudah ada atau mulai dari kosongan? - Kemudian, mengingat pesan dari Pak Ari dan Bu Lia, dalam pengisian permasalahan ini nanti perlu memperhatikan ada nomenkalturnya atau tidak. Jangan sampai menghadirkan masalah yang tidak bisa diakomodir oleh Kemendagri. 	<p>Ibu Wardiyah</p> <p>Kita mulai dari yang sudah ada, tetapi dengan pertimbangan seberapa jauh dari provinsi akan melakukan aksi dari apa yang sudah dirumuskan. Kalau secara riilnya memang disampaikan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Tapi kemarin kita sudah fix bahwa provinsi hanya sampai pada tahap pelindungan sehingga hanya bisa secara inventarisasi. Untuk itu, saya harap besok kita sampai situ saja jangan sampai meluas difokuskan pada inventarisasi.</p>
Bapak Iksan (Disdikbud Jateng)	<p>Pesan dari kementerian, untuk mengisi tabel pada bab 7 yani tabel permasalahan à Tabel tersebut diisi dengan permasalahan spesifik atau umum dari blok identifikasi masalah yang terapat di borang. Untuk mempermudah dan mensistematiskan permasalahan, permasalahan dapat di bagi menjadi 4 yakni pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Jika kita hanya</p>	<p>Ibu Wardiyah</p> <p>Memang ada aksi untuk pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, tetapi perlu diperhatikan lagi, apakah memang aksi tersebut akan dilaksanakan. Jangan sampai hanya tertulis di dokumen tetapi aksi tidak dilaksanakan</p>

	<p>menyepakati di pelindungan, berarti nanti dipengembangan diisi dengan strip (-). Bagaimana jika seperti itu?</p> <p>Tahun kemarin, kalau dari BAPEDA, lebih menitik beratkan pada penetapan. Baik WBTB dan CB kalau di dalam undang-undang, hanya sebatas dipelindungan dan pentapan termasuk pelindungan. Nah, untuk penetapan nanti masuk pada tahun 2029, tetapi kalau kita hanya fokus dipelindungan, bagaimana nasib pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan selanjutnya? Apakah akan distrip (-) diosongkan atau kita isi yang kira-kira nanti kita bisa penuhi.</p>	
Ibu Adhesty (Disdikbud Jateng)	Tidak ada disebutkan secara tersuaat apakah harus dilakukan semua atau opsional, tetapi ketika dievaluasi masing-masing punya nilai. Baik dari aksi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan itu mempengaruhi penilaian	Pak Bambang Mungkin bisa dibuat misal OPK X, dititik beratkan pada salah satu saja, jadi menentukan prioritas.
Bapak Iksan (Disdikbud Jateng)	Kolom selanjutnya yang harus diisi adalah rekomendasi yang diisi dengan tindakan untuk mengatasi permasalahan, tujuan diisi dengan menjawab permasalahan. Sasaran diisi dengan sasaran spesifik (orang/Lembaga) atau stakeholder yang akan melakukan/bertanggung jawab.	Ibu Lia Jika melihat indikator capaian, kalau dalam perencanaan, disebut dengan taget capaian untuk 5 tahun kedepan. Dalam perencanaan itu, pasti ada baseline dan baseline bisa dari tahun berapapun. Dugaan saya, yang tahun 2023 itu adalah <i>baseline</i> dan

	<p>Kemudian, untuk indikator capaian akan dibuat seperti yang sudah ada atau bagaimana?</p>	<p>kolom <i>baseline</i> seharusnya tidak dicampur adukkan dengan kolom target.</p> <p>Kalau langsung dituliskan 5 tahunan, kita tidak bisa menampilkan target dengan baik sehingga sebaiknya ada kolom <i>baseline</i>. Jadi, nanti akan telihat kita berangkat dari angka berapa kemudian sudah tercapai berapa. Misalnya kita punya target akan mendapatkan 1000 CB dan baseline nya berangkat dari CB yang sudah didaftarkan ada 500. Berarti, kita berangkat dari Data CB yang sudah didaftarkan, nanti tambah 10, tambah 10.</p> <p>Saya pikir, kemendikbud juga tidak kaku dalam hal penyajian, yang penting syarat minimal yang diminta kemendikbud dipenuhi, kemudian yang lainnya dimodifikasi tidak masalah yang penting arah modifikasinya supaya selaras dengan perencanaan.</p>
Bapak Iksan (Disdikbud Jateng)		Untuk FGD besok, kita akan berangkat dari data yang sudah ada. Kemudian, permasalahan dipilih skala prioritasnya selain dalam pelindungan apakah ada permasalahan di pengembangan, pemanfaatan, dan

		<p>pembinaan. Selain itu, indikator capaian akan dituliskan untuk setiap 5 tahun. Sebelum acara besok dimulai, diharapkan tim pemutakhiran dapat berkumpul terlebih dahulu di ruangan ini.</p>
--	--	--

Lampiran



Rekap FGD Permasalahan dan Rekomendasi OPK

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI HASIL FGD

19 Desember 2023

○ Manuskrip

	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
Pelindungan									
Inventarisasi	Terbatasnya jumlah manuskrip yang diinventarisasi	Melakukan upaya inventarisasi keberadaan manuskrip	Terinventariisasinya manuskrip	Dinas kebudayaan, dinas arsip dan perpusatkaan, pemerintah desa	- Pencarian dan penemuan manuskrip - Penyusunan template/ form pendataan - Inventarisasi Manuskrip				
Pengamanan	Belum optimalnya upaya pemutakhiran	Mewujudkan pemutakhiran data manuskrip	Terwujudnya pemutakhiran data manuskrip dalam	Dinas kebudayaan, dinas arsip	- Pengumpulan data - Memasukan data				

	data manuskrip dalam sistem pendataan terpadu	dalam sistem pendataan terpadu	sistem pendataan terpadu	dan perpusatkaan	dalam sistem - Pemutakhiran data			
Pemeliharaan	Belum optimalnya upaya pemeliharaan manuskrip	Mewujudkan pemeliharaan manuskrip agar tidak rusak, hialng dan musnah	Terselamatkannya manuskrip dari kerusakan, kehilangan, dan kemusnahan	Dinas kebudayaan, dinas arsip dan perpusatkaan, perpustakaan, pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi jenis dan ragam manuskrip - Melakukan upaya preventif - Melakukan upaya kuratif - Terpeliharanya manuskrip 			
	Belum optimalnya upaya digitalisasi manuskrip	Digitalisasi data base	Terdigitalisasinya database manuskrip	Admin database, IT	<ul style="list-style-type: none"> - Digitalisasi data base - Tersusunnya data base secara terintegrasi 			
Penyelamatan								

Restorasi	Masih banyak manuskrip yang mengalami kerusakan	Mewujudkan restorasi manuskrip	Terwujudnya restorasi manuskrip yang rusak	Dinas kebudayaan, dinas aris dan perpusatkaan, perpusatakaan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi kerusakan manuskrip - Dilakukan upaya restorasi - Manuskrip terselamatkan 			
Pengembangan								
Kajian	Belum optimalnya kajian tentang manuskrip	Transliterasi, transkripsi, alih bahasa, pengkajian, sosialisasi	Tersedia kajian manuskrip	Pemilik manuskrip baik dari dinas terkait maupun individu	<ul style="list-style-type: none"> - Transkripsi, transliterasi, alih bahasa - Analisis isi dan fisik manuskrip 			
Pemanfaatan								
Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan manuskrip yang	Menjadikan substansi manuskrip sebagai sumber	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Pemilik manuskrip dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pengemasan manuskrip sebagai daya tarik wisata 			

	berdampak pada kesejahteraan masyarakat	pendapatan masyarakat			-Penyajian/display manuskrip			
Membangun Karakter Bangsa	Belum optimalnya manuskrip sebagai media membangun karakter bangsa	Menjadikan substansi manuskrip sebagai salah satu muatan lokal dalam pendidikan baik formal maupun non formal	Menjadikan substansi mansukrip sebagai media membangun karakter bangsa	Peserta didik, guru, masyarakat	- Sosialisasi Pembuatan Kurikulum - Pembuatan bahan ajar - Pengajaran di kelas			
Pembinaan								
SDM	Terbatasnya SDM yang mampu melakukan transliterasi, alih aksara, dan	Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan	Tersedianya SDM yang kompeten	Pengelola manuskrip	- Pelatihan - Standarisasi dan sertifikasi SDM			

	alih bahasa untuk manuskrip								
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

○ **Tradisi Lisan**

	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
Pelindungan									
Inventarisasi	Belum optimalnya inventarisasi tradisi lisan	Melakukan upaya inventarisasi tradisi lisan	Melakukan pendataan tradisi lisan	Dinas kebudayaan	- Pencarian dan penemuan tradisi lisan - Penyusunan template/ form pendataan - Inventarisasi Tradisi Lisan				
Pengamanan	Belum optimalnya upaya pemutakhiran data tradisi lisan dalam	Mewujudkan pemutakhiran data tradisi lisan dalam	Terwujudnya pemutakhiran data tradisi lisan	Dinas kebudayaan	- Pengumpulan data - Memasukan data dalam				

	sistem terpadu	pendataan terpadu	sistem terpadu	pendataan terpadu	dalam terpadu	sistem terpadu	sistem - Pemutakhiran data				
Pemeliharaan	Belum optimalnya upaya pemeliharaan tradisi lisan	Mewujudkan pemeliharaan tradisi lisan agar tidak hilang dan musnah	Terselamatkannya dari kehilangan, kemusnahannya	Masyarakat			- Mengidentifikasi tradisi lisan - Terpeliharanya dialek lokal dalam bahasa daerah				
	Belum optimalnya upaya digitalisasi tradisi lisan	Melakukan Digitalisasi data base	Terdigitalisasinya database tradisi lisan	Admin database, IT			- Digitalisasi data base - Tersusunya data base secara terintegrasi				
Penyelamatan	Belum optimalnya upaya menghidupkan dan menjaga ekosistem tradisi lisan	Pewarisan generasi berikutnya	Pada generasi berikutnya	Terwariskannya tradisi lisan ke generasi berikut	Masyarakat umum	- dan generasi muda	- Sosialisasi - Proses Pembelajaran - Penyebaran desiminasi				

	Masih belum optimal upaya penyelamatan tradisi lisan	Dilakukan revitalisasi lisan	upaya	Terselamatkannya tradisi lisan	Penutur lisan	tradisi lisan	Menghidupkan kembali tradisi lisan			
Pengembangan										
Kajian	Belum optimalnya kajian terhadap tradisi lisan	Tersedianya tradisi lisan	kajian	Tersedia tradisi lisan	kajian	Pelaku lisan	tradisi lisan	Melakukan wawancara/ penggalian informasi tradisi lisan		
								- Proses Penulisan Kajian - Hasil Kajian		
Inovasi	Belum optimalnya pengayaan keberagamaan/inovasi tradisi lisan	Terciptanya pengayaan keberagaman/ tradisi lisan	pengayaan	Terciptanya pengayaan keberagaman/ inovasi tradisi lisan	pengayaan	Pelaku lisan	tradisi lisan	Rekonstruksi aslinya - Pengayaan keberagaman		
								- Kajian, pengayaan teknik kajian,		

pengayaan performen, pengayaan teknologi yang digunakan

Pemanfaatan							
Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan tradisi lisan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat	Menjadikan tradisi lisan sebagai sumber pendapatannya	Menjadikan substansi tradisi lisan sebagai muatan lokal dalam pendidikan bangsa	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Pelaku tradisi lisan dan masyarakat	- Pengemasan lisan - Penyajian/perform tradisi lisan	-
Membangun Karakter Bangsa	Belum optimalnya tradisi lisan sebagai media untuk membangun karakter bangsa	Menjadikan tradisi lisan sebagai salah satu muatan lokal dalam pendidikan bangsa	Menjadikan tradisi lisan sebagai media untuk membangun baik formal maupun non formal	Peserta didik, guru, masyarakat	-	Sosialisasi - Pembuatan Kurikulum - Pengajaran di kelas	
Sumber Daya Manusia	Belum tersedianya SDM yang kompeten	Peningkatan kapasitas SDM tradisi lisan	Tersedianya SDM yang kompeten	Pelaku tradisi lisan	-	Pelatihan - Standarisasi dan sertifikasi	

Sarana dan Prasarana	Belum tersedianya pranata tradisi lisan yang memanfaatkan teknologi	Teknologi digunakan dalam pranata tradisi lisan	Terwujudnya pemanfaatan teknologi dalam pranata tradisi lisan	Pelaku tradisi lisan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan teknologi - Implementasi Teknologi
----------------------	---	---	---	----------------------	--

○ **Adat-Istiadat**

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					2024	2029	2034	2039
Perlindungan: Belum tersusunnya peta jalan inventarisasi yang terintegrasi dan belum optimalnya inventarisasi termasuk penyelamatan, sebagai pedoman, adat dan	Menyusun peta jalan dan SOP jalan inventarisasi yang terintegrasi dan belum optimalnya inventarisasi penyelamatan, sebagai pedoman, adat dan	Menyusun peta jalan atau pemangku kepentingan dan standar operasi operasional produk	1.OPD atau pemangku u standar operasi operasional produk	<p>1. Menyusun peta jalan inventarisasi di bidang adat istiadat yang meliputi upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi secara terintegrasi.</p> <p>2. Tokoh adat dan</p>	<p>Tersusunnya rencana peta jalan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, dan publikasi secara terintegrasi.</p> <p>2. Tokoh adat dan</p>	<p>Telah dilaksanakan peta jalan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, dan publikasi secara terintegrasi.</p> <p>2. Tokoh adat dan</p>	<p>Peta jalan berjalan dengan baik yang melibatkan kelompok sasaran</p>	<p>Terwujudnya mekanisme SOP yang telah mapan sebagai ekosistem perlindungan adat istiadat yang</p>

upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi di bidang Adat Istiadat	pengamanan, pemeliharaan dan publikasi di bidang adat istiadat.	dan dalam melaku kan inventa risasi i	masyarakat adat akademis	2. Melakukan inventarisasi secara rinci dan detail berbasis peta jalan yang telah disusun	3. Pelaksanaan dan optimalisasi inventarisasi, pelaksanaan pemeliharaan termasuk publikasi khasanah adat istiadat	4. Pegiat budaya	4. Evaluasi secara keseluruhan mengenai pelaksanaan inventarisasi, pelaksanaan pemeliharaan termasuk publikasi khasanah adat istiadat	pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi di bidang adat istiadat	n, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi di bidang adat istiadat	berkelanjutan
--	---	---------------------------------------	--------------------------	---	---	------------------	---	--	---	---------------

Pengembangan & Pemanfaatan : Belum tersusunnya peta jalan bagi penelitian yang komprehensif mengenai adat istiadat dan dapat dijadikan dasar dalam mewariskan nilai-nilai luhur budaya untuk memperkuat	Menyusun peta jalan penelitian yang komprehensif mengenai adat istiadat dan dapat dijadikan dasar dalam mewariskan nilai-nilai luhur budaya untuk memperkuat	Menyusun peta jalan peneliti yang komprehensif mengenai adat istiadat dan dapat dijadikan dasar dalam mewariskan nilai-nilai luhur budaya untuk memperkuat	Para peneliti, lembaga peneliti yang komprehensif mengenai adat istiadat dan dapat dijadikan dasar dalam mewariskan nilai-nilai luhur budaya untuk memperkuat	<p>4. Menyusun peta jalan tentang penelitian dan pengkajian mencakup adat istiadat yang mencakup kekayaan budaya.</p> <p>5. Melaksanakan riset tersebut termasuk mendiseminasi hasil kajian tersebut agar bermanfaat bagi</p> <p>6. Melakukan evaluasi dan pelaksanaan riset yang melibatkan para peneliti,</p>	<p>Menyusun rancangan peta jalan tentang penelitian dan pengkajian mencakup adat istiadat yang mencakup kekayaan budaya.</p> <p>Menyusun budaya. diseminasi yang dapat memperkuat karakter bangsa dan ketahanan budaya.</p>	<p>Telah dilaksanakan peta jalan tentang penelitian dan pengkajian di bidang adat istiadat telah dapat dijalankan secara baik serta efektif dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai luhur budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan</p>	<p>Penelitian dan pengkajian di bidang adat istiadat telah dapat dijalankan secara baik secara berkelanjutan.</p>	<p>Terwujudnya ekosistem penelitian dan pengkajian di bidang adat istiadat pengkajian di bidang adat istiadat secara berkelanjutan.</p>
---	--	--	---	---	---	---	---	---

karakter bangsa		mentaskan.		lembaga riset pemerintah, dan pegiat kebudayaan.			ketahanan budaya	
Pembinaan: Masih kurangnya upaya yang mendorong masyarakat dalam menghidupi, memelihara, dan melestarikan adat istiadat	Memperbaikan upaya yang meningkatkan kualitas upaya yang mendorong masyarakat dalam menghidupi, memelihara, dan melestarikan adat istiadat	Menciptakan berbagai upaya yang meningkatkan kualitas upaya yang mendorong masyarakat dalam menghidupi, memelihara, dan melestarikan adat istiadat	Dinas dan OPD berbagai terkait, perguruan tinggi, akademis dan pegiat budaya, LSM, komunitas, dan masyarakat dalam menghidupi, merawat, dan melestarikan adat istiadat.	4. Menciptakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menghidupi, merawat, dan melestarikan adat istiadat.	Terciptanya berbagai program yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menghidupi, merawat, dan melestarikan adat istiadat.	Terlaksananya berbagai program yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menghidupi, merawat, dan melestarikan adat istiadat.	Terciptanya keberlanjutan berbagai program yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menghidupi, merawat, dan melestarikan adat istiadat.	Terciptanya keberlanjutan program pembinaan sumber daya manusia dalam memelihara, menghidupi, dan melestarikan adat istiadat.

		memeli hara, dan melesta rikan adat istiadat		<p>5. Melaksanakan kerja gotong royong seluruh pemangku kepentingan dalam menghidupi, merawat, dan melestarikan adat istiadat</p> <p>6. Menciptakan berbagai program yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan partisipasi Gen-Z dalam menghidupi, merawat, dan</p>			pembaruan program pembinaan.	
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--

				melestarikan adat istiadat.				
--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--

○ Ritus

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					2024	2029	2034	2039
Pelindungan: Belum tersusunnya peta jalan inventarisasi dan belum optimalnya inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan	Menyusun peta jalan dan SOP inventarisasi sekaligus mengoptimalkan inventarisasi secara terintegrasi	Menyusun peta jalan dan SOP sebagai pedoman dalam melakukannya dalam inventarisasi	1.OPD atau pemangku kepentingan atau dinas terkait	1. Menyusun peta jalan inventarisasi di bidang Ritus yang meliputi upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi secara terintegrasi. 2. Tokoh adat dan masyarakat adat yang telah disusun	Tersusunnya rencana peta jalan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi	Telah dilaksanakan peta jalan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi	Peta jalan berjalan dengan baik yang melibatkan kelompok sasaran	Terwujudnya mekanisme SOP yang telah mapan sebagai ekosistem perlindungan Ritus yang berkelanjutan

<p>dan publikasi secara pengamanan, terintegrasi di bidang Ritus</p>	<p>n, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi di bidang Ritus</p>	<p>penyelaman, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi di bidang Ritus</p>	<p>3. Akademisi (antropologi, filologi, arsitektur)</p>	<p>3. Pelaksanaan dan optimalisasi inventarisasi, pelaksanaan pemeliharaan termasuk publikasi khasanah Ritus</p>	<p>4. Evaluasi secara keseluruhan mengenai pelaksanaan inventarisasi, pelaksanaan pemeliharaan termasuk publikasi khasanah Ritus</p>	<p>secara terintegrasi di bidang Ritus</p>	<p>publikasi secara terintegrasi di bidang Ritus termasuk mekanisme evaluasi pelaksanaan peta jalan dan perbaikan serta penyesuaiannya</p>		
<p>Pengembangan & Pemanfaatan :</p>	<p>Menyusun peta jalan penelitian yang komprehensif</p>	<p>Menyusun peta jalan peneliti yang di</p>	<p>Para peneliti, lembaga peneliti riset pemerint</p>	<p>1. menyusun peta jalan penelitian dan pengkajian di bidang Ritus secara komprehensif yang</p>	<p>Tersusunnya rancangan peta jalan penelitian</p>	<p>Telah dilaksanakan rancangan peta jalan penelitian</p>	<p>Penelitian pengkajian di bidang Ritus telah</p>		

<p>Belum tersusunnya peta jalan penelitian yang komprehensif mengenai Ritus yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur budaya sebagai penopang karakter bangsa.</p>	<p>if mengenai Ritus yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur budaya sebagai penopang karakter bangsa.</p>	<p>bidang Ritus secara kompre hensif luhur sebagai penopang karakter bangsa.</p>	<p>ah dan pegiat swasta, dan kompre hensif pegiat kebudaya an.</p>	<p>mencakup kekayaan budaya.</p> <p>2. Melaksanakan penelitian dan pengkajian sesuai peta jalan yang di susun termasuk mendiseminasi hasilnya.</p>	<p>dan pengkajian di bidang Ritus termasuk rencana pengembangan dan pemanfaata</p>	<p>dan pengkajian di bidang Ritus termasuk diseminasi hasil penelitian.</p>	<p>dapat dijalankan secara baik dan efektif termasuk pengembangan dan pemanfaata</p>	<p>secara berkelanjutan.</p>
<p>Pembinaan: Masih kurangnya</p>	<p>Memperbaik upaya dan</p>	<p>Menciptakan berbagai</p>	<p>OPD terkait, pergurua</p>	<p>1. Menciptakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka</p>	<p>Terciptanya berbagai program</p>	<p>Terlaksana nya berbagai</p>	<p>Terciptanya keberlanjutan berbagai</p>	<p>Terciptanya keberlanjutan program</p>

upaya yang mendorong masyarakat dalam memelihara dan melestarikan Ritus.	meningkatkan kualitas upaya yang mendorong masyarakat dalam memelihara dan melestarikan Ritus	ini upaya kreatif, inovatif, dan variatif untuk mendorong dan memelihara dan melestarikan Ritus.	tinggi, akademis, budaya, LSM, komunitas, dan tokoh masyarakat dalam memelihara dan melestarikan Ritus	mendorong dan meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam merawat dan melestarikan Ritus.	dan meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam merawat dan melestarikan Ritus.	yang meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam merawat dan melestarikan Ritus.	program yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merawat dan melestarikan Ritus.	program yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merawat dan melestarikan Ritus.	pembinaan sumber daya manusia dalam memelihara dan melestarikan Ritus.
				2. Melaksanakan kerja gotong royong seluruh pemangku kepentingan dalam merawat dan melestarikan Ritus	3. Menciptakan berbagai program yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan partisipasi Gen-Z dalam merawat dan melestarikan Ritus				

- **Seni**

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian					Keterangan (Kepmenda gri No. 900.1.15.5. 1317)
					2025	2026	2027	2028	2029	
PELINDUNGAN										
Objek seni rupa belum terdata dengan baik	Perlu kajian, inventarisasi, dokumentasi dan pemetaan seni rupa	Mengetahui jumlah dan kondisi objek seni rupa	Objek seni rupa tradisi terutama jenis, produk dan spesifikasinya	Inventarisasi, dokumentasi, pemetaan dan kajian						
Objek seni rupa banyak yang belum	Publikasi terhadap	Mengangkat kembali	Objek seni yang	Inventarisasi, pemetaan,						

diangkat dan terancam punah	kesenian yang belum populer dan hampir punah	melalui informasi meluas dan menumbuh kan minat pemajuan kesenian	terancam punah dan yang kurang populer	perumusan publikasi dan menyusun bentuk publikasi baik foto, video, radio, dll					
PEMANFAATAN									
Terbatasnya ruang ekspresi	Pengadaan ruang ekspresi atau festival yang lebih bisa mewadahi seluruh kesenian	Menumbuh kan berbagai event terutama festival	Membuka ruang ekspresi dan ruang apresiasi secara meluas	Pemetaan kebutuhan ekspresi, penentuan tempat, waktu, anggaran dan keterlibatan berbagai pihak					
Seni rupa masih dibuat oleh pelaku seni luar daerah	Mengedepankan seniman-seniman	Kemandirian pemenuhan	Pelaku seni rupa dan masyarakat	Sosialisasi produk, seniman dan					

	setempat untuk membangun identitas daerah melalui kesenian daerah, bangunan monumental, dan ornamentik	produk seni rupa di daerah	penggunaanya, serta pemerintah daerah setempat	membangun kesadaran penggunaan produk lokal melalui promosi dan percontohan					
PENGEMBANGAN									
Terdapat kesamaan dan kemiripan antar daerah	Perlu adanya kajian identitas kesenian	Menggali dan menumbuh kan identitas dan kekhasan produk dan	Pelaku seni, peneliti dan pemerintah daerah	Identifikasi dan kajian rupa, motif, teknologi, dan pengetahuan. Publikasi dan ekspresi secara meluas					

		objek seninya							
Terdapat kesamaan dan kemiripan kesenian di wilayah yang beririsan	Promosi kesenian Pembakuan kesenian	Menumbuh kan identitas dan kekhasan	Pelaku seni, peneliti, akademisi, masyarakat dan pemerintah daerah	Pemetaan persebaran, identifikasi kemiripan, identifikasi pelaku, penggalian identitas, pembakuan, promosi secara meluas					
PEMBINAAN									
Pihak Kabupaten dan Provinsi belum melakukan pembakuan maestro.	Mendorong pembakuan maestro dalam ranah kabupaten, provinsi dan pusat.	Mengapresiasi maestro dan penjaminan pewarisan, serta menumbuh	Pelaku seni, pemerintah daerah	Penentuan kriteria maestro sesuai tingkatan, pembentukan tim, penilaian					

		kan motivasi		dan pembakuan maestro secara berkala tiap tahun					
Terjadinya ketimpangan antar opk yang satu dengan yang lain dan ada kelompok opk tapi belum memiliki legal formal	Pembuatan legal formal organisasi dan pembuatan ruang berekspresi	Menumbuh kan kesadaran berorganisa si yang legal formal dan payung hukum	Pelaku seni dan sanggar- sanggar seni	Publikasi standarisasi organisasi, langkah pendampinga n, akta notaris dan kemenkumha m					
Kurangnya pemantauan organisasi seni	Pembenahan tata kelola	Organisasi seni yang sehat dengan tata kelola yang baik	Organisasi seni	Penataan pengurus organisasi, manajemen tata kelola					

Masalah terkait perlindungan hukum pelaku seni	Pendampingan hukum	Kenyamanan dan kebebasan dalam beraktivitas seni	Pelaku seni dan pemerintah daerah	Pembentukan LSP Kesenian					
Perundungan kegiatan kesenian	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kode etik • Membuat perda untuk batasan penyeleenggaraan pertunjukan kesenian 	Kenyamanan dan kebebasan dalam beraktivitas seni	Pelaku seni dan pemerintah daerah	Konsorsium pelaku seni, pembentukan tim perumus, perumusan, uji publik dan pembakuan kode etik					

<ul style="list-style-type: none"> • Belum terukurnya kompetensi pelaku seni • Kesulitan sertifikasi pelaku seni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan sertifikasi pelaku seni • Sosialisasi sertifikasi pelaku seni • Perlu adanya sosialisasi LSP 	Standarisasi profesi	Pelaku seni dan organisasi seni	Pembentukan KKNI, RSKKNI, pendirian LSP, pembentukan asesor, pelatihan dan penyelenggaraan UJI Kompetensi					
Pembinaan pelaku seni atau sanggar belum merata	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan ruang 	Kemandirian pelaku dan	Pelaku dan organisasi seni,	Pemetaan kondisi pelaku dan					

	<p>ekspresi, fasilitas, dan pendanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembentahan sistem internal terkait distribusi fasilitas serta melakukannya pendataan dan promosi 	organisasi seni secara merata	pemerintah daerah dan stakeholder	sanggar seni, program kegiatan dan pembinaan yang dibutuhkan					
--	---	-------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kehidupan sanggar seni masih tahap ketergantungan dan belum mandiri	Pendampingan tata kelola organisasi	Kemandirian organisasi kesenian	Organisasi seni, pelaku seni dan pemerintah daerah	Pemetaan kondisi sanggar seni, pendampingan tata kelola					
Regenerasi	Upaya mendorong pewarisan	Pewarisan yang berlangsung dengan baik. diminati generasi muda	Generasi pewaris, pelaku seni dan maestro	Pemetaan sistem pewarisan, dukungan pembuatan bahan ajar, publikasi, penyelenggaran edukasi					
Perlindungan anak dan eksploitasi anak	Mengedepankan HAM dan apresiasi, menghindari eksploitasi, serta kekerasan	Kenyamanan, keamanan dan kebebasan ekspresi anak dalam	Pelaku seni, masyarakat, dan generasi pewaris	Pembakuan wilayah keterlibatan anak dalam ekspresi seni, kode etik, pelindungan					

		dunia seni, hak penghargaan dalam ekspresi seni		hukum, pendampingan						
--	--	---	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

○ **Bahasa**

	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
Pelindungan									
Inventarisasi	Belum optimalnya inventarisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Melakukan upaya inventarisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Terinventariisasinya dialek lokal dalam bahasa daerah	Masyarakat, BAPEDA, dinas kebudayaan	- Pencarian dan penemuan dialek lokal dalam bahasa daerah - Penyusunan template/ form pendataan - Inventarisasi Dialek lokal dalam bahasa daerah				
Pengamanan	Belum optimalnya upaya	Mewujudkan pemutakhiran data dialek	Terwujudnya pemutakhiran data dialek lokal dalam	Dinas kebudayaan	- Pengumpulan data - Memasukan data dalam				

	pemutakhiran data dialek lokal dalam bahasa daerah dalam sistem pendataan terpadu	lokal dalam bahasa daerah dalam sistem terpadu	bahasa daerah dalam sistem terpadu		sistem - Pemutakhiran data			
Pemeliharaan	Belum optimalnya upaya pemeliharaan dialek lokal dalam bahasa daerah	Mewujudkan pemeliharaan dialek lokal dalam bahasa daerah agar tidak hilang dan musnah	Terselamatkannya dialek lokal dalam bahasa daerah dari kehilangan dan kemusnahan	Masyarakat penutur dialek dalam bahasa daerah	- Mengidentifikasi dialek lokal dalam bahasan daerah - Terpeliharanya dialek lokal dalam bahasa daerah			
	Belum dilakukan upaya digitalisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Melakukan digitalisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Terdigitalisasinya dialek lokal dalam bahasa daerah	-Dinas pendidikan -Dinas Kebudayaan -Kominfo	- Perekaman dialek lokal dalam berbahasa daerah - Memasukan ke sistem - Digitalisasi dialek lokal dalam bahasa daerah			

Pengembangan								
Kajian	Belum optimalnya kajian tentang dialek	Melakukan kajian dialek lokal dalam bahasa daerah	Tersedia kajian dialek lokal dalam bahasa daerah	BAPEDA, dinas kebudayaan	- Penggalian informasi - Proses penulisan kajian - Hasil kajian			
Pemanfaatan								
Kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat	Menjadikan dialek lokal dalam bahasa daerah sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dialek lokal dalam bahasa daerah	Masyarakat	- Inventarisasi dialek lokal - Mengimplementasikan dialek lokal dalam kontenMengimplemtasikan dalam media seni - Masyarakat mendapatkan penghasilan			
Meningkatkan ketahanan budaya	Belum optimalnya dialek lokal dalam bahasa daearah sebagai salah	Menjadikan dialek lokal dalam bahasa daerah sebagai media ketahanan budaya	Menjadikan dialek lokal dalam bahasa daerah sebagai media ketahanan budaya	Peserta didik, guru, masyarakat	- Sosialisasi Pembuatan Kurikulum - Pembuatan bahan ajar - Pengajaran di kelas			

	ketahanan budaya	satu muatan lokal							
Pembinaan									
SDM	Semakin berkurangnya penutur dialek lokal dalam bahasa daerah	Mewujudkan transfer <i>knowledge</i> dialek lokal dalam bahasa daerah pada generasi penerus terkait dengan dialek lokal dalam bahasa daerah	Meningkatnya penutur dialek lokal dalam bahasa daerah	Ibu-ibu PKK, masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi dialek lokal dalam bahasa daerah - Membangun komunitas dialek lokal dalam bahasa daerah - Melakukan transfer dialek lokal dalam bahasa daerah pada generasi penerus - Dialek lokal menjadi bahasa keseharian masyarakat 				

- Olah Raga Tradisional

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					202	2029	203	203
4	4	9						
Pelindungan: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang olah raga tradisional	Melakukan sosialisasi tentang olah raga tradisional	Menyebarluaskan informasi mengenai olah raga tradisional kepada masyarakat, khususnya generasi muda	1. OPD terkait 2. Akademisi 3. Masyarakat 4. Generasi muda	1. Pemutakhiran data tentang olah raga tradisional 2. Penyelenggaraan FGD/DKT 3. Sosialisasi				
Pelindungan: Belum adanya penetapan olah raga tradisional sebagai WBTB	Melakukan pengusulan penetapan olah raga tradisional sebagai WBTB	Olah raga tradisional yang dilindungi dan siap untuk dikembangkan dan dimanfaatkan	1. OPD terkait 2. Kemendikbud ristek 3. BPK Wilayah X 4. Akademisi 5. Masyarakat	1. Pendataan dan pendokumentasi tentang olah raga tradisional 2. Kajian tentang olah raga tradisional				

				3. Penyelenggaraan FGD/DKT 4. Usulan penetapan			
Pengembangan: Belum terbentuknya ekosistem kebudayaan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan terkait pelestarian olah raga tradisional	Penyelenggaraan event atau festival olah raga tradisional	Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan olah raga tradisional yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.	1. OPD terkait 2. Masyarakat 3. Generasi muda	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta 2. Publikasi dan dokumentasi 3. Penyelenggaraan event			

Pemanfaatan: Kurangnya sarana prasana penunjang olah raga tradisional	Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang olah raga tradisional	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang olah raga tradisional yang sesuai standar.	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektor 2. Pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap			
Pemanfaatan: Kurang optimalnya pemanfaatan olah raga tradisional sebagai atraksi tradisional sebagai atraksi wisata daerah	Mengoptimalkan olah raga tradisional sebagai atraksi wisata daerah	Olah raga tradisional yang dapat dimanfaatkan sebagai atraksi wisata daerah	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Publikasi dan dokumentasi 2. Penyelenggaraan event wisata			
Pembinaan: Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional	Melakukan pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional	Terselenggaranya pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional	1. OPD terkait 2. Komunitas Budaya 3. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektor 2. Pembinaan kepada para pelaku olah			

				raga tradisional				
--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--

- **Permainan Rakyat**

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					202 4	2029 4	203 4	203 9
Pelindungan: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang permainan rakyat	Melakukan sosialisasi tentang permainan rakyat	Menyebarluaskan informasi mengenai permainan rakyat kepada masyarakat, khususnya generasi muda	1. OPD terkait 2. Akademisi 3. Masyarakat 4. Generasi muda	1. Pemutakhiran data tentang permainan rakyat, 2. Penyelenggaraan FGD/DKT Sosialisasi				

<p>Pelindungan: Belum adanya penetapan permainan rakyat sebagai WBTB</p>	<p>Melakukan pengusulan penetapan permainan rakyat sebagai WBTB</p>	<p>Permainan rakyat yang dilindungi dan siap untuk dikembangkan dan dimanfaatkan</p>	<p>1. OPD terkait, 2. Kemendikbud ristek 3. BPK Wilayah X 4. Akademisi 5. Masyarakat</p>	<p>1. Pendataan dan pendokumentasi tentang permainan rakyat, 2. Kajian tentang permainan rakyat, 3. Penyelenggaraan FGD/DKT, 4. Usulan penetapan.</p>			
<p>Pengembangan: Belum terbentuknya ekosistem kebudayaan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan terkait pelestarian permainan rakyat</p>	<p>Penyelenggaraan event atau festival permainan rakyat</p>	<p>Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan permainan rakyat yang berkelanjutan kepada masyarakat,</p>	<p>1. OPD terkait 2. Masyarakat 3. Generasi muda</p>	<p>1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah</p>			

		khususnya generasi muda		maupun swasta, 2. Publikasi dan dokumentasi, 3. Penyelenggaraan event.			
Pembinaan: Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Melakukan pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Terselenggaranya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	1. OPD terkait 2. Komunitas Budaya 3. Masyarakat 4. Generasi muda	1. Melakukan koordinasi lintas sektor 2. Pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat			
Pemanfaatan: Kurang optimalnya pemanfaatan permainan rakyat sebagai atraksi rakyat sebagai atraksi wisata daerah	Mengoptimalkan permainan rakyat sebagai atraksi wisata daerah	permainan rakyat yang dapat dimanfaatkan sebagai atraksi wisata daerah	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Publikasi dan dokumentasi 2. Penyelenggaraan event wisata			

Pembinaan: Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Melakukan pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Terselenggaranya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	1. OPD terkait 2. Komunitas Budaya 3. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektor 2. Pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat				
---	---	--	--	---	--	--	--	--

○ **Pengetahuan Tradisional**

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					202	2029	203	203
Pelindungan: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengetahuan tradisional.	Melakukan sosialisasi tentang pengetahuan tradisional.	Menyebarluaskan informasi mengenai pengetahuan tradisional kepada masyarakat,	1. OPD terkait 2. Akademisi 3. Masyarakat 4. Generasi muda	1. Pemutakhiran data tentang pengetahuan tradisional 2. Penyelenggaraan FGD/DKT	4	4	9	

		khususnya generasi muda.		3. Sosialisasi				
Pelindungan: Keterbatasan bahan baku untuk pembuatan jamu tradisional	Menyediakan bahan baku untuk pembuatan jamu tradisional	Jamu sebagai pengetahuan tradisional yang lestari dan dapat dimanfaatkan.	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektoral 2. OPD terkait menyediakan bibit tanaman untuk pembuatan jamu tradisional, 3. Sosialisasi kepada petani untuk menanam tanaman yang dibutuhkan dalam				

				<p>pembuatan jamu tradisional,</p> <p>4. Penanaman tanaman yang dibutuhkan dalam pembuatan jamu tradisional.</p>			
<p>Pelindungan:</p> <p>Penetapan pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya takbenda (WBTB) masih terbatas.</p>	<p>Melakukan pengusulan penetapan pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya takbenda (WBTB).</p>	<p>Pengetahuan tradisional yang dilindungi dan siap dikembangkan untuk dimanfaatkan.</p>	<p>1. OPD terkait 2. Kemendikbud ristek 3. BPK Wilayah X 4. Akademisi 5. Masyarakat</p>	<p>1. Pendataan dan pendokumentasiannya tentang pengetahuan tradisional, 2. Kajian tentang pengetahuan tradisional, 3. Penyelenggaraan FGD/DKT,</p>			

				4. Usulan penetapan.			
<p>Pengembangan: Belum terbentuknya ekosistem kebudayaan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan terkait pelestarian pengetahuan tradisional</p>	<p>Penyelenggaraan event atau festival pengetahuan tradisional.</p>	<p>Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan pengetahuan tradisional yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.</p>	<p>1. OPD terkait 2. Masyarakat 3. Generasi muda</p>	<p>1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta, 2. Publikasi dan dokumentasi, 3. Penyelenggaraan event.</p>			

<p>Pemanfaatan: Belum optimalnya pemasaran produk pengetahuan tradisional.</p>	<p>Mengoptimalkan pasar-pasar untuk menjual produk pengetahuan tradisional.</p>	<p>Tersedianya pasar-pasar untuk menjual produk pengetahuan tradisional.</p>	<p>1. OPD terkait 2. Masyarakat</p>	<p>1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta, 2. Publikasi dan dokumentasi, 3. Penjualan produk.</p>			
<p>Pemanfaatan: Belum optimalnya sertifikasi terhadap produk pengetahuan tradisional.</p>	<p>Mengoptimalkan sertifikasi terhadap produk pengetahuan tradisional.</p>	<p>Tersedianya produk pengetahuan tradisional yang telah tersertifikasi.</p>	<p>1. OPD terkait 2. Masyarakat</p>	<p>1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, 2. Publikasi dan dokumentasi,</p>			

				3. Sertifikasi produk.			
Pembinaan: Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku pengetahuan tradisional.	Melakukan pembinaan dan sertifikasi kepada para pelaku pengetahuan tradisional.	Terselenggaranya pembinaan dan sertifikasi kepada para pelaku pengetahuan tradisional yang sesuai dengan standar dan prosedur.	1. OPD terkait 2. Lembaga sertifikasi 3. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait pembinaan dan sertifikasi, 2. Pembinaan kepada para pelaku pengetahuan tradisional, 3. Sertifikasi kepada para pelaku pengetahuan tradisional.			

- **Teknologi Tradisional**

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					2024	2029	2034	2039
Pelindungan 1. Minimnya data mengenai teknologi tradisional	Inventarisasi berkala data teknologi tradisional	Terhimpunnya data yang valid		a. Lembaga, masyarakat, b. Akademisi, c. Pelaku teknologi tradisional dan d. Pemerintah / OPD terkait	1. Membentuk tim pendataan 2. Identifikasi dan dicatatkan, diverifikasi dan divalidasi 3. Ditetapkan oleh Kepala Daerah 4. Diusulkan untuk mendapatkan penatapan			

					5. Pelaporan secara berkala 6. Evaluasi			
Lemahnya pelindungan hukum (terkait dengan pengamanan)	Memberikan pendampingan hukum teknologi tradisional	Menjamin terwujudnya payung hukum pengakuan dari pihak lain/asing	a. Lembaga masyarakat, Akademisi b. Pelaku teknologi tradisional dan pemerintah / OPD terkait	1. Pengusulan/ pengajuan sebagai kekayaan intelektual 2. Mendapatkan pengakuan kekayaan intelektual 3. Pemutakhiran data 4. Sosialisasi Evaluasi				
Minimnya publikasi kepada masyarakat	Mempublikasikan melalui media massa	Mempublikasikan hasil melalui media massa	a. Lembaga masyarakat b. Akademisi	1. Membentuk tim publikasi				

			c. Pelaku teknologi tradisional dan Pemerintah/OPD terkait	2. Menyiapkan bahan publikasi 3. Mempublikasikan Evaluasi				
Pengembangan Penyebarluasan pengetahuan tradisional yang belum merata	Melakukan penyebarluasan informasi pengetahuan tradisional	<p>a. Menyebarluaskan nilai-nilai budaya teknologi tradisional</p> <p>b. Penyebaran dilakukan secara desiminasi: melalui nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran,</p>	<p>a. Lembaga masyarakat b. Akademisi c. Pelaku teknologi tradisional dan Pemerintah/OPD terkait</p>	1. Penyiapan bahan informasi 2. Seleksi data/informasi, dikurasi (penyeleksi secara detail) 3. Ditindaklanjuti melalui pameran 4. Evaluasi				

		<p>maupun festival dan diaspora: melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya</p> <p>c. Penyebarluasan melalui media massa, informasi budaya, transfer ilmu budayanya</p>					
Rendahnya kajian tentang teknologi tradisional	Melakukan kajian tentang teknologi tradisional	<p>Tergalinya nilai-nilai budaya pada teknologi tradisional secara faktual.</p>	<p>a. Lembaga masyarakat b. Akademisi</p>	<p>1. Penyusunan tim kajian 2. Penulusuran sumber</p>			

			c. pelaku teknologi tradisional dan pemerintah/operad terkait	3. Verifikasi lapangan 4. Pendokument asian 5. Penyusunan kajian 6. Penyampaian hasil kajian 7. Sosialisasi hasil kajian 8. Evaluasi				
Pemanfaatan Rendahnya pemanfaatan teknologi tradisional untuk kesejahteraan masyarakat	Melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi tradisional	Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan	a. Lembaga masyarakat b. Akademisi c. pelaku teknologi tradisional dan d. pemerintah/operad terkait Dinas Pariwisata	1. Identifikasi manfaat teknologi tradisional 2. Mensosialisas ikan hasil identifikasi 3. Evaluasi				

Pembinaan Belum optimalnya pembinaan SDM tentang teknologi tradisional	Penyusunan <i>grand design</i> pelatihan	Meningkatnya kompetensi SDM	<ol style="list-style-type: none"> Lembaga masyarakat Akademisi pelaku teknologi tradisional dan pemerintah/operd terkait Dinas Pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan <i>grand design</i> Pelaksanaan latihan Evaluasi 				
--	--	-----------------------------	---	--	--	--	--	--

○ **Cagar Budaya**

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					2024	2029	2034	2039
Pelindungan Belum semua kabupaten kota memiliki Tim Ahli Cagar Budaya	Membentuk TACB Kab Kota	Melakukan penetapan, pemeringkatan	<ol style="list-style-type: none"> Ahli yang memiliki kompetensi Cagar Budaya, 	<ol style="list-style-type: none"> Merekruit ahli menjadi TACB mengikuti asesmen untuk 				

			<ul style="list-style-type: none"> b. Pemerintah, c. Akademisi, d. Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> memperoleh sertifikat 3. meminjam TACB kab terdekat atau provinsi dengan masa kerja 1 tahun dan boleh diperpanjang 4. Evaluasi 				
Belum semua ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya) ditetapkan sebagai Cagar Budaya	Ditetapkan ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya) menjadi Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan status Cagar Budaya agar nilai yang terkandung didalamnya dapat lestari b. Perlindungan hukum 	Objek Diduga Cagar Budaya / Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi 2. Kajian 3. Rekomendasi 4. Penetapan 5. Sosialisasi 6. Pemutakhiran 7. Evaluasi 				

<p>PERDA Jateng Nomor 10 th 2013 sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 th 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 1 th 2022 tentang registrasi nasional dan Cagar Budaya.</p>	<p>a. Melakukan revisi/perubahan perda no 10 th 2013 b. Penyusunan rencana induk</p>	<p>Untuk pemajuan kebudayaan dan pelestarian CB</p>	<p>a. Ahli yang memiliki kompetensi Cagar Budaya, b. Pemerintah, c. Akademisi, d. Masyarakat Cagar Budaya</p>	<p>1. Penyusunan 2. Pembahasan 3. Penetapan 4. Pengesahan 5. Pengundangan 6. Penyebarluasan/sosialisasi 7. Menyusun rencana induk Evaluasi</p>			
<p>Pengembangan Belum optimalnya pengembangan nilai Cagar Budaya melalui Penelitian, Adapatisasi, Revitalisasi</p>	<p>Melakukan optimalisasi Pengembangan nilai Cagar Budaya melalui Penelitian, Adapatisasi, Revitalisasi</p>	<p>Meningkatkan nilai Cagar Budaya melalui Penelitian, Adapatisasi, Revitalisasi</p>	<p>Objek Diduga Cagar Budaya / Cagar Budaya</p>	<p>1. Penelitian 2. Adpatasi, 3. Revitalisasi 4. Evaluasi</p>			
<p>Pemanfaatan Belum optimalnya pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan prinsip-prinsip</p>	<p>Melakukan optimalisasi pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan prinsip-</p>	<p>Tercapainya pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan prinsip-</p>	<p>Semua Cagar Budaya yang ada di Jawa Tengah</p>	<p>Regulasi dan fasilitasi Cagar Budaya melalui perizinan,</p>			

pelestarian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	dengan prinsip-prinsip pelestarian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	prinsip pelestarian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat		pemanfaatan koleksi, Evaluasi			
Belum semua kabupaten kota mempunyai museum	Mendirikan/merintis museum	Sebagai tempat untuk menyimpan, memelihara, memanfaatkan koleksi Cagar Budaya / Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Cagar Budaya yang ada di Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan /melakukan kajian pendirian museum, 2. Menyiapkan sarana prasarana dan/SDM, 3. Menyiapkan Koleksi 4. Mengisi/menata museum, 5. Menyusun SOP pengelolaan Museum 			

				Evaluasi				
Pembinaan Belum optimalnya pembinaan SDM yang menangani Cagar Budaya	Melakukan optimalisasi pembinaan SDM untuk pelestarian Cagar Budaya	Meningkatkan kompotensi pelestari Cagar Budaya melalui pembinaan SDM	Seluruh komponen Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi 2. Workshop 3. Lokakarya 4. Seminar dan 5. Bimtek 6. Evaluasi 				